



LKPJ

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Probolinggo Tahun 2023



Kepada:
**Dewan Perwakilan Rakyat
Kota Probolinggo**

**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2024**



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	I - 1
1.1 DASAR HUKUM.....	I - 1
1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH.....	I - 3
1.2.1 VISI.....	I - 3
1.2.2 MISI.....	I - 4
1.3 DATA UMUM DAERAH	I - 4
1.3.1 Data Geografis Wilayah	I - 4
1.3.2 Gambaran Umum Demografis	I - 10
1.3.3 Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara.....	I - 11
1.3.4 Kondisi Ekonomi	I - 11
1.3.5 Kondisi Sosial	I - 25
1.3.6 Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan	I - 27
1.3.7 Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja.....	I - 27
1.3.8 Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan.....	I - 28
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	II - 1
1. Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	II - 2
2. Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	II - 19
3. Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	II - 37
4. Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja	II - 46
5. Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	II - 50
6. Perangkat Daerah : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.....	II - 54
7. Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja	II - 64
8. Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	II - 70
9. Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup	II - 79
10. Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II - 88
11. Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan	II - 92
12. Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika	II - 98
13. Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	II - 102
14. Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.....	II - 110
15. Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	II - 117
16. Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah.....	II - 120
17. Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD	II - 130
18. Perangkat Daerah : Inspektorat	II - 136
19. Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.	II - 140



20.Perangkat Daerah : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	II - 146
21.Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	II - 154
22.Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	II - 164
23.Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.....	II - 170
24.Perangkat Daerah : Kecamatan Wonoasih.....	II - 177
25.Perangkat Daerah : Kecamatan Kademangan	II - 184
26.Perangkat Daerah : Kecamatan Mayangan	II - 190
27.Perangkat Daerah : Kecamatan Kedopok.....	II - 196
28.Perangkat Daerah : Kecamatan Kanigaran	II - 201
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN	
DAERAH.....	III - 1
3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	III - 1
3.1.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	III - 1
3.1.1.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)	III - 1
3.1.1.2 Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD).....	III - 6
3.1.1.3 Realisasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	III - 20
3.1.1.3.1 Pelaksanaan Urusan Pilihan	III - 54
3.1.1.3.2 Pelaksanaan Unsur Staf.....	III - 57
3.1.1.3.3 Pelaksanaan Unsur Pengawasan	III - 59
3.1.1.3.4 Pelaksanaan Fungsi Penunjang	III - 62
3.1.1.3.5 Pelaksanaan Fungsi Koordinasi	III - 68
3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN.....	III - 72
3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	III - 80
3.4 PRESTASI YANG TELAH DIRAIH.....	III - 97
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	IV – 1
BAB V PENUTUP.....	IV – 1



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Geologi Kota Probolinggo Berdasarkan Kecamatan	I - 6
Tabel 1. 2 Nama dan Panjang Sungai di Kota Probolinggo.....	I - 7
Tabel 1. 3 Sumber Mata Air di Kota Probolinggo	I - 7
Tabel 1. 4 Kedalaman Air Tanah Berdasarkan Kecamatan.....	I - 8
Tabel 1. 5 Penggunaan Lahan Kota Probolinggo Tahun 2023	I - 9
Tabel 1. 7 Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2023	I - 10
Tabel 1. 8 Jumlah Pegawai ASN Kota Probolinggo Tahun 2019-2023.....	I - 10
Tabel 1. 9 Luas Wilayah berdasarkan Penggunaan Lahan Kota Probolinggo Tahun 2023.....	I - 11
Tabel 1. 10 Luas Panen dan Produksi Bahan Makanan Tahun 2019-2022.....	I - 12
Tabel 1. 11 Luas Panen dan Produksi Perkebunan Kota Probolinggo Tahun 2019–2023.....	I - 12
Tabel 1. 12 Data Produksi Peternakan Tahun 2019 - 2023	I - 13
Tabel 1. 13 Data Produksi Perikanan Tahun 2019-2023	I - 16
Tabel 1. 14 Data Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Probolinggo Tahun 2019-2023	I - 16
Tabel 1. 15 Data Profil Industri Tahun 2019–2023.....	I - 17
Tabel 1. 16 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo Tahun 2019-2023 .	I - 17
Tabel 1. 17 Profil Penyediaan Air Bersih Tahun 2019-2023	I - 18
Tabel 1. 18 Perkembangan Pasar dan Toko di Kota Probolinggo Tahun 2019-2023	I - 18
Tabel 1. 19 Jumlah UMKM Kota Probolinggo Tahun 2019-2023	I - 18
Tabel 1. 20 Perkembangan Investasi di Kota Probolinggo Tahun 2019-2023.....	I - 19
Tabel 1. 21 Jumlah Bank Menurut Kepemilikan di Kota Probolinggo Tahun 2019-2023.....	I - 19
Tabel 1. 22 Potensi Wisata Kota Probolinggo	I - 20
Tabel 1. 23 Kunjungan Pada Destinasi Pariwisata Kota Probolinggo Tahun 2019–2023	I - 21
Tabel 1. 24 Data Indikator Ekonomi Makro Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2022	I - 22
Tabel 1. 25 Jumlah Penduduk Miskin Kota Probolinggo Tahun 2019–2023	I - 23
Tabel 1. 26 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah TA. 2023.....	I - 26
Tabel 1. 27 Target dan Realisasi Belanja Daerah TA. 2023	I - 27
Tabel 1. 28 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah TA. 2023	I - 27
Tabel 2. 2 Target dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah TA. 2023.....	II - 2
Tabel 2. 3 Data Kinerja Anggaran 2022 – 2023	II - 205
Tabel 3. 1 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Probolinggo Tahun 2023	III - 1
Tabel 3. 2 Realisasi Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2023.....	III - 6
Tabel 3. 3 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 (Pendidikan).....	III - 21
Tabel 3. 4 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 (Kesehatan).....	III - 23



Tabel 3. 5 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	III - 24
Tabel 3. 6 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 (Perumahan dan Permukiman)	III - 25
Tabel 3. 7 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 (Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat).....	III - 27
Tabel 3. 8 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 (Sosial)	III - 29
Tabel 3. 9 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 (Tenaga Kerja).....	III - 30
Tabel 3. 10 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	III - 30
Tabel 3. 11 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 (Pangan)	III - 31
Tabel 3. 12 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 (Pertanahan).....	III - 32
Tabel 3. 13 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 (Lingkungan Hidup)	III - 33
Tabel 3. 14 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 (Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	III - 40
Tabel 3. 15 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 (Pemberdayaan Masyarakat).....	III - 40
Tabel 3. 16 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	III - 44
Tabel 3. 17 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 (Perhubungan)	III - 44
Tabel 3. 18 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 (Komunikasi dan Informatika)	III - 46
Tabel 3. 19 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah).....	III - 47
Tabel 3. 20 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 (Penanaman Modal).....	III - 48



Tabel 3. 21 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 (Pemuda dan Olahraga)	III - 49
Tabel 3. 22 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 (Statistik)	III - 50
Tabel 3. 23 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 (Persandian)	III - 51
Tabel 3. 24 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 (Kebudayaan)	III - 52
Tabel 3. 25 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 (Perpustakaan)	III - 52
Tabel 3. 26 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 (Kearsipan)	III - 53
Tabel 3. 27 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 (Kelautan dan Perikanan)	III - 53
Tabel 3. 28 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 (Pariwisata)	III - 54
Tabel 3. 29 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 (Pertanian)	III - 55
Tabel 3. 30 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 (Perdagangan)	III - 56
Tabel 3. 31 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 (Perindustrian)	III - 56
Tabel 3. 32 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 (Unsur Staf _Sekretariat Daerah)	III - 57
Tabel 3. 33 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 (Unsur Staf _Sekretariat DPRD)	III - 58
Tabel 3. 34 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 (Pengawasan)	III - 59
Tabel 3. 35 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 (Perencanaan)	III - 61
Tabel 3. 36 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 (Keuangan)	III - 62
Tabel 3. 37 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 (Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan)	III - 64
Tabel 3. 38 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 (Penelitian dan Pengembangan)	III - 66



Tabel 3. 39 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 (Penunjang).....	III - 66
Tabel 3. 40 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 (Koordinasi).....	III - 68
Tabel 3. 41 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III - 72
Tabel 3. 42 Prestasi Yang Telah Diraih Tahun 2023	III - 97
Tabel 4. 1 Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.....	IV - 1



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Wilayah Kota Probolinggo	I - 4
Gambar 1. 2 Peta Topografi Kota Probolinggo.....	I - 5
Gambar 1. 3 Transek Wilayah Kota Probolinggo.....	I - 5
Gambar 1. 4 Peta Jenis Tanah Kota Probolinggo	I - 6
Gambar 1. 5 Peta Hidrologi Kota Probolinggo	I - 8
Gambar 1. 6 Peta Penggunaan Lahan Kota Probolinggo.....	I - 9
Gambar 1. 7 Persentase Penduduk Miskin Kota Probolinggo Tahun 2019–2023	I - 24
Gambar 1. 8 Indeks Pembangunan Manusia Kota Probolinggo Tahun 2019- 2023	I - 25
Gambar 1. 9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Probolinggo Tahun 2019 –2023.....	I - 26
Gambar 1. 10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2023	I - 26



BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengatur ruang lingkup Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang terdiri dari hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. LKPJ Tahun 2023 disampaikan oleh Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo, berisi tentang capaian kinerja hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan berupa program dan kegiatan, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024. Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2019-2024.

1.1 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;



4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah



- terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005-2025;
 21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019–2024;
 23. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 70 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 24. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023.

1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

1.2.1 VISI

Visi Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 disusun berdasarkan kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD periode ke-4 Selain itu visi harus melihat dinamika pembangunan di Kota Probolinggo yang direpresentasikan melalui permasalahan dan isu strategis pembangunan di Tahun berkenaan, maka Visi Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 yang merupakan Visi Politik yang diusung Kepala Daerah terpilih yaitu:

**“Membangun Bersama Rakyat untuk Kota Probolinggo Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera,
Transparan, Aman dan Berkelanjutan”**



1.2.2 MISI

Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 tersebut, maka ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dielaborasi sebagai berikut :

Misi Pertama : Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial

Misi Kedua : Sumberdaya Manusia dan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas

Misi Ketiga : Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Misi Keempat : Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik

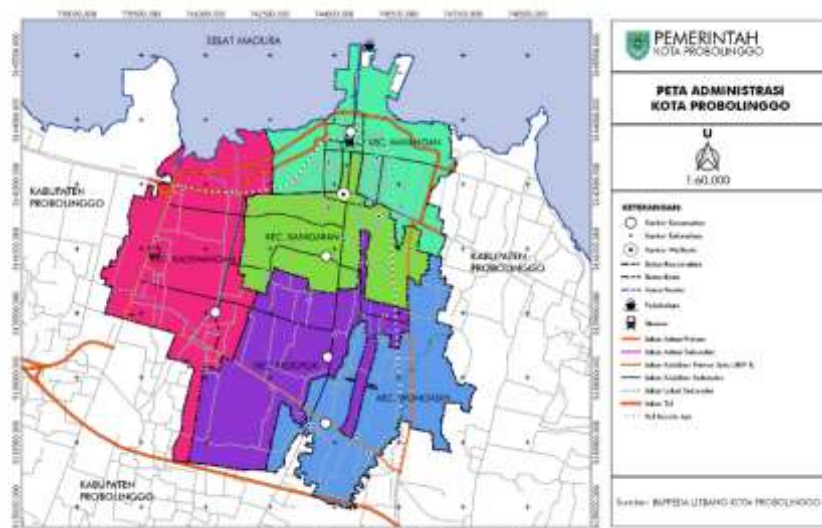
1.3 DATA UMUM DAERAH

1.3.1 Data Geografis Wilayah

A. Administrasi Wilayah

Kota Probolinggo merupakan kota sedang yang berfungsi sebagai pusat dari WP Probolinggo–Lumajang dalam konstelasi perwilayahan Provinsi Jawa Timur dan bagian dari tlatah atau kawasan kebudayaan Pendalungan yang berbatasan langsung dengan Selat Madura. Secara geografis Kota Probolinggo berada diantara 7°43’41” sampai 7°49’04” Lintang Selatan dan 113°10’ sampai dengan 113°15’ Bujur Timur. Berdasarkan Kepmendagri 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau bahwa Luas wilayah Kota Probolinggo adalah 54,676 km². Secara administrasi, Kota Probolinggo terdiri dari 5 kecamatan dan 29 kelurahan dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Selat Madura
2. Sebelah Timur : Kecamatan Dringu (Kabupaten Probolinggo)
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Leces, Wonomerto, Bantaran, dan Sumberasih (Kabupaten Probolinggo)
4. Sebelah Barat : Kecamatan Sumberasih (Kabupaten Probolinggo)

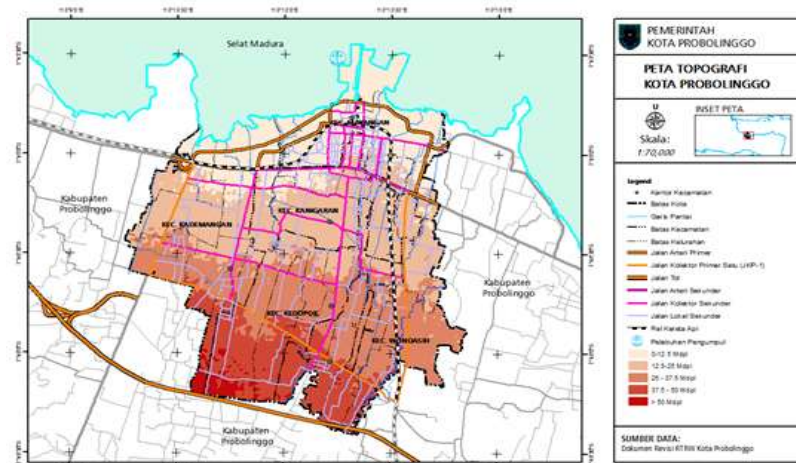


Gambar 1. 1 Peta Administrasi Wilayah Kota Probolinggo

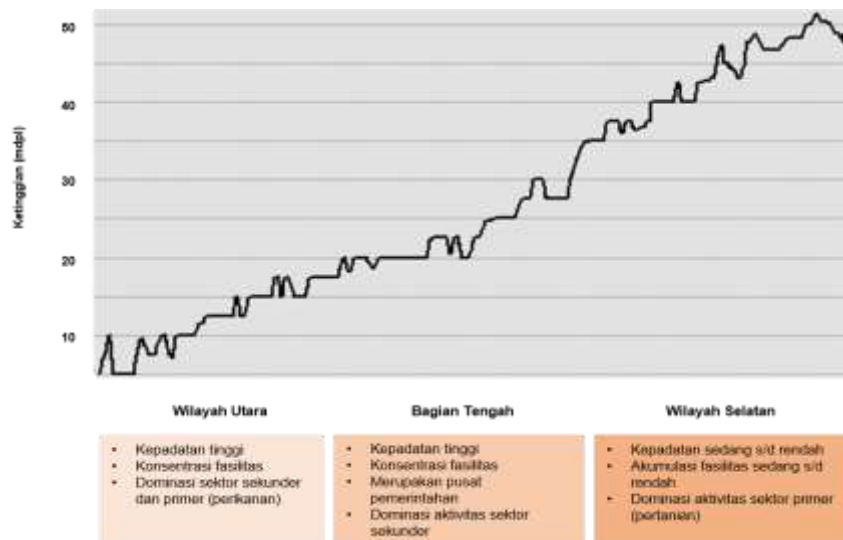


B. Topografi

Berdasarkan data dari BPS ketinggian Kota Probolinggo berkisar pada 0 s.d 36 mdpl. Jika ditinjau dari aspek kelerengan maka wilayah Kota Probolinggo berada pada kelerengan 0 – 2% atau dapat dikatakan memiliki wilayah yang relatif datar dan memungkinkan untuk pengembangan kawasan, khususnya kawasan budidaya. Topografi yang semakin tinggi di wilayah selatan berdampak pada arah limpasan air yang mengarah ke wilayah utara dan berpotensi menyebabkan banjir bila tidak didukung oleh sistem drainase yang memadai.



Gambar 1. 2 Peta Topografi Kota Probolinggo



Gambar 1. 3 Transek Wilayah Kota Probolinggo

C. Geologi

Wilayah Kota Probolinggo dibentuk dari bahan induk batuan vulkanik dan zaman quarter muda (young quarternary volcanic product) dan batuan endapan (alluvium). Bahan induk tersebut terbentuk dengan fisiografi yang relatif datar. Geologi jenis young quarternary volcanic tersebar merata di kecamatan Kota Probolinggo sebesar 65,05% dari luas wilayah sedangkan jenis batuan aluvium sekitar 34,95%, tersebar di Kecamatan Kademangan, Wonoasih, Mayangan dan Kanigaran.

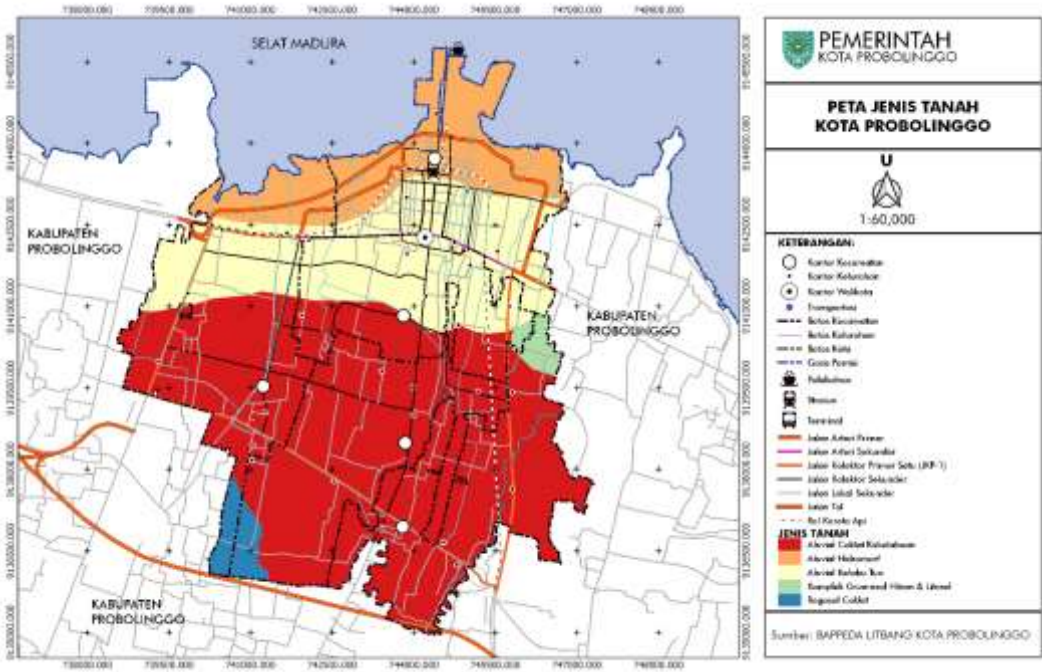
Tabel 1. 1 Geologi Kota Probolinggo Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Jenis Batuan (geologi)	
		Alluvium	Young Quarternary Volcanic
1	Kademangan	12,62%	12,8%
2	Wonoasih	1,38%	18,2%
3	Mayangan	17,10%	0,7%
4	Kanigaran	3,86%	11,9%
5	Kedopok	0,00%	21,4%
	Kota Probolinggo	34,95%	65,0%

Sumber: Bappeda Litbang, 2024

D. Jenis Tanah

Jenis tanah di wilayah Kota Probolinggo terdiri dari Alluvial, Grumosol dan Regosol. Jenis tanah alluvial regosol terdapat pada daerah paling utara yaitu daerah pantai. Alluvial kelabu tua pada bagian tengah ke utara. Jenis tanah yang terluas pada wilayah Kota Probolinggo adalah alluvial coklat keabuan, yaitu dari bagian tengah hingga selatan kota. Jenis tanah regosol coklat terdapat sebagian kecil di bagian timur kota, sedangkan kompleks grumosol hitam dan litosol pada bagian barat daya. Jenis tanah aluvial merupakan tanah yang sangat baik untuk usaha pertanian, karena pada jenis ini tersedia cukup mineral yang diperlukan untuk tumbuh-tumbuhan. Demikian pula jika digunakan untuk bangunan, jenis tanah ini mempunyai daya tahan yang kuat karena merupakan endapan tanah liat.



Gambar 1. 4 Peta Jenis Tanah Kota Probolinggo

E. Hidrologi

Kondisi hidrologi dapat menunjukkan kondisi sumber daya air yang terdapat di wilayah perencanaan. Kota Probolinggo mempunyai potensi sumber air yang cukup banyak, pada umumnya sungai-sungai yang ada mempunyai aliran yang cukup. Wilayah Kota Probolinggo dialiri oleh 6 (enam) sungai, antara lain Sungai Kedunggaleng, Umbul, Banger, Legundi, Kasbah dan Pancur. Sungai-sungai tersebut mengalir sepanjang tahun, mengalir dari arah Selatan ke Utara sesuai dengan kelerengn wilayah.

Tabel 1. 2 Nama dan Panjang Sungai di Kota Probolinggo

NO	NAMA SUNGAI / KALI	PANJANG (Km)	NO	NAMA SUNGAI / KALI	PANJANG (Km)
1	Kedunggaleng	3,097	11	Afvoer Bromo	3,297
2	Umbul	5,138	12	Pakis	3,225
3	Banger	2,865	13	Gladak Serang	4,392
4	Legundi	5,439	14	Akub	3,693
5	Kasbah	2,037	15	Belo'an	5,539
6	Pancor	4,239	16	Esan	4,137
7	Pesisir	3,693	17	Bangsingan	2,844
8	Dringu	5,949	18	Barat TPA	2,51
9	Tempuran	2,059	19	Kedunggaleng 1	3,206
10	Afvoer Brantas	3,704			

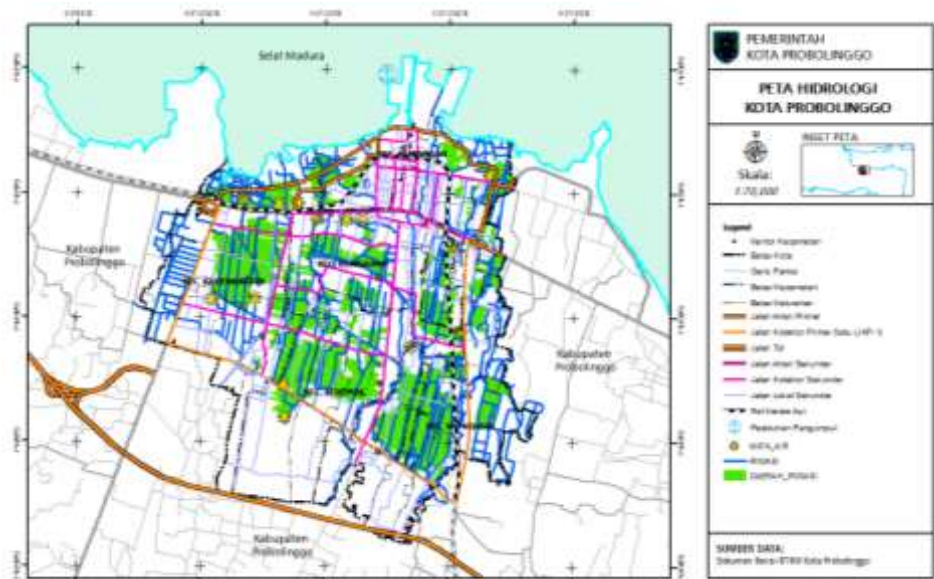
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024

Selain memanfaatkan aliran air sungai untuk irigasi usaha di sektor pertanian, kondisi hidrologi Kota Probolinggo juga didukung oleh keberadaan sumber mata air yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian serta berpotensi sebagai obyek wisata.

Tabel 1. 3 Sumber Mata Air di Kota Probolinggo

NO	SUMBER MATA AIR	LOKASI	
		KELURAHAN	KECAMATAN
1	Sumber Mata Air Langse	Triwung Lor	Kademangan
2	Sumber Mata Air Pilang Renes	Pilang	Kademangan
3	Sumber Mata Air Jalil	Ketapang	Kademangan
4	Sumber Mata Air Tiban	Pilang	Kademangan
5	Sumber Mata Air Genthong	Pilang	Kademangan
6	Sumber Mata Air Umbul/Ganesha	Curah Ginting	Kanigaran
7	Sumber Mata Air Sumber Pacar	Tisnonegaran	Kanigaran
8	Sumber Mata Air Sumber kekok	Tisnonegaran	Kanigaran
9	Sumber Mata Air Arum	Mangunharjo	Mayangan
10	Sumber Mata Air Jati	Sukoharjo	Kanigaran
11	Sumber Mata Air Sumber Taman	Sumber Taman	Wonoasih
12	Sumber Mata Air Sumber Ardi	Wonoasih	Wonoasih
13	Sumber Mata Air Grinting, Sumber Wetan	Sumber Wetan	Kedopak
14	Sumber Mata Air Senthong	Jrebeng Wetan, Jrebeng Kidul	Kedopak
15	Sumber Mata Air Sumber Pilang	Pilang	Kademangan
16	Sumber Mata Air Sumber Gayam	Pilang	Kademangan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2024



Gambar 1. 5 Peta Hidrologi Kota Probolinggo

F. Kedalaman Air Tanah

Kedalaman air tanah Kota Probolinggo didominasi oleh kedalaman 4 – 8 m sebesar 40,36% sedangkan kedalaman di bawah 4 m sebesar 26,87% dari luas wilayah. Dapat dikatakan semakin ke selatan maka kedalaman air tanah akan semakin tinggi.

Tabel 1. 4 Kedalaman Air Tanah Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Kedalaman Air Tanah		
		Kedalaman < 4 Meter	Kedalaman 4 - 8 Meter	Kedalaman 8 - 12 Meter
1	Kademangan	7,90%	12,80%	4,75%
2	Wonoasih	0,00%	5,72%	13,88%
3	Mayangan	16,99%	0,78%	0,00%
4	Kanigaran	2,08%	13,64%	0,00%
5	Kedopok	0,00%	7,42%	14,03%
	KOTA PROBOLINGGO	26,97%	40,36%	32,66%

Sumber : Bappeda Litbang, 2024

G. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Probolinggo didominasi oleh penggunaan lahan tidak terbangun baik berupa perairan, sawah maupun mangrove sebesar 74,33% dari luas wilayah. Adapun kawasan terbangun adalah seluas 25,67% dari luas wilayah yang didominasi oleh kawasan perumahan. Kecamatan Mayangan dan Kanigaran merupakan wilayah dengan luas lahan terbangun lebih besar dibandingkan lahan tidak terbangun.

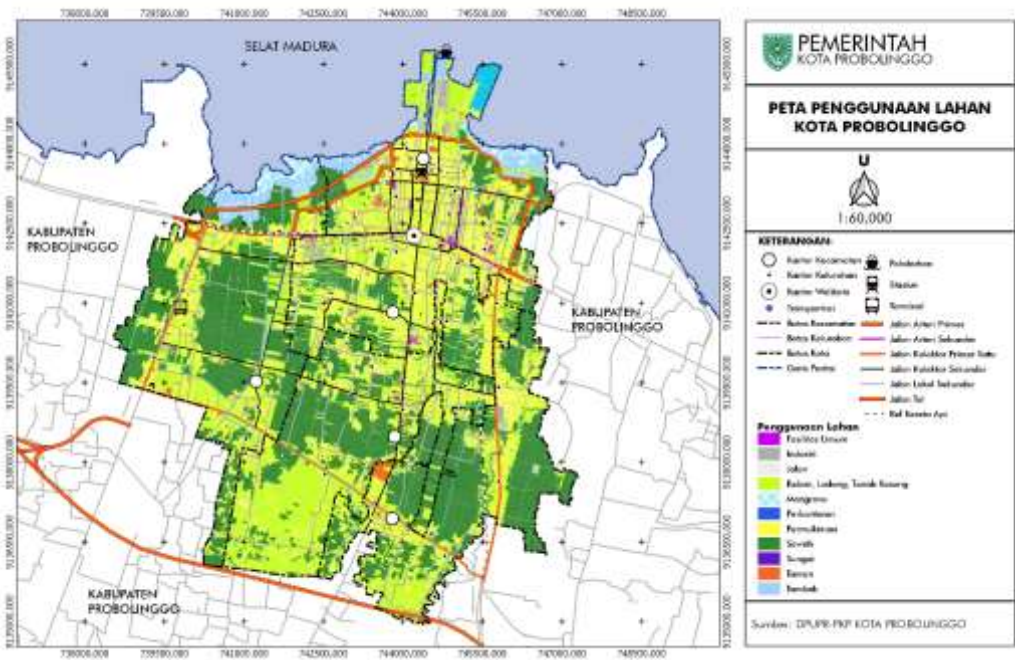
Secara keruangan konsentrasi aktivitas cenderung terpusat terkonsentrasi di Kecamatan Mayangan dan Kanigaran sebagai pusat kota dengan kepadatan penduduk dan bangunan yang tinggi serta didominasi oleh aktivitas di sektor sekunder. Sebaliknya Kecamatan Kademangan, Kedopok dan Wonoasih memiliki kepadatan yang relatif rendah dengan dominasi kegiatan di sektor primer khususnya pertanian. Pola penggunaan lahan tersebut menjadikan struktur ruang Kota Probolinggo cenderung monocentric dimana bentuk struktur ruang ini hanya memiliki satu pusat pelayanan.Apabila di wilayah utara berkembang perumahan dengan kepadatan tinggi dan

berkarakteristik kekotaan maka di wilayah selatan khususnya di Kecamatan Wonoasih berkembang perumahan yang lebih berkarakteristik pedesaan yang pada umumnya mengelompok dalam suatu kawasan dan dikelilingi oleh kawasan pertanian atau berkembang secara linier di sepanjang jalan utama yang ada.

Tabel 1. 5 Penggunaan Lahan Kota Probolinggo Tahun 2023

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
1	Perairan	174,46	3,16%
2	Fasilitas Umum	18,58	0,34%
3	Fasilitas Peribadatan	5,39	0,10%
4	Industri	112,03	2,03%
5	Jalan	211,25	3,82%
6	Kebun dan Tegal	1.848,18	33,45%
7	Makam	34,57	0,63%
8	Mangrove	112,46	2,04%
9	Perkantoran	6,80	0,12%
10	Permukiman	1.013,52	18,34%
11	Perdagangan dan Jasa	28,96	0,52%
12	Fasilitas Kesehatan	2,46	0,04%
13	Sawah	1.937,35	35,06%
14	Fasilitas Pendidikan	19,72	0,36%

Sumber : DPUPR-PKP, 2024



Gambar 1. 6 Peta Penggunaan Lahan Kota Probolinggo



1.3.2 Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Kota Probolinggo pada Tahun 2023 berdasarkan data BPS adalah sejumlah 245.174 orang yang terdiri atas 121.500 orang penduduk laki-laki dan 123.674 orang penduduk perempuan. Adapun gambaran penduduk berdasarkan usia dan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 6 Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2023

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	10.224	10.008	20.232
2	5-9	9.460	9.220	18.680
3	10-14	9.613	9.133	18.746
4	15-19	9.901	9.340	19.241
5	20-24	9.619	9.242	18.861
6	25-29	9.568	9.350	18.918
7	30-34	9.308	9.237	18.545
8	35-39	9.207	9.292	18.499
9	40-44	8.988	9.064	18.052
10	45-49	8.541	8.819	17.360
11	50-54	7.707	8.170	15.877
12	55-59	6.291	7.031	13.322
13	60-64	5.182	5.599	10.781
14	65-69	3.768	4.209	7.977
15	70-74	2.323	2.819	5.142
16	75+	1.800	3.141	4.941
	Total	121.500	123.674	245.174

Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka Tahun 2024, BPS

Dari data diatas dapat diilustrasikan bahwa jumlah penduduk terbanyak pada usia produktif dengan kategori umur 15-60 tahun yang merupakan subyek / pelaku pembangunan utama, merupakan modal dasar bagi pembangunan daerah. Dengan banyaknya penduduk pada usia produktif, maka pemerintah dituntut untuk dapat mengarahkan program-program pembangunan daerah guna memberdayakan masyarakat serta upaya-upaya peningkatan kualitas SDM yang masuk dalam kelompok usia ini mengingat bonus demografi ini menjadi modal untuk mencapai keberhasilan pembangunan. Penduduk 15 tahun ke atas menurut pendidikan terakhir yang ditamatkan Tahun 2023 menunjukkan bahwa persentase terbesar tingkat pendidikan masyarakat Kota Probolinggo adalah lulusan Sekolah Menengah Atas.

1.3.3 Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk jumlah data Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dalam kurun waktu tiga tahun terakhir bisa dilihat pada tabel 1.10 dibawah ini:

Tabel 1. 7 Jumlah Pegawai ASN Kota Probolinggo Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Pegawai ASN
2019	3.503 orang
2020	3.344 orang
2021	3.338 orang
2022	3.567 orang
2023	3.639 orang

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024

Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara Kota Probolinggo sampai dengan Akhir Desember 2023 sebanyak 3.639 orang. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang paling banyak dari Tahun 2019 hingga 2022. Jumlah ASN pada Tahun 2023 terdiri PPPK berjumlah 486 orang. CPNS berjumlah 6 orang dan PNS berjumlah 3.147 orang.

1.3.4 Kondisi Ekonomi

1.3.4.1 Potensi Unggulan Daerah

Kota Probolinggo menyimpan berbagai potensi yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan terlebih potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset investasi penting dan kompetitif bagi dunia usaha, berbagai potensi investasi yang dimiliki tersebar luas diberbagai sektor, diantaranya:

1. Pertanian

Pada wilayah selatan Kota Probolinggo jumlah luasan lahan pertanian masih bisa dioptimalkan untuk mendukung total produksi pangan. Namun demikian kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di Kota Probolinggo cenderung menurun. Hal ini dimungkinkan karena adanya pergeseran struktur perekonomian kota dari sektor primer ke sektor sekunder (jasa dan industri). Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor menurunnya jumlah luasan lahan pertanian. Adapun luasan lahan pertanian di Kota Probolinggo Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 1. 8 Luas Wilayah berdasarkan Penggunaan Lahan Kota Probolinggo Tahun 2023

PENGGUNAAN LAHAN	KECAMATAN					Total (Ha)
	Kademangan	Kedopok	Wonoasih	Mayangan	Kanigaran	
LAHAN PERTANIAN						
Lahan Sawah	535	399,5	422	117	268	1741,5
Irigasi Teknis	535	399,5	422	117	268	1741,5
Irigasi Setengah Teknis						0
Irigasi Sederhana						0
Irigasi Desa/ Non PU						0
Tadah Hujan						0
Pasang Surut						0
Lebak						0
Polder dan Lainnya						0
Bukan Lahan Sawah	120	430,25	224,6	73,6	56,76	905,21
Tegal/Kebun	66	367,5	190	-	-	623,5
Ladang/Huma						0
Perkebunan						0
Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	4	57,2	20,8	17,1	6,5	105,6
Padang Penggembalaan Rumput						0
Sementara tak diusahakan						0
Lain – lain (tambak, kolam, pekarangan, ditanami tanaman pertanian dll)	50	5,55	13,8	56,5	50,26	176,11
BUKAN LAHAN PERTANIAN	620,36	531,87	451,49	674,94	740,55	3019,21
Jumlah	1275,36	1361,62	1098,09	865,54	1065,31	5665,92

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Tahun 2024

Sedangkan gambaran umum produktivitas sektor pertanian Kota Probolinggo selama Tahun 2023 sebagaimana pembahasan di bawah ini :

a. Tanaman Pangan

Adapun Luas Panen dan Produksi Bahan Makanan dari tanaman Pangan di Kota Probolinggo pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 1.10 di bawah ini. Untuk produksi, luas panen dan rata-rata produksi ini sangat dipengaruhi oleh kondisi alam seperti cuaca, hama, curah hujan, dll sehingga produktivitasnya cenderung fluktuatif.

Tabel 1. 9 Luas Panen dan Produksi Bahan Makanan Tahun 2019-2022

Jenis	Produksi (ton)					Luas Panen (ha)					Rata-rata Produksi (kw/ha)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Padi	13.991,69	12.150,60	13.492,85	12.535,18	11.639,23	2.088,00	1.841,00	2.034,00	1.886,00	1718	67,01	66	66,34	66,46	67,75
Jagung	32.195,90	34.993,00	34.587,82	36.901,54	34.795,49	4.534,00	4.999,00	4.800,00	5.196,00	4896	71	70	72,06	71,02	71,07
Bawang Merah	4.556,10	5.254,50	6.017,80	6.109,90	8.487,30	510	599	676	697	940	89,34	87,72	89,02	87,66	90,29

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Tahun 2024

b. Perkebunan

Perkebunan bukan merupakan komoditas utama di Kota Probolinggo mengingat Kota Probolinggo tidak termasuk kategori wilayah yang memiliki lahan perkebunan, sehingga usaha perkebunan rakyat hanya sebatas usaha sampingan sebagai penunjang kehidupan keluarga saja. Adapun Luas Panen dan Produksi Perkebunan Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2023 sebagaimana data tabel dibawah ini.

Tabel 1. 10 Luas Panen dan Produksi Perkebunan Kota Probolinggo Tahun 2019–2023

Jenis	Produksi (ton)					Luas Panen (ha)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Tembakau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tebu	1.661,06	1.568,70	1.629,60	1.182,30	1.672,60	21,547	20,366	18,6	15,23	18,541
Kelapa	14,5	12,53	16	5,35	0,4	72,79	56,43	48,08	4,43	0,5
Kapuk Randu	0,16	0,08	0,04	0,03	0	3,23	2,22	2,2	0,8	0

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Tahun 2024

Komoditas tembakau di Kota Probolinggo sudah tidak ada lagi sejak tahun 2017. Untuk komoditas tebu tingkat produksi meningkat menjadi 1.672,60 berbanding dengan luas panen yang meningkat di tahun 2023 cenderung menurun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, hal ini disebabkan karena tingkat rendemen semakin meningkat atau dengan kata lain semakin baiknya sistem budidaya tebu oleh petani dan masih menjadi potensi komoditas unggulan perkebunan Kota Probolinggo. Begitu juga dengan komoditas kelapa dan kapuk randu.

c. Peternakan

Peternakan merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat potensial untuk dikembangkan di Kota Probolinggo. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, potensi peternakan di Kota Probolinggo Tahun 2019 s.d 2023 dapat dilihat pada tabel 1.12 berikut ini.



Tabel 1. 11 Data Produksi Peternakan Tahun 2019 - 2023

JENIS TERNAK	JUMLAH POPULASI					DAGING					TELUR					SUSU				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Sapi Potong	10.764	10.934	11.061	4.582	4.083	492.577	422.340	372.563	362.628	473.105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sapi Perah	223	224	108	161	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.577	461.153	394.129	309.767	284.974
Kambing	8.177	3.226	3.247	1.027	1.052	34.369	37.542	37.675	165.969	35.705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Domba	9.815	5.427	5.459	3.728	3.781	148.522	149.332	164.462	31.279	159.424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuda	12	13	16	24	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ayam Buras	83.701	85.139	86.437	86.603	87.852	95.811	96.027	110.686	140.570	161.095	56.078	57.194	57.871	58.068	58.942	-	-	-	-	-
Ayam Ras Petelur	15.700	12.000	12.700	11.350	9.550	1.885	6.003	5.544	4.375	14.940	141.377	140.946	135.369	101.400	106.850	-	-	-	-	-
Ayam Ras Pedaging	56.100	27.000	87.000	63.000	60.000	1.639.514	1.398.176	1.724.393	1.820.710	1.961.386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Itik	887	976	998	1.119	1.582	23.556	25.668	26.108	27.214	29.475	6.502	6.722	7.097	7.427	10.564	-	-	-	-	-
Entog	298	372	311	306	467	-	-	-	-	-	370	475	471	398	546	-	-	-	-	-
Puyuh	150	-	245	300	5.000	-	-	-	-	-	615	-	210	282	2.853	-	-	-	-	-
Kelinci	149	180	193	216	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Merpati	2.383	2.362	2.408	2.475	2.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Tahun 2024



- Populasi sapi potong mengalami penurunan sebesar 10,89 % disebabkan oleh beberapa hal. Faktor teknis, dikarenakan terjadinya masih adanya PMK dan LSD menyebabkan peternak belum mau menambah jumlah ternaknya. Faktor lainnya adalah pengaruh El Nino dan kesulitan pupuk subsidi yang menyebabkan kemunduran jadwal panen bahkan beberapa gagal panen. Kondisi ini memaksa peternak untuk sementara menjual ternaknya atau mengurangi jumlah ternak peliharaannya untuk mendapatkan penghasilan. Sedangkan untuk Produksi daging sapi potong mengalami kenaikan 30,47%. Naiknya angka pemotongan sapi potong ini anomali dengan penurunan populasi. Hal ini dikarenakan penjualan ternak untuk dipotong tidak diiringi dengan pembelian kembali oleh peternak dikarenakan masih adanya PMK dan LSD, kesulitan pupuk subsidi dan gejala El Nino yang turut mengurangi penghasilan peternak yang sebagian besar juga berprofesi sebagai petani.
- Populasi sapi perah mengalami penurunan 27,95% disebabkan oleh ada beberapa peternak besar di wilayah sentra Mayangan yang berhenti beternak dan menjual seluruh asset ternaknya dikarenakan tidak adanya regenerasi dalam meneruskan usaha ternak sapi perahnya. Beberapa peternak lainnya juga mengurangi ternaknya karena tidak produktif/produktivitas menurun dan tidak memiliki modal untuk menambah ternaknya. Produksi susu sapi perah mengalami penurunan 12,51% disebabkan menurunnya jumlah betina produktif pada sapi perah karena terjadinya penjualan/pengurangan populasi oleh peternak.
- Populasi kambing mengalami kenaikan 2,43% disebabkan oleh mulai tumbuh peternak baru yang sebelumnya memelihara sapi dan beralih ke peternakan kambing/domba. Sebagian besar masih berupa bibit baik untuk usaha pembibitan maupun penggemukan. Begitu pula dengan produksi daging kambing mengalami kenaikan 14,15% disebabkan oleh bertambahnya peternak kambing baru dan pemotongannya dilakukan di dalam kota untuk keperluan rumah makan, aqiqah, kurban dan hajatan.
- Populasi domba juga mengalami kenaikan 1,42 %. Penyebabnya hampir sama dengan kenaikan populasi kambing, karena sebagian besar peternak kambing dan domba dijadikan satu kandang oleh peternak, sedangkan untuk produksi daging domba mengalami penurunan 3,94% disebabkan oleh banyaknya peternak yang menjual ternak domba menjual ternak tetapi tidak dipotong di dalam kota namun dijual hidup dan dikirim ke luar kota sehingga tidak masuk di data pemotongan kota. Sehingga meskipun jumlah populasi meningkat, namun produksi dalam kota sedikit menurun. Hal ini juga dipengaruhi oleh demand dari pasar sepanjang tahun 2023.
- Populasi kuda mengalami penurunan 16,67% disebabkan oleh adanya pengurangan populasi kuda oleh beberapa pemilik kuda karena tidak mampu menutupi biaya operasional dikarenakan menurunnya permintaan persewaan kereta kuda/kuda kacak selama tahun 2023 ini.



- Populasi ayam buras mengalami peningkatan 1,44%% disebabkan oleh pola budidaya ayam buras yang umbaran bukan skala bisnis, sehingga faktor-faktor luar tidak berpengaruh terhadap budidaya ayam buras ini. Untuk produksi daging ayam buras juga mengalami peningkatan 14,60% % disebabkan oleh populasi ayam buras tidak terpengaruh faktor eksternal karena sifat usaha umbaran atau tidak intensif. Pemotongan meningkat terutama dilakukan oleh peternaknya sendiri untuk keperluan hajatan/hari besar. Produksi telur ayam buras mengalami sedikit kenaikan 1,5% disebabkan oleh pertumbuhan populasi ayam buras yang relatif stabil. Skala usaha kecil dengan sistem umbaran membuat produksi telur ayam tidak terpengaruh kondisi pasar dan lingkungan.
- Populasi ayam ras petelur mengalami penurunan 15,86% disebabkan oleh beberapa peternak yang mengurangi / mengafkir sebagian ayamnya. Peternak lebih memilih untuk memperbaiki pola budidaya ternaknya dan meningkatkan produktivitas ternak dalam rangka mempertahankan usaha peternakannya. Sedangkan untuk produksi daging ayam ras petelur mengalami peningkatan 241,49%. Kenaikan drastis ini disebabkan oleh meningkatkan jumlah ayam afkir dalam upaya mempertahankan cash flow peternakannya mengingat kondisi yang cukup sulit yaitu tingginya harga pakan sementara harga jual telur masih stagnan. Produksi telur ayam ras mengalami kenaikan 5,38%, meskipun secara populasi ada penurunan. Hal ini dikarenakan perbedaan metode perhitungan data, dimana untuk produksi digunakan data akumulasi produksi dari triwulan I,II,III, IV tahun 2023. Sedangkan data populasi yang digunakan adalah data ayam petelur yang masih eksis pada akhir triwulan IV saja. Pada triwulan I,II,III populasi dan produksi masih tinggi, sedangkan pada triwulan IV populasi sudah mulai turun dikarenakan tingginya pengafkiran ayam sebagai untuk mempertahankan peternakan yang diakibatkan naiknya harga pakan secara drastis, sedangkan harga telur masih stagnan.
- Populasi ayam ras pedaging mengalami penurunan 4,76% disebabkan selama tahun 2023 adanya salah satu peternak yang sempat vakum beberapa kali periode pemeliharaan karena adanya proses peralihan kandang dari kandang terbuka ke kandang close house sesuai persyaratan dari pihak kemitraan. Namun untuk produksi daging ayam ras pedaging meningkat 7,73% disebabkan oleh meningkatnya daya beli masyarakat, ketersediaan dan harga ayam ras pedaging yang relatif stabil sepanjang tahun 2023.
- Populasi itik mengalami kenaikan 41,38% selama tahun 2023 disebabkan oleh adanya penambahan beberapa peternak baru dalam baik usaha itik penggemukan maupun petelur. Untuk produksi daging itik juga mengalami kenaikan 8,31% disebabkan oleh permintaan daging itik yang relatif naik karena banyaknya usaha-usaha tempat makan yang baru. Produksi telur itik mengalami kenaikan 42,25% disebabkan oleh bertambahnya peternak baru karena peralihan dari sektor usaha lain.

- Populasi burung dara mengalami kenaikan 4,24% disebabkan oleh bertambahnya jumlah peternak karena maraknya lomba-lomba adu burung dara.
- Produksi telur entok mengalami kenaikan 37,19% disebabkan oleh bertambahnya populasi entok betina pada budidaya peternak tradisional.

2. Perikanan

Potensi Perikanan laut di Kota Probolinggo memiliki peluang yang sangat besar untuk dioptimalkan. Peluang ini melihat dari letak geografis Kota Probolinggo yang berbatasan langsung dengan Selat Madura dengan panjang pantai 7 km. Secara umum, jika dibandingkan antara produksi perikanan tangkap dari tahun 2020 sampai 2023 ini, perikanan tangkap mengalami penurunan dikarenakan semenjak 2021 pencatatan produksi perikanan tangkap hanya berasal dari kapal-kapal nelayan kecil (non pelabuhan) sesuai kewenangan Pemerintah Kota dan adanya cuaca buruk yang menyebabkan nelayan tidak melaut. Produksi Perikanan Tangkap mulai meningkat pada tahun 2022 dan 2023, begitu juga dengan produksi perikanan budidaya terjadi peningkatan. Berikut ini data produksi perikanan di Kota Probolinggo dalam kurun waktu Tahun 2019-2023

Tabel 1. 12 Data Produksi Perikanan Tahun 2019-2023

JENIS	2019	2020	2021	2022	2023
Perikanan Tangkap					
Jumlah Produksi (Ton)	17.782,20	12.720,40	853	880,69	919,25
Nilai Produksi (Rp)	299.264.770.000,00	191.162.011.400,00	19.676.938.700,00	21.263.264.000,00	22.892.288.000,00
Perikanan Budidaya					
Jumlah Produksi (Ton)	423,77	312,83	337,41	355,06	415,50
Nilai Produksi (Rp)	8.375.980.000,00	7.365.793.000,00	7.889.536.400,00	9.190.007.500,00	12.157.624.964,00

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Tahun 2024

3. Pendidikan

Pendidikan suatu daerah akan mencerminkan kualitas penduduk daerah tersebut. Saat ini pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi penduduk, sehingga ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana akan sangat menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan. Berikut ini data fasilitas Pendidikan Dasar Menengah di Kota Probolinggo. Dalam proses pembangunan peranan pendidikan sangatlah strategis. Tingkat

Tabel 1. 13 Data Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Probolinggo Tahun 2019-2023

NO	VARIABEL	SD/MI					SMP/MTs					SMA/SMK					Jumlah Prasarana 2023
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Sekolah	114	112	118	114	115	48	47	47	49	49	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	164
2	Rombongan Belajar (Kelas)	923	909	956	962	973	465	466	470	465	467	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1440
3	Ruang Kelas	951	939	977	988	986	503	498	498	507	480	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1466
4	Perpustakaan	122	122	103	103	105	28	28	29	29	31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	136
5	Ruang UKS	107	107	94	94	94	25	25	28	28	28	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	122
6	Ruang Komputer	71	71	0	0	0	29	29	0	0	27	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27
7	Laboratorium	4	4	4	4	4	24	24	28	28	34	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	38
8	Ruang Olahraga	118	118	105	105	105	9	9	19	19	19	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	124

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,2024

Berdasarkan data prasarana pendidikan Tahun 2019 - 2023, diketahui bahwa untuk jenjang pendidikan tingkat SD / MI pada tahun 2023 terdapat peningkatan jumlah sekolah. Untuk jenjang pendidikan tingkat SMP / MTS terdapat penurunan prasarana berupa ruang kelas dikarenakan adanya ahli fungsi ruang namun ada peningkatan prasarana pada ruang komputer dan ruang laboratorium. Sedangkan untuk jenjang pendidikan tingkat SMA / SMK tidak terdapat data yang tersedia dalam dua tahun terakhir karena SMA/SMK menjadi kewenangan Provinsi.

4. Industri

Pembangunan sektor industri di Kota Probolinggo selama Tahun 2019-2023 menunjukkan kinerja positif. Sektor industri diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian nasional dan telah menempatkan industri manufaktur sebagai penghela sektor riil. Perkembangan kinerja sektor industri dapat dilihat dari perkembangan unit usaha industri,nilai produksi dan nilai investasi yang mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2020-2022. Adapun data Perkembangan sektor industri dapat dilihat dalam tabel 1.15

Tabel 1. 14 Data Profil Industri Tahun 2019–2023

JENIS	2019	2020	2021	2022	2023
Industri agro dan kimia (IAK)	986	1.004	1.012	926	1001
Industri logam, mesin, tekstil dan aneka (ILMTA)	165	166	188	251	253
Industri alat transportasi elektronika dan telematika (IATT)	11	11	11	11	12
Total Industri	1.162	1.181	1.211	1.188	1.266
Nilai produksi	3.479.689.872.885	3.375.299.176.698	3.402.301.570.112	5.851.006.690.969	5.902.604.233.165
Nilai Investasi	199.834.831.184	200.088.387.807	201.889.183.297	3.296.744.990.733	3.297.173.064.758

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024

5. Kelistrikan

Listrik menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Berdasarkan data BPS, jumlah pelanggan listrik PLN Kota Probolinggo pada periode Tahun 2023 meningkat 1,84% dibandingkan Tahun 2022.Pada tahun 2023, daya listrik terpasang di Kota Probolinggo sebesar 148,047 KW dengan jumlah pelanggan listrik di Kota Probolinggo pada tahun 2023 sebesar 85.583 pelanggan.

Tabel 1. 15 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo Tahun 2019-2023

KECAMATAN	2019	2020	2021	2022	2023
Kademangan	14.369	14.881	15.416	15.854	16.188
Kedopak	20.752	21.431	12.015	13.002	13.449
Wonoasih	11.357	11.989	9.279	9.991	10.236
Mayangan	21.273	21.794	21.104	22.733	22.757
Kanigaran	9.311	9.657	21.636	22.450	22.953
Total	77.062	79.752	79.450	84.030	85.583

Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka Tahun 2024, BPS

6. Air Minum

Kapasitas air bersih yang dapat disediakan atau yang diproduksi secara keseluruhan dan cakupan layanannya PDAM Kota Probolinggo selama kurun waktu tahun 2019–2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. 16 Profil Penyediaan Air Bersih Tahun 2019-2023

NO	VARIABEL	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kapasitas Air Bersih yang disediakan / diproduksi	8,722,300	8,431,000	8,461,100	7,853,100	7,410,200
2	Kapasitas Air Bersih yang disalurkan	4,967,914	4,823,565	4,656,416	4,573,349	4,427,968
3	Jumlah Sambungan Rumah (SR)	19,92	19,979	20,41	20,36	20,754
4	Jumlah Pelanggan	19,92	19,979	20,41	20,36	20,754
5	Cakupan Pelayanan (%)	40,54	46,6	47,82	34,08	34,06

Sumber : PDAM, 2024

Berdasarkan data PDAM dimaksud, diketahui bahwa terdapat kenaikan jumlah sambungan rumah, jumlah pelanggan selama empat tahun terakhir. Namun terdapat penurunan cakupan pelayanan pada tahun 2023. Begitu juga dari sisi debit air terdapat penurunan Kapasitas Air Bersih yang disediakan / diproduksi dari tahun 2021 – 2023. berbanding lurus dengan kapasitas air bersih yang disalurkan menurun akan tetapi masih dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

7. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang cukup berkembang di Kota Probolinggo. Hal tersebut mendorong Pemerintah Kota Probolinggo untuk melakukan penataan dan pembangunan pusat-pusat perdagangan yang ada. Data perkembangan pasar dan toko di Kota Probolinggo sebagaimana tabel 1.18.

Tabel 1. 17 Perkembangan Pasar dan Toko di Kota Probolinggo Tahun 2019-2023

JENIS	2019	2020	2021	2022	2023
Pasar Tradisional / Rakyat (Milik Pemerintah Kota Probolinggo)	11	11	11	11	11
Toko Modern /swalayan	10	3	51	48	50
Pasar Hewan (sapi,kambing)	1	1	1	1	1
Pasar Ikan	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, 2024

8. UMKM

Data perkembangan jumlah UMKM di Kota Probolinggo dari tahun 2019 s.d 2023 bisa dilihat dari tabel 1.19

Tabel 1. 18 Jumlah UMKM Kota Probolinggo Tahun 2019-2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
Usaha Mikro	6.035	19.253	19.753	20.056	20.753
Usaha Kecil	127	127	127	134	134
Usaha Menengah	36	36	36	38	38
Total UMKM	6.198	19.416	19.916	20.228	20.925

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, 2024

Dari data UMKM pada tabel 1.19 terjadi peningkatan jumlah usaha mikro. Hal dilatarbelakangi oleh kebijakan untuk menumbuhkan 500 UMKM baru per tahun sejak kepemimpinan Walikota yang baru guna merespon lesunya perekonomian global, serta keterbatasan lapangan pekerjaan sektor formal (industri dan perkantoran) dalam menampung pencari kerja di Kota Probolinggo.Adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya

kinerja perekonomian sektor formal menyebabkan banyaknya peralihan mata pencaharian sektor usaha mandiri masyarakat yang mendorong inisiasi usaha mikro baru yang didukung kemudahan perijinan usaha baru serta adanya fasilitasi stimulan usaha dari pemerintah untuk UMKM.

9. Perizinan dan Penanaman Modal

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan dapat mengurangi beban pengangguran dan akan menjadi salah satu upaya dalam menanggulangi kemiskinan. Nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) / Penanaman Modal Dalam Negeri (PDMN) di Kota Probolinggo pada Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel 1.20

Tabel 1. 19 Perkembangan Investasi di Kota Probolinggo Tahun 2019-2023

NO	TAHUN	NILAI INVESTASI	INVESTOR
1	2019	Rp 4.444.684.564.917,00	52
2	2020	Rp 6.116.025.342.540,00	40
3	2021	Rp 8.394.186.131.394,00	100
4	2022	Rp 11.658.513.500.445,00	279
5	2023	Rp.16.549.464.253.579,00	259

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024

Terdapat peningkatan nilai Investasi pada Tahun 2023 sebesar 42% namun terjadi penurunan jumlah investor sebanyak 7%.

10. Perbankan

Kinerja perbankan di Kota Probolinggo menunjukkan kecenderungan meningkat selama kurun waktu 2019 – 2023 dengan adanya perkembangan ekonomi nasional serta berbagai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dengan menciptakan iklim yang lebih baik bagi perkembangan usaha dibidang Perbankan di Indonesia, namun terjadi penurunan untuk Bank Persero.

Tabel 1. 20 Jumlah Bank Menurut Kepemilikan di Kota Probolinggo Tahun 2019-2023

NO	KEPEMILIKAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bank Persero	13	13	14	12	11
2	Bank Pembangunan Daerah	2	3	3	3	3
3	Bank Umum Syariah	3	3	3	3	3
Total		18	19	20	20	17

Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka Tahun 2024,BPS

11. Transportasi

Pesatnya perkembangan pembangunan di Kota Probolinggo didukung pula dengan pembenahan Infrastruktur jalan oleh Pemerintah Kota Probolinggo serta sarana transportasi yang ada di Probolinggo seperti Terminal Bus Bayuangga, Stasiun Kereta Api Probolinggo, Pelabuhan Tanjung Tembaga dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang merupakan merupakan ujung tombak

fasilitas transportasi Kota Probolinggo. Modal transportasi dalam kota seperti *shuttle travel*, angkutan dalam kota yang merupakan angkutan jarak dekat, becak dan ojek memberikan pilihan kepada masyarakat untuk dapat lebih cepat menuju tempat tujuan. Berdasarkan data Kota Probolinggo Dalam Angka Tahun 2024, diketahui bahwa dari total panjang jalan yang berada di bawah wewenang Pemerintah Kota Probolinggo pada Tahun 2023 sebesar 199,11 km, terdapat jaringan jalan sepanjang 3,87 km dalam kondisi rusak berat, 2,94 km dalam kondisi rusak dan sepanjang 43,74 km dalam kondisi sedang, sedangkan sisanya sepanjang 148,56 km dalam kondisi baik.

12. Pariwisata

Kota Probolinggo merupakan Kota transit yang menghubungkan kota-kota di wilayah sebelah barat dan timur di Provinsi Jawa Timur. Sehingga dalam perkembangannya Kota Probolinggo telah berkembang menjadi Kota tujuan wisata, hiburan dan kuliner, dengan berbagai fasilitas yang tersedia bagi para wisatawan karena menjadi tempat transit bagi wisatawan yang akan melakukan perjalanan dari kota-kota di Jawa dan Bali. Selain itu Kota Probolinggo juga telah ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo Tengger Semeru sehingga mampu meningkatkan promosi potensi wisata dan jumlah kunjungan wisata Kota Probolinggo. Berikut potensi wisata yang ada di Kota Probolinggo

Tabel 1. 21 Potensi Wisata Kota Probolinggo

No.	Jenis Obyek Wisata	Nama Obyek Wisata	Alamat
1	Wisata Alam	Sumber Mata Air Sentong	Jl. Ranu, Jrebeng Wetan, Kec. Kedopak, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67233
		Pantai Permata	Pilang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67221
2	Wisata Budaya	Museum Probolinggo	Jl. Suroyo, Tisnonegaran, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67211
		Museum Dr. Moh Saleh	Jl.dr.Moh.Saleh No 1, Tisnonegaran, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219
3	Wisata Religi	Gereja Merah	Jl. Suroyo No.32, Tisnonegaran, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217
		Klenteng Tri Dharma	Jl. Wr. Supratman No.127, Mangunharjo, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217
4	Wisata Buatan	Pelabuhan Perikanan Pantai	Pelabuhan PPP Mayangan, Kota Probolinggo 67217 Jawa Timur, Mangunharjo, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217
		Kolam Renang Bayuangga	Jl. Hayam Wuruk, Mangunharjo, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217
		Kolam Renang Olympic	Kedopak, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67231
		Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL)	Jl. Basuki Rachmad, Mangunharjo, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217
		Bee Jay Bakau Resort (BJBR)	Pelabuhan PPP Mayangan, Kota Probolinggo 67217 Jawa Timur, Indonesia, Wisata Primadona, Mangunharjo, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217
		Putra Papua Water Park	Pakistaji, Kec. Wonoasih Kota probolinggo, Jawa Timur 67239

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 2024

Upaya pemerintah dalam mengembangkan pariwisata di Kota Probolinggo bukan tanpa alasan karena sesuai dengan data Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Probolinggo



Tahun 2023 tercatat jumlah wisatawan yang berkunjung di Kota Probolinggo dari Tahun 2019-2021 terus mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini merupakan dampak dari Covid 19 yang berdampak pada penurunan pengunjung wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Namun meningkat pesat pada Tahun 2022 dikarenakan sudah tidak diberlakukan kegiatan pembatasan sosial oleh Pemerintah dan kembali meningkat pada Tahun 2023 melalui langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo dalam rangka mengembangkan wisata di Kota Probolinggo diantaranya melalui kegiatan-kegiatan yang menjadi daya tarik wisata yaitu Semipro 2023, Hadipro 2023, Refleksi 5 Tahun Kepemimpinan Walikota, Cokro Fair, Festival Pendalungan. Berikut tabel kunjungan wisatawan di Kota Probolinggo.

Tabel 1. 22 Kunjungan Pada Destinasi Pariwisata Kota Probolinggo Tahun 2019–2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Wisatawan Domestik	1.084.317	474.546	449.517	841.369	948.803
2	Wisatawan Mancanegara	1.698	69	0	235	3.157
	Total Wisatawan	1.086.015	474.615	449.517	841.604	951.960

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 2024

1.3.4.2 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Probolinggo baik Atas Dasar Harga berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 pada periode Tahun 2019-2023 menunjukkan peningkatan signifikan dari sisi pertumbuhan ekonomi. Data Indikator Ekonomi Makro Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel 1.24



Tabel 1. 23 Data Indikator Ekonomi Makro Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2023

NO	LAPANGAN USAHA	ADHK					ADHB				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	455,26	450,75	430,04	463,84	494,08	679,87	683,16	669,33	773,15	857,97
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	1.290,72	1.230,07	1.272,57	1.349,30	1.439,94	1.659,26	1.601,75	1.715,86	1.886,67	2.094,63
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,40	9,28	9,55	10,29	10,88	13,14	12,90	13,40	14,82	15,82
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	19,18	19,99	21,05	21,60	21,90	22,75	23,77	25,18	26,92	27,94
F	Konstruksi	529,84	495,68	500,59	526,27	561,23	669,87	629,50	640,48	707,20	776,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.080,21	1.960,80	2.080,34	2.206,74	2.326,59	2.968,05	2.846,72	3.082,47	3.424,18	3.748,95
H	Transportasi dan Pergudangan	1.206,48	1.140,33	1.241,29	1.406,40	1.519,27	1.595,52	1.519,80	1.648,32	1.970,05	2.300,72
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	295,52	270,61	276,50	296,29	315,22	446,63	414,18	444,83	495,52	548,87
J	Informasi dan Komunikasi	518,57	556,63	589,63	609,75	646,91	563,27	611,49	648,46	672,54	725,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	489,46	488,74	494,05	497,39	521,94	742,65	742,98	769,89	827,29	902,96
L	Real Estat	258,41	265,79	271,92	284,28	297,58	347,49	359,96	370,39	392,88	416,17
M,N	Jasa Perusahaan	54,59	50,99	52,14	51,76	60,05	74,55	70,88	73,26	75,85	90,91
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	380,26	366,19	367,04	365,89	367,29	577,12	584,27	583,68	585,14	622,05
P	Jasa Pendidikan	392,46	406,64	414,52	415,21	435,59	524,86	549,38	556,53	564,32	603,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	76,42	83,35	89,68	89,95	95,16	100,09	110,49	120,38	124,19	136,60
R,S,T,U	Jasa Lainnya	281,99	239,43	250,23	277,88	294,89	336,65	364,03	337,45	390,67	428,05
	PDRB	8.338,77	8.035,27	8.361,14	8.872,84	9.408,51	10.521,39	11.349,15	11.699,90	12.931,38	14.296,47



1.3.4.3 Kemiskinan

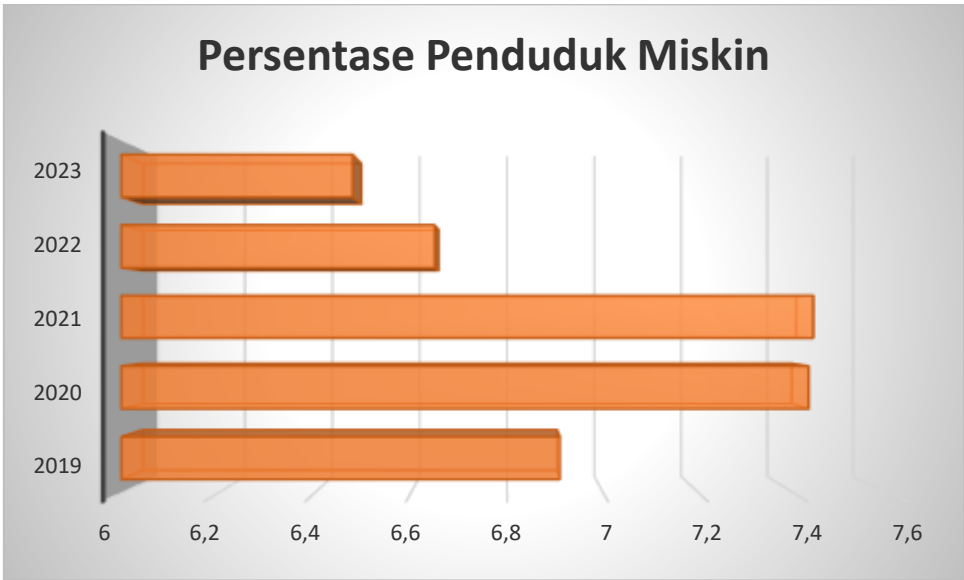
Berdasarkan data BPS Kota Probolinggo, persentase penduduk miskin di Kota Probolinggo yaitu 6,48 persen. Penurunan jumlah penduduk miskin pada Tahun 2023 tidak lepas dari upaya pemerintah Kota Probolinggo dalam mengentaskan kemiskinan melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diantaranya :

- ✓ Penyediaan Permakanan dalam program rantang sehat kepada 65 Lanjut Usia Terlantar (2kali/sehari);
- ✓ Bantuan sosial berupa sembako kepada eks Napi, ODGJ, Disabilitas, dan ODHA;
- ✓ Bantuan Sosial Sembako dan Operasional Pelaksanaan Program BSP, PKH,BST dan Penanganan PMKS;
- ✓ Penyediaan Beras dalam rangka Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan;
- ✓ Bantuan Sosial Sembako bagi Anak Yatim;
- ✓ Bantuan Sosial Berupa Sembako bagi Fakir Miskin sebanyak 140 Orang @Rp200.000,00 dan bantuan sosial uang tunai @300.000,- yang disalurkan melalui 2 tahap. Tahap I kepada 1540 orang dan Tahap II kepada 1475 orang dalam kurun waktu 10 bulan

Tabel 1. 24 Jumlah Penduduk Miskin Kota Probolinggo Tahun 2019–2023

No.	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1	2019	16,37	6,91
2	2020	17,72	7,43
3	2021	17,91	7,44
4	2022	16,16	6,65
5.	2023	15,86	6,48

Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka Tahun 2024, BPS



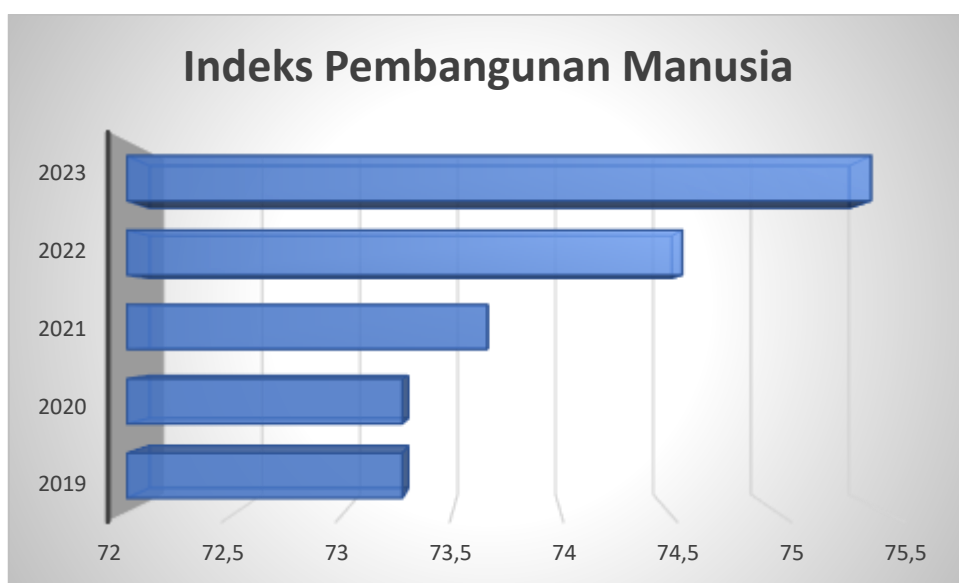
Gambar 1. 7 Persentase Penduduk Miskin Kota Probolinggo Tahun 2019–2023



1.3.5 Kondisi Sosial

1.3.5.1 Kualitas SDM

Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kualitas sumberdaya manusia daerah adalah nilai IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Berdasarkan data BPS nilai IPM Kota Probolinggo selama Tahun 2019-2023 menunjukkan peningkatan dimana pada Tahun 2023 nilai IPM Kota Probolinggo sebesar 75,43. Pertumbuhan IPM 2023 Kota Probolinggo mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama umur panjang dan hidup sehat dan standar hidup layak. Adapun jika ditinjau dari komponen pembentuk IPM, diketahui bahwa Usia Harapan Hidup Masyarakat Kota Probolinggo Tahun 2023 sebesar 70,99 tahun, Harapan Lama Sekolah sebesar 13,73 tahun, Rata-rata Lama Sekolah sebesar 9,56 tahun, dan pengeluaran perkapita.



Gambar 1. 8 Indeks Pembangunan Manusia Kota Probolinggo Tahun 2019- 2023

1.3.5.2 Ketenagakerjaan

Ditinjau dari aspek ketenagakerjaan, berdasarkan data BPS Kota Probolinggo (2023) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Probolinggo pada Tahun 2023 adalah sebesar 70,61% atau mengalami peningkatan dibanding Tahun 2022 sebesar 2,22%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Penduduk usia kerja terdiri dari Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. TPAK diukur sebagai persentase jumlah Angkatan Kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Dibandingkan tahun 2022, TPAK 2023 naik dari 68,39 persen (2022) menjadi 71,06 persen (2023). Hal ini dikarenakan jumlah penduduk Angkatan Kerja naik sebesar 3,45 persen dari 129.272 jiwa pada tahun 2022 menjadi 133.727 jiwa pada tahun 2023 dan menurunnya penduduk Bukan Angkatan Kerja dari 59.775 jiwa pada tahun 2022 menjadi 55.668 jiwa pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terjadi peningkatan penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa pada tahun 2023 yaitu sebesar 70,61 persen.



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Probolinggo Tahun 2023 sebesar 4,53%. Hal tersebut karena adanya program yang telah dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo dalam mengatasi Tingkat Pengangguran diantaranya:

- ✓ Kegiatan Job Market Fair. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja melalui JOB MARKET FAIR, yang bertujuan untuk mempertemukan antara perusahaan dan pencari kerja dalam proses penempatan tenaga kerja,
- ✓ Millenial Job Center, berupa kegiatan sosialisasi kepada Pelajar dan Mahasiswa, MJC sebagai wadah pertukaran informasi dan jaringan diantara klien, mentor dan talent, yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem freelance yang kompetitif dan kondusif;
- ✓ Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dalam upaya peningkatan keterampilan dan kompetensi pencari kerja telah dilaksanakan pelatihan sebanyak 9 paket pelatihan (Pelatihan Tata Rias Pengantin, Pelatihan Bordir, Pelatihan Tata Rias Salon, Pelatihan Barbershop, Pelatihan Kopi Barista, Pelatihan Las Listrik, Pelatihan pembuatan makanan dan minuman);
- ✓ Sosialisasi kepada perusahaan terkait Peraturan Perusahaan dan ketenagakerjaan.



Gambar 1. 9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Probolinggo Tahun 2019 –2023



Gambar 1. 10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2023

1.3.6 Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pada dasarnya pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya seiring peningkatan perekonomian nasional dan daerah yang pada gilirannya akan semakin membuka peluang potensi pendapatan negara maupun daerah. Hal ini terutama dari kenaikan komponen dana perimbangan, juga dari kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD diharapkan tetap meningkat sebagai wujud kemandirian daerah. Kenaikan PAD dilaksanakan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian untuk dapat mempertahankan kondisi daerah tetap kondusif terutama saat perekonomian sedang lesu.

Target dan realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 1.26

Tabel 1. 25 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah TA. 2023

No.	URAIAN	TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	PENDAPATAN DAERAH	932.272.450.324,00	968.417.858.316,29	103,88
1	Pendapatan Asli Daerah	198.177.764.901,00	209.764.702.551,29	105,85
	Pajak Daerah	60.429.219.278,00	56.636.986.040,36	93,72
	Retribusi Daerah	14.138.419.314,00	12.202.736.808,00	86,31
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.470.762.667,00	1.421.600.239,43	96,66
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	122.139.363.642,00	139.503.379.463,50	114,22
2	Pendapatan Transfer	734.094.685.423,00	758.653.155.765,00	103,35
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	629.054.548.242,00	634.206.402.044,00	100,82
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	105.040.137.181,00	124.446.753.721,00	118,48
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	0	0,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0,00

Sumber Data: BPPKAD Kota Probolinggo, cut of 19 Februari 2024 (non audited)

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah Tahun 2023 mencapai target bahkan lebih, yakni sebesar 103,88% dari target pendapatan daerah sebesar Rp. **932.272.450.324,00** dengan realisasi pendapatan daerah Rp. **968.417.858.316,29**

1.3.7 Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja

Rumusan kebijakan belanja daerah, ditetapkan melalui pendekatan belanja proporsional, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan dilaksanakan dengan berpedoman pada anggaran berbasis kinerja serta berdasarkan kepada agenda-agenda pembangunan.

Secara umum target dan realisasi belanja Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan pada tabel 1.27 sebagai berikut:

Tabel 1. 26 Target dan Realisasi Belanja Daerah TA. 2023

No.	URAIAN	TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	BELANJA DAERAH	1.116.603.394.169,00	1.016.894.990.872,63	91,07
1	Belanja Operasi	975.602.043.240,00	902.709.536.086,63	92,53
	Belanja Pegawai	460.762.284.121,00	437.510.461.343,00	94,95
	Belanja Barang dan Jasa	449.364.462.031,00	404.026.544.251,90	89,91
	Belanja Hibah	63.432.761.588,00	59.789.919.852,73	94,26
	Belanja Bantuan Sosial	2.042.535.500,00	1.382.610.639,00	67,69
2	Belanja Modal	131.272.831.046,00	112.290.783.286,00	85,54
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.035.958.252,00	48.060.266.778,00	90,62
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.139.486.054,00	40.561.483.076,00	87,91
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	29.594.401.224,00	21.310.177.902,00	72,01
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.452.985.516,00	2.310.043.280,00	94,17
	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	48.812.250,00	97,62
3	Belanja Tidak Terduga	9.728.519.883,00	1.894.671.500,00	19,48
	Belanja Tidak Terduga	9.728.519.883,00	1.894.671.500,00	19,48
4	Belanja Transfer	0	0	0,00
	Belanja Bagi Hasil	0	0	0,00

Sumber Data : BPPKAD Kota Probolinggo, cut of 19 Februari 2024 (non audited)

Realisasi belanja daerah Kota Probolinggo pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.016.894.990.872,63 dengan demikian capaian realisasi belanja daerah pada Tahun 2023 adalah sebesar 91,07% dari target Rp. 1.116.603.394.169,00 Postur belanja pada Tahun 2023 meliputi: 87,37% untuk belanja operasi, belanja modal 11,76%, belanja tidak terduga 0,87% dan 0% untuk belanja transfer. Pos anggaran terbesar adalah pada belanja pegawai sebesar 39,62% dari total belanja.

1.3.8 Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan

Selain pendapatan dan belanja daerah, juga dilaporkan pembiayaan daerah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam struktur APBD. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Tabel 1. 27 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah TA. 2023

No	Uraian	2023		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1.	Pembiayaan Daerah	184.330.943.845,00	183.913.590.820,35	99,77
	Penerimaan Pembiayaan	184.330.943.845,00	183.913.590.820,35	99,77
2.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	0	0
3.	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
4.	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	184.330.943.845,00	183.913.590.820,35	99,77

Sumber Data : BPPKAD Kota Probolinggo, cut off 19 Februari 2024 (non audited)



BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Kuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian sampai kepada pertanggung-jawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang- undangan

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan setiap tahun melalui Peraturan Daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan Pertanggungjawaban APBN/APBD disusun dan dilaporkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Pada Pemerintah Daerah Kota Probolinggo, pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian sampai kepada pertanggung-jawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang- undangan.

Adapun target dan realisasi anggaran hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel 2.1 :



Tabel 2. 1 Target dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah TA. 2023

1. Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
PENDAPATAN									Pemanfaatan gedung kesenian hanya untuk Pusat Kreatif Anak. Jika untuk penyelenggaraan event, terkendala terhadap penyediaan akses dan sarana prasarana yang belum gedung kesenian yang belum memadai.
PENDAPATAN ASLI DAERAH		bulan	12	12		63.279.143,00	36.623.500,00	57,88	
JUMLAH PENDAPATAN						63.279.143,00	36.623.500,00	57,88	
BELANJA						212.082.175.510,18	204.878.038.322,00	96,60	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Persentase	100	88,89	88,89	134.596.192.072,18	132.006.211.445,00	88,53	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	Persentase	100	91,70	91,70	215.277.120,00	203.600.790,00	92,57	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100,00	9.307.350,00	8.412.250,00	90,38	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	25	25	100,00	205.969.770,00	195.188.540,00	94,77	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	Persentase	100	97,43	97,43	132.262.053.708,18	129.923.336.198,00	95,08	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	18914	17458	92,30	131.794.764.563,18	129.474.597.718,00	98,24	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100,00	457.471.145,00	439.817.980,00	96,14	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12	100,00	9.818.000,00	8.920.500,00	90,86	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Sesuai Ketentuan	Persentase	100	100	100,00	162.681.104,00	161.018.608,00	98,98	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4	100,00	162.681.104,00	161.018.608,00	98,98	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	Persentase	100	100	100,00	16.120.000,00	14.475.000,00	89,80	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	3	3	100,00	16.120.000,00	14.475.000,00	89,80	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	Persentase	100	100	100,00	195.269.100,00	179.729.548,00	95,50	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100,00	39.370.500,00	38.879.000,00	98,75	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	5	100,00	20.055.800,00	18.937.700,00	94,43	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	100,00	6.525.000,00	6.320.000,00	96,86	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100,00	4.800.000,00	4.723.500,00	98,41	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	25	100,00	124.517.800,00	110.869.348,00	89,04	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	Persentase	100	100	100,00	1.537.780.040,00	1.409.679.022,00	90,93	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	laporan	0		0,00	0,00	0,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00	642.179.960,00	554.902.002,00	86,41	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00	895.600.080,00	854.777.020,00	95,44	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang yang terpelihara	Persentase	100	71,15	71,15	207.011.000,00	114.372.279,00	56,86	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	52	48	92,31	162.038.500,00	87.518.279,00	54,01	Ketidaksesuaian penyedia pelaksana paket pemeliharaan kendaraan operasional



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	2	50,00	44.972.500,00	26.854.000,00	59,71	Ketidaksesuaian penyedia pelaksana paket pemeliharaan mesin
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0		0,00	0,00	0,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar	Persentase	100	83,70	83,70	57.778.282.118,00	53.872.573.409,00	93,24	
	Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal yang memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan PAUD dan Nonformal	Persentase	100	100,00	100,00	17.761.110.580,00	17.471.824.214,00	98,37	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI	Persentase	100	98,26	98,26	35.644.895.448,00	33.608.094.004,00	94,29	
	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	59,31	75,80	127,80				
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	43,17	56,86	131,71				
	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentase	100%	99,69	9.969,00				
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi sedang/berat	Ruang	2	2	100,00	112.552.868,00	107.585.499,00	95,59	
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	3947	1136	28,78	542.844.000,00	253.158.900,00	46,64	Pengadaan seragam diperuntukkan bagi peserta didik sekolah SD dengan kategori tidak mampu dan terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan hasil sejumlah 568 siswa, sehingga terdapat selisih dari usulan Sekolah sebesar 2.600 stel atau 1.300 siswa tidak mampu berdasarkan pendataan dari sekolah
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia	Paket	10	0	0,00	220.600.000,00	0,00	0,00	Ketersediaan Barang di Katalog tidak tersedia dan tidak sesuai dengan spesifikasi



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	86	86	100,00	66.830.000,00	65.645.000,00	98,23	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	112	112	100,00	2.880.000.000,00	2.803.680.000,00	97,35	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	86	86	100,00	16.938.900.000,00	16.891.992.305,00	99,72	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	172	172	100,00	116.859.180,00	114.324.160,00	97,83	
SUB UNIT :									
SD NEGERI CURAHGRINTING 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	102.203.200,00	94.004.400,00	91,98	
SD NEGERI CURAHGRINTING 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	87.161.100,00	71.553.550,00	82,09	
SD NEGERI JATI 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	407.174.800,00	275.165.700,00	67,58	Terdapat belanja Jasa Non ASN (GTT) yang menjadi PPPK, terdapat belanja Pemeliharaan yang tidak diusulkan pada RKBMD , dan Beberapa Belanja Modal sudah masuk di RKBMD akan tetapi tumpang tindih dengan pengadaan dari sumber dana BOSP
SD NEGERI JATI 4	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	89.653.100,00	85.816.900,00	95,72	
SD NEGERI JREBENG KIDUL	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	152.439.000,00	143.837.970,00	94,36	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
SD NEGERI JREBENG KULON 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	171.781.900,00	129.936.470,00	75,64	Ketidaksesuaian antara penganggaran dengan pelaksanaan kegiatan BOSDA
SD NEGERI JREBENG KULON 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	156.785.900,00	127.839.500,00	81,54	
SD NEGERI JREBENG LOR 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	231.910.700,00	217.227.800,00	93,67	
SD NEGERI JREBENG LOR 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	269.189.900,00	268.621.100,00	99,79	
SD NEGERI JREBENG LOR 7	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	120.071.000,00	118.257.800,00	98,49	
SD NEGERI JREBENG WETAN	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	139.546.200,00	123.460.200,00	88,47	
SD NEGERI KADEMANGAN 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	167.081.100,00	127.908.520,00	76,55	KPA / atau Kepala Sekolah Pensiun, sehingga membutuhkan waktu untuk menunggu pengesahan Plt KPA ataupun pengangkatan KPA
SD NEGERI KADEMANGAN 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	160.924.600,00	156.975.000,00	97,55	
SD NEGERI KADEMANGAN 4	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	152.932.600,00	124.269.630,00	81,26	
SD NEGERI KANIGARAN 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	478.066.500,00	387.507.550,00	81,06	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
	Kelembagaan dan manajemen sekolah								
SD NEGERI KANIGARAN 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	333.742.800,00	304.274.310,00	91,17	
SD NEGERI KANIGARAN 6	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	270.015.800,00	260.101.010,00	96,33	
SD NEGERI KARENG LOR 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	153.369.700,00	153.299.500,00	99,95	
SD NEGERI KARENG LOR 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	123.924.300,00	115.251.220,00	93,00	
SD NEGERI KEBONSARI KULON 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	318.195.900,00	314.592.491,00	98,87	
SD NEGERI KEBONSARI KULON 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	425.650.800,00	417.497.121,00	98,08	
SD NEGERI KEBONSARI KULON 6	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	154.998.700,00	135.209.180,00	87,23	
SD NEGERI KEBONSARI WETAN 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	84.763.500,00	73.830.100,00	87,10	
SD NEGERI KEBONSARI WETAN 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	78.369.900,00	70.253.980,00	89,64	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
SD NEGERI KEDOPOK 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	134.313.900,00	121.564.480,00	90,51	
SD NEGERI KEDOPOK 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	161.315.600,00	151.817.100,00	94,11	
SD NEGERI KEDUNGASEM 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	260.416.400,00	243.550.400,00	93,52	
SD NEGERI KEDUNGASEM 4	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	176.015.000,00	175.878.644,00	99,92	
SD NEGERI KEDUNGGALENG	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	134.551.000,00	131.947.000,00	98,06	
SD NEGERI KETAPANG 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	144.484.100,00	129.228.100,00	89,44	
SD NEGERI KETAPANG 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	178.412.600,00	156.181.200,00	87,54	
SD NEGERI KETAPANG 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	153.352.000,00	73.051.700,00	47,64	KPA / atau Kepala Sekolah Pensiun, sehingga membutuhkan waktu untuk menunggu pengesahan Plt KPA ataupun pengangkatan KPA
SD NEGERI MANGUNHARJO 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	176.671.500,00	152.141.380,00	86,12	
SD NEGERI MANGUNHARJO 10	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	115.789.600,00	106.702.950,00	92,15	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
	Kelembagaan dan manajemen sekolah								
SD NEGERI MANGUNHARJO 12	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	161.866.500,00	144.818.245,00	89,47	
SD NEGERI MANGUNHARJO 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	197.545.100,00	197.155.950,00	99,80	
SD NEGERI MANGUNHARJO 4	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	120.501.700,00	117.744.550,00	97,71	
SD NEGERI MANGUNHARJO 5	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	146.444.600,00	98.816.653,00	67,48	KPA / atau Kepala Sekolah Pensiun, sehingga membutuhkan waktu untuk menunggu pengesahan Plt KPA ataupun pengangkatan KPA
SD NEGERI MANGUNHARJO 6	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	152.133.400,00	147.667.250,00	97,06	
SD NEGERI MANGUNHARJO 7	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	302.269.200,00	293.425.300,00	97,07	
SD NEGERI MAYANGAN 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	160.687.500,00	138.980.100,00	86,49	
SD NEGERI MAYANGAN 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	395.138.500,00	378.732.500,00	95,85	
SD NEGERI MAYANGAN 4	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	75.829.600,00	67.534.590,00	89,06	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
SD NEGERI PAKISTAJI 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	150.735.000,00	147.133.100,00	97,61	
SD NEGERI PAKISTAJI 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	153.837.400,00	141.062.000,00	91,70	
SD NEGERI PILANG 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	146.034.200,00	134.239.100,00	91,92	
SD NEGERI PILANG 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	87.912.000,00	87.891.700,00	99,98	
SD NEGERI PILANG 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	113.372.600,00	108.296.500,00	95,52	
SD NEGERI POHSANGIT KIDUL 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	100.042.700,00	97.891.090,00	97,85	
SD NEGERI POHSANGIT KIDUL 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	159.793.900,00	159.430.906,00	99,77	
SD NEGERI SUKABUMI 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	321.166.800,00	289.506.050,00	90,14	
SD NEGERI SUKABUMI 10	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	172.769.900,00	148.364.600,00	85,87	
SD NEGERI SUKABUMI 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	605.907.900,00	552.451.900,00	91,18	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
	Kelembagaan dan manajemen sekolah								
SD NEGERI SUKABUMI 4	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	363.829.200,00	311.822.400,00	85,71	
SD NEGERI SUKABUMI 6	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	139.109.100,00	130.898.700,00	94,10	
SD NEGERI SUKABUMI 7	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	145.502.700,00	137.021.500,00	94,17	
SD NEGERI SUKOHARJO 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	337.969.400,00	308.154.549,00	91,18	
SD NEGERI SUKOHARJO 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	252.518.800,00	246.864.610,00	97,76	
SD NEGERI SUKOHARJO 4	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	143.904.300,00	135.456.280,00	94,13	
SD NEGERI SUMBER WETAN 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	200.485.400,00	200.431.400,00	99,97	
SD NEGERI SUMBER WETAN 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	156.129.400,00	156.023.876,00	99,93	
SD NEGERI SUMBERTAMAN 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	162.285.900,00	138.210.200,00	85,16	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
SD NEGERI SUMBERTAMAN 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	285.343.300,00	279.773.000,00	98,05	
SD NEGERI TISNONEGARAN 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	336.845.200,00	284.491.675,00	84,46	
SD NEGERI TISNONEGARAN 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	316.066.000,00	291.013.060,00	92,07	
SD NEGERI TRIWUNG KIDUL 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	177.014.200,00	158.938.200,00	89,79	
SD NEGERI TRIWUNG KIDUL 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	157.396.300,00	128.472.990,00	81,62	
SD NEGERI TRIWUNG KIDUL 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	148.137.400,00	107.891.800,00	72,83	KPA / atau Kepala Sekolah Pensiun, sehingga membutuhkan waktu untuk menunggu pengesahan Plt KPA ataupun pengangkatan KPA
SD NEGERI TRIWUNG LOR 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	176.272.300,00	168.093.250,00	95,36	
SD NEGERI TRIWUNG LOR 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	95.010.400,00	78.827.750,00	82,97	
SD NEGERI TRIWUNG LOR 3	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	138.167.200,00	116.678.980,00	84,45	
SD NEGERI WIROBORANG 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	403.835.300,00	401.421.680,00	99,40	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
	Kelembagaan dan manajemen sekolah								
SD NEGERI WIROBORANG 4	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	113.923.500,00	111.863.500,00	98,19	
SD NEGERI WONOASIH 1	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	164.777.900,00	139.872.900,00	84,89	
SD NEGERI WONOASIH 2	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	162.523.000,00	149.589.800,00	92,04	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Warga Negara Usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SMP/MTs	Persentase	100%	96,59	9.659,00	22.133.386.670,00	20.264.479.405,00	91,56	
	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	70,22	76,83	109,41				
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	57,72	58,88	102,01				
	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentase	100%	99,69	9.969,00				
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Paket	4315	2572	59,61	602.908.000,00	265.691.882,00	44,07	Pengadaan seragam diperuntukkan bagi peserta didik SMP kategori tidak mampu yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sejumlah 643 siswa, sehingga terdapat selisih dari usulan Sekolah sebesar 2.725 stel berdasarkan pendataan dari sekolah.
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	8669	8669	100,00	132.993.770,00	130.982.740,00	98,49	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	47	47	100,00	4.164.600.000,00	3.698.400.000,00	88,81	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	28	28	100,00	10.003.600.000,00	9.809.555.655,00	98,06	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	60	60	100,00	26.000.000,00	22.460.000,00	86,38	
SUB UNIT :									
SMP NEGERI 1 PROBOLINGGO	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	756.005.200,00	674.290.420,00	89,19	
SMP NEGERI 2 PROBOLINGGO	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	622.622.100,00	537.517.546,00	86,33	
SMP NEGERI 3 PROBOLINGGO	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	758.264.800,00	697.052.670,00	91,93	
SMP NEGERI 4 PROBOLINGGO	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	762.729.800,00	592.531.190,00	77,69	Terjadi mutasi Bendahara Pengeluaran BOSDA, sehingga harus menunggu SK Walikota Probolinggo tentang Perubahan Bendahara BOSDA Sub Unit
SMP NEGERI 5 PROBOLINGGO	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	739.437.000,00	709.995.250,00	96,02	
SMP NEGERI 6 PROBOLINGGO	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	689.302.100,00	580.952.810,00	84,28	
SMP NEGERI 7 PROBOLINGGO	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	703.287.700,00	613.726.200,00	87,27	
SMP NEGERI 8 PROBOLINGGO	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	650.810.900,00	567.271.590,00	87,16	
SMP NEGERI 9 PROBOLINGGO	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	751.057.600,00	614.246.872,00	81,78	
SMP NEGERI 10 PROBOLINGGO	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	1	1	100,00	769.767.700,00	749.804.580,00	97,41	
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persentase	77,88	88,68	113,87	9.231.547.720,00	9.026.725.294,00	97,78	
	Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	Persentase	100,00	93,81	93,81				
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	5348		0,00	408.920.000,00	404.062.100,00	98,81	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	237	245	103,38	3.696.827.720,00	3.540.940.796,00	95,78	
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	228	228	100,00	5.125.800.000,00	5.081.722.398,00	99,14	
Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persentase	100	90,80	90,80	8.529.562.860,00	8.445.098.920,00	99,01	
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal /Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	750	750	100,00	7.078.255.680,00	7.033.144.760,00	99,36	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah NonFormal /Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	90	90	100,00	849.607.180,00	821.954.160,00	96,75	
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah satuan pendidikan nonformal / kesetaraan yang mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	6	6	100,00	601.700.000,00	590.000.000,00	98,06	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang menerapkan Standar Mutu Pembelajaran	Persentase	100	100	100,00	42.885.400,00	36.525.000,00	85,17	
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase satuan Pendidikan Dasar yang menerapkan standar isi, standar proses dan standar penilaian	Persentase	100%	100	10.000,00	39.775.000,00	33.525.000,00	84,29	
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	Orang	172	170	98,84	39.775.000,00	33.525.000,00	84,29	
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal yang menerapkan standar isi, standar proses dan standar penilaian	Persentase	100%	100	10.000,00	3.110.400,00	3.000.000,00	96,45	
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	Dokumen	2	2	100,00	3.110.400,00	3.000.000,00	96,45	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan ketentuan	Persentase	100	59,31	59,31	404.135.160,00	378.172.290,00	93,58	
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan	Persentase	100	78,51	78,51	404.135.160,00	378.172.290,00	93,58	
	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	Persentase	75,65	76,75	101,45				
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	4	4	100,00	90.848.180,00	88.261.200,00	97,15	
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan	Laporan	4	4	100,00	313.286.980,00	289.911.090,00	92,54	
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang diselenggarakan oleh Masyarakat sesuai dengan syarat dan ketentuan	Persentase	100	100	100,00	4.744.000,00	4.415.000,00	93,06	
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat mendapatkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan ketentuan	Persentase	100	100	100,00	2.520.000,00	2.310.000,00	91,67	
1.01.05.2.01.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	4	4	100,00	2.520.000,00	2.310.000,00	91,67	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat mendapatkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan ketentuan	Persentase	100	100	100,00	2.224.000,00	2.105.000,00	94,65	
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	4	4	100,00	2.224.000,00	2.105.000,00	94,65	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan Dalam Daerah yang dikembangkan	Persentase	100	100	100	440.425.180,00	439.862.460,00	99,87	
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Budaya yang dibina	Persentase	100	100	100	440.425.180,00	439.862.460,00	99,87	
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persentase	100	100	100				
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	50	50	100	440.425.180,00	439.862.460,00	99,87	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	Persentase	100	100	100	13.275.000,00	13.275.000,00	100,00	
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Seni yang dibina	Persentase	100	100	100	13.275.000,00	13.275.000,00	100,00	
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	5	5	100,00	13.275.000,00	13.275.000,00	100,00	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Sejarah Lokal yang dilestarikan	Persentase	100	100	100	48.676.900,00	46.920.452,00	96,39	
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Sejarah Lokal yang dibina	Persentase	100	100	100	48.676.900,00	46.920.452,00	96,39	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang	60	60	100	48.676.900,00	46.920.452,00	96,39	
PROGRAM PELESTARIAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola	Persentase	100	100	100	22.118.200,00	21.209.500,00	95,89	
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya yang mendapatkan legalitas	Persentase	100	100	100	22.118.200,00	21.209.500,00	95,89	
Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	2	2	100	22.118.200,00	21.209.500,00	95,89	
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Museum yang dikelola	Persentase	100	76,82	76,82	970.330.900,00	587.049.552,00	60,50	
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan kapasitas Museum Kota	Persentase	100	76,82	76,82	970.330.900,00	587.049.552,00	60,50	Capaian kinerja peningkatan kapasitas museum berdasarkan rata-rata keseluruhan capaian kinerja semua sub kegiatan pendukung
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Koleksi	686	64	9,33	210.000.000,00	15.000.000,00	7,14	Ketidaksesuaian spesifikasi belanja konsultasi / kajian koleksi museum , Kajian Konservasi koleksi (lempengan prasasti, area dll ;
Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Orang	10	10	100	270.330.900,00	252.096.100,00	93,25	
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Kegiatan	4	4	100	350.000.000,00	225.371.750,00	64,39	Terdapat pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyebar luasan informasi koleksi tidak terlaksana disebabkan ketidaksesuaian Narasumber / Tenaga Ahli
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Unit	2	2	100	140.000.000,00	94.581.702,00	67,56	terdapat ketidaksesuaian spesifikasi atas pelaksanaan pengadaan sarana prasarana, sehingga diubah pada pemeliharaan Instalasi Listrik dan pemeliharaan Taman Museum

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 17 Januari 2024



2. Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	KETERANGAN
PENDAPATAN						114.314.820.000,00	129.396.681.528,75	113,19	
PENDAPATAN ASLI DAERAH						114.314.820.000,00	129.396.681.528,75	113,19	
BELANJA						288.950.039.128,00	265.780.464.121,90	91,98	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	persentase	100	100	100	184.816.093.323	174.724.423.763	94,54	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	persentase	95	100	105,26	114.000.000	111.519.000	97,82	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7	9	128,57	110.000.000	107.535.000	97,76	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	18	15	83,33	4.000.000	3.984.000	99,60	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	persentase	100	100	100	63.211.232.462	60.722.115.313	96,06	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	727	1426	196,15	62.772.395.862	60.291.425.913	96,05	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	1	1	100	408.356.600	400.274.400	98,02	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	13	13	100	30.480.000	30.415.000	99,79	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	persentase	100	100	100	15.000.000	9.990.000	66,60	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	dokumen	12	13	108,33	15.000.000	9.990.000	66,60	Penilaian sudah dilakukan oleh KPKNL di Kota Probolinggo, sehingga tidak melakukan penyerapan anggaran perjalanan dinas
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	persentase	90	90	100	767.936.823	728.041.163	94,80	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	KETERANGAN
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	12	12	100	767.936.823	728.041.163	94,80	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	persentase	80	80	100	703.246.100	605.983.703	86,17	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	5	8	160	61.575.000	46.847.600	76,08	Sisa pagu merupakan belanja cetak banner, umbul umbul dan karangan bunga. Karena even yang ditargetkan lebih sedikit dari realisasi.
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	3	4	133,33	151.750.500	147.946.500	97,49	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	dokumen	1	4	400	3.240.000	3.120.000	96,30	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	12	100	11.824.100	11.404.000	96,45	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	160	220	137,5	245.856.500	201.661.050	82,02	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	5	7	140	229.000.000	195.004.553	85,15	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	persentase	95	91	96,05	190.310.000	167.645.000	88,09	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	8	8	100	190.310.000	167.645.000	88,09	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	persentase	100	100	100	1.627.142.200	1.485.393.463	91,29	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	2	2	100	517.000	220.000	42,55	Sisa pagu merupakan belanja Tera Cek,tidak terealisasi karena semua pencairan anggaran menggunakan sistem token
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	100	301.093.200	242.456.773	80,53	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	KETERANGAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	100	1.325.532.000	1.242.716.690	93,75	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	persentase	100	100	100	796.964.600	708.532.940	88,90	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	130	135	103,85	498.370.600	412.494.743	82,77	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	125	130	104	98.200.000	97.512.000	99,30	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	2	100	200.394.000	198.526.197	99,07	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas / RSUD	Indeks	85	81	95,28	117.390.261.138	110.185.203.181	93,86	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	7	7	100	117.390.261.138	110.185.203.180,90	93,86	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang sesuai standar	persentase	100	100	100	92.717.523.165	80.494.881.368	86,82	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) dan Fasilitas Kesehatan Lainnya yang sesuai standar	%	63	100	158,73	44.280.650.457	39.117.064.149	88,34	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	unit	5	5	100	5.815.000.000	5.675.009.343,00	97,59	
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	264	265	100,38	14.879.775.500	11.906.161.404,00	80,02	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	KETERANGAN
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	77	77	100	16.599.980.024	15.526.622.242,00	93,53	
Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	144	226	156,94	2.758.100.000	2.461.055.692,00	89,23	
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	79	100	126,58	2.944.194.933	2.418.103.668,00	82,13	
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit/Set	701	665	94	1.283.600.000,00	1.130.111.800,00	88,04	Anggaran pemeliharaan/kalibrasi alat kesehatan pada unit induk tidak dapat direalisasikan, karena sudah direalisasikan melalui anggaran BOK pada Puskesmas
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan yang terlaksana sesuai standar	persentase	100	100	100	45.461.912.708,00	38.609.075.816,00	84,93	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	3918	3601	91,91	295.878.000	253.473.435	85,67	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	3740	3211	85,86	29.114.700	23.924.000	82,17	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	3562	2961	83,13	10.000.000	7.360.000	73,60	anggaran BOK yang tidak terserap yaitu belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk ASN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	18369	16576	90,24	45.975.000	33.875.000	73,68	anggaran BOK yang tidak terserap yaitu belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk ASN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	32668	31833	97,44	76.440.000,00	67.065.000,00	87,74	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	159881	141474	88,49	102.475.000	48.780.000	47,60	1. Anggaran dana khusus BOK Puskesmas baru bisa direalisasikan pada TW II (Bulan Mei), karena harus menunggu juknis perlu menyesuaikan menu dengan juknis pada penjabaran anggaran (di lakukan di bulan Juni). 2. Sistem Penatausahaan Keuangan pada BOK Puskesmas mengalami



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	KETERANGAN
									perubahan di tahun 2023 (BOK langsung di salurkan ke masing - masing Puskesmas tanpa melalui RKUD, sehingga diperlukan adaptasi penatausahaan ulang).
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	30585	26736	87,42	759.450.000,00	751.170.000,00	98,91	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	61140	31158	50,96	10.000.000	9.704.400,00	97,04	Capaian kinerja penderita hipertensi belum mencapai 100% karena Data Risesdas sasaran terlalu besar dari keadaan di lapangan/real
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	8647	8647	100	236.054.000	223.342.832	94,62	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	446	446	100	44.000.000	23.205.000	52,74	1. Anggaran dana khusus BOK Puskesmas baru bisa direalisasikan pada TW II (Bulan Mei), karena harus menunggu juknis perlu menyesuaikan menu dengan juknis pada penjabaran anggaran (di lakukan di bulan Juni). 2. Sistem Penatausahaan Keuangan pada BOK Puskesmas mengalami perubahan di tahun 2023 (BOK langsung di salurkan ke masing - masing Puskesmas tanpa melalui RKUD, sehingga diperlukan adaptasi penatausahaan ulang).
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	4968	4968	100	48.775.000	23.175.000	47,51	1. Anggaran dana khusus BOK Puskesmas baru bisa direalisasikan pada TW II (Bulan Mei), karena harus menunggu juknis perlu menyesuaikan menu dengan juknis pada penjabaran anggaran (di lakukan di bulan Juni). 2. Sistem Penatausahaan Keuangan pada BOK Puskesmas mengalami perubahan di tahun 2023 (BOK



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	KETERANGAN
									langsung di salurkan ke masing - masing Puskesmas tanpa melalui RKUD, sehingga diperlukan adaptasi penatausahaan ulang).
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	5552	5552	100	117.760.000	85.800.000	72,86	1. Anggaran dana khusus BOK Puskesmas baru bisa direalisasikan pada TW II (Bulan Mei), karena harus menunggu juknis perlu menyesuaikan menu dengan juknis pada penjabaran anggaran (di lakukan di bulan Juni). 2. Sistem Penatausahaan Keuangan pada BOK Puskesmas mengalami perubahan di tahun 2023 (BOK langsung di salurkan ke masing - masing Puskesmas tanpa melalui RKUD, sehingga diperlukan adaptasi penatausahaan ulang).
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dokumen	4	4	100	57.170.000	49.818.000	87,14	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	dokumen	8	8	100	10.000.000	6.915.000	69,15	Sisa anggaran merupakan belanja cetak, dikarenakan adanya dokumen yang belum mendapat persetujuan, sehingga tidak menyerap anggaran cetak
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	14	12	85,71	3.043.541.500	2.030.691.000	66,72	1. Anggaran dana khusus BOK Puskesmas baru bisa direalisasikan pada TW II (Bulan Mei), karena harus menunggu juknis perlu menyesuaikan menu dengan juknis pada penjabaran anggaran (di lakukan di bulan Juni). 2. Sistem Penatausahaan Keuangan pada BOK Puskesmas mengalami perubahan di tahun 2023 (BOK langsung di salurkan ke masing - masing Puskesmas tanpa melalui



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	KETERANGAN
									RKUD, sehingga diperlukan adaptasi penatausahaan ulang).
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	6	6	100	80.600.000	46.899.500	58,19	1. Anggaran dana khusus BOK Puskesmas baru bisa direalisasikan pada TW II (Bulan Mei), karena harus menunggu juknis perlu menyesuaikan menu dengan juknis pada penjabaran anggaran (di lakukan di bulan Juni). 2. Sistem Penatausahaan Keuangan pada BOK Puskesmas mengalami perubahan di tahun 2023 (BOK langsung di salurkan ke masing - masing Puskesmas tanpa melalui RKUD, sehingga diperlukan adaptasi penatausahaan ulang).
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	9	9	100	477.194.650	435.943.200	91,36	
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	Dokumen	15	14	93,33	266.344.200	191.303.200	71,83	1. Anggaran dana khusus BOK Puskesmas baru bisa direalisasikan pada TW II (Bulan Mei), karena harus menunggu juknis perlu menyesuaikan menu dengan juknis pada penjabaran anggaran (di lakukan di bulan Juni). 2. Sistem Penatausahaan Keuangan pada BOK Puskesmas mengalami perubahan di tahun 2023 (BOK langsung di salurkan ke masing - masing Puskesmas tanpa melalui RKUD, sehingga diperlukan adaptasi penatausahaan ulang).
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	dokumen	6	6	100	5.000.000	4.920.000	98,40	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	18	16	88,89	30.450.000	10.400.000	34,15	1. Anggaran dana khusus BOK Puskesmas baru bisa direalisasikan pada TW II (Bulan Mei), karena harus



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	KETERANGAN
									menunggu juknis perlu menyesuaikan menu dengan juknis pada penjabaran anggaran (di lakukan di bulan Juni). 2. Sistem Penatausahaan Keuangan pada BOK Puskesmas mengalami perubahan di tahun 2023 (BOK langsung di salurkan ke masing - masing Puskesmas tanpa melalui RKUD, sehingga diperlukan adaptasi penatausahaan ulang).
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang	144	144	100	21.408.100	13.800.000	64,46	Sisa anggaran merupakan belanja cetak, dikarenakan terdapat dokumen yang tidak disetujui untuk dilakukan cetak
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang	953	1408	147,74	36.100.000,00	21.125.000,00	58,52	1. Anggaran dana khusus BOK Puskesmas baru bisa direalisasikan pada TW II (Bulan Mei), karena harus menunggu juknis perlu menyesuaikan menu dengan juknis pada penjabaran anggaran (di lakukan di bulan Juni). 2. Sistem Penatausahaan Keuangan pada BOK Puskesmas mengalami perubahan di tahun 2023 (BOK langsung di salurkan ke masing - masing Puskesmas tanpa melalui RKUD, sehingga diperlukan adaptasi penatausahaan ulang).
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	51	51	100	1.909.642.850	1.665.791.494	87,23	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	1	1	100	35.929.042.708	31.569.076.300	87,87	Anggaran sudah terbayar sesuai tagihan
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	orang	144	144	100	11.600.000	11.588.000	99,90	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	KETERANGAN
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan	paket	40	0	0	14.840.000	0	0,00	1. Anggaran dana khusus BOK Puskesmas baru bisa direalisasikan pada TW II (Bulan Mei), karena harus menunggu juknis perlu menyesuaikan menu dengan juknis pada penjabaran anggaran (di lakukan di bulan Juni). 2. Sistem Penatausahaan Keuangan pada BOK Puskesmas mengalami perubahan di tahun 2023 (BOK langsung di salurkan ke masing - masing Puskesmas tanpa melalui RKUD, sehingga diperlukan adaptasi penatausahaan ulang).
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	dokumen	1	1	100	48.000.000	47.042.500	98,01	
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	Dokumen	56	56	100	1.246.358.000	524.263.621	42,06	1. Anggaran dana khusus BOK Puskesmas baru bisa direalisasikan pada TW II (Bulan Mei), karena harus menunggu juknis perlu menyesuaikan menu dengan juknis pada penjabaran anggaran (di lakukan di bulan Juni). 2. Sistem Penatausahaan Keuangan pada BOK Puskesmas mengalami perubahan di tahun 2023 (BOK langsung di salurkan ke masing - masing Puskesmas tanpa melalui RKUD, sehingga diperlukan adaptasi penatausahaan ulang).
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	dokumen	1	1	100	42.399.000	42.179.000	99,48	
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	1	1	100	370.000.000,00	329.370.334,00	89,02	
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan	Laporan	35	0	0	5.400.000	0	0,00	Semua kasus KIPI tetap terpantau, akan tetapi tidak ada kasus KIPI



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	KETERANGAN
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)								serius, sehingga tidak memerlukan tindak lanjut
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	dokumen	1	2	200	5.000.000	5.000.000	100,00	
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	unit	1	1	100	50.000.000	45.600.000	91,20	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	530	530	100	21.925.000	5.475.000	24,97	1. Anggaran dana khusus BOK Puskesmas baru bisa direalisasikan pada TW II (Bulan Mei), karena harus menunggu juknis perlu menyesuaikan menu dengan juknis pada penjabaran anggaran (di lakukan di bulan Juni). 2. Sistem Penatausahaan Keuangan pada BOK Puskesmas mengalami perubahan di tahun 2023 (BOK langsung di salurkan ke masing - masing Puskesmas tanpa melalui RKUD, sehingga diperlukan adaptasi penatausahaan ulang).
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	orang	59	58	98,31	3.975.000	1.000.000	25,16	1. Anggaran dana khusus BOK Puskesmas baru bisa direalisasikan pada TW II (Bulan Mei), karena harus menunggu juknis perlu menyesuaikan menu dengan juknis pada penjabaran anggaran (di lakukan di bulan Juni). 2. Sistem Penatausahaan Keuangan pada BOK Puskesmas mengalami perubahan di tahun 2023 (BOK langsung di salurkan ke masing - masing Puskesmas tanpa melalui RKUD, sehingga diperlukan adaptasi penatausahaan ulang).



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	KETERANGAN
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Ijin Operasional Fasilitas Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang di diterbitkan sesuai ketentuan	%	100	100	100	2.974.960.000	2.768.741.403	93,07	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya Lainnya	Unit	10	10	100	5.000.000	2.875.000	57,50	Sisa anggaran merupakan belanja Fotocopy dan Perjalanan Dinas Luar Daerah, dikarenakan Untuk Perdin mengacu pada penyesuaian SBU terbaru.
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	18	18	100	2.969.960.000	2.765.866.403	93,13	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	persentase	80	100	125	1.439.616.067	888.183.611	61,70	
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Ijin Tenaga Kesehatan yang di terbitkan sesuai ketentuan	persentase	90	100	111,11	10.000.000	3.925.000	39,25	
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	dokumen	465	481	103,44	10.000.000	3.925.000	39,25	Sisa anggaran merupakan belanja Fotocopy dan Perjalanan Dinas Luar Daerah, dikarenakan Untuk Perdin mengacu pada penyesuaian SBU terbaru.
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dan Penempatan SDM Kesehatan sesuai standart	persentase	80	95	118,75	305.194.067	56.444.000	18,49	
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	1	1	100	5.000.000	4.700.000	94,00	
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	orang	352	12	3,41	259.300.000	30.950.000	11,94	Belum terbitnya ijin operasional pada RSUD Ar -Rozy sehingga tidak dapat memberikan insentif pada SDM Klinis & Non Klinis yang bekerja sama dg RSUD Ar Rozy.



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	KETERANGAN
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	7	7	100	40.894.067	20.794.000	50,85	Perdin luar kota terealisasi tidak maksimal dan honor narsum tidak dapat direalisasikan karena pelaksanaan kegiatan tidak dapat menyesuaikan jadwal Narasumber
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pelatihan fungsional sesuai kompetensinya	%	80	95	118,75	1.124.422.000	827.814.611	73,62	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	153	153	100	1.124.422.000	827.814.611	73,62	1. Jadwal pelaksanaan kegiatan telah penuh dan tidak dapat membuka kelas karena kurangnya kuota peserta pelatihan 2. Biaya kontribusi pelatihan yang bervariasi dan lebih besar dari estimasi awal, sehingga capaian kinerja rendah, dan belum ada mapping kebutuhan diklat pegawai
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Perijinan Sarana Kefarmasian, Toko Alkes, Optik, UMOT, Produksi serta Pengelolaan Makanan dan Minuman yang terlaksana sesuai standar	persentase	85	100	117,65	498.932.000	422.646.050	84,71	
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Rekomendasi Ijin Operasional Fasilitas Pelayanan kesehatan yang di terbitkan sesuai ketentuan	persentase	90	100	111,11	82.840.000	72.440.450	87,45	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	dokumen	50	50	100	14.110.000	14.032.950	99,45	
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan UMOT yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka	Unit	80	103	128,75	63.730.000	55.480.000	87,05	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	KETERANGAN
Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Penerbitan dan TL Penerbitan Izin Apk, Tk Obat, Tk Alkes , dan UMOT								
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	sarana	50	50	100	5.000.000	2.927.500	58,55	Sisa anggaran merupakan belanja Fotocopy dan Perjalanan Dinas Luar Daerah, dikarenakan Untuk Perdin mengacu pada penyesuaian SBU terbaru.
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase rekomendasi produksi pangan industri rumah tangga yang diterbitkan sesuai ketentuan	persentase	85	85	100	244.650.000	199.865.500	81,69	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	dokumen	1	1	100	244.650.000	199.865.500	81,69	
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase rekomendasi TPM dan DAM yang diterbitkan sesuai ketentuan	persentase	90	90	100	11.400.000	6.885.000	60,39	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	dokumen	1	1	100	11.400.000	6.885.000	60,39	Belanja Pengujian tidak diserap karena ada pengadaan reagen air melalui dana BOK
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk	Persentase Industri Rumah Tangga yang mendapatkan fasilitasi pembinaan dan pengawasan	persentase	85	95	111,76	160.042.000	143.455.100	89,64	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	KETERANGAN
Makanan Minuman Industri Rumah Tangga									
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	unit	6	6	100	160.042.000	143.455.100	89,64	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Puri di Kota Probolinggo	persentase	65	75,8	116,62	4.468.897.773	4.241.352.530	94,91	
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD dan Ormas yang menerapkan kebijakan Germas sesuai ketentuan	persentase	85	95	111,76	131.906.473	113.820.500	86,29	
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	dokumen	3	3	100	131.906.473	113.820.500	86,29	
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan GERMAS yang dilaksanakan sesuai ketentuan	persentase	80	95	118,75	86.200.000	85.511.000	99,20	
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	dokumen	72	72	100	86.200.000	85.511.000	99,20	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang aktif	persentase	65	100	153,85	4.250.791.300	4.042.021.030	95,09	
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	30	30	100	4.250.791.300	4.042.021.030	95,09	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase ketersediaan data mikro keluarga yang sesuai ketentuan	%	100	100	100	123.300.000	105.832.804	85,83	
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam	Persentase pendataan keluarga yang dilaksanakan	%	90	90	100	1.000.000	987.500	98,75	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	KETERANGAN
rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk									
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100	1.000.000	987.500	98,75	
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga) yang dilaporkan	%	90	100	111,11	122.300.000	104.845.304	85,73	
Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dokumen	29	29	100	600.000	600.000	100,00	
Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	Unit	7	7	100	8.500.000	8.487.500	99,85	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	1	1	100	64.200.000	55.220.000	86,01	
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	laporan	1	1	100	17.400.000	17.400.000	100,00	
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	50	58	116	30.600.000	22.150.304	72,39	Anggaran dana khusus BOKB baru bisa direalisasikan pada TW II (Bulan April), karena harus menunggu juknis perlu menyesuaikan menu dengan juknis pada penjabaran anggaran.
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	Laporan	5	5	100	1.000.000	987.500	98,75	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kelompok pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) yang aktif melakukan kegiatan sesuai ketentuan	%	85	85	100	2.777.196.900	2.406.206.450	86,64	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	KETERANGAN
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase KIE KKBPK yang dilaksanakan bagi kader PPKBD dan sub PPKBD	%	85	85	100	705.450.100	556.251.500	78,85	
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders da	organisasi	54	54	100	120.000.100	77.965.000	64,97	Anggaran dana khusus BOKB baru bisa direalisasikan pada TW II (Bulan April), karena harus menunggu juknis perlu menyesuaikan menu dengan juknis pada penjabaran anggaran.
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	1	1	100	6.000.000,00	5.850.000,00	97,50	
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	1	1	100	150.000.000	129.407.000	86,27	
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakord	Dokumen	4	4	100	65.000.000	64.760.000	99,63	
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	1	1	100	284.450.000	225.369.500	79,23	Anggaran dana khusus BOKB baru bisa direalisasikan pada TW II (Bulan April), karena harus menunggu juknis perlu menyesuaikan menu dengan juknis pada penjabaran anggaran.



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	KETERANGAN
Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	2	2	100	80.000.000	52.900.000	66,13	Anggaran dana khusus BOKB baru bisa direalisasikan pada TW II (Bulan April), karena harus menunggu juknis perlu menyesuaikan menu dengan juknis pada penjabaran anggaran.
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase penyuluhan, pergerakan pelayanan dan pengembangan program KKBPK oleh PKB/PLKB bagi masyarakat	%	85	85	100	508.525.000	460.808.250	90,62	
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	1	1	100	30.000.000	27.000.000	90,00	
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	267	267	100	478.525.000	433.808.250	90,66	
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan KB yang dilaksanakan sesuai standar	%	85	120	141,18	1.445.721.800,00	1.302.506.700,00	90,09	
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	1	100	40.500.000	26.309.531,00	64,96	Anggaran dana khusus BOKB baru bisa direalisasikan pada TW II (Bulan April), karena harus menunggu juknis perlu menyesuaikan menu dengan juknis pada penjabaran anggaran.
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang	1027	756	73,61	666.652.900	563.742.765	84,56	
Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dokumen	46	46	100	21.864.000	21.366.870	97,73	
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Unit	5	5	100	604.988.000	585.674.534	96,81	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	KETERANGAN
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	28	44	157,14	111.716.900	105.413.000	94,36	
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase pelaksanaan kegiatan pembinaan kesertaan ber KB bagi organisasi kemasyarakatan	%	85	85	100	117.500.000	86.640.000	73,74	
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	1	1	100	15.440.000	14.550.000	94,24	
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah pengelolaan program KKBPK di Kampung KB yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	100	102.060.000	72.090.000	70,63	Anggaran dana khusus BOKB baru bisa direalisasikan pada TW II (Bulan April), karena harus menunggu juknis perlu menyesuaikan menu dengan juknis pada penjabaran anggaran.
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	%	85	100	117,65	2.108.480.000	1.875.805.070	88,96	
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS) yang mendapatkan fasilitasi pembinaan dan pendampingan	%	100	100	100	2.067.000.000	1.845.690.000	89,29	
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	30	30	100	360.000.000	352.440.000	97,90	
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	145	145	100	13.100.000	9.270.000	70,76	Karena adanya efisiensi penawaran melalui E-Katalog



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	KETERANGAN
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	552	552	100	1.163.500.000,00	953.580.000,00	81,96	
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelompok	340	340	100	530.400.000,00	530.400.000,00	100,00	
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan fasilitasi pembinaan / pendampingan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	%	85	100	117,65	41.480.000,00	30.115.070,00	72,60	
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberday	Organisasi	19	19	100	41.480.000	30.115.070	72,60	Karena adanya efisiensi penawaran melalui E-Katalog

Sumber : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, 17 Januari 2024

3. Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD) (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Keterangan
PENDAPATAN						1.588.181.154,00	1.368.391.247,00	86,16	
PENDAPATAN ASLI DAERAH						1.588.181.154,00	1.368.391.247,00	86,16	
JUMLAH PENDAPATAN						1.588.181.154,00	1.368.391.247,00	86,16	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD) (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Keterangan
BELANJA						114.088.930.824,00	100.578.894.428,00	88,16	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH									
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%	100	100	100%	132.226.000,00	90.520.240,00	68,46	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100%	126.476.000,00	85.770.240,00	67,82	Belanja Honorarium Tenaga Informasi dan Teknologi yang direncanakan untuk diisi, tidak terbayarkan karena jabatan kosong, selain itu adanya upaya untuk efisiensi belanja kegiatan Lembur Non ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	100%	5.750.000,00	4.750.000,00	82,61	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	%	100	100	100%	9.450.162.057,00	9.063.669.046,00	95,91	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	67	67	100%	8.721.246.057,00	8.391.211.596,00	96,22	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	100%	728.916.000,00	672.457.450,00	92,25	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Sesuai Ketentuan	%	100	100	100%	7.500.000,00	5.550.000,00	74	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	100%	7.500.000,00	5.550.000,00	74	Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan efisiensi Lembur Non ASN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian sesuai Ketentuan	%	100	100	100%	5.000.000,00	-	0	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	2	2	100%	5.000.000,00	-	0	Kegiatan Bimtek, Pendidikan dan pelatihan pegawai yang diikuti tidak memerlukan biaya kontribusi
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100%	1.816.463.850,00	1.529.457.676,00	84,2	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD) (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Keterangan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	3	50%	88.674.750,00	42.765.500,00	48,23	Efisiensi dalam Belanja Alat /Komponen Instalasi Listrik untuk Bangunan Gedung Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100%	155.280.000,00	149.185.000,00	96,07	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	6	100%	21.793.900,00	19.752.500,00	90,63	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100%	279.545.800,00	267.646.122,00	95,74	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	6	100%	166.061.500,00	144.792.850,00	87,19	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100%	3.900.000,00	1.650.000,00	42,31	Belanja Langganan Surat Kabar hanya 1 Media
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	6	6	100%	115.147.900,00	114.913.100,00	99,8	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100%	174.000.000,00	155.945.000,00	89,62	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100%	619.325.000,00	460.491.982,00	74,35	Berkurangnya volume undangan koordinasi ke provinsi dan pusat, dan kegiatan di luar kota
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	1	1	100%	81.700.000,00	75.710.000,00	92,67	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1	1	100%	111.035.000,00	96.605.622,00	87	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	%	100	100	100%	655.962.972,00	585.584.313,00	89,27	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100%	127.006.000,00	104.146.320,00	82	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100%	390.956.972,00	358.630.843,00	91,73	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100%	38.000.000,00	22.927.150,00	60,33	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD) (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Keterangan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100%	100.000.000,00	99.880.000,00	99,88	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD yang Terpenuhi	%	100	100	100%	845.808.740,00	793.119.163,00	93,77	
Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100%	23.453.300,00	14.269.500,00	60,84	
Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	23	23	100%	313.736.940,00	286.225.300,00	91,23	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2	2	100%	5.000.000,00	4.900.000,00	98	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	83	83	100%	233.121.300,00	232.034.700,00	99,53	
Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100%	165.497.200,00	155.898.663,00	94,2	
Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100%	105.000.000,00	99.791.000,00	95,04	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik	%	84	84	100%	1.630.144.000,00	1.606.116.715,00	98,53	
Pengelolaan SDA dan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi dan Drainase yang Terbangun dan Terpelihara dengan Baik	km	1	1	100%	40.714.000,00	36.384.080,00	89,37	
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	130	130	100%	40.714.000,00	36.384.080,00	89,37	
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang	Panjang Jaringan Irigasi dan Drainase yang Terbangun dan Terpelihara dengan Baik	Km	1	1	100%	1.589.430.000,00	1.569.732.635,00	98,76	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD) (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Keterangan
Luasnya dibawah 1000 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Km	0,8	0,8	100%	628.864.000,00	617.115.490,00	98,13	
Operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	0,75	0,75	100%	893.776.000,00	889.727.145,00	99,55	
Pengelolaan dan Pengawasan A Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	DI	5	5	100%	66.790.000,00	62.890.000,00	94,16	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Capaian Jaringan SPAM Perpipaan	%	40	40	100%	1.729.515.000,00	1.722.831.760,00	99,61	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sambungan Rumah Dalam Kondisi Baik	%	40	40	100%	1.729.515.000,00	1.722.831.760,00	99,61	
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Liter/detik	130	130	100%	358.000.000,00	357.238.100,00	99,79	
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR	377	377	100%	1.227.743.000,00	1.222.643.000,00	99,58	
Operasi dan pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Unit	110	110	100%	143.772.000,00	142.950.660,00	99,43	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan Akses Layanan Air Limbah Domestik	%	98,29	98,52	100%	1.269.272.000,00	1.240.015.160,00	97,69	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana limbah domestik yang Terbangun dan Terpelihara	Unit	13	12	92%	1.269.272.000,00	1.240.015.160,00	97,69	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD) (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Keterangan
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	Rumah Tangga	1	1	100%	210.272.000,00	183.996.160,00	87,5	
Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	1	1	100%	309.000.000,00	306.219.000,00	99,1	
Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	1	1	100%	750.000.000,00	749.800.000,00	99,97	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Perkotaan Dalam Kondisi Mantap	%	81	78	96%	6.441.625.300,00	5.686.414.121,00	88,28	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Pematusan/Drainase Jalan Kota yang Terbangun dan Terpelihara dengan Baik	Km	2	2	100%	6.441.625.300,00	5.686.414.121,00	88,28	
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	meter	100	90	90%	5.310.050.000,00	4.581.148.573,00	86,27	
Operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	meter	800	800	100%	1.131.575.300,00	1.105.265.548,00	97,67	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan dalam Kondisi Mantap	%	81	79	98%	10.456.940.975,00	7.693.363.409,00	73,57	
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan yang Terbangun dan Terpelihara dengan Baik	meter	11.000	9.000	82%	10.456.940.975,00	7.693.363.409,00	73,57	
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	sistem jaringan	15	15	100%	1.020.000.000,00	918.950.057,00	90,09	
Pemanfaatan dan pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	sistem jaringan	40	30	75%	9.436.940.975,00	6.774.413.352,00	71,79	Kondisi dan kebutuhan saat pelaksanaan di lapangan mengalami penyesuaian, sehingga terjadi pengurangan volume pekerjaan dan item pekerjaan yang tidak perlu dilaksanakan, menyesuaikan



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD) (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Keterangan
									dengan kondisi di lokasi (seperti kanstin yang tidak perlu dibongkar dsb)
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Fasilitas Umum yang Sesuai Standar Konstruksi	%	89	87	98%	53.570.718.966,00	48.311.129.473,00	90,18	
Penyelenggaraan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Gedung	Jumlah bangunan gedung pemerintah dan Fasilitas Umum yang Terbangun dan Terpelihara dengan Baik	Bangunan	9	8	89%	53.570.718.966,00	48.311.129.473,00	90,18	
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Gedung (TABG), Pendataan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	dokumen	78	78	100%	84.999.800,00	78.250.000,00	92,06	
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	7	6	86%	49.321.777.166,00	44.252.756.486,00	89,72	
Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	Bangunan	9	9	100%	4.163.942.000,00	3.980.122.987,00	95,59	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase IMB yang terselesaikan Tepat Waktu	%	100	100	100%	658.480.000,00	654.211.373,00	99,35	
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase IMB yang terselesaikan Tepat Waktu	%	100	100	100%	658.480.000,00	654.211.373,00	99,35	
Penataan bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	kawasan	3	3	100%	658.480.000,00	654.211.373,00	99,35	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	%	81	80	99%	22.733.519.433,00	19.821.401.185,00	87,19	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD) (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Keterangan
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan yang Terbangun dan Terpelihara dengan Baik	Km	20,16	18	89%	22.733.519.433,00	19.821.401.185,00	87,19	
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	meter	1.413	565	40%	10.961.244.000,00	8.746.703.693,00	79,8	Pembangunan Jalan Tembus Maramis yang belum terserap seluruhnya dan masih membutuhkan perpanjangan waktu/addendum kontrak
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	20,16	18	89%	9.215.190.000,00	8.630.864.945,00	93,66	
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Km	2	2	100%	2.257.085.433,00	2.245.947.220,00	99,51	
Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	meter	100	100	100%	200.000.000,00	98.361.540,00	49,18	Hanya Survey kondisi jalan yang terlaksana sedangkan perencanaan pembangunan jembatan yang belum terlaksana
Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	meter	100	100	100%	100.000.000,00	99.523.787,00	99,52	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	%	84	84	100%	223.864.000,00	178.674.080,00	79,81	
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana tata ruang yang Disusun sesuai Ketentuan	Dokumen	1	1	100%	151.864.000,00	147.374.080,00	97,04	
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100%	151.864.000,00	147.374.080,00	97,04	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Permasalahan Tata Ruang yang difasilitasi melalui TKPRD	%	84	84	100%	72.000.000,00	31.300.000,00	43,47	
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	dokumen	1	1	100%	72.000.000,00	31.300.000,00	43,47	Belanja Honorarium Tenaga Ahli Forum Penataan Ruang (FPR) yang tidak terserap dikarenakan berkurangnya permohonan/pengajuan perijinan pemanfaatan ruang yang membutuhkan pembahasan dengan FPR. Honorarium hanya



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD) (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Keterangan
									diberikan pada saat terdapat kegiatan Rapat FPR
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						1.055.350.000,00	511.269.714,00	48,45	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Ijin Site Plan yang Terselesaikan Tepat Waktu	%	100	100	100%	210.000.000,00	2.800.000,00	1,33	
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Fasilitas Rehabilitasi atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	%	100	0	0%	210.000.000,00	2.800.000,00	1,33	Tidak adanya Rumah Korban Bencana yang direhabilitasi
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	unit rumah	5	0	0%	210.000.000,00	2.800.000,00	1,33	
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Fasilitas Rumah Susun dalam Kondisi Baik	%	87	87	100%	906.357.031,00	898.559.340,00	99,14	
Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan	12	12	100%	906.357.031,00	898.559.340,00	99,14	
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan PERUMAHAN	Persentase Ijin Site Plan yang sesuai Ketentuan	%	100	100	100%	431.250.000,00	123.485.000,00	28,63	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	35	30	86%	431.250.000,00	123.485.000,00	28,63	Belanja Jasa Appraisal untuk Rusunawa Bestari yang belum dapat terselenggara dikarenakan proses hukum yang masih berlangsung. Selain itu penyusunan Naskah Akademis Revisi Raperda Perumahan Kawasan Permukiman tidak perlu dilaksanakan karena substansi perubahan Perda tidak lebih 50%
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung oleh PSU	%	81	79	98%	845.350.000,00	508.469.714,00	60,15	
URUSAN Penyelenggaraan PSU PERUMAHAN	Persentase PSU Perumahan yang telah diserahkan pada Pemerintah Kota	%	81	79	98%	845.350.000,00	508.469.714,00	60,15	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD) (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Keterangan
Penyediaan Prasarana, Sarana , dan Utilitas Umum di PERUMAHAN untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	15	11	73%	845.350.000,00	508.469.714,00	60,15	Pembiayaan untuk persertifikatan pekerjaan padat karya dan Dana Kelurahan lebih rendah daripada biaya sertifikasi lahan Fasum Perumahan. Selain itu adanya permohonan warga berupa dinding pembatas perumahan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan anggaran yang tersedia adalah untuk drainase lingkungan perumahan.
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN						68.770.500,00	63.522.660,00	92,37	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Permasalahan Pertanahan yang Terselesaikan	%	100	100	100%	68.770.500,00	63.522.660,00	92,37	
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Permasalahan Pertanahan yang difasilitasi	permasalahan	2	2	100%	68.770.500,00	63.522.660,00	92,37	
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	permasalahan	2	2	100%	68.770.500,00	63.522.660,00	92,37	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 17 Januari 2024

4. Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH						13.190.000	15.737.000	119,31%	
JUMLAH PENDAPATAN						13.190.000	15.737.000	119,31%	
BELANJA DAERAH						17.313.204.092,00	15.991.642.355,00	92,37%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			90	100	111,11	8.633.095.659,00	8.319.087.926,00	96,36%	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pencapaian kinerja kegiatan perangkat daerah	%	90	100	111,11	59.787.900,00	58.520.150,00	97,88%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja dan realisasi kinerja	laporan	2	2	100,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan realisasi kinerja	laporan	4	4	100,00	53.787.900,00	52.520.150,00	97,64%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi keuangan	%	100	100	100,00	7.104.645.921,00	6.845.519.733,00	96,35%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Realisasi Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu	%	100	100	100,00	6.530.400.721,00	6.274.701.551,00	96,08%	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP	Dokumen	221	221	100,00	124.482.000,00	122.862.000,00	98,70%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	laporan	15	15	100,00	449.763.200,00	447.956.182,00	99,60%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi kepegawaian	%	80	80	100,00	24.577.500,00	12.352.100,00	50,26%	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase capaian administrasi kepegawaian	%	80	60	75,00	24.577.500,00	12.352.100,00	50,26%	Adanya kelebihan anggaran gaji sopir yang terdampak mutasi
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi umum	%	85	100	117,65	568.370.250,00	555.072.898,00	97,66%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor	paket	12	12	100,00	384.058.500,00	371.150.050,00	96,64%	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah realisasi paket peralatan rumah tangga yang diadakan	paket	10	10	100,00	22.613.300,00	22.466.300,00	99,35%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen barang cetakan dan penggandaan yang terealisasi	dokumen	12	12	100,00	13.090.000,00	13.090.000,00	100,00%	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah laporan realisasi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	laporan	12	12	100,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00%	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan kunjungan Tamu	laporan	12	12	100,00	9.000.000,00	8.990.000,00	99,89%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terpenuhi	dokumen	65	65	100,00	136.008.450,00	135.776.548,00	99,83%	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	80	100	125,00	183.259.658,00	168.983.203,00	92,21%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	laporan	12	12	100,00	114.259.658,00	100.067.603,00	87,58%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi	laporan	12	12	100,00	69.000.000,00	68.915.600,00	99,88%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	80	100	125,00	692.454.430,00	678.639.842,00	98,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam kondisi layak	unit	40	40	100,00	514.739.430,00	506.916.592,00	98,48%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi baik	unit	50	50	100,00	84.140.000,00	83.993.250,00	99,83%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dalam	unit	1	1	100,00	93.575.000,00	87.730.000,00	93,75%	
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan trantibum yang terselesaikan	%	100	100	100,00	8.040.862.783,00	7.057.454.179,00	87,77%	
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan trantibum yang terselesaikan	%	100	100	100,00	4.248.376.540,00	4.197.923.350,00	98,81%	
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah kegiatan pengamanan trantibum	kegiatan	1094	1124	102,74	482.600.000,00	463.015.000,00	95,94%	
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah penertiban non yustisi (unjuk rasa, Operasi PKL, Minuman beralkohol)	kegiatan	206	203	100	3.478.429.850,00	3.457.503.700,00	99,40%	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengamanan terpadu anggota linmas sekota	kegiatan	12	12	100,00	36.426.000,00	35.430.960,00	97,27%	
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Linmas	dokumen	12	12	100,00	85.000.000,00	76.250.000,00	89,71%	
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah personil satpol pp yang mendapatkan peningkatan kapasitas SDM	anggota/ personil	221	221	100,00	149.590.690,00	149.493.690,00	99,94%	
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan kerjasama dengan jajaran samping dan OPD terkait trantibum	kegiatan	12	12	100,00	16.330.000,00	16.230.000,00	99,39%	
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penanganan perda dan perkada yang terselesaikan	%	80	80	100,00	3.792.486.243,00	2.859.530.829,00	75,40%	
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi perda dan perkada	laporan	12	12	100,00	1.946.717.843,00	1.615.093.560,00	82,96%	
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	laporan	12	11	91,67	1.845.768.400,00	1.244.437.269,00	67,42%	Belum optimalnya kegiatan evaluasi pemberantasan BKC
Pencegahan, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase penanganan kebakaran yang ditangani sesuai responsife time	%	60	100	166,67	639.245.650,00	615.100.250,00	96,22%	
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100,00	528.545.650,00	504.450.250,00	95,44%	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
pengecahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen NSPM kebakaran	dokumen	5	5	100,00	496.570.650,00	472.550.250,00	95,16%	
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan kejadian kebakaran	kejadian	60	105	175,00	19.725.000,00	19.675.000,00	99,75%	
Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah korban kebakaran dan non kebakaran	kejadian	102	177	173,53	12.250.000,00	12.225.000,00	99,80%	
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	109	109	100,00	10.000.000,00	9.950.000,00	99,50%	
Pendataan Pra Proteksi Kebakaran	Jumlah sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	109	109	100,00	10.000.000,00	9.950.000,00	99,50%	
Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran	warga	300	300	100,00	100.700.000,00	100.700.000,00	100,00%	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran	warga	300	300	100,00	100.700.000,00	100.700.000,00	100,00%	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 17 Januari 2024

5. Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
PENDAPATAN						0	0		
PENDAPATAN ASLI DAERAH									
BELANJA DAERAH						4.115.446.059	3.879.453.223	94,27	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	80	80	100	2.891.632.259	2.715.900.663	93,92	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%	80	80	100	4.139.200	4.000.000	96,94	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100	2.069.600	1.964.000	94,90	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100	2.069.600	2.036.000	98,38	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	%	80	80	100	2.435.176.491	2.267.854.344	93,13	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	18	18	100	2.227.276.141	2.063.232.744	92,63	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100	204.266.250	201.039.000	98,42	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1	100	3.634.100	3.582.600	98,58	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	%	80	80	100	214.494.920	211.205.207	98,47	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100	43.173.400	43.024.890	99,66	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12	100	6.553.320	6.525.300	99,57	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100	14.413.200	12.943.500	89,8	dikarenakan ada salah satu koran lokal yang berhenti pengirimannya
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100	120.325.000	120.164.993	99,87	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	12	100	30.030.000	28.546.524	95,06	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	80	80	100	6.000.000	5.900.000	98,33	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100	6.000.000	5.900.000	98,33	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	%	80	80	100	79.453.148	77.866.685	98,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100	79.453.148	77.866.685	98,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD yang terpenuhi	%	80	80	100	152.368.500	149.074.427	97,84	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100	27.570.500	27.278.214	98,94	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	10	100	93.590.500	90.702.213	96,91	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10	100	31.207.500	31.094.000	99,64	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Penanggulangan Bencana	%	90	90	100	1.223.813.800	1.163.552.560	95,08	
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	100	100	100	91.200.000	85.410.000	93,65	
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	60	60	100	91.200.000	85.410.000	93,65	
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100	100	100	451.069.000	427.175.060	94,7	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APD)	REALISASI	%	Keterangan
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kebencanaan	Laporan	12	12	100	54.100.000	47.350.000	87,52	Belum cermat dan teliti dalam perencanaan penganggaran
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	12	12	100	125.000.000	114.505.000	91,6	
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	3	3	100	151.969.000	151.220.060	99,51	
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	30	30	100	120.000.000	114.100.000	95,08	
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase kejadian Bencana Yang Tertangani	%	100	100	100	127.963.000	118.963.000	92,97	
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	1	1	100	127.963.000	118.963.000	92,97	
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana tepat waktu	%	100	100	100	553.581.800	532.004.500	96,1	
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	1	1	100	23.000.000	20.034.000	87,1	Adanya pengurangan jumlah peserta yang dihadirkan dan Penyerapan anggaran untuk rekening narasumber tidak maksimal, karena diwakilkan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	12	12	100	180.581.800	162.420.500	89,94	Tidak terlaksananya rapat koordinasi BPBD Bersama dengan FPRB Kota Probolinggo
Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana	Dokumen	6	6	100	350.000.000	349.550.000	99,87	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)								

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 17 Januari 2024

6. Perangkat Daerah : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
PENDAPATAN ASLI DAERAH						0	0		
JUMLAH PENDAPATAN									
BELANJA DAERAH						15.847.399.455	13.279.691.803	83,80%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terselesaikan	%	100	100	100	6.178.399.396	5.723.659.308	92,64%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%	100	100	100	54.435.590	54.245.880	99,65%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100	4.365.000	4.364.800	100,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	100	50.070.590	49.881.080	99,62%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	5.172.743.886	4.748.818.575	91,80%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bln	42	42	100	5.009.870.706	4.587.713.895	91,57%	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	700	1.103	158	93.492.000	92.592.000	99,04%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	4	3	75	69.381.180	68.512.680	98,75%	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	1.129.800	1.109.800	98,23%	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100	1.129.800	1.109.800	98,23%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	213.150.010	212.819.635	99,85%	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	12	100	213.150.010	212.819.635	99,85%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	270.729.910	260.831.012	96,34%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100	29.847.250	29.610.100	99,21%	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4	100	9.031.800	9.031.500	100,00%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	100	8.215.000	8.215.000	100,00%	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100	1.998.000	1.950.000	97,60%	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	6	6	100	10.000.000	10.000.000	100,00%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	24	100	163.527.860	159.382.200	97,46%	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	12	100	48.110.000	42.642.212	88,63%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang terpenuhi	%	100	100	100	41.519.000	40.060.000	96,49%	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	7	100	41.519.000	40.060.000	96,49%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	%	100	100	100	142.464.030	137.567.941	96,56%	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4	100	2.854.030	2.851.000	99,89%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100	103.280.000	100.886.941	97,68%	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100	24.330.000	21.830.000	89,72%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100	12.000.000	12.000.000	100,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	282.227.170	268.206.465	95,03%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100	33.789.200	32.066.064	94,90%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	29	29	100	127.794.970	116.310.801	91,01%	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4	2	50	6.900.000	6.900.000	100,00%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	82	82	100	48.725.000	48.575.000	99,69%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4	100	65.018.000	64.354.600	98,98%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial	persen	80	80	100	77.716.590	76.800.180	98,82%	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	persen	80	80	100	77.716.590	76.800.180	98,82%	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota	Orang	29	29	100	7.921.000	7.715.100	97,40%	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	Orang	5	5	100	64.895.590	64.730.080	99,74%	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	Lembaga	13	13	100	3.400.000	2.855.000	83,97%	
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	5	5	100	1.500.000	1.500.000	100,00%	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	persen	85	85	100	935.125.180	885.422.865	94,68%	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	persen	80	80	100	823.275.590	776.568.200	94,33%	
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	146	140	96	763.033.590	717.253.700	94,00%	
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	28	112	60.242.000	59.314.500	98,46%	
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	persen	80	80	100	111.849.590	108.854.665	97,32%	
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan	Orang	80	80	100	21.800.000	21.477.800	98,52%	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
	Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota								
Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	100	100	90.049.590	87.376.865	97,03%	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	persen	30	30	100	7.258.495.319	5.322.704.210	73,33%	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang sudah dilakukan verval	persen	50	50	100	7.258.495.319	5.322.704.210	73,33%	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota yang di data	Orang	800	2669	334	322.244.780	321.790.360	99,86%	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	2330	1691	73	6.860.469.049	4.925.303.870	71,79%	Penerima Bansos DBHCHT memiliki data ganda dengan penerima Bansos APBN
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	117	117	100	75.781.490	75.609.980	99,77%	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Penanganan Bencana	persen	80	80	100	201.900.000	191.355.250	94,78%	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	persen	80	80	100	201.900.000	191.355.250	94,78%	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	225	134	60	201.900.000	191.355.250	94,78%	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase TMP yang dikelola	persen	85	81	95	97.077.090	95.378.480	98,25%	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase sarpras TMP dalam kondisi baik	persen	90	90	100	97.077.090	95.378.480	98,25%	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100	15.000.000	14.934.000	99,56%	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	70	70	100	13.096.000	11.618.000	88,71%	
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan	36	36	100	68.981.090	68.826.480	99,78%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presentase Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	persen	51	51	100	331.107.290	317.397.280	95,86%	
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas	persen	55	52	95	45.620.000	42.168.500	92,43%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	15	15	100	29.157.500	25.857.500	88,68%	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	60	60	100	16.462.500	16.311.000	99,08%	
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan peran Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan	persen	6	6	100	285.487.290	275.228.780	96,41%	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	100	17.890.000	17.840.000	99,72%	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	23	23	100	267.597.290	257.388.780	96,19%	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan perempuan	persen	100	100	100	192.165.000	127.295.900	90,53%	
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota	Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani dan diselesaikan	persen	100	100	100	51.500.000	47.550.000	92,33%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	100	51.500.000	47.550.000	92,33%	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Rujukan Lanjutan	persen	100	100	100	121.515.000	60.700.000	49,95%	Terkendala ketentuan pada Juknis DAK Non Fisik
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	24	24	100	24.000.000	24.000.000	100,00%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	40	26	65	97.515.000	36.700.000	37,64%	Terkendala ketentuan pada Juknis DAK Non Fisik



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan serta jejaringnya dan persentase kasus perempuan yang mendapat pengawasan dan perlindungan	persen	100	100	100	19.150.000	19.045.900	99,46%	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	41	41	100	19.150.000	19.045.900	99,46%	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data gender dan anak yang terpilah	persen	30	30	100	250.000	250.000	100,00%	
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase data gender dan anak yang terkumpul	persen	30	30	100	250.000	250.000	100,00%	
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100	250.000	250.000	100,00%	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pencapaian indikator Kota Layak Anak	persen	80	80	100	263.533.590	256.856.280	97,47%	
Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota	Persentase kelurahan yang memiliki Kampung Ramah Anak	persen	70	70	100	95.636.000	91.982.450	96,18%	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	27	32	119	18.850.000	17.850.000	94,69%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	35	41	117	76.786.000	74.132.450	96,54%	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase kelurahan, kecamatan layak anak	persen	80	80	100	167.897.590	164.873.830	98,20%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	29	29	100	27.500.000	27.400.000	99,64%	
Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak-anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	3	3	100	87.012.000	85.694.750	98,49%	
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	34	34	100	53.385.590	51.779.080	96,99%	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan anak	persen	100	100	100	310.230.000	282.572.050	90,64%	
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapat pengawasan dan perlindungan	persen	100	100	100	58.200.000	55.295.000	95,01%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	4	100	58.200.000	55.295.000	95,01%	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus	persen	100	100	100	177.434.000	154.629.500	87,15%	Terkendala ketentuan pada Juknis DAK Non Fisik
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	40	43	108	156.989.000	134.394.500	85,61%	Terkendala ketentuan pada Juknis DAK Non Fisik



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Pengembangan Komunikasi, informasi dan Edukasi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5	5	100	20.445.000	20.235.000	98,97%	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapat pengawasan dan perlindungan	persen	100	100	100	74.596.000	72.647.550	95,55%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	3	3	100	74.596.000	71.280.000	95,55%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	persen	90	90	100	1.400.000	1.367.550	97,68%	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anggota Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang berpartisipasi dalam mendapatkan Upaya - upaya Pemberdayaan Masyarakat	persen	90	90	100	1.400.000	1.367.550	97,68%	
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	1	100	1.400.000	1.367.550	97,68%	

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, 17 Januari 2024



7. Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
PENDAPATAN	-	-	-	-		-	-	-	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-	-		-	-	-	
JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-		-	-	-	
BELANJA DAERAH						7.480.026.018,00	6.945.342.278,00	92,85	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Persentase	100	102	102	6.719.303.288	6.235.003.598	92,79	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Persentase	100	100	100	57.443.590	57.439.080	99,99	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	10	100	44.177.090	44.172.580	99,99	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	10	100	13.266.500	13.266.500	100	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase	100	147	147	4.523.209.658	4.307.115.508	95,22	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	476	462	97	4.384.371.568	4.169.844.028	95,11	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	183	537	293	130.883.090	129.516.480	98,96	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	25	25	100	7.955.000	7.755.000	97,49	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase	100	100	100	4.500.000	4.500.000	100	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4	100	4.500.000	4.500.000	100	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase	100	100	100	42.050.000	39.174.000	93,16	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	2	100	32.050.000	29.174.000	91,03	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	2	100	10.000.000	10.000.000	100	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase	100	100	100	355.155.900	334.044.246	94,06	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100	64.435.500	63.613.700	98,72	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	6	100	10.077.400	10.055.400	99,78	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	40	40	100	4.680.000	4.680.000	100	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	7	7	100	8.000.000	7.999.300	99,99	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	50	100	168.603.000	165.397.849	98,10	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	100	100	100	9.787.500	9.782.500	99,95	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	12	100	89.572.500	72.515.497	80,96	karena pada pelaksanaannya (anggaran internet) dirubah rincian paket internet (jenis) sehingga bisa dapat mengefisiensi anggaran
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Persentase	100	90,9	90,9	109.463.200	99.750.000	91,13	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	11	10	90,9	109.463.200	99.750.000	91,13	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	Persentase	100	100	100	1.056.038.890	886.832.051	83,98	capaian anggaran 71,57% karena pengajuan nota dinas kepada Walikota Probolinggo salah satunya adalah pengajuan tambah daya listrik untuk MPP dan pasang baru listrik untuk gedung baru DPMPTSP tidak bisa dialihkan ke anggaran yang lain selain itu belanja rutin listrik dan air tidak terserap sesuai dengan proker dikarenakan tertundanya perpindahan MPP sehingga realisasi anggaran rutin (listrik, air) masih dibebankan ke DISPOBPAPAR karena MPP masih menempati GOR A Yani
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100	537.449.250	384.666.331	71,57	capaian anggaran 71,57% karena pengajuan nota dinas kepada Walikota Probolinggo salah satunya adalah pengajuan tambah daya listrik untuk MPP dan pasang baru listrik untuk gedung baru DPMPTSP tidak bisa dialihkan ke anggaran yang lain selain itu belanja rutin listrik dan air tidak terserap sesuai dengan proker dikarenakan tertundanya perpindahan MPP sehingga realisasi anggaran rutin (listrik, air) masih dibebankan ke DISPOBPAPAR karena MPP masih menempati GOR A Yani
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	18	18	100	518.589.640	502.165.720	96,83	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	Persentase	100	78,8	78,8	571.442.050	506.148.713	88,57	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	16	16	100	93.509.550	89.130.060	95,32	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	68	68	100	122.482.500	119.592.528	97,64	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	2	66,7	355.450.000	297.426.125	83,68	Capaian kinerja 66% dan anggaran 83,68% karena anggaran taman tidak terealisasi disebabkan kesalahan pada kode rekening yang tertera pemeliharaan seharusnya belanja bibit hal ini berdasarkan hasil review inspektorat
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	Persentase	0,4	0,42	105	103.890.000	103.421.360	99,55	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kab/Kota	Persentase	100	100	100	103.890.000	103.421.360	99,55	
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100	103.890.000	103.421.360	99,55	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Promosi dan Peluang Investasi yang dipromosikan	Persentase	100	100	100	25.838.000	24.340.500	94,20	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Persentase	100	100	100	25.838.000	24.340.500	94,20	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100	25.838.000	24.340.500	94,20	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APD)	REALISASI	%	Keterangan
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ijin yang Terbit Tepat Waktu	Persentase	100	89,22	89,22	248.865.140	245.996.480	98,85	Capaian kinerja program pelayanan penanaman modal masih 89,22% dikarenakan terkendala dengan persetujuan bangunan gedung (PBG) yang merupakan salah satu persyaratan izin operasional pendidikan dan adanya klinik online yang diselenggarakan oleh BKPM sehingga mengurangi jumlah pemohon layanan konsultasi pada mal pelayanan publik
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase	100	89,22	89,22	248.865.140	245.996.480	98,85	Capaian kinerja kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan masih 89,22% dikarenakan terkendala dengan persetujuan bangunan gedung (PBG) yang merupakan salah satu persyaratan izin operasional pendidikan dan adanya klinik online yang diselenggarakan oleh BKPM sehingga mengurangi jumlah pemohon layanan konsultasi pada mal pelayanan publik
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	2700	2.255	83,52	157.180.860	156.172.620	99,36	dikarenakan izin perpanjangan operasional sekolah terkendala PBG
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	750	749	99,87	83.169.280	81.343.860	97,81	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	60	48	80	800.000	800.000	100	karena adanya klinik lkpm online oleh bkpm sehingga pelaku usaha tidak selalu melakukan konsultasi di MPP
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kegiatan Usaha	50	47	94	7.715.000	7.680.000	99,55	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Pengendalian Penanaman Modal	Persentase	100	95%	0,95	339.300.000	297.250.400	87,61	Capaian anggaran 87,61% dikarenakan pengendalian penanaman modal terkendala oleh SDM sehingga pelaksanaan pengendalian penanaman modal tidak optimal
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Penanaman Modal	Persentase	100	95%	0,95	339.300.000	297.250.400	87,61	Capaian anggaran 87,61% dikarenakan pengawasan penanaman modal terkendala oleh SDM sehingga pelaksanaan pengawasan penanaman modal tidak optimal
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	325	393	120,9	319.000.000	279.302.400	87,56	honorarium narasumber tidak terealisasi 100% karena menyesuaikan tema sosialisasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	50	35	70	20.300.000	17.948.000	88,41	kurangnya sumber daya manusia (jabatan pelaksana), pelaksanaan pengawasan rutin menyesuaikan waktu anggota tim OPD teknis lainnya,
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase	100	100	100	42.829.590	39.329.940	91,83	
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Perizinan dan Penanaman Modal yang Dipublikasikan	Persentase	100	100	100	42.829.590	39.329.940	91,83	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	78	78	100	42.829.590	39.329.940	91,83	

Sumber : Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja, 17 Januari 2024

8. Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD) (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Keterangan
PENDAPATAN						1.139.276.000,00	1.155.513.863,00	101,43	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						1.139.276.000,00	1.155.513.863,00	101,43	
Retribusi Daerah						661.776.000,00	672.661.000,00	101,64	
Lain - lain PAD yang sah						477.500.000,00	482.852.863,00	101,12	
BELANJA						22.170.558.245,00	20.332.162.261,00	91,71	
BELANJA OPERASI						22.104.608.245,00	20.269.312.261,00	91,70	
Belanja Pegawai						10.815.576.295,00	10.468.422.291,00	96,79	
Belanja Barang dan Jasa						10.871.478.350,00	9.390.341.170,00	86,38	
Belanja Bantuan Sosial						417.553.600,00	410.548.800,00	98,32	
BELANJA MODAL						65.950.000,00	62.850.000,00	95,30	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin						65.950.000,00	62.850.000,00	95,30	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						1.139.276.000,00	1.155.513.863,00	101,43	
Retribusi Daerah						661.776.000,00	672.661.000,00	101,64	
Retribusi Jasa Umum						661.776.000,00	672.661.000,00	101,64	
Retribusi Pelayanan Pasar						459.302.000,00	460.211.000,00	100,20	
Retribusi Pelataran						408.102.000,00	406.593.000,00	99,63	
Retribusi Los						51.200.000,00	53.618.000,00	104,72	
Retribusi Jasa Usaha						202.474.000,00	212.450.000,00	104,93	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD) (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Keterangan
Retribusi Pemakaian Kekayaan Darah						112.114.000,00	103.018.000,00	91,89	
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan						38.700.000,00	43.560.000,00	112,56	
Retribusi Penyewaan Tanah						43.780.000,00	40.000.000,00	91,37	
Retribusi Penyewaan Bangunan						29.634.000,00	19.458.000,00	65,66	
Retribusi Tempat Pelelangan						45.000.000,00	63.930.000,00	142,07	
Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan						45.000.000,00	63.930.000,00	142,07	
Retribusi Rumah Potong Hewan						45.360.000,00	45.502.000,00	100,31	
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan						45.360.000,00	45.502.000,00	100,31	
Lain - Lain PAD yang Sah						477.500.000,00	482.852.863,00	101,12	
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan						435.500.000,00	440.852.863,00	101,23	
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya						135.500.000,00	171.572.863,00	126,62	
Hasil Penjualan Hewan						15.000.000,00	15.500.000,00	103,33	
Hasil Penjualan Biota Perairan						100.500.000,00	136.052.863,00	135,38	
Hasil Penjualan Tanaman						20.000.000,00	20.020.000,00	100,10	
Hasil Penjualan Aset Lainnya						300.000.000,00	269.280.000,00	89,76	
Hasil Penjualan Aset Lainnya - Aset Lain - Lain						300.000.000,00	269.280.000,00	89,76	
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan						42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	
Hasil Sewa BMD						42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	
Hasil Sewa BMD						42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	
BELANJA DAERAH						22.170.558.245,00	20.332.162.261,00	91,71	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	95	93	97,89%	12.731.323.052,00	12.317.164.462,00	96,75	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%	95	92	96,84%	116.112.520,00	115.216.594,00	99,23	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD) (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Keterangan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	100,00%	22.474.050,00	21.897.910,00	97,44	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	100,00%	93.638.470,00	93.318.684,00	99,66	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	95	100	105,26%	11.022.473.325,00	10.672.129.599,00	96,82	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	88	83	94,32%	10.683.876.295,00	10.336.722.291,00	96,75	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	600	1102	183,67%	324.437.130,00	321.247.408,00	99,02	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	18	100,00%	14.159.900,00	14.159.900,00	100,00	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	95	95	100,00%	402.495.120,00	394.189.832,00	97,94	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	100,00%	125.520.500,00	117.298.840,00	93,45	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Laporan	2	8	400,00%	27.500.000,00	27.426.000,00	99,73	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100,00%	249.474.620,00	249.464.992,00	100,00	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	%	70	70	100,00%	34.600.000,00	34.600.000,00	100,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	8	200,00%	34.600.000,00	34.600.000,00	100,00	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD) (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Keterangan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	%	95	95	100,00%	798.148.470,00	773.165.011,00	96,87	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00%	335.959.600,00	314.905.731,00	93,73	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00%	462.188.870,00	458.259.280,00	99,15	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	%	95	95	100,00%	357.493.617,00	327.863.426,00	91,71	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	8	400,00%	88.000.000,00	84.460.461,00	95,98	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	56	56	100,00%	142.343.750,00	116.500.900,00	81,84	PPTK belum bisa merealisasikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas yang sudah disusun
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	55	55	100,00%	52.396.867,00	52.149.065,00	99,53	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4	100,00%	74.753.000,00	74.753.000,00	100,00	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rasio Ketersediaan Pangan	Skor	0,65	0,86	132,31%	153.817.770,00	153.111.742,00	99,54	
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tingkat Ketersediaan Pangan Utama Masyarakat	kg/kap/thn	168	127,75	76,04%	86.767.770,00	86.179.190,00	99,32	Realisasi tidak sesuai dengan target disebabkan adanya penurunan produksi netto jagung sebesar 25%, produksi netto ubi kayu sebesar 89%, dan produksi netto ubi jalar sebesar 67%
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	3	3	100,00%	27.404.590,00	27.400.080,00	99,98	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD) (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Keterangan
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	1	1	100,00%	10.060.000,00	10.050.000,00	99,90	
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit	2	2	100,00%	49.303.180,00	48.729.110,00	98,84	
Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tingkat Konsumsi Energi terhadap standart konsumsi energi	% dari 2.100 kkal/kap/hari	98	88,47	90,28%	67.050.000,00	66.932.552,00	99,82	
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1	1	100,00%	67.050.000,00	66.932.552,00	99,82	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	100	100	100,00%	6.875.000,00	6.825.000,00	99,27	
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peningkatan penanganan daerah rawan pangan	Lokasi	4	4	100,00%	6.875.000,00	6.825.000,00	99,27	
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	1	1	100,00%	6.875.000,00	6.825.000,00	99,27	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang memenuhi syarat	%	80	82,35	102,94%	6.000.000,00	5.923.750,00	98,73	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok yang mendapat pengawasan keamanan pangan segar	%	6	8	133,33%	6.000.000,00	5.923.750,00	98,73	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100,00%	6.000.000,00	5.923.750,00	98,73	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	1	1,01	101,00%	876.139.800,00	853.054.693,00	97,37	
Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan pendapatan nelayan	%	5	5	100,00%	475.151.990,00	465.969.660,00	98,07	
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	2375	2067	87,03%	475.151.990,00	465.969.660,00	98,07	
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase pelaku usaha yang mendapat layanan dari UPT TPI	%	86	100	116,28%	400.987.810,00	387.085.033,00	96,53	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD) (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Keterangan
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	100	100	100,00%	400.987.810,00	387.085.033,00	96,53	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	1	1,19	119,00%	746.324.670,00	740.260.060,00	99,19	
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase pengelolaan budidaya ikan yang baik	%	23	25,1	109,13%	746.324.670,00	740.260.060,00	99,19	
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	100	100	100,00%	53.009.590,00	51.748.650,00	97,62	
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	735	735	100,00%	353.455.590,00	351.203.280,00	99,36	
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Ha	8	8	100,00%	339.859.490,00	337.308.130,00	99,25	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase peningkatan perairan darat yang mendapat pengawasan	%	1	1	100,00%	43.413.590,00	42.674.880,00	98,30	
Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase Perairan darat yang direstocking	%	30	20	66,67%	43.413.590,00	42.674.880,00	98,30	Realisasi pelaksanaan <i>restocking</i> tidak sesuai target disebabkan ketersediaan dan kemampuan anggaran belum mencukupi
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100,00%	43.413.590,00	42.674.880,00	98,30	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Tambah Produk Perikanan	(Rp./ Kg)	30601	30464	99,55%	1.123.599.350,00	1.103.310.318,00	98,19	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD) (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Keterangan
Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Persentase pelaku usaha yang memiliki ijin usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	%	17	17	100,00%	90.490.680,00	89.934.560,00	99,39	
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Resiko	Dokumen	2	2	100,00%	90.490.680,00	89.934.560,00	99,39	
Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	%	5	5,25	105,00%	1.033.108.670,00	1.013.375.758,00	98,09	
Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	350	350	100,00%	1.033.108.670,00	1.013.375.758,00	98,09	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Ternak	%	0,55	0,629	114,36%	184.120.000,00	183.948.000,00	99,91	
Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	%	0,55	0,807	146,73%	184.120.000,00	183.948.000,00	99,91	
Peningkatan Kualitas SDG (Sumber Daya Genetik) Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	4	4	100,00%	184.120.000,00	183.948.000,00	99,91	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelahiran Pedet	%	1	0,85	85,00%	58.164.180,00	57.737.630,00	99,27	
	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	0,1	0,05	50,00%				
Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pertanian	%	80	80	100,00%	58.164.180,00	57.737.630,00	99,27	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	1	100,00%	58.164.180,00	57.737.630,00	99,27	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN	Persentase Peningkatan Pencegahan Penyakit Hewan / Ternak	%	1	1	100,00%	785.443.820,00	767.520.536,00	97,72	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD) (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Keterangan
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER									
Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan	%	0,01	0,01	100,00%	47.300.000,00	46.746.400,00	98,83	
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	12	12	100,00%	47.300.000,00	46.746.400,00	98,83	
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ternak yang Mendapat Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Ekor	6000	6000	100,00%	301.150.000,00	292.917.562,00	97,27	
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (DAK-NF)	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	12	12	100,00%	301.150.000,00	292.917.562,00	97,27	
Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha Hewan yang Mendapat Pengawasan/Pendampingan	%	52,94	53,3	100,68%	211.866.640,00	208.249.244,00	98,29	
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	12	12	100,00%	211.866.640,00	208.249.244,00	98,29	
Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase ternak yang terfasilitasi pemasarannya	%	65	65	100,00%	225.127.180,00	219.607.330,00	97,55	
Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Laporan	12	12	100,00%	225.127.180,00	219.607.330,00	97,55	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil pertanian	%	1	1,26	126,00%	113.009.490,00	102.757.510,00	90,93	
Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Kehilangan Hasil Pertanian	%	1	1,27	127,00%	113.009.490,00	102.757.510,00	90,93	
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	100	101,5	101,50%	113.009.490,00	102.757.510,00	90,93	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD) (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Keterangan
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Produk dan Unit Usaha Sarana Produksi Ternak yang memenuhi legalitas	%	90	90	100,00%	86.160.770,00	82.474.068,00	95,72	
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase Unit Usaha Sarana Produksi Ternak yang Dipantau Legalitasnya	%	100	100	100,00%	86.160.770,00	82.474.068,00	95,72	
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	Laporan	1	1	100,00%	86.160.770,00	82.474.068,00	95,72	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	%	0,1	1,78	1780,00%	5.256.166.753,00	3.915.399.612,00	74,49	
Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Capaian Produktivitas Pertanian	Ton/Ha	22,52	22,91	101,73%	5.256.166.753,00	3.915.399.612,00	74,49	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (DAU & DAK NF)	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	5	5	100,00%	712.927.070,00	654.944.292,00	91,87	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa (DBHCHT)	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	15	18	120,00%	4.543.239.683,00	3.260.455.320,00	71,76	- Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan (baru dimulai TW II) - Sisa hasil negosiasi pengadaan barang/jasa melalui mekanisme e-purchasing - PPTK belum bisa merealisasikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas yang sudah disusun

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, 17 Januari 2024



9. Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	(%)	ANGGARAN P-APBD 2023	REALISASI ANGGARAN	(%)	KETERANGAN
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH						778.100.000	730.741.651	93,91%	
JUMLAH PENDAPATAN						778.100.000	730.741.651	93,91%	
BELANJA DAERAH						35.062.461.213	33.581.576.665	95,78%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Persen	90	88,89	98,77%	15.799.412.329	15.140.995.330	95,83%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Persen	95	95	100%	104.313.180	104.273.010	99,96%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	100%	54.162.590	54.145.130	99,97%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	13	13	100%	50.150.590	50.127.880	99,95%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	Persen	100	100	100%	12.782.745.404	12.171.643.794	95,22%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	120	122	102%	12.472.754.634	11.866.580.034	95,14%	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100%	296.073.770	291.823.240	98,56%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	14	14	100%	13.917.000	13.240.520	95,14%	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Sesuai Ketentuan	Persen	100	0	0%	10.000.000	0	0,00%	Karena adanya peraturan terkait tata cara tentang penghapusan BMD dimana proses penghapusan BMD
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	0	0%	10.000.000	0	0,00%	



URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	(%)	ANGGARAN P-APBD 2023	REALISASI ANGGARAN	(%)	KETERANGAN
									hanya boleh dilakukan secara sentral di BPPKAD dan Perangkat Daerah tidak diperbolehkan melakukan proses tersebut
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	Persen	100	100	100%	10.000.000	8.200.000	82,00%	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	1	100%	10.000.000	8.200.000	82,00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	Persen	100	100	100%	717.093.725	714.851.880	99,69%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	100%	106.471.034	105.977.800	99,54%	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100%	11.364.691	11.364.500	100,00%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100%	23.990.000	23.984.900	99,98%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	60	100%	525.588.000	524.158.480	99,73%	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	12	100%	49.680.000	49.366.200	99,37%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Yang Terpenuhi	Persen	100	100	100%	192.510.500	185.664.000	96,44%	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	22	22	100	192.510.500	185.664.000	96,44%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	Persen	100	97,22	97,22%	1.649.888.920	1.631.453.028	98,88%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100%	143.775.000	141.445.374	98,38%	



URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	(%)	ANGGARAN P-APBD 2023	REALISASI ANGGARAN	(%)	KETERANGAN
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	5	100%	42.340.000	40.913.500	96,63%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	11	91,67%	1.463.773.920	1.449.094.154	99,00%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Yang Terpenuhi	Persen	100	100	100%	332.860.600	324.909.618	97,61%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	12	100%	68.316.200	62.218.158	91,07%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	10	100%	142.877.400	141.365.150	98,94%	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0%	0	0	0	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100%	117.167.000	116.826.310	99,71%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100%	4.500.000	4.500.000	100,00%	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kegiatan atau Usaha Berizin yang Mempunyai Dokumen Lingkungan	Persen	100	100	100%	392.699.200	370.112.700	94,25%	
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Permohonan Kajian Lingkungan Hidup Yang Telah Mendapatkan Rekomendasi Teknis	Persen	100	100	100%	30.499.200	30.340.000	99,48%	
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100%	30.499.200	30.340.000	99,48%	



URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	(%)	ANGGARAN P-APBD 2023	REALISASI ANGGARAN	(%)	KETERANGAN
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tertuang dalam Kebijakan Rencana dan Program (KRP)	Persen	100	100	100%	362.200.000	339.772.700	93,81%	
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	2	2	100%	362.200.000	339.772.700	93,81%	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Mutu Air Dan Udara Dengan Kualitas Baik	Persen	100	100,94	100,94%	1.048.594.280	1.032.993.795	98,51%	
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persen	100	102,82	102,82%	915.379.500	900.868.635	98,41%	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	2	2	100%	87.601.150	87.191.450	99,53%	
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	550	581	106%	827.778.350	813.677.185	98,30%	
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100%	122.814.780	121.725.160	99,11%	
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	4	4	100%	87.614.780	86.625.160	98,87%	
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik	4	4	100%	35.200.000	35.100.000	99,72%	
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Wilayah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100%	10.400.000	10.400.000	100,00%	



URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	(%)	ANGGARAN P-APBD 2023	REALISASI ANGGARAN	(%)	KETERANGAN
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen	1	1	100%	10.400.000	10.400.000	100,00%	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Tutupan Lahan Publik	Persen	20	5,66	28,30	8.999.576.404	8.625.919.769	95,85%	
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas Pengelolaan Konservasi Kehati	Persen	100	100	100%	8.999.576.404	8.625.919.769	95,85%	
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	6,45	6,45	100%	14.605.000	14.479.000	99,14%	
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	42	42	100%	6.869.836.392	6.520.744.491	94,92%	
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	2,4	2,4	100%	1.815.440.812	1.799.269.602	99,11%	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	225	225	100%	44.094.700	44.094.700	100,00%	
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	5	5	100%	255.599.500	247.331.976	96,77%	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Pengelolaan Limbah B3 Skala Kota	Persen	100	100	100%	66.413.590	56.944.520	85,74%	
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3	Persen	100	100	100%	66.413.590	56.944.520	85,74%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Dokumen	1	1	100%	66.413.590	56.944.520	85,74%	



URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	(%)	ANGGARAN P-APBD 2023	REALISASI ANGGARAN	(%)	KETERANGAN
	yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya								
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Taat Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota	Persen	100	100	100%	87.523.080	86.993.040	99,39%	
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Dibina dan Diawasi Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota	Persen	100	100	100%	87.523.080	86.993.040	99,39%	
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	1	1	100%	14.350.000	14.078.140	98,11%	
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	23	23	100%	73.173.080	72.914.900	99,65%	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah, Lembaga Pendidikan dan Kelompok Masyarakat yang Berperan Aktif Dalam Pengelolaan Lingkungan	Persen	100	100	100%	177.725.870	177.253.340	99,73%	
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah, Lembaga Pendidikan dan Kelompok Masyarakat yang Peduli Terhadap Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100%	177.725.870	177.253.340	99,73%	



URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	(%)	ANGGARAN P-APBD 2023	REALISASI ANGGARAN	(%)	KETERANGAN
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Lembaga	3	3	100%	117.816.870	117.803.340	99,99%	
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	4	4	100%	29.700.000	29.625.000	99,75%	
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Orang	300	300	100%	30.209.000	29.825.000	98,73%	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah dan Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100%	36.095.500	36.095.500	100,00%	
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keberhasilan Partisipasi Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah dan Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	60	100	166,67%	36.095.500	36.095.500	100,00%	
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	11	11	100%	36.095.500	36.095.500	100,00%	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Pengaduan Lingkungan Hidup Masyarakat yang Tertangani	Persen	90	90	100%	56.030.000	54.713.700	97,65%	
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Pencemaran Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100%	56.030.000	54.713.700	97,65%	



URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	(%)	ANGGARAN P-APBD 2023	REALISASI ANGGARAN	(%)	KETERANGAN
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dokumen	10	10	100%	6.380.000	6.300.000	98,75%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Dokumen	5	5	100%	49.650.000	48.413.700	97,51%	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Timbulan Sampah Yang Terlayani	Persen	80	64,10	80,13	8.398.390.960	7.999.554.971	95,25%	
Pengelolaan Sampah	Persentase Timbulan Sampah Yang Terangkut Dan Terolah	Persen	80	59,33	74,16	5.629.362.600	5.374.092.561	95,47%	Dikarenakan Sarana Prasarana Pengangkut Sampah yang berupa Kendaraan Truk Kompactor mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dioperasikan. Hal ini berdampak terhadap turunya penanganan sampah. Truk Kompactor tersebut baru dapat diperbaiki dan dapat mulai beroperasi lagi pada bulan Desember tahun 2023.
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen	2	2	100%	3.943.000	3.701.250	93,87%	
Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Laporan	4	4	100%	906.613.060	878.142.027	96,86%	
Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	21.890	22434	102%	2.976.488.290	2.766.820.510	92,96%	



URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	(%)	ANGGARAN P-APBD 2023	REALISASI ANGGARAN	(%)	KETERANGAN
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	4	4	100%	39.923.000	39.460.400	98,84%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen	2	2	100%	420.907.100	420.174.240	99,83%	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	6	6	100%	1.281.488.150	1.265.794.134	98,78%	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Persampahan	Persen	100	100	100%	2.769.028.360	2.625.462.410	94,82%	
Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Laporan	4	4	100%	2.769.028.360	2.625.462.410	94,82%	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 17 Januari 2024



10. Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH									
JUMLAH PENDAPATAN									
BELANJA DAERAH						6.386.860.108	5.648.147.805	88,43	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100	100	100	5.294.191.028	4.595.027.935	87%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%	100	87	87	13.103.000	13.103.000	100%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	Dokumen	3	3	100	4.830.000	4.830.000	100%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	dokumen	4	4	100	8.273.000	8.273.000	100%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	3.930.088.891	3.298.644.853	84%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	25	25	100	3.869.847.891	3.244.404.853	84%	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dokumen	6	6	100	55.326.000	49.325.000	89%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	2	2	100	4.915.000	4.915.000	100%	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	4.820.000	4.720.000	98%	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100	4.820.000	4.720.000	98%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai	%	100	100	100	297.126.770	281.114.004	95%	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	12	100	297.126.770	281.114.004	95%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	191.017.562	182.388.603	95%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100	58.895.950	56.009.500	95%	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2	100	4.690.000	3.849.500	82%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	5	100	11.510.000	10.200.000	89%	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	754	752	99,73	4.380.000	3.948.000	90%	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	2	50	4.855.500	1.788.000	37%	Anggaran belanja mamin tamu tidak terserap optimal dikarenakan kunjungan tamu ke dispendukcapil tidak terlalu banyak
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	24	100	106.686.112	106.593.603	100%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	%	100	100	100	387.110.005	375.100.000	97%	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9	9	100	387.110.005	375.100.000	97%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	%	100	100	100	292.025.000	275.557.824	94%	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	10	8	80	2.000.000	1.050.308	53%	Anggaran belanja tidak terealisasi karena pengiriman paket Blanko KTP el dari pusat tidak terlalu banyak
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100	290.025.000	274.507.516	95%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	%	100	100	100	183.719.800	169.119.651	92%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	9	9	100	70.569.800	60.154.651	85%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	50	100	113.150.000	108.965.000	96%	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	%	100	97,51	97,51	497.616.540	486.960.200	98%	
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan	%	100	126,71	126,71	497.616.540	486.960.200	98%	
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	Anggaran di Refocusing
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	40000	51778	129,445	334.735.000	329.710.000	98%	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen	4000	3976	99,4	162.881.540	157.250.200	97%	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk memiliki akta kelahiran usia 0-18 tahun	%	99	103,16	104,2020202	280.637.950	270.241.190	96%	
Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	%	100	104,76	104,76	280.637.950	270.241.190	96%	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APD)	REALISASI	%	Keterangan
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	3830	3977	103,8381201	29.975.000	28.938.000	97%	
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	5000	5273	105,46	250.662.950	241.303.190	96%	
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase pencatatan sipil melalui pelayanan keliling yang terfasilitasi	%	0	0	0	0	0	0	
Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Persentase pencatatan sipil melalui pelayanan keliling yang terfasilitasi	%	0	0	0	0	0	0	Anggaran di Refocusing
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan	%	100	100	100	255.739.590	246.393.480	96%	
	Persentase jaringan SIAK dalam kondisi baik	%	100	100	100	0	0		
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase laporan dan penyajian data yang tepat waktu	%	100	100	100	71.739.590	67.972.580	95%	
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	68	70	102,9411765	24.939.590	24.896.580	100%	
Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	12	12	100	46.800.000	43.076.000	92%	
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase informasi administrasi kependudukan yang tersampaikan	%	100	100	100	184.000.000	178.420.900	97%	
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	4	4	100	184.000.000	178.420.900	97%	
Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	0	0	0	0	0	0	Anggaran di Refocusing
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap materi Bimtek	%	0	0	0	0	0	0%	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan	0	0	0	0	0	0	Anggaran di Refocusing
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan data kependudukan dan pencatatan sipil	%	100	100	100	58.675.000	49.525.000	84%	
Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase pemenuhan data profil kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	100	100	100	58.675.000	49.525.000	84%	
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	100	58.675.000	49.525.000	84%	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 17 Januari 2024

11. Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGAHAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH						4.251.000.000,00	3.905.571.000,00	91.87	
JUMLAH PENDAPATAN						4.251.000.000,00	3.905.571.000,00	91.87	
BELANJA						29.505.463.923,00	28.920.414.800,00	98.02	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	90	85	94.44	7.222.664.495,00	7.048.463.386,00	97.88	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja kegiatan Perangkat daerah Minimal 80%	%	86	86	100	16.905.700,00	16.885.600,00	99.88	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100	14.105.900,00	14.105.600,00	100	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Laporan	4	4	100	2.799.800,00	2.780.000,00	100	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan sesuai ketentuan	%	100	100	100	5.640.135.915,00	5.514.530.887,00	97.77	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	528	528	100	5.448.168.615,00	5.333.810.827,00	97.90	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Penatausahaan Keuangan yang terverifikasi	%	100	100	100	187.734.900,00	176.503.160,00	94.02	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan	Laporan	9	9	99.68	4.232.400,00	4.218.900,00	99.68	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan	%	40	33.62	84.05	26.600.000,00	16.289.609,00	61.24	tidak tercapai dikarenakan diklat dilaksanakan secara daring
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai	%	50	22.43	44.86	26.600.000,00	16.289.609,00	61.24	tidak tercapai dikarenakan diklat dilaksanakan secara daring
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan	%	100	99.17	99.17	142.169.370,00	135.707.914,00	95.46	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	%	100	97.47	97.47	27.748.770,00	24.626.400,00	88.75	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Peralatan Rumah Tangga yang terpenuhi	%	100	100	100	9.966.400,00	9.692.400,00	97.25	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase realisasi barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	%	100	51	51	8.604.200,00	6.580.000,00	76.47	tidak tercapai karena menyesuaikan kebutuhan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang terpenuhi	Eksemplar	36	33	91.67	3.600.000,00	3.600.000,00	100	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Kunjungan tamu yang terfasilitasi	%	100	99.73	99.73	9.920.000,00	9.795.000,00	98.74	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100	99.81	99.81	82.330.000,00	81.414.114,00	98.89	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100	96	96	0,00	9.600.000,00	96	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	2	2	100	10.000.000,00	9.600.000,00	96	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan ketatalaksanaan yang terpenuhi	%	100	99.13	99.13	966.201.260,00	943.122.726,00	97.61	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Jasa Surat Menyurat yang terpenuhi	%	100	98.46	98.46	2.751.800,00	2.057.000,00	74.75	menyesuaikan kebutuhan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	%	100	99.87	99.87	225.230.452,00	205.209.248,00	91.11	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi	%	100	79	79	17.975.000,00	17.405.000,00	96.83	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	%	100	99.17	99.17	720.244.008,00	718.451.478,00	99.75	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah dalam kondisi baik	%	100	99.7	99.7	430.652.250,00	412.326.650,00	95.74	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100	32.037.000,00	30.151.399,00	94.11	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	31	29	93.55	368.758.750,00	353.915.251,00	95.97	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	17	17	94.51	11.009.000,00	10.405.000,00	94.51	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	4	100	18.847.500,00	17.855.000,00	94.73	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Presentase Sarana dan Prasarana Perlengkapan jalan sesuai standar Kementerian Perhubungan	%	90	95.85	106.5	18.643.213.188,00	18.372.214.571,00	105.10	
	Prosentase Ruas Jalan yang terlayani Trayek Angkutan Kota	%	20	14.88	74.4	38.058.100,00	37.393.580,00	98	tidak tercapainya dikarenakan berkurangnya minat pengguna



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APD)	REALISASI	%	Keterangan
									angkutan jalan dan beralih ke ojol atau gojek
	Presentase Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji Berkala	%	98	34.63	35.34	384.533.400,00	377.050.345,00	98	1. persediaan E Blue masih cukup untuk 1 tahun berjalan sehingga anggaran dialihkan ke kegiatan yang lebih penting 2. terjadi kerusakan pada alat uji KIR selama hampir 3 bulan tidak beroperasi
	Presentase Pemenuhan-Dokumen Kajian Bidang Perhubungan	%	20	127	635	14.500.000,00	10.234.900,00	71	
	Presentase Penurunan Angka Pelanggaran Angkutan Jalan	%	11	0	0	3.187.645.000,00	3.070.900.018,00	96	tidak terlaksananya operasi gabungan dan tidak terjadi pelanggaran pada angkutan jalan
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perlengkapan jalan	%	90	111.12	123.47	18.467.251.128,00	18.204.864.640,00	98.58	
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan yang Terbangun	Unit	3	3	100	210.600.000,00	206.884.053,00	98.24	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemenuhan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan Elektrikal	Unit	43	79	149.06	2.028.657.000,00	1.964.936.374,00	96.86	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah pemenuhan Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan Elektrikal	Unit	1500	1490	99.33	16.227.994.128,00	16.033.044.213,00	98.80	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Prosentase kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir angkutan barang	%	90	89.90	99.78	696.003.000,00	680.962.750,00	97.84	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	100	696.003.000,00	680.962.750,00	97.84	
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan bermotor di kota Probolinggo	%	98	90.12	97.96	384.533.400,00	377.050.345,00	98.05	
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji	Unit	8250	8250	100	51.587.500,00	50.907.000,00	98.68	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji elektronik yang tersedia	Set	2500	0	0	1.500.000,00	0,00	0	masih tersedianya E Blue dan anggaran sudah dialihkan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian dalam kondisi baik	unit	9	9	100	226.551.500,00	223.025.625,00	98.44	
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang lulus uji/laik jalan	Unit	8892	6828	78.42	104.894.400,00	103.117.720,00	98.31	1. Pada 2 bulan pertama tidak melakukan operasi kelayakan uji KIR dikarenakan ada kerusakan pada alat uji
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana jaringan jalan di wilayah kota	%	77	75.51	98.06	2.667.604.000,00	2.557.287.199,00	95.86	
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Presentase Penyediaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka MRLL	%	70	69.80	99.71	175.962.000,00	167.349.931,00	95.11	
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Lokasi	2	2	100	2.500.000,00	2.397.500,00	95.90	
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan LLAJ	Lokasi	83	81	97.59	2.485.142.000,00	2.383.544.768,00	95.91	
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembahasan Kebijakan LLAJ	Kebijakan	8	8	100	4.000.000,00	3.995.000,00	99.88	
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang taat Andalalin	%	30	27.50	91.67	14.500.000,00	10.234.900,00	70.59	penyesuaian kebutuhan rekomendasi andalalin
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Pelaku Usaha yang melaksanakan Andalalin sesuai rekomendasi	Pelaku Usaha	10	23	230	14.500.000,00	10.234.900,00	70.59	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota	Persentase Angkutan Penumpang umum di Kota Probolinggo	%	13.17	11.21	85.12	3.255.000,00	3.000.000,00	92.17	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Orang dan Angkutan Barang	Kendaraan	5253	2842	54.1	3.255.000,00	3.000.000,00	92.17	pemenuhan terpusat pada trayek pada manajemen rekayasa lalu lintas
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan trayek perkotaan yang ditetapkan	%	15.69	14.88	94.84	1.000.000,00	750.000,00	75.00	
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	Orang	50	0	0	1.000.000,00	750.000,00	75.00	penyesuaian kehadiran peserta kegiatan sosialisasi
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek	Dokumen	204	13	6.37	33.803.100,00	33.643.580,00	99.53	tidak tercapai dikarenakan berkurang angkutan jalan yang memiliki ijin trayek dan banyak kondisi fisik kendaraan yang tidak layak sehingga perlu peremajaan pada angkutan jalan
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	12	3	25	5.825.000,00	5.760.400,00	98.89	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	12	9	75	27.978.100,00	27.883.180,00	99.66	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Prosentase Jumlah Pelanggaran Kapal dibawah 7GT	%	2	2	100	4.849.800,00	4.156.000,00	85.69	
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi	Jumlah Nelayan/ Pemilik Kapal <7GT yang mendapatkan pembinaan	Orang	60	60	100	4.849.800,00	4.156.000,00	85.69	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota									
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut kewenangan kabupaten/kota	orang	60	60	100	4.849.800,00	4.156.000,00	85.69	penyesuaian kehadiran peserta kegiatan sosialisasi

Sumber : Dinas Perhubungan, 17 Januari 2024

12. Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH						183.720.000,00	193.038.500,00	105,07	
JUMLAH PENDAPATAN						183.720.000,00	193.038.500,00	105,07	
BELANJA DAERAH						18.684.786.067,00	16.690.120.853,00	89,32%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100	100	100	7.705.903.869,00	7.408.308.389,00	96.14	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%	90	90	100	2.887.500,00	2.835.000,00	98.18	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7	7	100	637.500,00	615.000,00	96.47	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	9	9	100	2.250.000,00	2.220.000,00	98.67	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	6.663.311.770,00	6.394.342.217,00	95.96	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	49	49	100	6.540.947.270,00	6.274.014.217,00	95.92	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	12	100	120.672.000,00	118.643.000,00	98.32	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	laporan	13	13	100	1.692.500,00	1.685.000,00	99.56	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	2.400.000,00	2.400.000,00	100.00	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	1	1	100	2.400.000,00	2.400.000,00	100.00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD sesuai ketentuan	%	100	100	100	5.000.000,00	4.000.000,00	80.00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	3	3	100	5.000.000,00	4.000.000,00	80.00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	280.907.382,00	279.329.209,00	99.44	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12	12	100	70.193.200,00	69.470.050,00	98.97	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	12	12	100	14.966.000,00	14.909.000,00	99.62	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	dokumen	7	8	114	12.744.000,00	12.635.000,00	99.14	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	12	100	10.000.000,00	9.881.700,00	98.82	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	100	173.004.182,00	172.433.459,00	99.67	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	%	100	100	100	629.617.517,00	606.555.721,00	96.34	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	100	267.648.997,00	249.476.962,00	93.21	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	100	361.968.520,00	357.078.759,00	98.65	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	%	80	80	100	121.779.700,00	118.846.242,00	97.59	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	11	11	100	75.540.200,00	74.136.452,00	98.14	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	25	25	100	16.927.500,00	15.561.947,00	91.93	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	3	100	29.312.000,00	29.147.843,00	99.44	
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase media komunikasi yang dikelola	%	90	90	100	5.514.478.520,00	4.535.595.539,00	82.25	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase media komunikasi yang dikelola	%	90	90	100	5.514.478.520,00	4.535.595.539,00	82.25	
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	dokumen	12	12	100	70.571.680,00	68.840.785,00	97.55	
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	dokumen	12	12	100	252.979.340,00	245.508.371,00	97.05	
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	dokumen	19	19	100	2.278.120.000,00	1.688.475.000,00	74.12	Merupakan sisa belanja dari pengadaan 2 (dua) unit videotron
Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	layanan	2	2	100	51.800.000,00	49.900.000,00	96.33	
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	dokumen	10	10	100	154.467.500,00	151.924.000,00	98.35	
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam	dokumen	600	600	100	2.706.540.000,00	2.330.947.383,00	86.12	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
	Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan								
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi informatika yang terintegrasi	%	69	77,5	112	5.353.237.178,00	4.640.288.425,00	86.68	
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi	%	90	100	111	1.367.688.998,00	1.344.018.406,00	98.27	
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	100	1.600.000,00	1.600.000,00	100.00	
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	unit	56	56	100	1.366.088.998,00	1.342.418.406,00	98.27	
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Layanan Berbasis Elektronik	%	70	100	143	3.985.548.180,00	3.296.270.019,00	82.71	
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	3	3	100	2.000.000,00	2.000.000,00	100.00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	perangkat daerah	28	28	100	2.231.852.000,00	2.051.709.046,00	91.93	
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	unit	4	4	100	1.704.069.000,00	1.194.942.813,00	70.12	Beberapa pengadaan terkait penyediaan sarana prasarana Gedung Pusat Layanan Terpadu belum dapat dilaksanakan; interior gedung dan aplikasi.
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	dokumen	6	6	100	47.627.180,00	47.618.160,00	99.98	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						17.232.500,00	15.865.000,00	92.06	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Release Data Statistik Tepat Waktu	%	100	100	100	17.232.500,00	15.865.000,00	92.06	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral yang dirilis	data	32	32	100	17.232.500,00	15.865.000,00	92.06	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	dokumen	1	2	200	16.007.500,00	14.640.000,00	91.46	
Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	orang	35	102	291	1.225.000,00	1.225.000,00	100.00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						93.934.000,00	90.063.500,00	95.88	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Layanan Keamanan Informasi yang Diterapkan	%	50	50	100	93.934.000,00	90.063.500,00	95.88	
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik yang memanfaatkan sertifikat elektronik	%	9,23	9,23	100	93.934.000,00	90.063.500,00	95.88	
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	perangkat daerah	27	28	104	93.934.000,00	90.063.500,00	95.88	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 17 Januari 2024

13. Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
PENDAPATAN						2,298,223,081	2,071,579,801	90.14	
PENDAPATAN ASLI DAERAH						2,298,223,081	2,071,579,801	90.14	
JUMLAH PENDAPATAN						2,298,223,081	2,071,579,801	90.14	
BELANJA DAERAH						16,744,689,891	15,637,071,740	93.39	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Persen	82	82	100	8,499,190,777	8,230,793,411	96.84	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Persen	82	82	100	80,625,000	80,187,080	99.46	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100	59,750,000	59,410,080	99,43	Penganggaran dan Realisasi Belanja sudah efektif dilaksanakan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Laporan	2	2	100	10,292,500	10,205,000	99,15	Penganggaran dan Realisasi Belanja sudah efektif dilaksanakan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	1	1	100	3,375,000	3,375,000	100.00	Penganggaran dan Realisasi Belanja sudah efektif dilaksanakan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	100	7,207,500	7,197,000	99.85	Penganggaran dan Realisasi Belanja sudah efektif dilaksanakan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	Persen	72	72	100	6,908,833,069	6,671,284,754	96.56	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	58	58	100	6,603,211,669	6,384,066,604	96.68	terdapat sisa anggaran karena adanya kekosongan jabatan struktural (sekdis) selama 8 bulan dan Kabid Koperasi selama 11 bulan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	12	12	100	284,349,400	271,713,150	95.56	Penganggaran dan Realisasi Belanja sudah efektif dilaksanakan
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan	12	12	100	7,254,000	5,630,000	77.61	adanya sisa belanja di ATK, kertas cover dan Tinta tidak terserap dikarenakan sudah terpenuhi kebutuhannya oleh TU (efisiensi anggaran)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12	12	100	2,528,000	1,000,000	39.56	adanya sisa belanja di ATK, kertas cover dan Tinta tidak terserap dikarenakan sudah



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
									terpenuhi kebutuhannya oleh TU (efisiensi anggaran)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Dokumen	12	12	100	11,490,000	8,875,000	77.24	adanya sisa belanja di ATK, kertas cover dan Tinta tidak terserap dikarenakan sudah terpenuhi kebutuhannya oleh TU (efisiensi anggaran)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Sesuai Ketentuan	Persen	80	80	100	34,440,000	34,435,080	99.99	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persen	80	80	100	34,440,000	34,435,080	99.99	Penganggaran dan Realisasi Belanja sudah efektif dilaksanakan
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	Persen	80	80	100	17,056,000	16,380,000	96.04	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	2	2	100	17,056,000	16,380,000	96.04	tidak terserap karena tersisa pada barang habis pakai (ATK)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	Persen	85	85	100	36,946,000	36,935,080	99.97	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Presentase Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persen	85	85	100	36,940,000	36,935,080	99.99	Penganggaran dan Realisasi Belanja sudah efektif dilaksanakan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persen	85	85	100	0	0	0.00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	Persen	80	80	100	567,975,510	561,590,392	98.88	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persen	90	90	100	27,162,100	26,939,200	99.18	Penganggaran dan Realisasi Belanja sudah efektif dilaksanakan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persen	80	80	100	4,541,500	4,497,800	99.04	Penganggaran dan Realisasi Belanja sudah efektif dilaksanakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persen	80	80	100	47,980,500	47,424,473	98.84	Terdapat sisa anggaran pembelian bahan bakar Gas elpiji dan Fotocopi



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Presentase Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persen	85	85	100	159,657,000	154,103,950	96.52	Terdapat sisa anggaran belanja Cetak karcis retribusi pasar karena sebagian pasar sudah melakukan Non tunai
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase Kunjungan Tamu yang terfasilitasi	Persen	80	80	100	31,469,910	31,461,080	99.97	Penganggaran dan Realisasi Belanja sudah efektif dilaksanakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terpenuhi	Persen	80	80	100	297,164,500	297,163,889	100.00	Penganggaran dan Realisasi Belanja sudah efektif dilaksanakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	Persen	80	80	100	660,799,140	642,246,645	97.19	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persen	80	80	100	31,800,000	31,795,080	99.98	Penganggaran dan Realisasi Belanja sudah efektif dilaksanakan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persen	80	80	100	137,156,000	126,291,819	92.08	Terdapat sisa anggaran karena pengalihan PDAM ke air bawah tanah DAP
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persen	80	80	100	491,843,140	484,159,746	98.44	Terdapat sisa anggaran karena Peserta BPJS Non ASN mutasi, pensiun dan meninggal dunia
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	Persen	90	90	100	192,516,058	187,734,380	97.52	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persen	85	85	100	45,864,000	45,015,310	98.15	Terdapat sisa anggaran dalam sisa pembayaran pajak kendaraan dinas jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persen	80	80	100	46,582,100	45,434,370	97.54	Tidak terserap sisa pemeliharaan kendaraan operasional
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persen	85	85	100	13,000,000	13,000,000	100.00	Penganggaran dan Realisasi Belanja sudah efektif dilaksanakan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persen	90	90	100	75,069,958	73,505,200	97.92	Efisiensi Anggaran



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persen	85	85	100	12,000,000	10,779,500	89.83	Terdapat sisa anggaran pada rekening Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga (loundry)
PROGRAM PELAYANAN IZIN SIMPAN PINJAM	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif	Persen	2,35	2,4	102,127659 6	225,002,000	213,976,280	95.10	
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Menerapkan Kepatuhan Terhadap Regulasi	Unit Usaha	50	50	100	225,002,000	213,976,280	95.10	
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	50	50	100	225,002,000	213,976,280	95.10	Penganggaran dan Realisasi Belanja sudah efektif dilaksanakan
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Sehat	Persen	2,4	4,34	180,833333 3	1,375,000	0	0.00	
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/ Kota	Jumlah Koperasi yang Menerapkan Kepatuhan Terhadap Regulasi	Unit Usaha	50	50	100	1,375,000	0	0.00	
Pengawasan Kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	Unit Usaha	50	50	100	1,375,000		0.00	Tidak terserap karena tidak ada kode rekening lain yang menunjang kegiatan, hanya ATK saja (tidak ada cantolan kegiatan)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Presentase SDM Koperasi yang mendapatkan Fasilitas Diklat Perkoperasian	Persen	62,5	62,5	100	420,370,000	371,919,251	88.47	
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang Memperoleh Pendidikan dan	orang	115	115	100	420,370,000	371,919,251	88.47	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelatihan Perkoperasian								
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	orang	115	115	100	420,370,000	371,919,251	88.47	Sisa anggaran ATK Kegiatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi yang Mandiri	Persen	1,25	1,25	100	76,395,000	65,981,648	86.37	
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mandiri dari Aspek Pembiayaan dan Permodalan Usaha	Koperasi dan ukm	32	32	100	76,395,000	65,981,648	86.37	
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kab/kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Unit Usaha	30	30	100	76,395,000	65,981,648	86.37	Yang tidak terserap perjalanan dinas dalam kota karena waktu tidak mencukupi, terjadi perubahan perencanaan, Belanja Modal tidak terserap semua karena barang yang dibeli harus sesuai dengan aturan TKDN
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Usaha	Persen	2,34	2,34	100	4,051,282,000	3,338,618,995	82.41	
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dan kelembagaan usaha	PUM	100	100	100	4,051,282,000	3,338,618,995	82.41	
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah data potensi dan pengembangan usaha mikro	Dokumen	1	1	100	7,216,000	6,907,000	95.72	Terdapat Sisa Belanja ATK
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	350	350	100	3,034,294,000	2,514,418,099	82.87	Sisa Kontrak Pengadaan Barang Bantuan Sosial Peralatan dan terdapat 209 Calon Penerima yang tidak lolos karena tidak masuk dalam data DTKS



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	100	100	100	1,001,372,000	809,465,190	80.84	Belanja bansos dan iuran JKK dan KM yang tidak terbayarkan karena calon penerima iuran BPJS Ketenagakerjaan UMKM karena tidak lolos verifikasi sebagai akibat double penganggaran dengan BPJS Ketenagakerjaan RT RW, Nelayan dan petani, PNS/Polri, Guru Ngaji dll
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	kali	6	6	100	8,400,000	7,828,700	93.20	Terdapat Sisa Belanja ATK
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pelaku Usaha Mikro Yang Mendapatkan Fasilitas Pengembangan Usaha	Persen	0,91	0,91	100	376,990,000	373,373,285	99.04	
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas Pengembangan Produksi & Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	PUM	200	200	100	376,990,000	373,373,285	99.04	
Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	200	200	100	376,990,000	373,373,285	99.04	Terdapat Sisa Anggaran Belanja Pengadaan Belanja Modal
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Kebutuhan Sarana Distribusi Perdagangan yang disediakan	Persen	82	82	100	879,356,330	873,496,637	99.33	
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Rakyat dalam kondisi baik	Persen	80	80	100	854,356,330	848,983,800	99.37	
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	unit	6	6	100	854,356,330	848,983,800	99.37	Selisih Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pengawasan Barang Pokok dan Barang Penting	Persen	80	80	100	25,000,000	24,512,837	98.05	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	12	12	100	25,000,000	24,512,837	98.05	Sisa Mamin Kegiatan Pembukaan Sentra PKL Pujasera Alun-Alun Kota Probolinggo
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang terkendali	Persen	81	81	100	1,899,548,784	1,856,789,710	97.75	
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pasar yang terstandarisasi Bersih Tertib Aman sesuai standart	Persen	80	80	100	1,769,368,784	1,729,050,710	97.72	Selisih Penawaran Kegiatan Sewa Peralatan Kegiatan Bazar Ramadhan dan Pasar Murah
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	12	12	100	1,769,368,784	1,729,050,710	97.72	Sisa anggaran Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan Barang Pokok dan Barang Penting	Persen	80	80	100	109,430,000	108,039,000	98.73	
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	100	109,430,000	108,039,000	98.73	Sisa anggaran Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Persen	80	80	100	20,750,000	19,700,000	94.94	
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan	12	12	100	20,750,000	19,700,000	94.94	Sisa anggaran Perjalanan Dinas Dalam Kota
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	Persen	1,5	1,5	100	49,310,000	48,512,743	98.38	
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Promosi Dagang	Pelaku Usaha	25	25	100	49,310,000	48,512,743	98.38	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi pameran dagang lokal	Pelaku Usaha	25	25	100	49,310,000	48,512,743	98.38	Selisih Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa dan Belanja Modal
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTTP yang memenuhi standar secara metrologi legal	Persen	91	91	100	265,870,000	263,609,780	99.15	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaku Usaha yang sadar Tera dan Tera Ulang UTTP	Pelaku Usaha	1000	1500	150	265,870,000	263,609,780	99.15	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat	Unit	1500	1832	122,133333 3	265,870,000	263,609,780	99.15	Penganggaran dan Realisasi Belanja sudah efektif dilaksanakan

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, 17 Januari 2024

14. Perangkat Daerah : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH									
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah						74.611.750,00	11.545.500,00	15,47	Sudah dilakukan penagihan I dan II namun belum ada pembayaran sampai dengan 31 Desember 2023 untuk retribusi pembayaran BJBR



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga						742.859.186,00	297.025.500,00	39,98	Tidak mencapai target dikarenakan minimnya fasilitas pada TRA Bayuangga terutama anak-anak, Dikarenakan Kolam Renang Olympic diperuntukkan untuk latihan atlit sehingga kebanyakan yang menggunakan sarana tersebut adalah cabor dan dikarenakan mulai dapat digunakan sebagai sarana olahraga mulai minggu ke-2 bulan November yang sebelumnya dipergunakan sebagai Mall Pelayanan Publik
BELANJA DAERAH						23.176.570.583,00	22.337.110.747,73	96,38	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	persentase pemuda berprestasi	%	60	60	100,00	70.000.000,00	69.960.000,00	99,94%	
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	presentase pemuda yang berprestasi	%	70	70	100,00	70.000.000,00	69.960.000,00	99,94%	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	100	100	100,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%	
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan	Orang	100	100	100,00	50.000.000,00	49.960.000,00	99,92%	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet berprestasi	%	35	35	100,00	13.260.347.017,00	13.067.088.942,73	98,54%	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada	Persentase Olah Raga yang dibina	%	60,5	60,5	100,00	1.069.528.317,00	1.030.978.206,00	96,40%	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	6	6	100,00	1.069.528.317,00	1.030.978.206,00	96,40%	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	presentase prestasi yang diraih tingkat daerah	%	75	75	100,00	299.995.100,00	291.925.000,00	97,31%	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100,00	299.995.100,00	291.925.000,00	97,31%	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Atlet yang berprestasi	%	60	60	100,00	11.757.823.900,00	11.623.575.736,73	98,86%	
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Orang	500	500	100,00	11.757.823.900,00	11.623.575.736,73	98,86%	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	presentase cabang olahraga rekreasi yang di bina	%	60	60	100,00	132.999.700,00	120.610.000,00	90,68%	
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalahan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalahan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	2	2	100,00	132.999.700,00	120.610.000,00	90,68%	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	persentase organisasi pramuka yang dibina	%	90	90	100,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00%	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	jumlah organisasi pramuka yang dibina	Organisasi	1	1	100,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00%	
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	100	100	100,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	87	85	97,70	6.303.143.733,00	5.797.077.334,00	91,97%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%	87	85	97,70	52.799.500,00	45.853.400,00	86,84%	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	100,00	29.231.700,00	23.078.400,00	78,95%	efisiensi anggaran lembur non ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	6	100,00	23.567.800,00	22.775.000,00	96,64%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	86	86	100,00	4.914.605.533,00	4.577.810.858,00	93,15%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Realisasi Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu	%	95	92	96,84	4.479.222.453,00	4.161.907.168,00	92,92%	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	6	6	100,00	376.802.080,00	360.415.490,00	95,65%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD	Laporan	700	700	100,00	58.581.000,00	55.488.200,00	94,72%	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	82	0	0,00	0	0		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	0	0,00	0	0		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	%	87	87	100,00	333.843.200,00	306.617.090,00	91,84%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	100,00	137.981.700,00	129.220.390,00	93,65%	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2	100,00	1.513.500,00	1.370.000,00	90,52%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	100,00	35.370.000,00	22.630.000,00	63,98%	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	720	720	100,00	10.800.000,00	9.640.000,00	89,26%	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	100	100,00	148.178.000,00	143.756.700,00	97,02%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	%	87	87	100,00	141.425.000,00	80.165.000,00	56,68%	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	7	100,00	141.425.000,00	80.165.000,00	56,68%	adanya pembatasan harga pengadaan laptop tidak boleh melebihi dari surat edaran kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/ jasa Peraturan pemerintah Indonesia no 4 tahun 2023
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	%	87	87	100,00	636.853.000,00	588.595.300,00	92,42%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	5	100,00	1.617.000,00	0	0,00%	dikarenakan semua jasa surat menyurat menggunakan elektronik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	100,00	431.760.000,00	397.537.068,00	92,07%	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3	100,00	168.780.000,00	157.488.152,00	93,31%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3	100,00	34.696.000,00	33.570.080,00	96,75%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	%	87	87	100,00	223.617.500,00	198.035.686,00	88,56%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	13	100,00	81.714.500,00	62.394.700,00	76,36%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	465	150	32,26	37.650.000,00	31.953.000,00	84,87%	dikarenakan pemeliharaannya hanya untuk alat kantor yang prioritas



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	104.253.000,00	103.687.986,00	99,46%	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prosentase Destinasi Wisata Yang Berkembang	%	5	8	160,00	1.024.825.600,00	995.359.284,00	97,12%	
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	presentase daya tarik wisata lokal yang di lestarikan	%	67	67	100,00	192.600.000,00	190.150.000,00	98,73%	
Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	2	2	100,00	192.600.000,00	190.150.000,00	98,73%	
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	presentase peningkatan SDM pelaku pariwisata	%	15	15	100,00	629.453.500,00	613.683.184,00	97,49%	
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	1	1	100,00	625.453.500,00	609.683.184,00	97,48%	
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Presentase usaha pariwisata yang terdaftar	%	85	85	100,00	202.772.100,00	191.526.100,00	94,45%	
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan	3	3	100,00	202.772.100,00	191.526.100,00	94,45%	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	persentase angka kunjungan wisatawan	%	13	-3,54	-27,23	1.914.469.183,00	1.814.076.187,00	94,76%	Uraian penjelasan rendahnya capaian kinerja
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Prosentase Kegiatan Pemasaran Pariwisata	%	30	40	133,33	1.914.469.183,00	1.814.076.187,00	94,76%	
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	15	11	73,33	1.656.486.383,00	1.571.831.520,00	94,89%	dikarenakan untuk kegiatan promosi pariwisata di masing-masing destinasi di jadikan 1 kegiatan event besar yang mewadai semuanya



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	2	2	100,00	99.695.800,00	98.350.892,00	98,65%	
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	2	2	100,00	158.287.000,00	143.893.775,00	90,91%	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	persentase peningkatan sarpas ekonomi kreatif yang di pelihara	%	5	5	100,00	16.999.000,00	7.965.000,00	46,86%	
Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase sarpras dalam kondisi baik	%	2	2	100,00	16.999.000,00	7.965.000,00	46,86%	
Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Unit	1	1	100,00	16.999.000,00	7.965.000,00	46,86%	adanya pembatasan harga pengadaan laptop tidak boleh melebihi dari surat edaran kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/ jasa pemerintah indonesia no 4 tahun 2023
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Komunitas Ekonomi Kreatif yang Berkembang	%	7	7	100,00	86.786.050,00	85.584.000,00	98,61%	
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	presentase ekonomi kreatif dan kelompok sadar wisata yang aktif	%	30	30	100,00	86.786.050,00	85.584.000,00	98,61%	
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang	100	100	100,00	74.989.800,00	73.865.000,00	98,50%	
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta	Orang	50	50	100,00	11.796.250,00	11.719.000,00	99,35%	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata								

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 17 Januari 2024

15. Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran (P.APBD)	Realisasi	%	Keterangan
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH									
JUMLAH PENDAPATAN									
BELANJA						5.816.141.534	5.359.162.898	92,14	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100	100	100,00	5.649.497.944,00	5.201.916.318,00	92,08	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%	90	90	100,00	11.837.500,00	11.687.500,00	98,73	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	7	7	100,00	11.837.500,00	11.687.500,00	98,73	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	100	100,00	5.137.746.264,00	4.724.528.678,00	91,96	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang per bulan	574	574	100,00	5.017.707.684,00	4.604.499.518,00	91,77	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	12	100,00	120.038.580,00	120.029.160,00	99,99	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan 100%	%	100	100	100,00	170.278.840,00	158.464.630,00	93,06	



Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	4	4	100,00	83.248.940,00	81.814.730,00	98,28	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	4	4	100,00	8.100.900,00	8.099.800,00	99,99	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	dokumen	1210	1.210,00	100,00	1.800.000,00	1.690.000,00	93,89	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	36	36	100,00	43.499.000,00	34.701.700,00	79,78	Dikarenakan tidak banyak kegiatan yang diselenggarakan di luar kota
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	12	12	100,00	33.630.000,00	32.158.400,00	95,62	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	%	100	0	0,00	300.000,00	-	0	
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	1	0	0,00	300.000,00	0	0	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan Ketatalaksanaan yang terpenuhi	%	100	100	100,00	263.783.640,00	247.077.535,00	93,67	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan	12	12	100,00	90.542.500,00	74.617.855,00	82,41	Dikarenakan kelebihan penganggaran pada tagihan listrik
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa pelayanan urusan kantor yang disediakan	laporan	12	12	100,00	173.241.140,00	172.459.680,00	99,55	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpelihara	%	100	100	100,00	65.551.700,00	60.157.975,00	91,77	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	1	1	100,00	29.125.000,00	26.018.566,00	89,33	Dikarenakan kelebihan dalam menganggarkan BBM Kendaraan Jabatan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya	Jumlah kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan	unit	7	7	100,00	22.526.700,00	21.119.409,00	93,75	



pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya								
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	50	50	100,00	13.650.000,00	13.020.000,00	95,38	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	0	0,00	250.000,00	0	0	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	IKM layanan Perpustakaan	Indeks	79	81,21	102,80	85.804.000,00	85.062.500,00	99,14	
	Persentase peningkatan Perpustakaan yang dibina	%	8	8	100,00				
Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan yang dibina	%	100	100	100,00	39.504.000,00	39.375.000,00	99,67	
Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	perpustakaan	10	10	100,00	11.500.000,00	11.440.000,00	99,48	
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	eksemplar	1500	1.547	103,13	28.004.000,00	27.935.000,00	99,75	
Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sasaran masyarakatan perpustakaan	%	100	100	100,00	46.300.000,00	45.687.500,00	98,68	
Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	perpustakaan	2	2	100,00	46.300.000,00	45.687.500,00	98,68	
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Peningkatan Arsip yang Dikelola	%	14,45	14,45	100,00	80.839.590	72.184.080,00	89,29	
	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Pengelolaan Arsip sesuai Standart	%	90	90	100,00				



Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang dikelola	%	100	100	100,00	38.612.590,00	38.512.080,00	99,74	
Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	berkas	19500	19.501	100,01	38.612.590,00	38.512.080,00	99,74	
Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang dikelola	%	100	100	100,00	28.827.000,00	28.827.000,00	100	
Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Berkas	2800	2.800	100,00	28.827.000,00	28.827.000,00	100	
Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan kearsipan tingkat daerah kab/kota	%	100	100	100,00	13.400.000,00	4.845.000,00	36,16	
Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	laporan	25	25	100,00	13.400.000,00	4.845.000,00	36,16	Dikarenakan adanya peralihan Indeks Reformasi Birokrasi dari Pengawasan Kearsipan ke Digitalisasi Arsip sehingga konsentrasi untuk Reformasi Birokrasi pada Digitalisasi Arsip

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 17 Januari 2024

16. Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran (P.APBD)	Realisasi	%	Keterangan
PENDAPATAN ASLI DAERAH						0	0	0,00	
BELANJA DAERAH						56.752.375.147,00	50.559.906.452,00	89,09	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Persen	100	95,48	95,48	38.179.088.301,00	34.434.129.216,00	90,19	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Persen	100	94,33	94,33	26.500.000,00	26.176.000,00	98,78	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	4	80	17.400.000,00	17.171.000,00	98,68	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Laporan	10	10	100	9.100.000,00	9.005.000,00	98,96	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran (P.APBD)	Realisasi	%	Keterangan
	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	Persen	100	100	100	18.444.214.270,00	18.075.812.087,00	98,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	147	147	100	17.822.761.450,00	17.476.845.207,00	98,06	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100	492.451.180,00	477.566.560,00	96,98	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	14	14	100	129.001.640,00	121.400.320,00	94,11	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persen	100	100	100	20.000.000,00	19.935.000,00	99,68	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	100	20.000.000,00	19.935.000,00	99,68	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	Persen	100	100	100	1.272.978.392,00	785.341.044,00	61,69	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	8	8	100	9.875.000,00	8.641.500,00	87,51	Target dan realisasi belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Pakaian Dinas Upacara (PDU) untuk keperluan Sekda terpenuhi sedangkan pagu dan realisasi anggaran (selisih 1,25 juta dikarenakan rencana belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Pakaian Dinas Upacara (PDU) melebihi perkiraan harga nya
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	45	45	100	538.835.410,00	439.938.486,00	81,65	Target dan realisasi belanja Jasa Tenaga Administrasi, Tenaga Akutansi, Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota dll tidak semua terpenuhi



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran (P.APBD)	Realisasi	%	Keterangan
									sedangkan pagu dan realisasi anggaran (selisih 99 juta dikarenakan rencana belanja selain belanja rutin tidak jadi dilaksanakan)
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pegawai	10	10	100	126.003.982,00	33.470.000,00	26,56	Target dan realisasi belanja kegiatan pendidikan dan pelatihan, Perjalanan Dinas Biasa dll tidak semua terpenuhi sedangkan pagu dan realisasi anggaran (selisih 92,5 juta dikarenakan rencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 10 orang hanya diikuti 8 orang)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	350	350	100	598.264.000,00	303.291.058,00	50,70	Target dan realisasi belanja Kegiatan Bimbingan Teknis, Honorarium Narasumber, Perjalanan Dinas kegiatan Bimtek, paket meeting tidak semua terpenuhi sedangkan pagu dan realisasi anggaran (selisih 295 juta dikarenakan rencana kegiatan Bimtek yang akan dilaksanakan 4 kali hanya terlaksana 2 kali)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persen	100	100	100	1.028.752.190,00	997.072.467,00	96,92	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	100	156.379.690,00	155.875.000,00	99,68	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	10	100	142.372.500,00	141.897.000,00	99,67	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100	730.000.000,00	699.300.467,00	95,79	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran (P.APBD)	Realisasi	%	Keterangan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persen	100	94,44	94,44	1.870.700.000,00	1.618.700.000,00	86,53	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	7	4	57,14	1.840.000.000,00	1.588.000.000,00	86,30	Harga Penawaran barang dibawah harga perencanaan anggaran
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	0	0	0,00	0	0,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Paket	8	8	100	30.700.000,00	30.700.000,00	100,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	Persen	100	100	100	2.054.609.746,00	1.874.044.684,00	91,21	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100	1.110.210.000,00	1.048.847.618,00	94,47	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100	944.399.746,00	825.197.066,00	87,38	Rencana belanja kebutuhan sarana prasarana rangkaian kegiatan refleksi yang disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan yang terlaksana
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen	100	59,21	59,21	1.831.168.010,00	1.736.300.612,00	94,82	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan	21	21	100	531.216.500,00	504.928.064,00	95,05	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan	65	30	46,15	502.854.500,00	446.287.183,00	88,75	Karena permintaan pemeliharaan kendaraan yang tidak terlalu banyak sehingga prosentase tidak mencapai 100%
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Mebel	1	1	100	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung	12	12	100	104.696.000,00	104.552.000,00	99,86	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran (P.APBD)	Realisasi	%	Keterangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sarana dan Prasarana	416	240	57,69	687.401.010,00	675.533.365,00	98,27	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persen	100	100	100	842.993.937,00	765.119.244,00	90,76	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	2	100	118.051.937,00	91.509.244,00	77,52	Target dan realisasi belanja tidak terpenuhi dikarenakan tidak adanya pejabat Wakil Walikota dalam pemerintahan Daerah Kota Probolinggo
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	9	9	100	124.942.000,00	103.610.000,00	82,93	Target dan realisasi belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Upacara (PDU) dll untuk keperluan Walikota tidak terpenuhi sedangkan pagu dan realisasi anggaran (selisih 21,5 juta rencana belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Upacara (PDU) dll hanya tercukupi 7 paket dari rencana 9 paket)
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	0	0	0	0,00	0	0,00	Target dan realisasi rencana belanja Medical Check Up untuk keperluan Walikota tidak terpenuhi atau tidak dilaksanakan karena pagu anggaran di refocussing
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	2	100	600.000.000,00	570.000.000,00	95,00	
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kerumahtanggaan pimpinan	Persen	100	100	100	6.082.676.953,00	4.620.926.652,00	75,97	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran (P.APBD)	Realisasi	%	Keterangan
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	7	7	100	5.874.465.953,00	4.550.433.779,00	77,46	Ada beberapa belanja tidak dapat dimaksimalkan disebabkan realisasi belanja yang harus menyesuaikan kegiatan dan arahan langsung Kepala Daerah ; meliputi honorarium narasumber, belanja bahan bakar pelumas, belanja bibit ikan, belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan.
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	5	5	100	140.482.500,00	40.936.773,00	29,14	Realisasi sangat rendah disebabkan rumah dinas tidak digunakan, sehingga Belanja tagihan air, listrik dan internet terealisasi sangat minimal
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	5	5	100	67.728.500,00	29.556.100,00	43,64	Realisasi sangat rendah disebabkan rumah dinas tidak digunakan, sehingga Belanja tagihan air, listrik dan internet terealisasi sangat minimal
Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien	Persen	100	100	100	380.183.007,00	375.247.992,00	98,70	
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	15	15	100	154.165.907,00	150.962.780,00	97,92	
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	6	6	100	56.745.200,00	56.027.783,00	98,74	
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	10	10	100	169.271.900,00	168.257.429,00	99,40	
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	4.324.311.796,00	3.539.453.434,00	81,85	
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	12	12	100	1.430.232.500,00	1.023.865.944,00	71,59	- Terdapat Anggaran Belanja Jasa Tenaga kesenian dan budaya untuk giat Hadipro yang tidak dapat direalisasikan dikarenakan dijadikan 1 memakai anggaran bagian sarpras bukan tiap bagian



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran (P.APBD)	Realisasi	%	Keterangan
									- peresmian ar rozy sudah include semua dalam belanja jasa penyelenggaraan acara, sehingga anggaran yang telah direncanakan tidak dapat terealisasi.
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	12	12	100	2.894.079.296,00	2.515.587.490,00	86,92	- Pada Tahun 2023 hanya terdapat 3 agenda perjalanan dinas ke luar negeri dan terdapat 1 giat yang dibatalkan karena dari pihak penyelenggara terdapat kendala. sehingga hanya 2 giat DL Luar negeri yang terealisasikan; - belanja sewa hotel tidak terserap maksimal dikarenakan pada giat refleksi rencana awal akan mengundang tamu luar kota, tetapi pada pelaksanaan sesuai dengan arahan terakhir tidak melibatkan pihak luar; - perjalanan dinas yang rencananya dijadwalkan ke luar daerah ke medan tidak dapat terlaksana dikarenakan tidak ada tindak lanjut atas permohonan yang telah dikirimkan
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Layanan Pemerintahan Bidang Hukum Yang terselesaikan	Persen	100	95,93	95,93	1.322.630.850,00	1.243.849.884,00	94,04	
	Persentase rumusan kebijakan yang ditetapkan di bidang pemerintahan	Persen	100	100	100	1.176.691.847,00	1.033.140.366,00	87,80	
	Persentase rumusan kebijakan yang ditetapkan di bidang kesejahteraan rakyat	Persen	100	100	100	14.686.222.521,00	12.745.889.528,00	86,79	
Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase tata kelola pemerintahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Persen	100	92,86	92,86	1.155.840.018,00	1.012.731.966,00	87,62	
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	6	6	100	232.253.918,00	212.978.466,00	91,70	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran (P.APBD)	Realisasi	%	Keterangan
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	6	5	83,33	870.085.000,00	746.860.100,00	85,84	Fasilitasi pembahasan dan mekanisme yang panjang pada proses penetapan regulasi terkait pemberian penghargaan atas pencapaian kinerja bagi ketua RT RW dan LPM sehingga baru ditetapkan pada akhir tahun 2023 menyebabkan realisasi pemberian penghargaan atas pencapaian kinerja bagi Ketua RT RW dan LPM yang sedianya dilaksanakan 3 kali dalam setahun baru dapat terealisasi di akhir tahun 2023, sehingga realisasi anggaran kegiatan pendukung hanya bisa dilaksanakan sekali saja.
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	2	2	100	53.501.100,00	52.893.400,00	98,86	
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase perumusan kebijakan bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat yang terfasilitasi	Persen	100	100	100	14.686.222.521,00	12.745.889.528,00	86,79	
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	8	8	100	6.464.662.690,00	5.616.478.292,00	86,88	1. Perjalanan Dinas yang diperuntukan Ziarah untuk masyarakat tidak terserap secara maksimal karena proposal yang diajukan oleh masyarakat terlambat (diajukan di bulan Desember). 2. Pemberian penghargaan bagi guru pondok pesantren tidak bisa terserap dikarenakan regulasi yang mengatur belum selesai masih dalam proses
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi	Dokumen	502	502	100	7.966.803.621,00	6.874.910.936,00	86,29	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran (P.APBD)	Realisasi	%	Keterangan
	Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB								
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	2	2	100	254.756.210,00	254.500.300,00	99,90	
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Layanan Pemerintahan Bidang Hukum Yang terselesaikan	Persen	100	91,3	91,30	1.322.630.850,00	1.243.849.884,00	94,04	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	350	370	105,71	101.260.900,00	100.523.400,00	99,27	
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	74	91	122	1.016.784.250,00	941.270.700,00	92,57	
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	300	357	119,00	204.585.700,00	202.055.784,00	98,76	
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase naskah kesepakatan bersama yang diimplementasikan menjadi perjanjian kerjasama	Persen	100	97,72	97,72	20.851.829,00	20.408.400,00	97,87	
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	43	43	100	20.326.829,00	20.108.400,00	98,93	
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	1	0	0,00	525.000,00	300.000,00	57,14	fasilitasi kerja sama yang dilaksanakan hanya sampai tahap sosialisasi penawaran kerja sama
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	Persen	100	100	100	1.387.741.628,00	1.102.897.458,00	79,47	
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang terfasilitasi	Persen	100	100	100	669.554.020,00	448.644.830,00	67,01	Karena Ijin Pendirian BUMD dari Kemendagri Belum Turun
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan	Dokumen	9	9	100	75.108.640,00	74.893.430,00	99,71	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran (P.APBD)	Realisasi	%	Keterangan
Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD								
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	6	6	100	325.426.380,00	320.013.600,00	98,34	
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	2	2	100	4.169.000,00	4.143.000,00	99,38	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen	3	3	100	264.850.000,00	49.594.800,00	18,73	Karena Ijin Pendirian BUMD dari Kemendagri Belum Turun
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Laporan Pembangunan yang terselesaikan tepat waktu	Persen	100	100	100	19.703.500,00	17.183.500,00	87,21	
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	1	1	100	19.703.500,00	17.183.500,00	87,21	Terdapat Anggaran Belanja Jasa makan minum rapat sudah memenuhi target sehingga tidak terserap
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase layanan pengadaan barang dan jasa yang terselesaikan tepat waktu	Persen	100	100	100	325.275.888,00	323.199.068,00	99,36	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	45	45	100	57.877.790,00	57.686.330,00	99,67	
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	350	350	100	251.353.538,00	250.722.238,00	99,75	
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	40	40	100	16.044.560,00	14.790.500,00	92,18	
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang terfasilitasi	Persen	100	100	100	373.208.220,00	313.870.060,00	84,10	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	1	1	100	345.575.580,00	286.808.380,00	82,99	Terdapat Anggaran Belanja Jasa Honorarium yang tidak diserap dikarenakan pengurangan anggota TIM
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan	Dokumen	1	1	100	27.632.640,00	27.061.680,00	97,93	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran (P.APBD)	Realisasi	%	Keterangan
	Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan								

Sumber : Sekretariat Daerah, 17 Januari 2024

17. Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH									
JUMLAH PENDAPATAN									
BELANJA DAERAH									
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	Presentasi kinerja program minimal 80%	%	100	100	100	24.912.889.186,00	24.296.353.735,00	97,53	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentasi Capaian kinerja Perangkat Daerah Minimal 80%	%	100	100	100	110.624.000,00	79.417.900,00	71,79	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat DAerah	Dokumen	2	2	100	5.200.000,00	5.120.500,00	98,47	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	6	6	100	105.424.000,00	74.297.400,00	70,47	Kegiatan penyusunan dokumen Probis-SOP tidak terlaksana karena terkendala etalase pada ecatalog
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentasi Administrasi Keuangan sesuai Ketentuan	%	100	100	100	4.683.707.612,00	4.540.841.041,00	96,95	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	36	36	100	4.375.318.022,00	4.237.137.961,00	96,84	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	1	1	100	266.779.000,00	263.097.000,00	98,62	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	laporan	1	1	100	41.610.590,00	40.606.080,00	97,59	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APD)	REALISASI	%	Keterangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L keuangan								
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentasi Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	231.597.600,00	208.586.000,00	90,06	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang/bulan	37	4	11	231.597.600,00	208.586.000,00	90,06	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentasi Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	1.242.808.774,00	1.175.172.776,00	94,56	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	100	579.506.974,00	548.942.239,00	94,73	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	6	6	100	93.430.000,00	88.811.437,00	95,06	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	2	100	26.000.000,00	26.000.000,00	100	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	2	100	50.000.000,00	48.900.000,00	97,8	
Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1	0	0	1.500.000,00	0	0	Belanja Modal Buku belum ada RKBMD
Fasilitasi Kunjungan Tamu (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12	12	100	44.995.300,00	44.995.300,00	100	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	20	20	100	314.504.000,00	286.904.400,00	91,22	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	1	0	0	0	0	0	Refocusing anggaran
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	12	12	100	132.872.500,00	130.619.400,00	98,3	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	%	100	100	100	1.434.045.448,00	1.400.964.548,00	97,69	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	12	100	52.000.000,00	44.498.000,00	85,57	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	100	283.975.138,00	270.371.183,00	95,21	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	9	9	100	578.778.840,00	570.059.500,00	98,49	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	100	519.291.470,00	516.036.865,00	99,37	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	%	100	100	100	1.405.233.260,00	1.332.091.026,00	94,8	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	6	6	100	236.251.800,00	234.847.600,00	99,41	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	14	14	100	272.035.200,00	268.418.990,00	98,67	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	11	11	100	266.893.080,00	232.709.506,00	87,19	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	100	299.800.000,00	296.313.300,00	98,84	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	100	100	100	330.253.180,00	299.801.630,00	90,78	
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi	%	100	100	100	15.673.397.992,00	15.428.284.944,00	98,44	
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	orang/bulan	30	30	100	15.378.167.992,00	15.177.430.944,00	98,69	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	paket	90	90	100	250.230.000,00	248.730.000,00	99,4	
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	orang	30	2	7	45.000.000,00	2.124.000,00	4,72	anggota DPRD kurang memanfaatkan fasilitas medical checkup
Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi	%	100	100	100	131.474.500,00	130.994.500,00	99,63	
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	dokumen	1	0	0	480.000,00	0	0	sudah tersedianya KTA
Fasilitasi Fraksi DPRD (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	laporan	7	6	86	34.994.500,00	34.994.500,00	100	
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	laporan	12	9	75	96.000.000,00	96.000.000,00	100	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	73	78,53	108	19.308.343.190,00	16.346.847.963,00	84,66	
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terlaksana	%	100	100	100	1.134.049.880,00	731.492.810,00	64,5	dikarenakan Mobilitas DPRD yang terlalu tinggi sehingga tidak dapat melaksanakan pembahasan
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	dokumen	1	1	100	176.613.700,00	97.041.400,00	54,95	karena Untuk anggaran perdin cukup via wa karena biro hukum banyak kegiatan sehingga tidak bisa menerima tamu koordinasi. Untuk anggaran mamin dicover anggaran karena jadwal pembahasan bersamaan.
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	dokumen	8	6	75	866.436.180,00	560.460.360,00	64,69	dikarenakan Mobilitas DPRD yang terlalu tinggi sehingga tidak dapat melaksanakan pembahasan
Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan	dokumen	1	1	100	45.000.000,00	38.000.000,00	84,44	Mobilitas Dewan yang padat



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	dokumen	1	1	100	45.000.000,00	35.991.050,00	79,98	Karena tidak tercapai penyusunan NA & Raperda inisiatif DPRD sehingga tes uji public di terpenuhi Target raperda 23 Realisasi 9.
Penyusunan Tala Tertib DPRD (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	dokumen	1	0	0	1.000.000,00	0	0	
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	%	100	100	100	596.720.770,00	528.863.790,00	88,63	
Pembahasan KUA dan PPAS (SEKRETARIAT DPRD)	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	%	1	1	100	267.612.070,00	218.442.790,00	81,63	
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	dokumen	1	1	100	28.921.500,00	27.480.000,00	95,02	
Pembahasan APBD (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	dokumen	1	1	100	204.779.700,00	188.721.000,00	92,16	
Pembahasan APBD Perubahan (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	dokumen	1	1	100	52.345.000,00	51.850.000,00	99,05	
Pembahasan Laporan Semester (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	dokumen	1	0	0	2.000.000,00	1.695.000,00	84,75	
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	dokumen	1	1	100	41.062.500,00	40.675.000,00	99,06	
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	229.355.000,00	219.413.500,00	95,67	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	laporan	15	15	100	19.260.000,00	18.556.000,00	96,34	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	laporan	15	15	100	18.560.000,00	18.560.000,00	100	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	laporan	15	15	100	18.760.000,00	18.425.000,00	98,21	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	laporan	15	15	100	18.760.000,00	18.200.000,00	97,01	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	laporan	15	15	100	18.760.000,00	18.425.000,00	98,21	
Pengawasan Tidak Lanjut Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	laporan	1	1	100	20.400.000,00	20.400.000,00	100	
Pengawasan Penggunaan Anggaran (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	laporan	1	1	100	75.510.000,00	67.810.000,00	89,8	
Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	dokumen	1	1	100	39.345.000,00	39.037.500,00	99,22	
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	%	100	100	100	3.106.786.937,00	2.259.009.595,00	72,71	
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	dokumen	180	150	83	2.630.482.520,00	1.800.859.595,00	68,46	Karena jadwal bimtek dianggarkan perorangan untuk Bimtek Partai dan tidak semua partai mengadakan kegiatan Bimtek
Publikasi dan Dokumentasi Dewan (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	dokumen	55	55	100	203.765.417,00	203.750.000,00	99,99	
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	orang	1	0	0	17.500.000,00	0	0	Terkendala dengan padatnya kegiatan DPRD
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	orang	7	7	100	252.000.000,00	252.000.000,00	100	
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	dokumen	0	0	0	0	0	0	Refocusing
Penyusunan Program Kerja DPRD (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	dokumen	1	0	0	3.039.000,00	2.400.000,00	78,97	terkendala dengan padatnya kegiatan DPRD
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang diakomodir	%	100	100	100	1.121.650.000,00	874.966.150,00	78,01	
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	dokumen	30	30	100	20.000.000,00	18.550.000,00	92,75	
Pelaksanaan Reses (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	dokumen	90	90	100	1.101.650.000,00	856.416.150,00	77,74	Karena dalam pelaksanaan Reses untuk belanja sewa



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
									tempat/tenda untuk kegiatan reses harga lebih rendah daripada pagu anggaran {efisiensi}
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	%	100	0	0	0	0	0	
Penyusunan kode Etik DPRD (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	dokumen	0	0	0	0	0	0	
Pengawasan Kode Etik DPRD (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	laporan	0	0	0	0	0	0	
Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Kerja Sama Daerah	%	100	0	0	900.000,00	0	0	
Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	dokumen	1	0	0	500.000,00	0	0	Tidak ada NA yang dibahas sehingga tidak ada kegiatan pembahasan kerjasama
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	dokumen	1	0	0	400.000,00	0	0	Tidak ada NA yang dibahas sehingga tidak melakukan pembahasan dan menyusun bahan publikasinya
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	%	100	100	100	13.118.880.603,00	11.733.102.118,00	89,44	
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	dokumen	550	670	122	13.103.680.603,00	11.717.902.118,00	89,42	
Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (SEKRETARIAT DPRD)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	dokumen	30	30	100	15.200.000,00	15.200.000,00	100	

Sumber : Sekretariat DPRD, 17 Januari 2024

18. Perangkat Daerah : Inspektorat

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH									
JUMLAH PENDAPATAN									
BELANJA DAERAH						9.830.226.002	9.111.884.644	92,69	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	94	100	106	7.084.880.359	6.680.571.197	94,29	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%	%	90	100	111	27.439.700	26.605.700	96,96	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4	4	100	9.478.000	8.995.900	94,91	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD yang Disusun Sesuai Dengan Ketentuan	laporan	4	4	100	17.961.700	17.609.800	98,04	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu	%	100	100	100	6.480.097.472	6.161.535.037	95,08	
	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%	%	100	100	100				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Realisasi Gaji dan Tunjangan ASN yang Tepat Waktu	%	100	100	100	6.205.469.112	5.910.583.407	95,25	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Penatausahaan Keuangan yang Terverifikasi	%	100	100	100	265.034.460	241.511.630	91,12	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan PD yang Disusun Tepat Waktu	laporan	2	2	100	9.593.900	9.440.000	98,4	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	%	100	100	100	335.792.359	313.906.008	93,48	
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi	%	100	100	100				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpenuhi	%	100	100	100	78.715.759	74.969.397	95,24	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Barang Cetak dan Penggandaan yang Terpenuhi	%	100	100	100	8.435.000	8.350.000	98,99	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Kunjungan Tamu yang Terfasilitasi	%	100	100	100	17.600.000	14.999.000	85,22	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Terpenuhi	%	100	100	100	231.041.600	215.587.611	93,31	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100	61,11	61,11	61.250.000	52.545.000	85,79	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Realisasi Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	unit	18	11	61	61.250.000	52.545.000	85,79	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	%	100	100	100	116.356.000	65.926.652	56,66	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Terpenuhi	%	100	100	100	116.356.000	65.926.652	56,66	penyesuaian beban tagihan listrik setelah tambah daya namun realisasi atas tagihan tersebut tiap bulannya hampir sama dengan sebelum kenaikan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	%	100	100	100	63.944.828	60.052.800	93,91	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpenuhi	%	100	100	100	21.548.828	19.837.800	92,06	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	%	100	100	100	35.670.000	33.504.500	93,93	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%	100	100	100	6.726.000	6.710.500	99,77	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase PD dengan hasil evaluasi kinerja minimal memuaskan	%	70	71,42	102	1.979.801.443	1.724.761.947	87,12	
	Persentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan	%	90	90	100				
	Persentase penanganan kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	100				
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal A	%	70	71,42	102	1.748.776.543	1.509.167.047	86,30	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
	Persentase Perangkat Daerah yang telah terbebas dari temuan yang bersifat material	%	90	91,96	102				
	Persentase tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan	%	90	90	100				
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	laporan	28	39	139	396.595.900	368.943.108	93,03	
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	laporan	28	31	111	666.848.400	638.891.274	95,81	
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	laporan	28	29	104	249.375.900	195.188.625	78,27	dikarenakan anggaran mamin peserta rapat tidak proporsional dengan anggaran narasumber sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	laporan	28	43	154	229.392.553	173.854.400	75,79	dikarenakan anggaran mamin peserta rapat tidak proporsional dengan anggaran narasumber sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan
Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	kesepakatan	1	1	100	121.496.200	78.660.500	64,74	karena menyediakan tenaga ahli untuk pemeriksaan arrozi ternyata pemeriksaan tidak dilaksanakan
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	dokumen	4	4	100	85.067.590	53.629.140	63,04	dikarenakan terdapat pergantian pejabat penanggungjawab menjelang akhir tahun sehingga tidak dapat terlaksana dengan optimal
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase permasalahan pengawasan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	231.024.900	215.594.900	93,32	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	laporan	4	4	100	11.892.400	9.692.400	81,5	
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	laporan	27	27	100	219.132.500	205.902.500	93,96	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Maturitas SPIP	level	3	3	100	765.544.200	706.551.500	92,29	
Pendampingan dan Asistensi	Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	%	66	94,38	143	765.544.200	706.551.500	92,29	
	Persentase Perangkat Daerah yang maturitas SPIP sampai tingkat "terdefinisi"	%	57	57	100				
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	PD	28	28	100	116.816.000	96.597.100	82,69	
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	kegiatan	7	7	100	648.728.200	609.954.400	94,02	

Sumber : Inspektorat, 17 Januari 2024

19. Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Uraian	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH									
JUMLAH PENDAPATAN									
BELANJA DAERAH						9.213.168.254	8.738.587.938	94,85	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase capaian kinerja Program minimal 80%	Persentase	85	85	100	7.149.711.114	6.818.947.745	95,37	
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Persentase	86	100	116	46.327.790	42.107.080	90,89	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	Dokumen	4	4	100	42.522.790	41.103.280	96,66	



Uraian	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4	4	100	3.805.000	1.003.800	26,38	Realisasi tidak maksimal pada honor narasumber Walikota karena bapak walikota tidak bisa menghadiri dan mamin tidak bisa diajukan tanpa menghadirkan pihak luar
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	Persentase	100	100	100	6.098.937.352	5.824.972.980	95,51	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Realisasi gaji dan Tunjangan ASN yang tepat Waktu	Persentase	100	100	100	5.891.538.792	5.620.547.380	95,40	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase Dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi	Persentase	100	100	100	90.846.000	90.845.700	100,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	Dokumen	2	2	100	116.552.560	113.579.900	97,45	
ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi BMD Sesuai Ketentuan	Persentase	100	100	100	1.488.000	1.438.000	96,64	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Persentase	100	100	100	1.488.000	1.438.000	96,64	
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan PD Sesuai Ketentuan	Persentase	80	80	100	8.880.000	8.082.950	91,02	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai	Orang	80	80	100	6.350.000	5.714.200	89,99	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	80	80	100	2.530.000	2.368.750	93,63	
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Umum PD sesuai ketentuan	Persentase	100	100	100	366.736.500	326.829.034	89,12	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	100	57.876.900	56.368.450	97,39	



Uraian	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100	4.874.500	4.839.400	99,28	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	3	75	8.050.000	7.949.900	98,76	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	6	50	9.318.000	9.315.000	99,97	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	Persen	100	100	100	7.500.000	7.184.000	95,79	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persen	100	100	100	184.052.100	150.835.349	81,95	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	12	100	95.065.000	90.336.935	95,03	
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	persentase BMD perangkat daerah yang terpenuhi	Prosentase	100	100	100	32.000.000	30.500.000	95,31	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Paket	4	4	100	32.000.000	30.500.000	95,31	
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	persentase ketatalaksanaan tepat waktu	Laporan	5	5	100	429.273.172	421.181.132	98,11	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase	0	0	0	0	0	0,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100	123.309.212	122.536.012	99,37	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100	305.963.960	298.645.120	97,61	
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase BMD yang terpenuhi	Prosentase	86	86	100	166.068.300	163.836.569	98,66	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	1	100	27.939.300	27.610.000	98,82	



Uraian	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	13	100	50.491.500	50.001.999	99,03	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	4	100	25.157.500	24.708.500	98,22	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	umlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita	Unit	1	1	100	50.000.000	49.536.070	99,07	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100	12.480.000	11.980.000	95,99	
PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	persentase keselarasan dokumen perencanaan	Persen	90	90	100	1.009.422.940	962.814.520	95,38	
PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	persentase keselarasan dokumen perencanaan	Persen	90	100	111	761.529.580	725.316.678	95,24	
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	1	100	80.377.790	76.495.228	95,17	
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	2	2	100	681.151.790	648.821.450	95,25	
ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan	Persen	95	95	100	247.893.360	237.497.842	95,81	
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	2	2	100	13.345.000	13.000.490	97,42	
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan	Persen	100	100	100	117.274.180	112.248.676	95,71	



Uraian	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja sama daerah yang dikoordinasikan pelaksanaannya	Kerjasama	1	1	100	750.000	750.000	100,00	
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Dokumen	4	4	100	116.524.180	111.498.676	95,69	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang perekonomian dan SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan yang menyusun dokumen Berkualitas baik	Persen	100	100	100	685.886.810	597.675.379	87,14	Dikarenakan pada rekening belanja honorarium narasumber atau pembahas. moderator, pembawa acara dan panitia kurang tepatnya perencanaan penganggaran melalui dukungan mamin rapat tidak mencukupi guna mengakomodir sejumlah acara yang dibutuhkan untuk optimalisasi belanja honorarium dimaksud
COORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia yang menyusun dokumen Berkualitas baik	Persen	100	100	100	286.325.560	234.798.590	82,00	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Persen	34	34	100	107.306.180	83.540.439	77,85	Dikarenakan pada rekening belanja honorarium narasumber atau pembahas. moderator, pembawa acara dan panitia kurang tepatnya perencanaan penganggaran melalui dukungan mamin rapat tidak mencukupi guna mengakomodir sejumlah acara yang dibutuhkan untuk optimalisasi belanja honorarium dimaksud
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia Jumlah	Laporan	27	27	100	179.019.380	151.258.151	84,49	



Uraian	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan								
KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang perekonomian dan SDA, yang menyusun dokumen Berkualitas baik	Persen	100	100	100	178.663.070	156.411.882	87,55	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	6	6	100	97.063.890	87.525.684	90,17	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	4	4	100	81.599.180	68.886.198	84,42	
KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang menyusun dokumen Berkualitas baik	Persen	100	100	100	220.898.180	206.464.907	93,47	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	16	16	100	125.579.590	117.339.490	93,44	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	16	16	100	95.318.590	89.125.417	93,50	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan dalam Perumusan Perencanaan Pembangunan	Persen	85	117,64	138	485.421.570	471.398.970	97,11	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persen	70	100	143	372.097.590	367.914.780	98,88	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi	Kajian	3	2	67	372.097.590	367.914.780	98,88	



Uraian	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum								
PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	Persentase Inovasi yang diterapkan di daerah	Persen	80	80	100	113.323.980	103.484.190	91,32	
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Inovasi	75	75	100	113.323.980	103.484.190	91,32	

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 17 Januari 2024

20. Perangkat Daerah : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran (P.Apbd)	Realisasi	%	Keterangan
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH						72.714.544.587,00	70.577.470.700,54	97,06	
PENDAPATAN TRANSFER						734.094.685.423,00	758.653.155.765,00	103,35	
JUMLAH PENDAPATAN						806.809.230.010,00	829.230.626.465,54	102,78	
BELANJA						59.559.090.081,00	39.500.676.180,00	66,32	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Persentase	97	66,67	68,73	43.020.494.207,00	31.270.127.349,00	72,69	
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Persentase	96	92,31	96,16	89.491.180,00	88.231.520,00	98,59	
Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100,00	86.771.180,00	85.511.520,00	98,55	
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7	7	100,00	2.720.000,00	2.720.000,00	100	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	Persentase	96	96	100,00	39.666.000.640,00	28.185.429.799,00	71,06	



Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran (P.Apbd)	Realisasi	%	Keterangan
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan Asn	Orang	115	115	100,00	38.969.577.980,00	27.556.590.259,00	70,71	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn Realisasi Anggaran Belum Mencapai 90% Disebabkan Karena : Pada Uraian Belanja Gaji Pokok Pppk, Tunjangan Keluarga Pppk, Tunjangan Fungsional Pppk, Tunjangan Beras Pppk Dan Pembulatan Gaji Pppk Tidak Terserap Dengan Maksimal Disebabkan Karena Jumlah Pengangkatan Tidak Sesuai Dengan Rencana Formasi, Dan Tmt Pengangkatan Yang Mundur Mengakibatkan Realisasi Anggaran Tidak Sesuai Perencanaan Awal Tahun Anggaran Sehingga Sisa Anggaran Gaji Pppk Menjadi Silpa Pada Tahun Berikutnya. Pada Uraian Belanja Insentif Bagi Asn Atas Pemungutan Retribusi Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah Dan Belanja Insentif Bagi Kdh/Wkdh Atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah Belum Terealisasi Dari Triwulan I S/D Triwulan Iii Karena Realisasi Penerimaan Pajak Belum Mencapai Target Sehingga Akan Terealisasi Pada Triwulan Berikutnya. Pada Uraian Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Pns Dan Tabungan Perumahan Pppk



Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran (P.Apbd)	Realisasi	%	Keterangan
									Tidak Diserap Karena Belum Ada Regulasi Pencairan.
Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	Dokumen	6132	6132	100,00	663.321.260,00	599.275.040,00	90,34	
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd Dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem Skpd	Laporan	33	33	100,00	33.101.400,00	29.564.500,00	89,31	
Administrasi Barang Milik Daerah Pada perangkat Daerah	Persentase Administrasi Bmd Sesuai Ketentuan	Persentase	94	94	100,00	121.017.770,00	104.722.730,00	86,54	
Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd	Laporan	20	20	100,00	121.017.770,00	104.722.730,00	86,54	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Kewenangan Pd Sesuai Ketentuan	Persentase	95	95	100,00	542.167.600,00	476.614.000,00	87,91	
Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	180	180	100,00	504.341.600,00	464.768.000,00	92,15	
Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Orang	15	13	86,67	37.826.000,00	11.846.000,00	31,32	Dikarenakan Tidak Ada Perintah Dan Tugas Untuk Pendidikan Dan Pelatihan Pada ASN Yang Baru
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase	96	96	100,00	1.100.575.250,00	984.739.616,00	89,47	
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	216	216	100,00	203.501.500,00	203.271.000,00	99,89	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Paket	96	96	100,00	48.000.000,00	32.603.500,00	67,92	Tidak Ada Penyedia Yang Terdaftar Di E-Katalog Terkait Belanja Tersebut
Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak Dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	7	7	100,00	120.558.000,00	116.985.000,00	97,04	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4	100,00	49.278.200,00	48.832.000,00	99,09	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Laporan	12	12	100,00	281.790.300,00	221.288.019,00	78,53	Karena Di Skpd Lain Anggaran Paket Meeting Dikosongi Jadi Volume Perdin Ibu Kaban Berkurang



Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran (P.Apbd)	Realisasi	%	Keterangan
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Dokumen	12	12	100,00	397.447.250,00	361.760.097,00	91,02	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Bmd Yang Terpenuhi	Persentase	96	96	100,00	343.582.890,00	303.530.000,00	88,34	
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Unit	7	7	100,00	343.582.890,00	303.530.000,00	88,34	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	Persentase	97	97	100,00	343.428.500,00	323.393.738,00	94,17	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00	325.417.500,00	308.393.738,00	94,17	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Laporan	36	36	100,00	18.011.000,00	15.000.000,00	83,28	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Bmd Yang Terpelihara	Persentase	94	94	100,00	814.230.377,00	803.465.946,00	98,68	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	34	34	100,00	265.175.377,00	263.441.478,00	99,35	
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Unit	235	235	100,00	291.150.000,00	284.785.000,00	97,81	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	69	69	100,00	257.905.000,00	255.239.468,00	98,97	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Perbendaharaan Dan Kas Daerah Yang Tepat	Persentase	100	100	100,00	13.423.550.713,00	5.480.549.702,00	40,83	Realisasi Btt Bergantung Pada Pengajuan Skpd Atas Terjadinya Keadaan Darurat Dan Keperluan Mendesak Yang Tidak Dapat Diprediksi Sebelumnya Sehingga Unsur Realisasinya Tidak Dapat Dipastikan



Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran (P.Apbd)	Realisasi	%	Keterangan
Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	246	246	100,00	1.735.313.970,00	1.682.812.513,00	96,97	
Koordinasi Dan Penyusunan Kua Dan PPAS	Jumlah Dokumen Kua Dan Ppas Yang Disusun	Dokumen	2	2	100,00	643.545.490,00	637.892.015,00	99,12	
Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Kua Dan Dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan Kua Dan Perubahan Ppas Yang Disusun	Dokumen	2	2	100,00	56.880.000,00	56.273.510,00	98,93	
Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Apbd Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Apbd Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	2	100,00	214.237.200,00	200.939.046,00	93,79	
Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Apbd Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan Apbd Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	2	100,00	783.298.280,00	752.257.442,00	96,04	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	12	12	100,00	37.353.000,00	35.450.500,00	94,91	
Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang Melakukan Penatausahaan Dengan Tepat	Skpd	28	28	100,00	1.262.518.910,00	1.235.534.281,00	97,86	
Koordinasi Dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	246	246	100,00	170.111.080,00	169.161.610,00	99,44	
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian Dan Penerbitan Anggaran Kas Dan Spd	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Dan Penerbitan Anggaran Kas Dan Spd	Dokumen	570	570	100,00	97.149.000,00	94.055.200,00	96,82	
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, Dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan Dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, Dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan Dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	35	22	62,86	96.714.590,00	94.246.673,00	97,45	
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama Dan Pemantauan Transaksi Non Tunai Dengan Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama Dan Pemantauan Transaksi Non Tunai Dengan Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Laporan	2	2	100,00	97.299.000,00	85.226.750,00	87,59	
Rekonsiliasi Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan Dan Pengeluaran	Dokumen	30	30	100,00	52.382.000,00	52.244.891,00	99,74	



Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran (P.Apbd)	Realisasi	%	Keterangan
Pemungutan Dan Pemotongan Atas Sp2d Dengan Instansi Terkait	Kas Serta Pemungutan Dan Pemotongan Atas Sp2d Dengan Instansi Terkait								
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	156	156	100,00	748.863.240,00	740.599.157,00	98,9	
Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Pengelolaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Sesuai Dengan Aturan	Persentase	100	100	100,00	697.197.950,00	667.531.408,00	95,74	
Rekonsiliasi Dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendataan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- Lo Dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-Lo, Dan Beban	Dokumen	312	312	100,00	162.511.180,00	161.613.160,00	99,45	
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Bulanan, Triwulanan Dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Bulanan, Triwulanan Dan Semesteran	Laporan	17	17	100,00	97.634.770,00	94.009.290,00 (96,29	
Konsolidasi Laporan Keuangan Skpd, Blud Dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Skpd, Blud Dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Terkonsolidasi	Laporan	36	36	100,00	246.185.500,00	233.115.000,00	94,69	
Koordinasi Dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Kabupaten / Kota Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Kabupaten / Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Kabupaten/Kota Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	100,00	49.468.000,00	49.186.510,00	99,43	
Penyusunan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	2	2	100,00	5.075.000,00	5.069.000,00	99,88	
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Dan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Dan	Orang	75	75	100,00	109.239.500,00	99.943.100,00	91,49	



Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran (P.Apbd)	Realisasi	%	Keterangan
Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota								
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Blud Kabupaten / Kota	Jumlah Blud Kabupaten/Kota Yang Dibina	Lembaga 6 Puskesmas Dan 1 Rsud	7	7	100,00	27.084.000,00	24.595.348,00	90,81	
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase	100	25	25,00	9.728.519.883,00	1.894.671.500,00	19,48	Tidak Tercapainya Dikarenakan Penyesuaian Laporan Sp2d Tiap Pengajuan
Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase	100	25	25,00	9.728.519.883,00	1.894.671.500,00	19,48	Tidak Tercapainya Dikarenakan Penyesuaian Laporan Sp2d Tiap Pengajuan
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah Yang Valid Dan Akuntabel	Persentase	88	88	100,00	975.788.950,00	871.018.324,00	89,26	
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah Yang Valid Dan Akuntabel	Persentase	88	1	1,14	975.788.950,00	871.018.324,00	89,26	
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga Yang Disusun	Dokumen	1	2	200,00	40.466.200,00	28.779.368,00	71,12	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	2	100,00	16.620.000,00	15.620.000,00	93,88	
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	28	28	100,00	76.967.590,00	51.261.890,00	66,6	Dikarenakan Refocusing Anggaran Pada Pertengahan Tahun 2023 Yang Mengurangi Anggaran Untuk Paket Meeting Luar Kota, Sehingga Belanja Perjalanan Dinas Yang Merupakan Pendukung Kegiatan Paket Meeting Luar Kota Tidak Dapat Terserap Maksimal.
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	50	154	308,00	637.650.880,00	592.550.383,00	92,03	
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	10	10	100,00	148.306.280,00	132.213.810,00	89,15	



Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran (P.Apbd)	Realisasi	%	Keterangan
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Yang Disusun	Laporan	1	1	100,00	55.778.000,00	50.592.873,00	90,7	
Program Pengelolaan Pendapatan daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah	Persentase	3	2	66,67	2.139.256.211,00	1.878.980.805,00	87,83	
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah	Persentase	3	2	66,67	2.139.256.211,00	1.878.980.805,00	87,83	
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	35	35	100,00	82.575.100,00	82.103.200,00	99,43	
Pendataan Dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan Dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	8	8	100,00	686.262.900,00	562.504.850,00	81,07	
Pengolahan, Pemeliharaan, Dan Pelaporan Basis Data Pajak	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, Dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	2500	1944	77,76	37.582.000,00	36.973.600,00	96,38	
Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbbp2) Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb)	Jumlah Objek Pajak Yang Dilakukan Pemutakhiran Data	Obyek Pajak	3000	2871	95,70	440.801.431,00	410.723.965,00	93,18	
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	75000	76484	101,98	10.873.500,00	6.056.500,00	55,70	Dikarenakan Biaya Pemeliharaan Printer Printonic Lebih Tinggi Dari Pada Anggaran Yang Ada
Pelayanan Dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan Dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	14000	16305	116,46	51.080.000,00	38.267.300,00	74,92	Kurang Maksimalnya Perjalanan Dinas Dikarenakan Belum Ada Undangan Sosialisasi dari Kementerian. Dimana Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas deruntukan Untuk Menghadiri Dan Koordinasi Ke Kementerian
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	75000	76568	102,09	593.165.780,00	510.314.390,00	86,03	



Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran (P.Apbd)	Realisasi	%	Keterangan
Pengendalian, Pemeriksaan Dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian Dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	14	14	100,00	198.495.500,00	193.617.000,00	97,54	
Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	5	5	100,00	38.420.000,00	38.420.000	100	

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 17 Januari 2024

21. Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH									
JUMLAH PENDAPATAN									
BELANJA						7.688.765.251	7.007.642.650	91,14	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	83	100	120,48	5.982.236.651	5.537.324.942	92,56	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	persentase	99	72,73	73,46	54.983.000	1.468.000	2,67	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	5	5	100,00	3.218.000	498.000	15,48	Mamin Rapat Internal yang tidak bisa menyerap anggaran sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku Upaya untuk mencapai target : Mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan peserta Rapat dari OPD terkait
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	laporan	12	11	91,67	51.765.000	970000	1,87	belum terlaksananya kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								(SKM) Diagendakan tahun 2024
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	persentase	100	109,03	109,30	5.178.446.991	4.890.284.021	94,44	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	41	41	100,00	5.073.389.991	4.797.248.421	94,56	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	500	483	96,60	103.477.000	91.520.600	88,45	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan	2	2	100,00	1.580.000	1.515.000	95,89	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	persentase	100	75,54	75,54	335.219.600	286.655.934	85,51	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	12	9	75,00	51.256.900	39.023.500	76,13	Dikarenakan adanya belanja melalui e-purchasing dan Kurangnya pemahaman pihak ketiga terkait e-purchasing
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12	9	75,00	95.214.450	83.015.560	87,19	Dikarenakan adanya belanja melalui e-purchasing dan Kurangnya pemahaman pihak ketiga terkait e-purchasing
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	12	100,00	37.207.500	33.197.500	89,22	Dikarenakan adanya belanja melalui e-purchasing dan Kurangnya pemahaman pihak ketiga terkait e-purchasing
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	730	560	76,71	4.380.000	3.360.000	76,71	Karena sekarang hanya berlangganan dengan 2 penyedia koran
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	11	91,67	14.000.000	13.091.500	93,51	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	30	28	93,33	57.531.000	48.042.700	83,51	Karena berkurangnya penyelenggaraan kegiatan di luar daerah



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	12	12	100,00	75.629.750	66.925.174	88,49	karena adanya penambahan internet dari kominfo
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	persentase	100	77,78	77,78	248.342.696	228.804.506	92,13	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	5	41,67	950.000	780.000	82,11	Dikarenakan berkurangnya pengiriman surat dari bidang
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	100,00	131.308.256	113.400.376	86,36	Karena adanya penghematan pemakaian listrik,telpon,dan air
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	13	108,33	116.084.440	114.624.130	98,74	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	persentase	100	112,24	112,24	165.244.364	130.112.481	78,74	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	1	1	100,00	29.300.000	20.434.500	69,74	Karena berkurangnya mobilitas menggunakan kendaraan sehingga berpengaruh di pemeliharaan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	15	14	93,33	43.891.674	32.330.981	73,66	Karena berkurangnya mobilitas menggunakan kendaraan sehingga berpengaruh di pemeliharaan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	32	35	109,38	31.236.900	17.313.000	55,42	Dikarenakan adanya belanja Servis melalui e-purchasing dan Kurangnya pemahaman pihak ketiga terkait e-purchasing
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	1	50,00	60.815.790	60.034.000	98,71	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Capaian Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara	%	90	135,35	150,39	1.372.228.600	1.160.670.608	84,58	
	Persentase Capaian Layanan Kepegawaian	%	95	112,44	118,36				



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
	Persentase Capaian Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	%	75	67,84	90,45				
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara yang Terselesaikan	persentase	95	136,59	143,78	538.186.100,00	414.446.089	77,01	
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	dokumen	2	2	100,00	6.484.800,00	6.406.595	98,79	
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	dokumen	494	543	109,92	365.841.998,00	247.398.994	67,62	Kegiatan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2023 dilakukan secara marathon dengan Kebijakan Optimalisasi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022 sebagai tindak lanjut atas hasil Evaluasi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2022, dimana pemberitahuan mengenai mekanisme dan prosedur pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2023 diterbitkan secara hampir bersamaan dengan penetapan ketentuan-



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
									ketentuan yang mengatur pelaksanaan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2023. Oleh karena itu, terdapat beberapa tahapan Penyelenggaraan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2023, seperti rapat koordinasi persiapan dan mekanisme koordinasi yang lain yang telah biasanya dilaksanakan yang dipersingkat atau ditiadakan dibandingkan dari tahapan pada beberapa tahun anggaran sebelumnya. Kegiatan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan melalui kerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, dimana Pemerintah Kota Probolinggo kembali ditunjuk menjadi salah satu Titik Lokasi Badan Kepegawaian Negara (Titik Lokasi Hotel Tampiarto) untuk Penyelenggaraan



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
									Seleksi Kompetensi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023. Kedua hal tersebut berdampak sangat besar terhadap efisiensi penyerapan anggaran pada Subkegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK pada Tahun Anggaran 2023.
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	dokumen	140	135	96,43	10.025.000,00	9.666.000	96,42	
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	9	9	100,00	155.834.302,00	150.974.500	96,88	
Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan sesuai dengan Syarat Jabatan	persentase	90	121,81	135,34	286.449.000,00	275.293.956	96,11	
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	dokumen	1454	1701	116,99	257.349.000,00	250.640.956	97,39	
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	dokumen	500	359	71,80	22.500.000,00	18.054.200	80,24	Melalui pemanfaatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi dalam proses pelayanan administrasi kepegawaian, berdampak besar terhadap pelaksanaan prosedur dan mekanisme pelayanan administrasi kepegawaian. Pengelolaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil termasuk salah satu pelayanan administrasi kepegawaian yang terdampak oleh pemanfaatan Teknologi,



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
									Informasi, dan Komunikasi dimaksud, dimana sebelumnya setiap proses pengajuan usul terkait kepangkatan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan melalui pengajuan manual secara berjenjang (harus datang sendiri ke Instansi yang menangani, yaitu Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kewenangan masing-masing), saat ini diajukan cukup melalui Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI ASN) sehingga tidak memerlukan anggaran perjalanan dinas. Hal tersebut berdampak sangat besar terhadap efisiensi penyerapan anggaran pada Subkegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN pada Tahun Anggaran 2023.
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	dokumen	539	765	141,93	6.600.000,00	6.598.800	99,98	
Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	persentase	89	100	112,36	446.300.000,00	384.394.250	86,13	Permasalahan berkaitan dengan sisa dari pelaksanaan asesmen JPT berupa honorarium jasa asesor dari jumlah peserta
Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	dokumen	3	3	100,00	446.300.000,00	384.394.250	86,13	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Aparatur Sipil Negara yang telah dinilai dan dievaluasi kinerjanya	persentase	96	90,9	94,69	101.293.500,00	86.536.313	85,43	
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	dokumen	3600	3239	89,97	77.891.000,00	64.944.813	83,38	Adanya perkembangan ketentuan baru terkait Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil berdasarkan : 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang kemudian diimplementasikan melalui Aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara menyebabkan perubahan yang cukup drastis dalam mekanisme Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Guna mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, maka pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 lebih difokuskan pada penyelenggaraan kegiatan yang bersifat untuk



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
									meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo mengenai mekanisme dan prosedur Penilaian Kinerja Pegawai yang harus diterapkan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo secara efektif pada Tahun 2023, yaitu berupa Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara serta Coaching Clinic Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara sehingga pelaksanaan perjalanan dinas yang berkaitan dengan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur menjadi lebih terbatas. Hal tersebut berdampak sangat besar terhadap efisiensi penyerapan anggaran pada Subkegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur pada Tahun Anggaran 2023.
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	orang	250	248	99,20	3.402.500,00	1.600.000	47,02	Secara Kinerja sudah terpenuhi untuk sub kegiatan pengelolaan penghargaan pengusulan satyalancana karya satya, kegiatan ini tidak terserap maksimal dikarenakan tidak mencukupi untuk perjalanan dinas pengambilan ke Kemendagri



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	orang	38	47	123,68	20.000.000,00	19.991.500	99,96	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						334.300.000	309.647.100		
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Capaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara	%	63	56,18	89,17	334.300.000	309.647.100	92,63	
Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	persentase	75	85,25	113,67	67.050.000	58.606.700	87,41	berkaitan pengembangan kompetensi teknis yang capaian belum maksimal dikarenakan kelebihan dari honorarium nara sumber pada kegiatan Pelatihan DOU yang sudah direncanakan sebagai tindak lanjut pengembangan DOU
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	400	341	85,25	67.050.000	58.606.700	87,41	
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Persentase	80	100	125,00	267.250.000	251.040.400	93,93	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan penjabatan	laporan	3	3	100,00	267.250.000	251.040.400	93,93	

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, 17 Januari 2024



22. Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH									
JUMLAH PENDAPATAN									
BELANJA						13.821.149.513,00	12.293.371.001,00	88.94	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Persen	95	96,14	101,2	3,928,643,138.00	3,776,937,541.00	96.14	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat daerah	persen	98	98	100	50,637,500.00	45,196,000.00	89.25	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	100	9,135,000.00	6,268,000.00	68.62	Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	8	100	41,502,500.00	38,928,000.00	93.80	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program	Persen	100	100	100	3,121,193,898.00	3,043,872,959.00	97.52	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	23	23	100	2,960,568,128.00	2,887,696,883.00	97.54	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	5	100	139,240,770.00	138,446,376.00	99.43	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan L Keuangan	Laporan	5	5	100	21,385,000.00	17,729,700.00	82.91	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	14	117	3,800,000.00	3,800,000.00	100.00	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	14	117	3,800,000.00	3,800,000.00	100.00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	120	40	33	2,000,000.00	1,970,000.00	98.50	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	120	40	33	2,000,000.00	1,970,000.00	98.50	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	Persen	95	101,47	107	119,715,040.00	98,484,030.00	82.27	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	100	21,652,040.00	20,759,300.00	95.88	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2	100	3,455,000.00	3,442,500.00	99.64	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3	100	6,727,000.00	6,569,800.00	97.66	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	6	6	100	9,089,000.00	9,053,500.00	99.61	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	122	102	78,792,000.00	58,658,930.00	74.45	Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	Persen	100	128	128	124,747,500.00	111,539,000.00	89.41	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	9	129	124,747,500.00	111,539,000.00	89.41	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	Persen	100	100	100	367,825,600.00	336,980,937.00	91.61	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100	100,739,600.00	86,462,217.00	85.83	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100	267,086,000.00	250,518,720.00	93.80	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	Persen	100	100	100	138,723,600.00	135,094,615.00	97.38	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	11	100	80,723,600.00	77,134,615.00	95.55	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	7	7	100	7,100,000.00	7,060,000.00	99.44	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100	50,900,000.00	50,900,000.00	100.00	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase partisipasi lembaga dalam kegiatan yang mendorong penguatan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Persen	85	100	118	568,429,590.00	532,783,830.00	93.73	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase rumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan sesuai ketentuan Prosentase rumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan sesuai ketentuan	Persen	85	100	118	568,429,590.00	532,783,830.00	93.73	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	100	110	110	564,829,590.00	529,583,830.00	93.76	
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	3	3	100	3,600,000.00	3,200,000.00	88.89	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Melaksanakan Pendidikan Politik dan PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persen	90	100	111	2,630,566,025.00	2,347,673,505.00	89.25	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Pemilu/ Pemilukada serta Pemantauan Situasi Politik Daerah	persen	90	100	111	2,630,566,025.00	2,347,673,505.00	89.25	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	2140	2140	100	2,551,537,825.00	2,277,828,805.00	89.27	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	7	7	100	79,028,200.00	69,844,700.00	88.38	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Partisipasi Orkemas	Persen	87	100	115	180,192,990.00	175,823,453.00	97.58	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Orkemas yang Aktif	Persen	87	100	115	180,192,990.00	175,823,453.00	97.58	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	250	250	100	63,068,600.00	61,620,500.00	97.70	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	9	9	100	117,124,390.00	114,202,953.00	97.51	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Partisipasi Lembaga Dalam Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	persen	85	85	100	237,879,590.00	233,450,080.00	98.14	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sesuai ketentuan	persen	85	85	100	237,879,590.00	233,450,080.00	98.14	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	70	80	114	236,679,590.00	232,475,080.00	98.22	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas	Laporan	2	2	100	1,200,000.00	975,000.00	81.25	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Kejadian Terkait Konflik Sosial	Persen	100	147,5	148	6,275,438,180.00	5,226,702,592.00	83.29	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi Konflik Sosial Masyarakat yang terselesaikan	Persen	100	147,5	148	6,275,438,180.00	5,226,702,592.00	83.29	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	600	885	148	584,904,180.00	558,763,792.00	95.53	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	2	2	100	6,450,000.00	4,250,000.00	65.89	Efektivitas dan Efisiensi Anggaran yang berupa Sisa Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat.
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	12	100	5,684,084,000.00	4,663,688,800.00	82.05	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 17 Januari 2024



23. Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
PENDAPATAN	-	-	-	-		15.600.000	0	0	Target PAD Rp. 15.600.000,- Tahun 2023 tidak mencapai target dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2021 tentang
PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-	-		15.600.000	0	0	Penggunaan TKA, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata cara penggunaan TKA, di dalam peraturan tersebut mengharuskan daerah, baik prov. Kab/kota mengubah PERDA yaitu mengganti Retribusi Perpanjangan IMTA menjadi Retribusi Perpanjangan Pengguna TKA, dan jika PERDA tersebut belum dirubah, maka pembayaran retribusinya tidak dapat dilakukan di daerah prov. Kab/kota, karena secara otomatis Aplikasi pembayaran yang berada di Website TKA-online.kemnaker.go.id ditutup untuk daerah prov. Kab/kota. Dan pembayaran langsung masuk ke Pusat (Jakarta). PERDA masih dalam tahap perubahan bersamaan dengan PERDA retribusi yang lainnya. Didalam peraturan tersebut juga mengatur dasar penarikan retribusi, dimana pada peraturan yang lama dasar retribusinya dari IMTA (ijin mempekerjakan tenaga kerja asing) namun sekarang dirubah menjadi Rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA),
JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-		15.600.000	0	0	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
									sehingga bukan lagi dilihat dari domisili TKA bekerja, namun dari lokasi Perusahaan. Jika lokasi perusahaan berada di 2 (dua) lokasi atau lebih antar provinsi maka pembayaran retribusinya di pusat (Jakarta), jika lokasi perusahaan berada di 2 (dua) lokasi atau lebih dalam dalam 1 (satu) provinsi maka pembayaran retribusinya di Provinsi (Surabaya, karena Probolinggo berada di Provinsi Jawa Timur) dan jika perusahaan hanya ada di 1 (satu) lokasi saja maka pembayaran retribusinya di daerah kab/kota (dalam hal ini Probolinggo). Sedangkan perusahaan pengguna TKA yang di Probolinggo saja hanya ada 1 (satu) yaitu PT. Sumber Setia Abadi Jaya dan di perusahaan tersebut hanya ada 1 (satu) orang TKA saja.
BELANJA DAERAH	-	-	-	-		13.225.432.276	11.423.909.585	86,38	Belanja Daerah tidak terserap 100% dikarenakan Anggaran DBHCHT hanya terserap secara maksimal sebesar 72.28% dikarenakan terkendala tempat dan waktu dalam pelaksanaan pelatihan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Persentase	100	94,23	94	7.818.452.163	7.367.714.269	94,23	
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASIKINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	99,13	99	48.610.490	48.185.475	99,13	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	Dokumen	10	10	100	40.610.490	40.185.475	98,95	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	Laporan	10	10	100	8.000.000	8.000.000	100	
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100	95,12	95	6.953.092.433	6.613.612.015	95,12	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase realisasi gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	Persentase	100	95,15	95	6.841.528.533	6.509.886.115	95,15	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi	Persentase	100	93,48	93	101.738.900	95.100.900	93,48	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Persentase	100	87,79	88	9.825.000	8.625.000	87,79	Foto copy tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan kebutuhan foto copy (peruntukannya untuk foto copy Laporan LKD) sehingga bisa dapat mengefisiensi anggaran
ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADAPERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase	100	40,4	40	4.950.000	2.000.000	40,4	Anggaran Belanja Jasa Konsultasi (Penghapusan BMD) tidak terserap 100% karena tidak ada BMD yang di hapus
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	dokumen	20	20	100	4.950.000	2.000.000	40,4	Anggaran Belanja Jasa Konsultasi (Penghapusan BMD) tidak terserap 100% karena tidak ada BMD yang di hapus
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase	100	68	68	2.500.000	1.700.000	68	honorarium narasumber tidak terealisasi 100% karena menyesuaikan tema sosialisasi
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan	49	49	100	2.500.000	1.700.000	68	honorarium narasumber tidak terealisasi 100% karena menyesuaikan tema sosialisasi



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Umum Perang- kat Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase	100	87,47	87	163.857.600	143.332.354	87,47	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perleng- kapan Kantor yang Disediakan	paket	12	9	75	42.723.700	39.599.800	92,69	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pe- nggandaan yang Disediakan	paket	6	6	100	6.647.400	6.646.400	99,98	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	dokumen	72	72	100	1.820.000	1.820.000	100	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	6	6	100	3.000.000	3.000.000	100	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Ra- pat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	50	50	100	94.892.000	82.746.245	87,2	Tidak terserap 100% di Perjalanan Dinas Biasa dikarenakan menyesuaikan undangan/kegiatan rapat/koordinasi sehingga bisa dapat mengefisiensi anggaran
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsi- p Dinamis pada SKPD	dokumen	100	100	100	3.747.000	2.716.800	72,51	Tidak terserap di belanja lembur 100% karena tidak ada lembur yang dilakukan
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksan- aan Sistem Pemerintahan Berbasis El- ektronik pada SKPD	dokumen	12	12	100	11.027.500	6.803.109	61,69	Penyerapan tergantung dari tagihan internet sehingga bisa dapat mengefisiensi anggaran
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANGURUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase BMD Perangkat Daerah y- ang terpenuhi	Persentase	100	99	99	196.384.000	194.425.000	99	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lai- nnya yang Disediakan	unit	33	33	100	196.384.000	194.425.000	99	
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kebutuhan Ketatalaksan- aan yang Terpenuhi	Persentase	100	75,51	76	304.161.040	229.681.776	75,51	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	laporan	12	12	100	51.880.000	50.478.736	97,3	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Ka- ntor	laporan	18	18	100	252.281.040	179.203.040	71,03	Belanja tenaga administrasi tidak terserap 100% karena tenaga administrasi ada yang mengundurkan diri dan



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
									tenaga keamanan tidak terisi sebanyak 2 orang
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase BMD dalam kondisi baik	Persentase	100	93,02	93	144.896.600	134.777.649	93,02	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	kendaraan	14	14	100	82.052.980	74.046.595	90,24	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	100	100	100	27.777.500	27.370.000	98,53	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor yang dipelihara	unit	1	1	100	35.066.120	33.361.054	95,14	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan Pelatihan dan produktivitas tenaga kerja	Persentase	93,3	72,28	77	4.816.034.863	3.481.252.005	72,28	
PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	Persentase sertifikat pelatihan yang diterbitkan sesuai dengan kompetensinya	orang	720	576	80	4.816.034.863	3.481.252.005	72,28	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	peserta	720	576	80	4.611.317.163	3.296.312.832	71,48	Tidak cukup waktu dan sarana prasarana untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan dan karena mendapatkan tambahan anggaran di Triwulan III sehingga anggaran DBHCHT tidak bisa terserap 100%
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	lembaga	9	9	100	204.717.700	184.939.173	90,34	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja	Persentase	93,3	93,5	100	99.541.090	99.012.920	99,47	
PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah peserta yang terlayani pada pelayanan antar kerja	peserta	820	820	100	88.556.090	88.090.670	99,47	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Pelayanan antar Kerja	Jumlah masyarakat yang memiliki em brio usaha	orang	20	20	100	29.619.590	29.494.670	99,58	
	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	orang	800	800	100	29.619.590	29.494.670	99,58	
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdaya kan Melalui program Perluasan Kese mpatan Kerja	orang	20	20	100	58.936.500	58.596.000	99,42	
PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	Persentase penempatan tenaga kerj a melalui job fair	persentase	80	99,53	124	9.075.000	9.032.250	99,53	
Job Fair / Bursa Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	orang	1000	1000	100	9.075.000	9.032.250	99,53	
PELINDUNGAN PMI (PRA DAN PURNA PENEMPATAN) DI DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase peserta yang terlayani p ada layanan terpadu CPMI	persentase	100	98,95	99	1.910.000	1.890.000	98,95	
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang membuat rekom p aspor	orang	12	15	125	1.910.000	1.890.000	98,95	
	Jumlah peserta sosialisasi AKAN	orang	50	30	60	1.910.000	1.890.000	98,95	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang memen uhi persyaratan kerja	persentase	70	71	101	167.939.390	164.744.580	98,1	
	Persentase penurunan kasus perseli sihan hubungan industrial	persentase	56	30	54	167.939.390	164.744.580	98,1	
PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1(SATU) DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah perusahaan yang mendapatk an fasilitasi pemenuhan persyaratan kerja	perusahaan	130	80	62	48.424.800	45.869.500	94,72	
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah perusahaan yang difasilitasi p endataan dan informasi sarana hubu ngan industrial dan jaminan sosial te naga kerja serta pengupahan	perusahaan	80	80	100	48.424.800	45.869.500	94,72	
PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah perusahaan yang dibina dala m rangka pencegahan hubungan ind ustrial	perusahaan	79	9	11	119.514.590	118.875.080	99,46	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah perusahaan yang dibina dalam rangka pencegahan hubungan industrial	perusahaan	15	9	60	119.514.590	118.875.080	99,46	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan industri yang difasilitasi	Persentase	80	80	100	290.912.880	279.119.631	95,95	
PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN / KOTA	Jumlah RPIK dan RAPERDA	kegiatan	1	1	100	290.912.880	279.119.631	95,95	
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	Jumlah rencana pembangunan industri yang dibuat	kegiatan	2	2	100	2.000.000	2.000.000	100	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pelaku industri yang meningkat ketrampilannya	orang	100	100	100	79.205.590	76.356.180	96,4	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah pelaku industri yang mendapatkan fasilitasi standarisasi industri	orang	30	30	100	207.607.290	198.743.451	95,73	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelaku industri yang mendapatkan fasilitasi standarisasi industri	orang	30	30	100	600.000	520.000	86,67	Tidak terserap 100% di Perjalanan Dinas Biasa dikarenakan menyesuaikan undangan kegiatan dari provinsi
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah laporan capaian kinerja industri yang disusun sesuai ketentuan	laporan	1	1	100	1.500.000	1.500.000	100	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN / KOTA	Persentase izin usaha industri yang difasilitasi	Persentase	80	80	100	5.000.000	4.800.000	96	
PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI)	Persentase industri yang mematuhi izin usaha industri	Persentase	80	80	100	5.000.000	4.800.000	96	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA									
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	industri	40	40	100	5.000.000	4.800.000	96	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Presentase Data Industri yang dikelola dengan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)	Persentase	80	80	100	27.551.890	27.266.180	98,96	
PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKIKEWENANGAN KABUPATEN / KOTA	Persentase pelaku industri yang menyampaikan laporan data industri	Persentase	80	80	100	27.551.890	27.266.180	98,96	
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten / Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase	80	80	100	27.551.890	27.266.180	98,96	
JUMLAH BELANJA			86,38	86,38	100	13.225.432.276	11.423.909.585	86,38	

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 17 Januari 2024

24. Perangkat Daerah : Kecamatan Wonoasih

Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran (P.APBD)	Realisasi	%	Keterangan
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH									
JUMLAH PENDAPATAN									
BELANJA DAERAH						16.495.320.907,00	15.237.370.968,00	92,37	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100	100	100,00	9.150.470.437,00	8.795.704.415,00	96,12	



Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran (P.APBD)	Realisasi	%	Keterangan
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%	100	100	100,00	24.500.000,00	24.478.800,00	99,91	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	100,00	24.500.000,00	24.478.800,00	99,91	
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	100	100,00	8.343.051.154,00	8.021.122.923,00	96,14	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	780	780	100,00	8.003.443.737,00	7.687.535.763,00	96,05	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100,00	339.607.417,00	333.587.160,00	98,23	
ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	100	100,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100	
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	100	100,00	2.500.000,00	2.320.000,00	92,8	
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang disosialisasikan	Orang	100	100	100,00	2.500.000,00	2.320.000,00	92,8	
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	%	100	100	100,00	186.335.411,00	184.225.314,00	98,87	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100,00	70.397.792,00	69.609.625,00	98,88	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4	100,00	23.339.000,00	23.140.500,00	99,15	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100	



Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran (P.APBD)	Realisasi	%	Keterangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	552	552	100,00	3.500.000,00	3.370.000,00	96,29	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	10	100,00	80.098.619,00	79.105.189,00	98,76	
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100	100	100,00	224.447.850,00	211.730.000,00	94,33	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	2	2	100,00	72.500.000,00	72.500.000,00	100	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	27	27	100,00	151.947.850,00	139.230.000,00	91,63	
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang terpenuhi	%	100	100	100,00	182.770.520,00	170.123.328,00	93,08	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00	72.090.000,00	66.102.238,00	91,69	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00	110.680.520,00	104.021.090,00	93,98	
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase BMD dalam kondisi baik	%	100	100	100,00	176.865.502,00	171.704.050,00	97,08	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100,00	22.770.101,00	21.837.890,00	95,91	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	23	23	100,00	52.060.401,00	49.332.160,00	94,76	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10	100,00	37.035.000,00	36.265.000,00	97,92	



Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran (P.APBD)	Realisasi	%	Keterangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00	65.000.000,00	64.269.000,00	98,88	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	100	100	100,00	3.693.240.520,00	3.600.412.448,00	97,49	
KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	Persentase Kelurahan Kategori berkembang	%	100	100	100,00	1.903.510.590,00	1.890.943.480,00	99,34	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12	12	100,00	1.903.510.590,00	1.890.943.480,00	99,34	
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	Persentase pelayanan yang sesuai Standart Pelayanan	%	100	100	100,00	1.789.729.930,00	1.709.468.968,00	95,52	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100,00	114.924.180,00	112.855.010,00	98,2	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub Unit Sumber Taman)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100,00	276.161.920,00	263.727.644,00	95,5	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub Unit Kedung Asem)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100,00	256.691.070,00	238.840.248,00	93,05	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub Unit Kedunggaleng)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100,00	308.754.470,00	298.054.582,00	96,53	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100,00	249.178.680,00	235.603.358,00	94,55	



Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran (P.APBD)	Realisasi	%	Keterangan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub Unit Pakistaji)	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub Unit Jrebeng Kidul)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100,00	335.397.180,00	327.009.508,00	97,5	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub Unit Wonoasih)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100,00	248.622.430,00	233.378.618,00	93,87	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penurunan Gangguan Keamanan	%	22	22	100,00	476.056.770,00	474.816.800,00	99,74	
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	Persentase Gangguan Keamanan yang difasilitasi	%	100	100	100,00	476.056.770,00	474.816.800,00	99,74	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	150	150	100,00	476.056.770,00	474.816.800,00	99,74	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	%	90	90	100,00	3.175.553.180,00	2.366.437.305,00	74,52	
PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi	%	100	100	100,00	1.315.553.180,00	1.262.973.060,00	96	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	LKK	4	4	100,00	1.315.553.180,00	1.262.973.060,00	96	
KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang diberdayakan	%	90	90	100,00	1.860.000.000,00	1.103.464.245,00	59,33	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sub Unit Sumber Taman)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	4	1	25,00	160.000.000,00	10.276.300,00	6,42	Realisasi 1 unit dikarenakan pada unit yang lainnya Status kepemilikan tanah yang akan dibangun/dipelihara harus bersertifikat dan menjadi aset



Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran (P.APBD)	Realisasi	%	Keterangan
									Pemerintah Kota Probolinggo sedangkan dalam hal ini warga masih belum bersedia untuk menyerahkan tanahnya untuk dijadikan Aset Pemerintah Kota Probolinggo
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sub Unit Kedung Asem)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	5	2	40,00	177.836.000,00	39.853.936,00	22,41	Realisasi 2 unit dikarenakan pada unit yang lainnya Status kepemilikan tanah yang akan dibangun/dipelihara harus bersertifikat dan menjadi aset Pemerintah Kota Probolinggo sedangkan dalam hal ini warga masih belum bersedia untuk menyerahkan tanahnya untuk dijadikan Aset Pemerintah Kota Probolinggo
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sub Unit Kedunggaleng)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	4	2	50,00	160.500.700,00	82.000.750,00	51,09	Realisasi 1 unit dikarenakan pada unit yang lainnya Status kepemilikan tanah yang akan dibangun/dipelihara harus bersertifikat dan menjadi aset Pemerintah Kota Probolinggo sedangkan dalam hal ini warga masih belum bersedia untuk menyerahkan tanahnya untuk dijadikan Aset Pemerintah Kota Probolinggo
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sub Unit Pakistaji)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	8	0	0,00	90.000.000,00	-	-	Status kepemilikan tanah yang akan dibangun/dipelihara harus bersertifikat dan menjadi aset Pemerintah Kota Probolinggo
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sub Unit Jrebeng Kidul)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	1	100,00	57.500.000,00	37.682.209,00	65,53	sedangkan dalam hal ini warga masih belum bersedia untuk menyerahkan tanahnya untuk dijadikan Aset Pemerintah Kota Probolinggo



Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran (P.APBD)	Realisasi	%	Keterangan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sub Unit Wonoasih)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	4	0	0,00	195.000.000,00	-	-	Status kepemilikan tanah yang akan dibangun/dipelihara harus bersertifikat dan menjadi aset Pemerintah Kota Probolinggo sedangkan dalam hal ini warga masih belum bersedia untuk menyerahkan tanahnya untuk dijadikan Aset Pemerintah Kota Probolinggo
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sub Unit Sumber Taman)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	1	100,00	150.000.000,00	147.730.500,00	98,49	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sub Unit Kedung Asem)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	1	100,00	132.164.000,00	120.755.500,00	91,37	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sub Unit Kedunggaleng)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	5	100,00	149.499.300,00	141.891.300,00	94,91	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sub Unit Pakistaji)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	3	3	100,00	220.000.000,00	211.810.650,00	96,28	-
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sub Unit Jrebeng Kidul)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	2	2	100,00	162.500.000,00	124.499.000,00	76,61	Karena kelompok masyarakat penyelenggara swakelola tidak ada yang memiliki keahlian untuk membuat barang sesuai spesifikasi yang sudah ditentukan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sub Unit Wonoasih)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	2	2	100,00	115.000.000,00	97.794.500,00	85,04	-
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Sub Unit Sumber Taman)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	5	5	100,00	15.000.000,00	14.438.000,00	96,25	-
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	Kelompok	4	4	100,00	15.000.000,00	14.938.000,00	99,59	-



Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran (P.APBD)	Realisasi	%	Keterangan
Pembangunan di Kelurahan (Sub Unit Kedung Asem)	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Sub Unit Kedunggaleng)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelompok	7	7	100,00	15.000.000,00	14.939.000,00	99,59	-
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Sub Unit Pakistaji)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelompok	5	5	100,00	15.000.000,00	14.960.600,00	99,74	-
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Sub Unit Jrebeng Kidul)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelompok	5	5	100,00	15.000.000,00	14.940.000,00	99,60	-
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Sub Unit Wonoasih)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelompok	6	6	100,00	15.000.000,00	14.954.000,00	99,69	-

Sumber : Kecamatan Wonoasih, 17 Januari 2024

25. Perangkat Daerah : Kecamatan Kademangan

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH									
JUMLAH PENDAPATAN									
BELANJA DAERAH						17.136.362.976	15.798.399.296	92,19	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80 persen	%	100	100	100	9.206.073.231	8.762.792.828	95,18	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	%	95	95	100	4.344.000	3.669.000	84,46	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7	6	86	2.172.000	1.497.000	68,92	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	12	10	83	2.172.000	2.172.000	100	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	8.362.101.612	7.942.370.459	94,98	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	75	62	83	8.045.063.808	7.636.693.899	94,92	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	16	16	100	317.037.804	305.676.560	96,42	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	93	93	4.168.820	4.105.000	98,47	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	orang	75	70	93	4.168.820	4.105.000	98,47	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD yang terpenuhi	%	100	100	100	800.000	800.000	100	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	2	2	100	800.000	800.000	100	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	165.021.600	161.566.654	97,91	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	8	9	113	47.800.000	46.816.300	97,94	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	3	3	100	41.270.000	41.180.800	99,78	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	12	12	100	3.500.000	3.120.000	89,14	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	12	100	7.400.000	7.399.500	99,99	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	100	65.051.600	63.050.054	96,92	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	90	100	111	259.440.000	253.370.000	97,66	
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	15	15	100	186.940.000	180.870.000	96,75	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	2	200	72.500.000	72.500.000	100	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	%	100	100	100	244.094.659	236.684.385	96,96	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	100	95.714.619	90.570.231	94,63	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	100	148.380.040	146.114.154	98,47	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	%	100	100	100	166.102.540	160.227.330	96,46	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	1	100	31.870.500	31.778.000	99,71	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	26	21	81	34.820.500	31.107.788	89,34	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit/buah	60	41	68	15.772.500	15.130.000	95,93	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	100	83.639.040	82.211.542	98,29	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM	nilai/skor	84,79	97,37	115	3.852.786.810	3.706.642.314	96,21	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan Kategori Berkembang	%	84	84	100	1.912.312.490	1.908.905.388	99,82	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	20	20	100	1.912.312.490	1.908.905.388	99,82	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan yang Sesuai Standart Pelayanan	%	100	100	100	1.940.474.320	1.797.736.926	92,64	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	100	151.898.770	149.277.100	98,27	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kademangan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	100	264.899.020	245.986.026	92,86	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ketapang)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	100	286.565.480	275.817.446	96,25	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pilang)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	100	334.005.480	319.846.586	95,76	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pohsangit Kidul)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	100	307.719.350	262.881.448	85,43	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Triwung Kidul)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	100	320.106.610	279.380.515	87,28	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Triwung Lor)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	100	275.279.610	264.547.805,00	96,1	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan	%	21	0	0	440.119.180	437.232.240	99,34	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Gangguan Keamanan yang Difasilitasi	%	85	0	0	440.119.180	437.232.240	99,34	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	116	116	100	440.119.180	437.232.240	99,34	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	%	90	90	100	3.637.383.755	2.891.731.914	79,50	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang di Fasilitasi	%	90	90	100	1.564.144.390	1.534.329.120	98,09	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	LKK	21	21	100	1.564.144.390	1.534.329.120	98,09	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang diberdayakan	%	90	90	100	2.073.239.365	1.357.402.794,00	65,47	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(Sub unit Kelurahan Kademangan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	lokasi	4	0	0	147.889.515	0	0	karena warga tidak bersedia menyerahkan hak milik tanahnya menjadi aset Pemerintah Kota Probolinggo



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kelurahan Ketapang)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	lokasi	4	4	100	146.736.300	71.573.098	48,78	karena warga tidak bersedia menyerahkan hak milik tanahnya menjadi aset Pemerintah Kota Probolinggo
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kelurahan Pilang)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	lokasi	4	0	0	141.714.000	0	0	karena warga tidak bersedia menyerahkan hak milik tanahnya menjadi aset Pemerintah Kota Probolinggo
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kelurahan Pohsangit Kidul)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	lokasi	4	2	50	145.603.500	62.701.550	43,06	1. karena warga tidak bersedia menyerahkan hak milik tanahnya menjadi aset Pemerintah Kota Probolinggo 2. volume pekerjaan terlalu kecil
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kelurahan Triwung Kidul)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	lokasi	4	2	50	146.416.200	78.679.296	53,74	1. karena warga tidak bersedia menyerahkan hak milik tanahnya menjadi aset Pemerintah Kota Probolinggo 2. volume pekerjaan terlalu kecil
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (sub unit Kelurahan Triwung Lor)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	lokasi	4	0	0	145.379.850	0	0	1. karena warga tidak bersedia menyerahkan hak milik tanahnya menjadi aset Pemerintah Kota Probolinggo 2. volume pekerjaan terlalu kecil
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kelurahan Kademangan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/ormas	6	6	100	185.000.000	176.430.200	95,37	
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kelurahan Ketapang)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/ormas	6	6	100	160.000.000	151.193.750	94,5	
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kelurahan Pilang)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/ormas	6	6	100	257.500.000	241.291.000	93,71	
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kelurahan Pohsangit Kidul)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/ormas	6	6	100	95.000.000	93.190.200	98,09	
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kelurahan Triwung Kidul)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/ormas	6	6	100	260.000.000	254.066.500	97,72	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (sub unit Kelurahan Triwung Lor)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/ormas	6	6	100	242.000.000	228.277.200	94,33	

Sumber : Kecamatan Kademangan, 17 Januari 2024

26. Perangkat Daerah : Kecamatan Mayangan

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH									
JUMLAH PENDAPATAN									
BELANJA						15.958.330.883	15.244.493.803	95,53	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Persen	100	100	100	7.806.582.895	7.624.134.798	97,66%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Kegiatan	Persen	100	100	100	68.230.000	67.859.000	99,46%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	8	67	4.745.000	4.619.000	97,34%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	10	100	63.485.000	63.240.000	99,61%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persen	100	100	100	7.003.267.690	6.834.205.512	97,59%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	58	58	100	6.672.591.530	6.514.134.192	97,63%	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	72	72	100	330.676.160	320.071.320	96,79%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Persen	100	100	100	199.966.875	199.480.651	99,76%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	100	91.128.575	90.908.343	99,76%	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100	37.423.300	37.400.000	99,94%	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	800	800	100	4.638.000	4.557.000	98,25%	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100	10.000.000	9.940.150	99,40%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100	56.777.000	56.675.158	99,82%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persen	100	100	100	140.340.000	133.335.000	95,01%	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	2	100	75.000.000	72.500.000	96,67%	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	11	11	100	65.340.000	60.835.000	93,11%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	Persen	100	100	100	229.555.410	226.502.812	98,67%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100	82.320.000	81.234.176	98,68%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100	147.235.410	145.268.636	98,66%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen	100	100	100	165.222.920	162.751.823	98,50%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	6	100	33.419.300	32.713.023	97,89%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	2	100	25.816.000	24.519.000	94,98%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	30	100	23.443.000	23.398.000	99,81%	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100	82.544.620	82.121.800	99,49%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	84,9	87,5	103	4.641.215.328	4.553.286.647	98,11%	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan Kategori Berkembang	Persen	80	80	100	2.203.537.390	2.192.369.590	99,49%	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	1	100	2.203.537.390	2.192.369.590	99,49%	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan yang Sesuai Standart Pelayanan	Persen	100	100	100	2.437.677.938	2.360.917.057	96,85%	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100	124.319.180	123.435.160	99,29%	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub Unit Kelurahan Jati)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100	426.970.676	408.397.055	95,65%	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub Unit Kelurahan Mangunharjo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100	426.845.606	405.451.648	94,99%	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub Unit Kelurahan Wiroborang)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100	346.723.250	339.419.706	97,89%	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub Unit Kelurahan Sukabumi)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100	651.877.550	632.335.778	97,00%	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub Unit Kelurahan Mayangan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100	460.941.676	451.877.710	98,03%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	Persen	80	80	100	3.160.794.570	2.721.639.278	86,11%	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang diberdayakan	Persen	80	80	100	1.625.000.000	1.214.657.778	74,75%	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Sub Unit Kelurahan Jati)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LKK	2	2	100	5.000.000	5.000.000	100,00%	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Sub Unit Kelurahan Mangunharjo)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LKK	2	2	100	5.000.000	5.000.000	100,00%	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Sub Unit Kelurahan Wiroborang)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LKK	2	2	100	5.000.000	5.000.000	100,00%	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Sub Unit Kelurahan Sukabumi)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LKK	2	2	100	5.000.000	5.000.000	100,00%	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Sub Unit Kelurahan Mayangan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LKK	2	2	100	5.000.000	4.940.000	98,80%	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sub Unit Kelurahan Jati)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	10	1	10	103.000.000	22.750.000	22,09%	Terealisasi hanya 1 lokasi untuk yang 2 lokasi kondisi jalan sudah di paving dan masih layak serta 1 lokasi masih adanya konflik warga sehingga tidak bisa direalisasikan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sub Unit Kelurahan Mangunharjo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	10	3	30	150.000.000	44.425.000	29,62%	Terealisasi pada wahana bermain anak dan untuk yang septic tank komunal tidak terealisasi dikarenakan Jumlah KK yang mengajukan kurang dari 10 KK dan Lokasinya berdekatan dengan Septic tank komunal yang dibangun sebelumnya serta Lahannya masih belum menjadi Fasum (harus bersertifikat fasum dulu)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sub Unit Kelurahan Wiroborang)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	10	0	0	103.000.000	-	0,00%	Tidak terealisasi dikarenakan status lahan masih milik pribadi dan surat tanah tidak ditemukan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sub Unit Kelurahan Sukabumi)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	10	3	30	103.000.000	43.250.000	41,99%	Terealisasi pada sarpras taman bacaan dan untuk yang saluran BUIS U20 hanya terealisasi sekitar 69,59 meter dari 272,5 meter dikarenakan sebagian besar sudah terpasang BUIS U30
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sub Unit Kelurahan Mayangan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	10	1	10	150.000.000	125.868.678	83,91%	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sub Unit Kelurahan Jati)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	2	2	100	217.000.000	215.190.000	99,17%	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sub Unit Kelurahan Mangunharjo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	2	2	100	170.000.000	169.952.000	99,97%	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sub Unit Kelurahan Wiroborang)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	2	2	100	217.000.000	186.800.000	86,08%	Kegiatan Pelatihan Ikan air Tawar tidak dilaksanakan dikarenakan program sebelumnya dari kelompok peternak vakum dan tidak berjalan dan mengingat pelatihan tersebut adanya monev dari instansi terkait yaitu DKPPP
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sub Unit Kelurahan Sukabumi)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	2	2	100	217.000.000	213.147.000	98,22%	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sub Unit Kelurahan Mayangan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	2	2	100	170.000.000	168.335.100	99,02%	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang di Fasilitas	Persen	80	80	100	1.535.794.570	1.506.981.500	98,12%	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	LKK	6	6	100	1.535.794.570	1.506.981.500	98,12%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan	Persen	24	24	100	349.737.590	345.433.080	98,77%	
Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Gangguan Keamanan yang Ditindaklanjuti	Persen	80	80	100	349.737.590	345.433.080	98,77%	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	80	80	100	349.737.590	345.433.080	98,77%	

Sumber : Kecamatan Mayangan, 17 Januari 2024



27. Perangkat Daerah : Kecamatan Kedopok

URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH						360.000,00	360.000,00		Persewaan tanah untuk bangunan kantin kecamatan
JUMLAH PENDAPATAN									
BELANJA						16.902.432.794	14.929.650.376	88,33%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	persen	100%	98%	98	1.427.768.409	1.401.170.840	98,14%	Pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan terdapat : warga yang keberatan apabila tanahnya diserahkan kepada Pemerintah Kota Probolinggo sebagai aset serta titik lokasi merupakan kewenangan DPUPR
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi	persen	100%	95%	95	1.427.768.409	1.401.170.840	98,14%	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok dan Lembaga yang diberdayakan	persen	100	27,78	28	1.950.000.000	726.904.164	37,28%	Pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan terdapat : warga yang keberatan apabila tanahnya diserahkan kepada Pemerintah Kota Probolinggo sebagai aset serta titik lokasi merupakan kewenangan DPUPR
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KEDOPOK)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	0	0	165.500.000	0	0,00%	Terdapat warga yang keberatan apabila tanahnya diserahkan kepada Pemerintah Kota Probolinggo sebagai aset
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (JREBENG WETAN)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	5	0	0	150.000.000	0	0,00%	Terdapat warga yang keberatan apabila tanahnya diserahkan kepada Pemerintah Kota Probolinggo sebagai aset



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (JREBENG LOR)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	3	1	33	117.030.000	56.554.864	48,33%	Terdapat warga yang keberatan apabila tanahnya diserahkan kepada Pemerintah Kota Probolinggo sebagai aset
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (JREBENG KULON)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	3	0	0	205.000.000	0	0,00%	Terdapat warga yang keberatan apabila tanahnya diserahkan kepada Pemerintah Kota Probolinggo sebagai aset
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KARENG LOR)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	1	0	0	173.000.000	0	0,00%	Terdapat warga yang keberatan apabila tanahnya diserahkan kepada Pemerintah Kota Probolinggo sebagai aset
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (SUMBER WETAN)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	5	0	0	160.000.000	0	0,00%	Terdapat warga yang keberatan apabila tanahnya diserahkan kepada Pemerintah Kota Probolinggo sebagai aset
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (sub unit Kedopok)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	kelompok	5	2	40	154.422.000	42.428.000	27,48%	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (sub unit Jrebeng Wetan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	kelompok	4	4	100	153.695.000	142.889.000	92,97%	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (sub unit Jrebeng Lor)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	kelompok	8	8	100	182.970.000	169.120.000	92,43%	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (sub unit Jrebeng Kulon)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	kelompok	5	5	100	110.000.000	99.416.000	90,38%	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (sub unit Kareng Lor)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	kelompok	6	6	100	127.000.000	89.418.500	70,41%	tidak terserapnya honor narsum
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (sub unit Sumber Wetan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	kelompok	7	7	100	155.000.000	127.077.800	81,99%	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	skor	84	83,79	100	3.909.358.570	3.646.647.150	93,28%	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan dengan kategori berkembang	persen	100	100	100	1.451.007.700	1.442.772.570	99,43%	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persen	100	100	100	1.451.007.700	1.442.772.570	99,43%	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai standar pelayanan	persen	95	95	100	2.458.350.870	2.203.874.580	89,65%	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	dokumen	12	12	100	117.323.000	109.143.650	93,03%	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub unit Kedopak)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	dokumen	12	12	100	386.362.940	363.537.401	94,09%	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub unit Jrebeng Wetan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	dokumen	12	12	100	352.272.400	307.809.060	87,38%	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub unit Jrebeng Lor)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	dokumen	12	12	100	357.094.800	324.212.990	90,79%	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub unit Jrebeng Kulon)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	dokumen	12	12	100	432.880.000	389.221.310	89,91%	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub unit Kareng Lor)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	dokumen	12	12	100	362.967.530	322.787.785	88,93%	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub unit Sumber Wetan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	dokumen	12	12	100	449.450.200	387.232.384	86,16%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan	persen	100	100	100	383.440.000	383.067.080	99,90%	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Gangguan Keamanan yang difasilitasi	persen	100	100	100	383.440.000	383.067.080	99,90%	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	122	122	100	383.440.000	383.067.080	99,90%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	persen	100	83	83	9.231.865.815	8.681.585.842	94,04%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	persen	100		0	14.460.200	14.000.000	96,82%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	persen	100	70	70	8.273.914.781	7.765.996.829	93,86%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	orang	80	60	75	7.885.818.281	7.397.997.359	93,81%	tidak terealisasinya anggaran karena jabatan kosong
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	12	100	388.096.500	367.999.470	94,82%	
Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Administrasi BMD yang terpenuhi	persen	100	0	0	400.000	0	0,00%	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	12	0	0	400.000	0	0,00%	kurangnya anggaran yang dibutuhkan lebih kurang 20 juta
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	persen	100	100	100	2.800.000	2.000.000	71,43%	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	orang	121	121	100	2.800.000	2.000.000	71,43%	tidak terserapnya honor narsum
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	persen	100	100	100	203.259.300	196.976.405	96,91%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	8	6	75	56.927.700	56.663.700	99,54%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	3	3	100	40.840.100	39.762.000	97,36%	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	12	12	100	3.240.000	3.240.000	100,00%	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	12	100	10.000.000	9.993.300	99,93%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	30	30	100	92.251.500	87.317.405	94,65%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	persen	100	100	100	196.428.600	192.340.000	97,92%	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	unit	2	2	100	72.500.000	72.500.000	100,00%	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	15	14	93	123.928.600	119.840.000	96,70%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	persen	100	100	100	363.612.998	342.349.111	94,15%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	24	18	75	94.890.014	79.844.201	84,14%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	17	11	65	268.722.984	262.504.910	97,69%	



URAIAN	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	Keterangan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	persen				176.989.936	167.923.497	94,88%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	19	19	100	62.482.900	62.482.900	100,00%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	8	8	100	22.602.450	22.602.450	100,00%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	42	42	100	21.747.500	21.747.500	100,00%	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	1	100	70.157.086	70.050.000	99,85%	

Sumber : Kecamatan Kedopok, 17 Januari 2024

28. Perangkat Daerah : Kecamatan Kanigaran

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	KETERANGAN
PENDAPATAN									
PENDAPATAN ASLI DAERAH									
JUMLAH PENDAPATAN									
BELANJA						18.178.234.959	17.182.785.357	94,52%	
BELANJA DAERAH						18.178.234.959	17.182.785.357	94,52%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif	persen	90%	79%	87,78	4.029.302.180	3.525.801.873	87,50%	
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi	persen	95%	95%	100	2.079.302.180	2.035.776.980	97,91%	



URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	KETERANGAN
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang difasilitasi	LKK	10	10	100	2.079.302.180	2.035.776.980	97,91%	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok dan Lembaga yang diberdayakan	persen	100	27,78	27,78	1.950.000.000	1.490.024.893	76,41%	Pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan terdapat : warga yang keberatan apabila tanahnya diserahkan kepada Pemerintah Kota Probolinggo sebagai aset serta titik lokasi merupakan kewenangan DPUPR
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KANIGARAN)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	5	1	20	100.000.000	38.724.850	38,72%	Terdapat warga yang keberatan apabila tanahnya diserahkan kepada Pemerintah Kota Probolinggo sebagai aset
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (SUKOHARJO)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	5	1	20	100.000.000	65.773.000	65,77%	Terdapat ketidaksesuaian panjang jalan antara perencanaan (usulan Musrenbang) dengan Realita panjang jalan sebenarnya
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (TISNONEGARAN)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	0	0	174.504.000	0	0,00%	Titik Lokasi yang akan dikerjakan merupakan Kewenangan DPUPR sebab lebar jalan adalah 3 meter
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KEBONSARI WETAN)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	3	1	33	100.000.000	61.632.948	61,63%	Terdapat ketidaksesuaian panjang jalan antara perencanaan (usulan Musrenbang) dengan Realita panjang jalan sebenarnya
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KEBONSARI KULON)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	3	2	67	100.000.000	71.067.700	71,07%	Titik Lokasi yang akan dikerjakan merupakan Kewenangan DPUPR
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (CURAH GRINTING)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	3	1	33	100.000.000	20.000.000	20,00%	Terdapat warga yang keberatan apabila tanahnya diserahkan kepada Pemerintah Kota Probolinggo sebagai aset
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (sub unit Kanigaran)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	kelompok	2	2	100	225.000.000	215.549.600	95,80%	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (sub unit Sukoharjo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	kelompok	2	2	100	225.000.000	219.450.400	97,53%	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (sub unit Tisnonegaran)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	kelompok	2	2	100	150.496.000	144.232.000	95,84%	



URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	KETERANGAN
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (sub unit Kebonsari Wetan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	kelompok	2	2	100	225.000.000	216.261.400	96,12%	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (sub unit Kebonsari Kulon)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	kelompok	3	3	100	225.000.000	224.284.000	99,68%	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (sub unit Curahgrinting)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	kelompok	3	3	100	225.000.000	213.048.995	94,69%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	skor	84	82,75	98,51	4.173.425.839	4.075.143.203	97,65%	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan dengan kategori berkembang	persen	100	100	100	2.224.418.989	2.222.628.160	99,92%	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	5	5	100	2.224.418.989	2.222.628.160	99,92%	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai standar pelayanan	persen	95	95	100	1.949.006.850	1.852.515.043	95,05%	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	dokumen	12	12	100	54.686.180	52.292.160	95,62%	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub unit Kanigaran)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	dokumen	12	12	100	371.519.450	352.045.455	94,76%	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub unit Sukoharjo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	dokumen	12	12	100	303.260.090	290.282.845	95,72%	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan	dokumen	12	12	100	253.610.000	229.580.691	90,53%	



URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN (P.APD)	REALISASI	%	KETERANGAN
Kecamatan (Sub unit Tisnonegaran)	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub unit Kebonsari Wetan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	dokumen	12	12	100	323.690.770	310.470.242	95,92%	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub unit Kebonsari Kulon)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	dokumen	12	12	100	340.051.180	331.942.690	97,62%	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sub unit Curahgrinting)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	dokumen	12	12	100	302.189.180	285.900.960	94,61%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan	persen	30	30	100	424.178.770	418.758.240	98,72%	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Gangguan Keamanan yang difasilitasi	persen	88	88	100	424.178.770	418.758.240	98,72%	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	124	124	100	424.178.770	418.758.240	98,72%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	persen	99	99	100	9.551.328.170	9.163.082.041	95,94%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	persen	100	100	100	15.000.000	15.000.000	100,00%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7	7	100	15.000.000	15.000.000	100,00%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	persen	95	95	100	8.737.001.069	8.372.297.492	95,83%	



URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	KETERANGAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	orang	73	73	100	8.356.872.719	8.013.642.952	95,89%	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	12	100	380.128.350	358.654.540	94,35%	
Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Administrasi BMD yang terpenuhi	persen	100	100	100	2.000.000	2.000.000	100,00%	
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	4	4	100	2.000.000	2.000.000	100,00%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	persen	100	100	100	1.685.000	1.685.000	100,00%	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	orang	73	69	94,52054795	1.685.000	1.685.000	100,00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	persen	100	100	100	218.521.821	212.533.140	97,26%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	7	7	100	101.492.821	95.901.965	94,49%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	2	2	100	38.529.000	38.411.500	99,70%	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	24	24	100	3.500.000	3.500.000	100,00%	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	12	100	5.000.000	4.846.000	96,92%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	20	20	100	70.000.000	69.873.675	99,82%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi	persen	100	100	100	155.050.000	154.800.000	99,84%	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	unit	1	2	200	72.500.000	72.500.000	100,00%	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	8	8	100	82.550.000	82.300.000	99,70%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	persen	100	100	100	292.951.780	280.498.309	95,75%	



URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%	KETERANGAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	12	100	166.080.000	156.858.809	94,45%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	12	12	100	126.871.780	123.639.500	97,45%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	persen	100	100	100	129.118.500	124.268.100	96,24%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	1	1	100	11.100.000	10.710.300	96,49%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	27	27	100	23.760.500	19.749.800	83,12%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	52	52	100	20.000.000	19.550.000	97,75%	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	1	100	74.258.000	74.258.000	100,00%	

Sumber : Kecamatan Kanigaran, 17 Januari 2024



Tabel 2. 2 Data Kinerja Anggaran 2022 – 2023

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2023			Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%		
1	PENDAPATAN DAERAH								
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	221.286.566.585,00	191.597.662.537,99	86,58	198.177.764.901,00	209.764.702.551,29	105,85	18.167.040.013,30	9,48
1.1.1.	Pajak Daerah	57.746.250.000,00	55.643.023.132,00	96,36	60.429.219.278,00	56.636.986.040,36	93,72	993.962.908,36	1,79
1.1.2	Retribusi Daerah	16.919.109.073,00	12.995.734.364,00	76,81	14.138.419.314,00	12.202.736.808,00	86,31	-792.997.556,00	-6,10
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.470.762.667,00	1.353.258.667,97	92,01	1.470.762.667,00	1.421.600.239,43	96,66	68.341.571,46	5,05
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	145.150.444.845,00	121.605.646.374,02	83,78	122.139.363.642,00	139.503.379.463,50	114,22	17.897.733.089,48	14,72
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	732.441.135.948,00	763.491.570.099,00	104,24	734.094.685.423,00	758.653.155.765,00	103,35	-4.838.414.334,00	-0,63
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	646.917.962.688,00	662.563.090.692,00	102,42	629.054.548.242,00	634.206.402.044,00	100,82	-28.356.688.648,00	-4,28
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	85.523.173.260,00	100.928.479.407,00	118,01	105.040.137.181,00	124.446.753.721,00	118,48	23.518.274.314,00	23,30
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	953.727.702.533,00	955.089.232.636,99	100,14	932.272.450.324,00	968.417.858.316,29	103,88	13.328.625.679,30	1,40
2	BELANJA DAERAH								0,00
2.1	BELANJA OPERASI	927.633.333.113,00	820.317.719.643,71	88,43	975.602.043.240,00	902.709.536.086,63	92,53	82.391.816.442,92	10,04
2.1.1	Belanja Pegawai	458.858.094.981,00	427.975.533.107,90	93,27	460.762.284.121,00	437.510.461.343,00	94,95	9.534.928.235,10	2,23
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	429.472.115.537,00	357.085.628.954,22	83,15	449.364.462.031,00	404.026.544.251,90	89,91	46.940.915.297,68	13,15
2.1.2004	Belanja Subsidi	70.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
2.1.2005	Belanja Hibah	37.357.023.645,00	33.864.935.641,59	90,65	63.432.761.588,00	59.789.919.852,73	94,26	25.924.984.211,14	76,55
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1.876.098.950,00	1.391.621.940,00	74,18	2.042.535.500,00	1.382.610.639,00	67,69	-9.011.301,00	-0,65
2.2	BELANJA MODAL	312.118.779.087,00	250.674.126.301,82	80,31	131.272.831.046,00	112.290.783.286,00	85,54	-138.383.343.015,82	-55,20
2.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.055.925.871,00	48.462.449.151,85	83,48	53.035.958.252,00	48.060.266.778,00	90,62	-402.182.373,85	-0,83
2.2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	224.293.116.084,00	181.709.002.200,44	81,01	46.139.486.054,00	40.561.483.076,00	87,91	-141.147.519.124,44	-77,68
2.2.3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.963.163.635,00	18.792.487.617,53	67,20	29.594.401.224,00	21.310.177.902,00	72,01	2.517.690.284,47	13,40
2.2.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.806.573.497,00	1.710.187.332,00	94,66	2.452.985.516,00	2.310.043.280,00	94,17	599.855.948,00	35,08



No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2023			Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%		
2.2.2005	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	48.812.250,00	97,62	48.812.250,00	0,00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	23.351.369.880,00	9.142.222.393,00	39,15	9.728.519.883,00	1.894.671.500,00	19,48	-7.247.550.893,00	-79,28
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	23.351.369.880,00	9.142.222.393,00	39,15	9.728.519.883,00	1.894.671.500,00	19,48	-7.247.550.893,00	-79,28
2.4	BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.263.103.482.080,00	1.080.134.068.338,53	85,51	1.116.603.394.169,00	1.016.894.990.872,63	91,07	-63.239.077.465,90	-5,85
	SURPLUS / (DEFISIT)	-309.375.779.547,00	-125.044.835.701,54	40,42	-184.330.943.845,00	-48.477.132.556,34	26,30	76.567.703.145,20	-61,23
3	PEMBIAYAAN DAERAH								
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	309.375.779.547,00	309.375.779.546,89	100,00	184.330.943.845	183.913.590.820,35	99,77	-125.462.188.726,54	-40,55
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	269.375.779.547,00	269.375.779.546,89	100,00	184.330.943.845,00	183.913.590.820,35	99,77	-85.462.188.726,54	-31,73
	Pencairan Dana Cadangan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	100,00				-40.000.000.000,00	- 100,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	309.375.779.547,00	309.375.779.546,89	100,00	184.330.943.845,00	183.913.590.820,35	99,77	-125.462.188.726,54	-40,55
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	184.330.943.845,35	0,00	0,00	135.436.458.264,01	0	-48.894.485.581,34	-26,53

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 19 Februari 2024



- Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2023 secara realisasi sudah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 5,85% dan mengalami kenaikan jumlah PAD dari tahun 2022 yaitu sebesar 18.167.040.013,30 atau sebesar 9,48%
- Untuk pendapatan pajak daerah semua jenis pajak mengalami kenaikan jika dibandingkan pada realisasi tahun 2022
- Untuk pendapatan retribusi daerah terdapat beberapa objek retribusi yang mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022 yaitu Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus. Beberapa kendala dalam ketercapaian target pendapatan retribusi dikarenakan dikarenakan pada tahun 2023 perjanjian kerjasama Pemerintah Kota Probolinggo dengan kabupaten tidak diperpanjang untuk beberapa objek retribusi tersebut seperti contoh retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dikarenakan adanya kerusakan alat uji sehingga pelayanan uji kendaraan. Sehingga Pemerintah Kota Probolinggo melakukan upaya untuk mendongkrak pendapatan sektor retribusi yaitu Membentuk pedoman teknis dalam pemeriksaan dan penagihan retribusi, Memberikan pelatihan teknis pemeriksaan dan penagihan retribusi dan akan melakukan sosialisasi dan penagihan secara intensif kepada subjek retribusi yang memiliki tunggakan pajak yang relatif besar secara bertahap dan periodik
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp1.421.600.239,43 atau 96,66% dan mengalami kenaikan sebesar Rp68.341.571,46 atau 4,81% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp1.353.258.667,97.
- Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp139.503.379.463,50 pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp17.897.733.089,48 atau 12,83% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp121.605.646.374,02
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp634.206.402.044,00 pada tahun 2023 menurun sebesar Rp28.356.688.648,00 atau 4,47% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp662.563.090.692,00. Penurunan ini dikarenakan pada pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Penurunan Pendapatan Transfer DBH diantaranya DBH SDA sangat bergantung pada penerimaan negara dari sektor sumber daya alam dan kebijakan pengelolaannya. Penurunan Nilai DAK Fisik ini sangat bergantung pada prioritas nasional terhadap bidang yang akan diberikan transfer dana alokasi khusus. Dalam hal peningkatan pendapatan transfer, BPPKAD melakukan upaya diantaranya Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini pemerintah pusat yang berwenang memberikan DAK Fisik ini dengan memperhatikan prioritas nasional agar penentuan target pendapatan setiap pemerintah daerah dapat disesuaikan dengan dana transfer yang akan diberikan



- Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp124.446.753.721,00 pada tahun 2023 meningkat sebesar Rp23.518.274.314,00 atau 18,90% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp100.928.479.407,00.
- Dari anggaran belanja operasi tahun 2023 sebesar Rp 975.602.043.240,00 terealisasi sebesar Rp902.709.536.086,63 atau meningkat sebesar Rp82.391.816.442,92
- Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp437.510.461.343,00 atau 94,95% meningkat sebesar 9.534.928.235,10 dari tahun 2022
- Secara keseluruhan realisasi belanja barang dan jasa tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan, gencarnya realisasi SKPD di tahun 2023 menjadikan nilai SiLPA pada tahun anggaran 2023 berkurang dibandingkan dengan tahun anggaran 2022, hal ini dikarenakan banyaknya program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023. Keseluruhan anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023 disajikan secara terinci sebagai belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, belanja barang dan jasa BOS dan belanja barang dan jasa BLUD. Realisasi atas Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar 89,12% atau Rp19.122.657.123,00 dengan pagu anggaran sebesar Rp21.457.397.631,00. Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat meningkat dibandingkan tahun anggaran 2022 dikarenakan banyaknya kegiatan masyarakat yang di suport oleh Pemerintah Kota Probolinggo melalui kegiatan lomba-lomba pada masing-masing kecamatan di Kota Probolinggo
- Belanja hibah sebesar Rp59.789.919.852,73 pada tahun 2023 meningkat sebesar Rp25.924.984.211,14 atau 56,64% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp33.864.935.641,59. Belanja hibah tahun 2023 merupakan hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta
- Belanja bantuan sosial sebesar Rp1.382.610.639,00 pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp9.011.301,00 atau 0,65% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp1.391.621.940,00. Penurunan belanja bantuan sosial dikarenakan target yang akan diberikan menurun. Pemberian bantuan sosial didasarkan kebutuhan terhadap pihak yang akan diberikan bantuan, jadi untuk target dan realisasi disesuaikan dengan rencana pemberian bansos
- Belanja modal pada tahun 2023 sebesar Rp112.290.783.286,00 mengalami penurunan sebesar Rp138.383.343.015,82 atau 123,24% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp250.674.126.301,82. Penurunan belanja modal terjadi dikarenakan beberapa faktor diantaranya kebutuhan pemerintah akan belanja modal yang turun, kemudian terjadi perubahan prioritas pemerintah dalam anggaran belanja, lalu terdapat kendala yang terjadi diantaranya proses lelang pada belanja modal yang mepet pada akhir tahun sehingga anggaran yang tersedia tidak bisa dilakukan realisasi / penyerapan. Pada proses perencanaan belanja



modal harus dilakukan dengan cermat termasuk proses pengadaan dan tender sehingga waktu yang tersedia untuk belanja modal dapat

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2023 mengalami penurunan daripada tahun 2022 sejumlah 402.182.373,85
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun 2023 mengalami penurunan daripada tahun 2022 sejumlah 141.147.519.124,44
- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada tahun 2023 mengalami kenaikan daripada tahun 2022 sejumlah 2.517.690.284,47
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022 sejumlah 599.855.948,00
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022 sejumlah 599.855.948,00
- Belanja tak terduga sebesar Rp9.728.519.883,00 pada tahun 2023 menurun sebesar Rp7.247.550.893,00 atau 382,52% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp9.142.222.393,00. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah
- Pada tahun 2023, anggaran Pemerintah Kota Probolinggo mengalami defisit anggaran sebesar (Rp184.330.943.845,00). Anggaran dan realisasi surplus/defisit tahun 2023
- Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2023 terdiri dari penggunaan SILPA tahun lalu sebesar Rp184.330.943.845,00. Penggunaan SILPA pada tahun anggaran 2023 tidak terealisasi 100%, dikarenakan ada koreksi atas SILPA tahun lalu senilai Rp417.353.025,00

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 yaitu hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Untuk hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Permendagri 18 Tahun 2020 meliputi:

- Capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan
- Kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan pelaksanaannya
- Tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran sebelumnya

3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Probolinggo Tahun 2023 disusun sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan unsur penunjang urusan pemerintahan. Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan mencakup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

3.1.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 menetapkan 8 (delapan) indikator tujuan yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 22 (dua puluh dua) indikator sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD). Target Indikator Kinerja dimaksud ditetapkan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2023.

3.1.1.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021, terdapat 6 IKU sebagai gambaran pencapaian misi pembangunan Kota Probolinggo sebagaimana tabel 3.1

Tabel 3. 1 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Probolinggo Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2022	2023		
			REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,12	3.5 - 4	6,04	161%
2.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74,56	74,07	75,43	101,84%
3.	Persentase Penduduk Miskin	%	6,65	7,35	6,48	111,84%
4.	Indeks Infrastruktur	Indeks	74,91	76,84	75,53	98,30%



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2022	2023		
			REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	60,85	65,03	61,69	94,86%
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68,56	72,00	76,13	105%

Sumber: Bappeda Litbang, 2024

Capaian 6 (enam) Indikator Kinerja Utama / IKU yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 pada tahun 2023 rata – rata telah di atas 90%. Dua indikator yang tidak memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan adalah Indeks Infrastruktur, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Ketidaktercapaian Indeks Infrastruktur karena indikator-indikator yang menjadi pembentuk IKD Persentase Ketersediaan Infrastruktur dan Persentase Infrastruktur Berkualitas Baik. Secara umum IKD yang belum melampaui target adalah Persentase Ketersediaan Infrastruktur sehingga diperlukan upaya-upaya peningkatan ketersediaan infrastruktur guna menjamin akses serta mewujudkan pemerataan pembangunan. Adapun ketidaktercapaian target IKLH tahun 2023 disebabkan oleh adanya ada 2 (dua) Indikator yang masih belum mencapai target yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) masih kurang dikarenakan dari sampel air enam (6) sungai yang diuji oleh UPTD Laboratorium Lingkungan pada Kota Probolinggo melalui Mitralab Surabaya diperoleh data rata-rata air sungai tercemar ringan oleh nitrat, nitrit, cadmium, fluoride dan Total Coli dan untuk Capaian Indeks Kualitas Lahan (IKL) capaiannya masih kurang dikarenakan tutupan Vegetasi RTH masih banyak yang kurang dari 2 meter. Sehingga tidak dapat dilihat pada saat penilaian GIS.

1. PERTUMBUHAN EKONOMI

Pada Tahun 2023 perekonomian Kota Probolinggo mengalami pertumbuhan sebesar 6,04 persen. Laju pertumbuhan di kota probolinggo Tahun 2023 masih tumbuh positif namun tidak sebesar pada Tahun 2022 dikarenakan terdapat beberapa kategori yang turun sehingga berpengaruh pada total angka pertumbuhan 2023 salah satunya adalah transportasi. Sepanjang Tahun 2023 kategori transportasi masih tumbuh positif namun jauh angkanya jika dibandingkan Tahun 2022. Di Tahun 2022 yang notabene mulai pengurangan/penghapusan PPKM berdampak terhadap antusiasme warga yang sangat tinggi untuk melakukan perjalanan namun seiring berjalannya waktu (2023) antusiasme warga sudah mulai berkurang karena warga semakin selektif.

2. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (along and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan merupakan pusat pembangunan yang proses dan hasilnya harus dilakukan secara terencana dan terpadu demi mendapatkan hasil sumberdaya manusia yang berkualitas. Pemerintah Kota Probolinggo telah melakukan berbagai upaya untuk senantiasa



melaksanakan pembangunan yang seimbang, antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia. Hasil pembangunan manusia dapat dilihat salah satunya melalui indikator yang disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka IPM Kota Probolinggo pada 2023 tercatat sebesar 75,43 meningkat 1,36 dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan IPM 2023 Kota Probolinggo mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama umur panjang dan hidup sehat dan standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 70,99 tahun, meningkat 0,31 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,06 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,67 menjadi 13,73 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,27 tahun, dari 9,29 tahun menjadi 9,56 tahun pada tahun 2023. Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Susenas yang dilaksanakan pada bulan Maret. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 428 ribu rupiah (3,40 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret.

3. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

Persentase Penduduk Miskin Tahun 2023 tercatat sebesar 6,48 persen, menurun 0,17 persen poin terhadap Tahun 2022. Hal tersebut menggambarkan bahwa jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 telah berkurang sebanyak 0,30 ribu jiwa dibandingkan dengan Jumlah penduduk miskin di Kota Probolinggo pada Tahun 2022. Pada Tahun 2022, jumlah penduduk miskin mencapai 16,16 ribu jiwa dan pada Tahun 2023 jumlah penduduk miskin mencapai 15,86 ribu jiwa. Nilai realisasi pada tahun 2023 tersebut lebih kecil dibandingkan dengan target akhir RPJMD 7,3 persen. Hal tersebut menggambarkan bahwa Jumlah penduduk miskin di Kota Probolinggo sudah mengalami penurunan. Masalah kemiskinan, sebenarnya tidak hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin saja. Namun ukuran lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman serta keparahan dari kemiskinan yang terjadi. Upaya kebijakan pembangunan terutama yang bertujuan memperkecil jumlah penduduk miskin, diharapkan juga bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Pada periode Maret 2022 - Maret 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Probolinggo mengalami kenaikan nilai sebesar 0,090 poin menjadi 1,130 pada tahun 2023. Kenaikan angka indeks P1 salah satu penyebabnya adalah naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga barang secara umum akan sangat dirasakan oleh penduduk miskin, dan memperkecil daya belinya. Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengukur seberapa jarak rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di antara penduduk miskin itu sendiri. Semakin besar angka P2 berarti makin jauh jarak rata-



rata pengeluaran per kapita per bulan antara penduduk miskin. Pada periode Maret 2022 - Maret 2023, nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Probolinggo naik 0,01 poin dari 0,23 pada Maret 2022 menjadi 0,24 pada Maret 2023. Naiknya salah satu penyebabnya adalah naiknya harga-harga kebutuhan pokok hingga menyebabkan daya beli penduduk miskin juga makin kecil. Peningkatan ekonomi masyarakat Kota Probolinggo mempunyai efek pengurangan penduduk miskin di kota Probolinggo. Selain peningkatan internal tersebut, pemberian bantuan yang dilakukan oleh pemerintah bisa dikatakan tepat sasaran sehingga mampu menekan jumlah penduduk miskin dan mengentaskannya.

4. INDEKS INFRASTRUKTUR

Capaian indeks Infrastruktur pada tahun 2023 sebesar 98,30%, dimana dari target sebesar 76,84 realisasi pada tahun 2023 adalah 75,53. Namun nilai indeks infrastruktur tahun 2023 meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Kenaikan capaian indeks infrastruktur dari tahun 2022 ke tahun 2023 disebabkan kenaikan indikator persentase infrastruktur berkualitas baik sebagai pembentuk indeks infrastruktur dari 72,81 (2022) menjadi 74,07 (2023) atau naik sebesar 1,26%. Adapun capaian persentase ketersediaan infrastruktur relatif stabil pada angka 77. Capaian indeks infrastruktur pada tahun 2023 adalah 98,30% atau belum melampaui target dikarenakan indikator persentase ketersediaan infrastruktur yang belum melampaui target yang ditetapkan dalam perubahan RPJMD.

5. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2023 sebesar 61,69 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022. Berdasarkan aplikasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pplk.menlhk.go.id diketahui bahwa realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Probolinggo tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,84 dari nilai IKLH tahun 2022. Adapun IKLH pada tahun 2023 mencapai nilai 61.69 yang merupakan penggabungan antara perolehan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 50.00, Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 91.64 dan nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 26.36. Sedangkan untuk tahun 2022 sebesar 60.85 yang diperoleh dari penggabungan antara nilai IKA sebesar 50. Nilai IKU sebesar 91.44 dan Nilai IKL sebesar 22.90. Berdasarkan Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan Nomor 5.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 Tanggal 4 Desember 2020 Tentang Metode Perhitungan IKLH 2020 - 2024, disebutkan bahwa range nilai IKLH adalah sebagai berikut: - Kategori Sangat Baik yaitu nilai $x > 90$ - Kategori Baik yaitu antara nilai $70 < x \leq 90$ - Kategori Cukup / Sedang yaitu antara nilai $50 \leq x \leq 70$. - Kategori Kurang yaitu antara nilai $30 \leq x < 50$. - Kategori Sangat Kurang yaitu nilai $x < 30$ Dengan demikian maka nilai IKLH Kota Probolinggo dari tahun 2021 s.d tahun 2023 termasuk dalam kategori sedang. Meskipun IKLH Kota Probolinggo mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023 namun masih belum mencapai target sebagaimana tercantum dalam dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo



Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 yakni target pada tahun 2023 adalah 65,03.

Perhitungan nilai IKLH terdiri dari 3 (tiga) Indikator, yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Dimana untuk realisasi IKLH tahun 2023 tidak dapat mencapai target dikarenakan ada 2 (dua) Indikator yang masih belum mencapai target yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) masih kurang dikarenakan dari sampel air enam (6) sungai yang diuji oleh UPTD Laboratorium Lingkungan pada Kota Probolinggo melalui Mitralab Surabaya diperoleh data rata-rata air sungai tercemar ringan oleh nitrat, nitrit, cadmium, fluoride dan Total Coli. Capaian Indeks Kualitas Lahan (IKL) masih kurang, hal ini dikarenakan tutupan Vegetasi RTH masih banyak yang kurang dari 2 meter. Sehingga tidak dapat dilihat pada saat penilaian GIS.

Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya untuk mengatasi kendala yang muncul antara lain :

- Dalam upaya menaikkan nilai Indeks Kualitas Air :
 - a. Menambah jumlah titik dan waktu pengujian.
 - b. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait seperti satpol PP, Dinas Perizinan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dishub dalam rangka penegakan hukum.
 - c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pelaku usaha terkait pentingnya menjaga kualitas air sungai.
- Dalam upaya menaikkan nilai Indeks Kualitas Lahan :
 - a. pendataan luasan RTH yang dapat dimasukkan misalnya dari fasum-fasum di perumahan,
 - b. Melakukan penanaman dengan bibit pohon yang diatas 2 meter di beberapa lokasi diantaranya : 1. Fasilitas Umum (Fasum) 2. Perkantoran - perkantoran 3. Dll.

6. INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Probolinggo. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik. Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan



dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Probolinggo. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik. Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Pada Tahun 2023 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kota Probolinggo sebesar 76,13. Dalam hal ini nilai Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 tidak dapat dipersandingkan dengan hasil evaluasi Tahun sebelumnya karena Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024 dan peraturan turunannya terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan.

3.1.1.2 Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 telah ditetapkan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Daerah (berupa indikator sasaran). Dari 22 IKD Kota Probolinggo, 3 IKD belum dapat disajikan capaian tahun 2023 baik karena belum adanya rilis oleh BPS maupun karena masih dalam proses penghitungan oleh Pemerintah Pusat. Capaian 14 indikator lainnya rata-rata telah 90% bahkan melampaui target. Adapun indikator yang masih rendah capaiannya adalah Indeks Kualitas Lahan dengan capaian 55,45%, dimana dari target 36,83 capaian IKL pada tahun 2022 sebesar 22,9.

Tabel 3. 2 Realisasi Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)	SATUAN	2022	2023		
			KONDISI AWAL	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	0,389	0,4	0,42	105%
2.	Persentase Pertumbuhan PDRB Perdagangan	%	6,08	6,2	5,43	87,58%
3.	Persentase Pertumbuhan PDRB Perindustrian	%	6,03	2,2	6,72	305%
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,57	5,44	4,53	116%
5.	Persentase PMKS	%	48,82	33,5	46,28	61,85%



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)	SATUAN	2022	2023		
			KONDISI AWAL	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
6.	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	85,1	84,8	81,2	95,75%
7	Persentase Penurunan Kasus Ketenteraman dan Ketertiban	%	1,9	2	1,46	73%
8	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	65,81	68,40	N/A	N/A
9	Indeks Pendidikan	Indeks	0,69	0,69	0,7	101,45%
10	Indeks Kesehatan	Indeks	0,78	0,78	0,78	100%
11	Persentase Ketersediaan Infrastruktur	%	77,01	79,72	77	96,59%
12	Persentase Infrastruktur Berkualitas Baik	%	72,81	73,95	74,07	100,16%
13	Indeks Kualitas Air	Indeks	50	51,3	50	97,47%
14	Indeks Kualitas Udara	Indeks	91,44	90,5	91,64	101,26%
15	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	22,9	41,5	26,36	63,52%
16	Indeks Risiko Bencana	Indeks	101,33	112	97,72	112,75%
17	Nilai SAKIP	Skor	74,02	81	73,25	90,43%
18	Nilai LPPD	Skor	3,422	32,6	N/A	N/A
19	Indeks SPBE	Indeks	1,97	3,5	3,1	88,57%
20	Opini BPK Terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	N/A	N/A
21	Indeks Profesionalitas Aparatur	Indeks	42,08	64,5	64,04	99,29%
22	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,88	84,2	85,41	101,44%

Sumber: Bappeda Litbang, 2024

1. Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi

Target pertumbuhan nilai investasi 2023 telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 104,75%. Nilai investasi Kota Probolinggo tahun 2023 mencapai nilai Rp 16.549.464.253.579 yang didominasi oleh sektor perindustrian dan perdagangan. Keberhasilan dalam pencapaian target ini dikarenakan adanya anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik bidang Fasilitas Penanaman Modal TA 2023 sehingga kegiatan pendampingan kepada pelaku usaha dalam melaporkan realisasi penanaman modal melalui kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, bimbingan teknis dan sosialisasi, serta pengawasan kepada pelaku usaha bisa dilakukan secara maksimal. Terdapat kendala Dalam pelaksanaannya diantaranya belum semua pelaku usaha melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagai satu-satunya sumber data pencapaian realisasi investasi, kurangnya SDM yang memadai dalam pendampingan LKPM, Juknis DAKNF yang sifatnya mengikat dan kurang fleksibel sehingga diperlukan pendampingan per sektor usaha yang memiliki potensi realisasi investasi dan meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah teknis lain dalam kegiatan pengawasan berusaha.

2. Persentase Pertumbuhan PDRB Perdagangan

PDRB perdagangan meliputi perdagangan besar dan eceran ,reparasi mobil dan sepeda motor, dari data yang diperoleh untuk perdagangan besar mobil dan sepeda motor pertumbuhannya mengalami sedikit kontraksi atau penurunan yang cukup besar dibandingkan Tahun 2022, namun data yang diperoleh untuk perdagangan besar dan eceran bukan mobil & sepeda motor mengalami peningkatan sedangkan untuk perdagangan besar mobil dan sepeda

motor mengalami penurunan sehingga secara agregat mengakibatkan pertumbuhan kategori perdagangan sedikit mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2022.

3. Persentase Pertumbuhan PDRB Perindustrian

PDRB Tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan kategori industri ada peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2022. Di kategori industri ini ada 16 sub kategori dan ada beberapa sub kategori yang mengalami peningkatan sehingga mendongkrak pertumbuhan kategori industri. Beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan industri yaitu banyaknya momen pameran UMKM lewat ajang semipro, refleksi kepemimpinan walikota dan event-event lain yang mendorong pelaku UMKM utamanya terdongkraknya produksinya. Selain itu data yang diperoleh di sub kategori industri kayu dan tekstil juga ada peningkatan produksi, meski di beberapa sub kategori industri ada juga yang mengalami penurunan, namun secara garis besar masih ada pertumbuhan yang meningkat di kategori industri untuk Tahun 2023.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Kota Probolinggo tahun 2023 turun dari 4,57% (tahun 2022) menjadi 4,53%. Peningkatan ekonomi juga berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kota Probolinggo. Rasio pengangguran makin kecil dibanding penduduk angkatan kerjanya sehingga dengan kata lain Penduduk Kota Probolinggo yang bekerja semakin banyak.

5. Persentase PMKS

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Dari target RPJMD yang telah ditetapkan yaitu sebesar 33,5%, persentase PMKS terealisasi sebesar 46,28%. Walaupun besaran capaian hanya 61,85%, namun Pemerintah Kota Probolinggo sudah mampu menurunkan persentase PMKS sebesar 2,54% dari tahun 2022. Dengan kata lain, upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo mulai memberikan dampak yang signifikan. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain Penyediaan database kemiskinan yang akurat, Peningkatan cakupan layanan penanganan PMKS, Optimalisasi layanan dan pengaduan masyarakat miskin dan Peningkatan pelayanan rehabilitasi, perlindungan, dan jaminan sosial bagi masyarakat Kota Probolinggo.

6. Skor Pola Pangan Harapan

Realisasi skor PPH Konsumsi Tahun 2023 adalah 81,2 belum mencapai target RPJMD yaitu 84,8 sehingga capaiannya 95,75%. Hal ini disebabkan adanya penurunan skor konsumsi pada kelompok pangan : umbi - umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang - kacangan dan gula . Berdasarkan hasil analisa PPH Konsumsi yang didasarkan atas data SUSENAS BPS didapatkan bahwa terjadi penurunan besaran konsumsi energi di Kota Probolinggo yaitu 1.857,9 kkal/kap/hr



dan konsumsi protein juga mengalami penurunan yaitu 55,9 gr/kap/hr. Angka yang didapatkan merupakan citra dari kondisi kualitas konsumsi pangan masyarakat secara nasional, dan secara khusus di Kota Probolinggo. Capaian skor PPH akan terwujud apabila setiap wilayah memiliki capaian konsumsi pangan yang mengarah pada pola komposisi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam rangka peningkatan skor pola pangan harapan adalah :

- Peningkatan Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) melalui pemberian makanan tambahan bagi semua kalangan masyarakat mulai bayi, balita, anak sekolah/pelajar, ibu, bapak, lansia sehingga kualitas konsumsi pangan dapat meningkat.
- Pengenalan mengenai konsumsi pangan yang B2SA ke sekolah - sekolah dan masuk ke dalam kurikulum sekolah agar siswa/i dan warga sekolah juga orangtua mulai peduli terhadap pangan yang B2SA mulai dini.
- Kampanye Konsumsi Pangan B2SA secara masif dan intensif di masyarakat.
- Peningkatan teknologi tepat guna dengan mengolah pangan pokok lokal unggulan daerah (sumber karbohidrat lainnya pengganti beras) menjadi produk olahan yang berdaya saing dan memiliki nilai manfaat bagi tubuh dan juga meningkatkan kesejahteraan keluarga.

7. **Persentase Penurunan Kasus Ketenteraman dan Ketertiban**

Dari target RPJMD yang telah ditetapkan yaitu jumlah kasus menurun sebesar 2% terealisasi sebesar 1,46%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya Penurunan kasus ketenteraman dan ketertiban dengan capaian 72,82%. Dari jumlah pelanggaran perda dan perkada untuk tahun 2022 sebesar 206 kasus, turun menjadi 203 tahun 2023, disebabkan meningkatnya pengawasan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo serta sosialisasi yang diberikan kepada warga sehingga kesadaran warga juga meningkat. Jumlah pengawasan 1094 kali di tahun 2022, meningkat menjadi 1.369 kali di tahun 2023. Kurangnya pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang Perda Perkada. Rutin dalam pengawasan Perda Perkada dengan melakukan patroli dan operasi di lokasi rawan pelanggaran.

8. **Indeks Pemberdayaan Gender**

Pada tahun 2022, Indeks pemberdayaan gender kembali turun ke angka 65,81. Turunnya indeks pemberdayaan gender di Kota Probolinggo karena adanya komponen pendukung yang ikut turun yakni sumbangan pendapatan perempuan. Dari sebelumnya 31,4 persen menjadi 31,09 persen. Selain itu, banyak usaha yang harus tutup, karena dampak sepi akibat pembatasan. Banyak dari usaha ini yang menjalankan adalah kaum perempuan. Untuk Tahun 2023 Nilai Indeks Pemberdayaan Gender belum dapat disajikan capaiannya karena belum adanya rilis oleh BPS.



9. Indeks Pendidikan

Pertumbuhan Indeks Pendidikan 2023 Kota Probolinggo mencapai target dari 0,69 menjadi 0,7. Seluruh dimensi pembentuk Indeks pendidikan mengalami peningkatan. Salah satu faktor keberhasilan ketercapaian target adalah Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,06 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,67 menjadi 13,73 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,27 tahun, dari 9,29 tahun menjadi 9,56 tahun pada tahun 2023. Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Susenas Maret.

Pemerintah Kota Probolinggo dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo melakukan upaya dalam rangka peningkatan indeks pendidikan diantaranya :

- a. Pendidikan gratis; Pemerintah Daerah menggratiskan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan yang merupakan kewenangan dan tanggung jawabnya. Dengan adanya Pendidikan gratis ini diharapkan tidak ada lagi anak sekolah yang putus sekolah karena ketidakmampuan membayar biaya pendidikan, sehingga angka rata-rata lama sekolah meningkat;
- b. Pemberian seragam gratis
- c. Beasiswa dan/atau bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi dan Penghargaan hafidz/hafidzah.
- d. Pendidikan kesetaraan (Kejar Paket A, Paket B dan Paket C); Pemerintah Daerah dalam hal ini menjadi kewenangan dinas pendidikan sesuai kewenangan masing-masing memperbanyak penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B dan Paket C bagi masyarakat yang putus sekolah;
- e. Sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat. Mengingat bahwa faktor penyebab putus sekolah tidak hanya karena faktor ekonomi, tetapi juga faktor perhatian orangtua, budaya, kurangnya minat bersekolah, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pendidikan, dan sebagainya, maka upaya sosialisasi kepada masyarakat juga perlu dilakukan;
- f. Penambahan jumlah guru; Pemerintah Daerah melakukan penambahan jumlah guru dengan cara pengadaan guru, baik PNS maupun Non-PNS, sesuai dengan kebutuhannya.
- g. Pelatihan dan sertifikasi guru.
- h. Pemberian tambahan tunjangan guru/tenaga pendidik: Pemerintah memberi tambahan tunjangan bagi guru, baik guru PNS terlebih lagi bagi guru non-PNS.
- i. Dari sisi sarana/prasarana pendidikan: melengkapi dan membangun sarana/prasarana pendidikan guna mendekatkan akses pendidikan bagi masyarakat, dilakukan dengan kegiatan Merehabilitasi dan melengkapi sarana/prasarana sekolah, Pemerintah Daerah melakukan perbaikan atau rehabilitasi sekolah-sekolah dan melengkapi sarana/prasarana belajar. Banyak sekolah-sekolah yang dalam kondisi rusak dan kurang layak untuk digunakan dalam proses belajar-mengajar, dan tak jarang beberapa sekolah tidak dapat melaksanakan proses belajar-mengajar pada waktu-waktu tertentu seperti musim hujan misalnya dimana sekolah bocor, banjir dan khawatir ada yang ambruk, dan sebagainya;



- j. Pengembangan Perpustakaan Keliling (Pusling) sejak 2019 keliling ke sekolah.
- k. POCADI - pojok baca digital - scan barcode buku digital di perpustakaan.

10. Indeks Kesehatan

Pertumbuhan Indeks Kesehatan 2023 Kota Probolinggo mencapai target sebesar 0,784. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 70,99 tahun, meningkat 0,31 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Faktor yang mendukung ketercapaian target adalah :

- a. Meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan, hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan. Pembangunan Rumah Sakit Baru (Ar Rozy) Dan Sarana Prasarana Pendukung Dan Tenaga Medis-non Medis Untuk Mendukung Operasional Ar Rozy Termasuk Ambulans Siaga Di 29 Kelurahan Ditambah Dengan 6 Ambulans Darurat Jantung Yang Dilengkapi Alat Automatic External Defibrilator (AED).
- b. Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Fasilitas Kesehatan melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan Pengembangan Aplikasi Go PMB (Praktek Mandiri Bidan dan Profil terkini Siskia Pro Cantik (aplikasi KIA untuk Ibu hamil). Tenaga Kesehatan yang sudah terorientasi Kegawatdaruratan pada Maternal sehingga ketika menemukan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas dapat langsung tertangani dengan baik. Peningkatan pengetahuan ibu hamil, keluarga dan masyarakat melalui pelaksanaan kelas ibu hamil mengenai faktor-faktor resiko dan komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas sehingga pengambilan keputusan tidak terlambat. Rujukan kegawatdaruratan pada ibu hamil, bersalin dan nifas dapat langsung mengakses sehingga komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas dapat tertangani dengan baik.
- c. Terlaksananya Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui BPJS memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi warga dan Penyediaan Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Tahun 2023 Cakupan Universal Health Coverage (UHC) Mencapai 100 Persen Dari Jumlah Masyarakat Kota Probolinggo.
- d. BPJS ketenagakerjaan bagi guru ngaji/guru sekolah minggu/ pasraman, dan klenteng.
- e. Pemberian makanan tambahan pada kegiatan posyandu,
- f. Kegiatan penurunan stunting yang dilaksanakan melalui kegiatan sambang PAUD, sambang Posyandu.
- g. Pelayanan kesehatan menggunakan kendaraan reaksi cepat - mobil kecil dan motor untuk menjangkau area tertentu yang terintegrasi dengan Call Center 112

11. Persentase Ketersediaan Infrastruktur

Realisasi persentase ketersediaan infrastruktur pada tahun 2023 adalah sebesar 77% dengan capaian dibandingkan target adalah sebesar 96,59%. Ditinjau dari capaian berdasarkan target, terdapat beberapa indikator yang belum melampaui target yaitu: 1. Prosentase Angkutan Jalan yang Memenuhi Standar Keselamatan dari target sebesar 98% hanya terealisasi sebesar



85,27% sehingga tercapai 87% 2. persentase sampah masuk TPA dari target sebesar 73% hanya terealisasi sebesar 63,99% sehingga tercapai 87,66% 3. Prosentase penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah dari target sebesar 82,5% hanya terealisasi sebesar 64,15% sehingga tercapai 77,76% 4. Prosentase Pengoperasian TPA dari target sebesar 81,5% hanya terealisasi sebesar 79,4% sehingga tercapai 97,42% 5. Prosentase luas tanam irigasi teknis dari target sebesar 71,5% hanya terealisasi sebesar 68,8% sehingga tercapai 96,22% 6. Prosentase jumlah BTS berijin dari target sebesar 100% hanya terealisasi sebesar 98,15% sehingga tercapai 98,15% 7. Prosentase luasan RTH publik yang tersedia dari target sebesar 10,45% hanya terealisasi sebesar 5,66% sehingga tercapai 54,16% Beberapa kendala yang teridentifikasi terkait capaian persentase ketersediaan infrastruktur adalah: 1. Dalam pemenuhan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan terdapat kendala Pada Pelaksanaan Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor TA 2023 terjadi kerusakan dan Pemeliharaan pada 9 Unit Alat Uji Kendaraan Bermotor di bulan Maret-April sehingga Pelayanan Uji Berkala di hentikan, ada beberapa wajib uji yang meminta rekomendasi untuk melaksanakan pengujian kendaraan di luar Kota Probolinggo dan penerapan regulasi Surat Edaran terkait ODOL (Over dimensi dan Over Loading) pada angkutan jalan 2. Penurunan capaian sampah masuk TPA dikarenakan pada tahun 2023 mengalami musim kemarau panjang dimana volume berat sampah yang masuk ke TPA dalam kondisi kering dan berat sampah pun cenderung lebih ringan dibandingkan dengan sampah pada musim penghujan yang cenderung basah dan otomatis volume beratnya pun cenderung lebih berat. 3. Prosentase penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah mengalami penurunan dikarenakan Sarana dan Prasarana pengangkut sampah yang berupa kendaraan Truk Konvaktor mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dioperasikan. Hal ini berdampak terhadap turunnya penanganan sampah. Truk Konvaktor tersebut baru dapat diperbaiki dan dapat mulai beroperasi lagi pada bulan Desember 2023. 4. Meskipun luas tanam irigasi teknis bertambah dari 68.70 (2022) menjadi 68.80 (2023) namun persentase tersebut belum dapat memenuhi target 5. Belum terpenuhinya RTH Publik karena terjadinya alih fungsi lahan seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk untuk kebutuhan permukiman serta dampak dari adanya Pembangunan dimana di Kota Probolinggo semakin banyak perumahan, pusat pertokoan, pusat industry dan lain-lain. 1. Dalam rangka peningkatan pengelolaan persampahan perlu dilakukan upaya-upaya darurat sampah seperti: peningkatan penanganan sampah 3R, optimalisasi TPA (mining TPA), serta penerapan aturan yang tegas terkait persampahan 2. Dalam rangka penambahan luasan RTH Publik perlu dilakukan penambahan luas lahan baru untuk Hutan Kota, RTH RT/RW serta melaksanakan kegiatan Reboisasi sehingga memiliki Tutupan Vegetasi yang memiliki nilai kerapatan yang cukup baik agar kedepannya dapat menambah Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) 3. Dalam rangka pemenuhan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan perlu dilakukan upaya pemeliharaan rutin terhadap alat uji yang ada sehingga tidak sampai mengalami kerusakan secara bersamaan



12. Persentase Infrastruktur Berkualitas Baik

Realisasi persentase infrastruktur berkualitas baik pada tahun 2023 adalah sebesar 74,07 dengan capaian dibandingkan target adalah sebesar 100,16% atau telah melampaui target. Ditinjau dari capaian berdasarkan target, terdapat beberapa indikator yang telah melampaui target antara lain: 1. Prosentase kondisi jalan (baik-sedang) dari target sebesar 95% berhasil terealisasi sebesar 96,58% sehingga tercapai 101,67% 2. Prosentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik dari target sebesar 84% berhasil terealisasi sebesar 84,2% sehingga tercapai 100,2% 3. Prosentase panjang drainase lingkungan dalam kondisi baik dari target sebesar 73% berhasil terealisasi sebesar 73,45% sehingga tercapai 100,6% Namun demikian terdapat 1 indikator yang belum melampaui target pada tahun 2023 yaitu Persentase saluran irigasi, sungai, drainase dalam kondisi mantap dengan capaian 98,59%.

13. Indeks Kualitas Air

Berdasar dari hasil perhitungan, Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Probolinggo tahun 2023 memiliki nilai sebesar 50 yang berada pada kategori "sedang", dimana untuk kategori sedang ini skornya adalah antara $50 \leq x \leq 70$. Pengujian Kualitas Air dilakukan sebanyak 7 (tujuh) titik sample pada 6 (enam) sungai yang berlokasi di Kota Probolinggo, yang terdiri dari 6 (enam) titik hilir sungai yaitu Hilir Sungai Banger, Hilir Sungai Kedunggaleng, Hilir Sungai Pancor, Hilir Sungai Kasbah, Hilir Sungai Umbul dan Hilir Sungai Legundi serta 1(satu) titik hulu sungai, yaitu Hulu Sungai Kedung Galeng. Capaian IKA sebesar 50 tersebut tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 51,3. Ketidaktercapaian target ini disebabkan oleh beberapa hal ini diantaranya : 1. Masih banyaknya industri besar maupun Usaha Kecil Menengah (UKM) yang belum memiliki IPAL atau spesifikasi IPAL yang belum memenuhi syarat untuk membuang limbahnya ke badan air. Dari total UMKM di Kota Probolinggo kurang lebih sebanyak 3.500, ada sekitar kurang lebih 80% yang tidak memiliki IPAL. 2.Meningkatnya limbah domestik rumah tangga yang masuk ke badan air akan berakibat menurunnya kualitas air 3. Limbah dari pertanian dan peternakan diantaranya sisa penggunaan pupuk kimia, pembuangan kotoran hewan yang di buang langsung ke sungai.

Kendala yang masih ditemui dalam upaya peningkatan Indeks Kualitas Air diantaranya: 1. Meningkatnya pertumbuhan penduduk 2. Penegakan hukum terkait pengelolaan limbah domestik belum berjalan maksimal 3. Meningkatnya usaha hotel/ homestay, Laundry, tempat cucian kendaraan, tempat kos dan restoran/cafe yang belum diikuti dengan kesadaran penanganan limbah yang dihasilkan.

Solusi atau upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala yang muncul antara lain : 1. Akan menambah jumlah titik dan waktu pengujian. 2. Akan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait seperti satpol PP, Dinas Perizinan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dishub dll dalam rangka penegakan hukum. 3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pelaku usaha terkait pentingnya menjaga kualitas air sungai.



14. Indeks Kualitas Udara

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Probolinggo tahun 2023 adalah 91.64 dengan capaian 101,26% yang diartikan bahwa kondisi kualitas udara pada posisi Unggul. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) ini diperoleh berdasarkan data hasil uji Kualitas Udara yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim di Empat (4) Titik yaitu Terminal Bayuangga Kota Probolinggo, Perumahan Sumber Taman Indah, Industri PT South Marine Product dan Kompleks Perkantoran Setda Kota Probolinggo. Adapun proses pengujian serta penginputan hasil pengujian merupakan kewenangan dari DLH Provinsi Jawa Timur, sedang DLH Kota Probolinggo hanya melakukan pendampingan pada saat pemasangan dan pengambilan alat sampling Udara. Perolehan IKU Tahun 2023 sebesar 91,64 tersebut diperoleh bersumber dari Aplikasi IKLH dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Capaian nilai indeks Kualitas Udara dapat mendapat nilai 101,26% disebabkan oleh upaya-upaya yang telah dilakukan sebagai berikut:

- Meningkatkan Peran Sekolah Adiwiyata di Kota Probolinggo dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sejak dini, dengan sasaran siswa-siswi SD, SMP dan SLTA
- Penyelenggaraan Eco Pesantren dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, dengan sasaran warga pondok pesantren
- Aksi Perbanyak Lubang Resapan Biopori (Si Mak Ngebor) dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Adapun aksi ini menghasilkan produk kompos yang dapat digunakan untuk kebutuhan sendiri atau sekitarnya
- Pembentukan dan Pembinaan Program Kampung Iklim (PROKLIM) dan Kelurahan Berseri dengan melibatkan peran masyarakat dan kelurahan dalam aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Untuk Capaian dari IKU sudah melebihi dari Target. Namun masih ada hal yang perlu diperhatikan dalam rangka mempertahankan kualitas udara yang baik yakni masih adanya pembakaran sampah liar oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka akan dilakukan kegiatan sosialisasi dan himbauan terkait larangan untuk tidak membakar sampah. Disamping itu juga akan melakukan pengawasan terhadap baku mutu emisi pada industri, serta akan menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang masuk baik secara langsung maupun melalui layanan 112.

15. Indeks Kualitas Lahan

Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kota Probolinggo tahun 2023, dapat diperoleh nilai Indeks sebesar 26,36. Perolehan nilai ini didasarkan atas hasil penginputan yang telah dilakukan dari hasil pengukuran di beberapa titik yaitu pada titik Ruang Terbuka Hijau yang berupa Hutan Kota dan Taman Kota, sedang untuk titik Tutupan Vegetasi berupa Pekarangan (Perumahan/ Perkantoran/ Pertokoan) dan Pepohonan Lainnya yang Relevan. Data yang telah diinputkan pada aplikasi IKLH selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh Tim IKLH dari KLHK. Adapun untuk persyaratan agar data RTH dapat terverifikasi diantaranya adalah : 1. Data RTH telah dilengkapi dengan surat keputusan



walikota tentang RTH, 2. Data RTH dilengkapi dengan titik polygon 3. Data RTH dilengkapi dengan titik koordinat 4. Data RTH merupakan RTH yang memiliki tutupan vegetasi dengan tajuk pepohonan minimal ketinggian minimal 2 (dua) meter. Adapun IKL Kota Probolinggo tahun 2023 tidak dapat mencapai target dikarenakan sebagian RTH yang ada tidak didominasi tutupan vegetasi pepohonan dengan tinggi minimal 2 meter, serta memiliki kerapatan yang kurang sehingga pada saat dilaksanakan verifikasi dengan menggunakan system Geographic Information System (GIS) RTH tidak dinyatakan lolos. Penghitungan Nilai Indeks Kualitas Lahan Kota Probolinggo pada Tanggal 30 Nopember 2023 memang sangat kurang, Namun setelah ada penambahan titik pemetaan Tutupan Vegetasi pada : — Buffer Zone PT. KTI sebesar 5, 1521 Ha ; — Hutan Mangrove BJBR sebesar 2,075 Ha ; — Buffer Zone PT ISS sebesar 0, 568 Ha . Yang semula Nilai IKL sebesar 24, 29 (sangat kurang) naik menjadi 26, 36 (kurang) dari target pada Tahun 2023 sebesar 30,93 .Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)Kota Probolinggo pada tahun 2023 adalah sebesar 26,36 atau masuk dalam kategori "Kurang". Dimana untuk kategori "Kurang" ini memiliki range skor $25 \leq x < 50$. Adapun Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target adalah Data Ruang Terbuka Hijau (RTH)/ Tutupan Vegetasi yang telah dilakukan penginputan pada aplikasi IKLH sebagaimana data RTH yang sudah tercantum pada Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penetapan Taman Kota, Hutan Kota dan Pemakaman sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik, tidak memiliki vegetasi pepohonan serta memiliki kerapatan kurang. Sementara Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Probolinggo yang memiliki kerapatan vegetasi yang baik hanya pada RTH dan Hutan Kota saja sedang pada taman kota dan pemakaman tidak memenuhi syarat dikarenakan jenis tanaman yang berada pada titik tersebut merupakan tanaman hias yang memiliki ketinggian dibawah 2 meter, sehingga pada saat dilakukan verifikasi oleh tim IKLH dari KLHK melalui sistem Geographic Information System (GIS) tidak dinyatakan lolos. Sehingga dalam mengatasi kendala tersebut Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Lingkungan Hidup perlu melakukan upaya untuk peningkatan indeks kualitas lahan diantaranya :

- Perlu dilakukan penambahan Luas Lahan baru untuk Hutan Kota, RTH, kawasan lindung RTH RT/RW.
- Melaksanakan kegiatan Reboisasi sehingga memiliki Tutupan Vegetasi yang memiliki nilai kerapatan yang cukup baik agar kedepannya dapat menambah Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)

16. Indeks Risiko Bencana

Pencapaian besaran Indeks Risiko Bencana (IRB) tahun 2023 dengan nilai 97,72 dan menunjukkan capaian ini melampaui dari target penurunan awal yang sebesar 112, hal ini dikarenakan bahwa pemerintah kota probolinggo dalam hal ini diwakili BPBD sudah mampu mengoptimalkan peranannya khusus dalam peningkatan 2 prioritas pada perhitungan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) yaitu Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan, dan Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana. Disamping itu juga dengan adanya pola perhitungan IRB berbasis kolaborasi dengan IRB Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan perbandingan 60% (Kab./Kota) : 40% (Provinsi). hal ini kadang dapat mendongkrak capaian IRB menjadi lebih meningkat.



17. Nilai SAKIP

Pemerintah Kota Probolinggo telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut: a. Melakukan penyesuaian Indikator kinerja utama pada Perangkat Daerah melalui Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 49 Tahun 2023; b. Menyusun Peraturan Wali Kota tentang pedoman pelaksanaan evaluasi SAKIP c. Melakukan sosialisasi penyusunan dan penerapan SOP pengumpulan data kinerja. Meskipun Pemerintah Kota Probolinggo telah berupaya untuk menindaklanjuti rekomendasi tahun sebelumnya, namun hasil evaluasi menunjukkan bahwa tindak lanjut yang dilakukan belum optimal, dan kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Probolinggo mengalami penurunan. Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Probolinggo mendapatkan nilai sebesar 73,25 dengan predikat "BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik", yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Terdapat kendala yang menyebabkan capaian nilai SAKIP tidak mencapai target diantaranya

- Terdapat ketidakselarasan kinerja sasaran strategis yang dituangkan antara dokumen RPJMD dengan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah
- Pemerintah Kota Probolinggo belum menginformasikan definisi operasional dan sumber data dari indikator kinerja
- Informasi terkait dengan analisis faktor keberhasilan dan kegagalan serta solusi yang dilakukan dalam mewujudkan kinerja masih belum terinformasi dengan lengkap
- Evaluasi internal sudah dilakukan ke seluruh PD namun belum cukup menggambarkan permasalahan yang sebenarnya terjadi.

Sehingga perlu dilakukan upaya untuk mendongkrak nilai SAKIP Pemerintah Kota Probolinggo yaitu Menyelaraskan kinerja sasaran strategis yang dituangkan antara dokumen RPJMD dengan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah. Menginformasikan definisi operasional dan sumber data dari indikator kinerja lebih jelas lagi. Melengkapi Informasi terkait dengan analisis faktor keberhasilan dan kegagalan serta solusi yang dilakukan dalam mewujudkan kinerja dan Meningkatkan kualitas Evaluasi internal yang dilakukan ke seluruh PD

18. Nilai LPPD

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2023 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021 bahwa hasil evaluasi LPPD Kota Probolinggo Tahun 2021 dengan skor 3,14 dengan Status Kinerja "SEDANG" (diumumkan pada tahun 2023), secara hasil evaluasi terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 (3,3812) dan tahun 2017 (3,2015) hal ini karena adanya perubahan dalam penetapan peringkat, skor dan status kinerja pemerintah daerah baik di Provinsi



maupun di Kabupaten/Kota. Hasil evaluasi LPPD tahun 2019 dan tahun 2020 tidak di publish oleh Kementerian Dalam Negeri karena Pemerintah Pusat ingin Pemerintah Daerah fokus pada penanganan Covid dan pemulihan ekonomi. Hasil evaluasi LPPD Tahun 2022 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022 untuk Kota Probolinggo dengan Skor 3,4420 dengan Status Kinerja "TINGGI". Adapun beberapa kendala terkait dalam upaya pencapaian target diantaranya :

- a. Keterbatasan waktu penyusunan dokumen LPPD mengingat di awal tahun banyak agenda dan kegiatan yang dilaksanakan seperti penyusunan anggaran, audit keuangan dan pertanggungjawaban BPK, penyusunan laporan-laporan (LKPJ, LKjIP, LPPD, LKD, dsb) yang semuanya diampu oleh 1 orang.
- b. Beberapa data yang terlambat diperoleh, misalnya : Publikasi Daerah Dalam Angka yang dirilis oleh BPS pada akhir bulan Februari, Data Kependudukan semester 2 yang dirilis pada akhir Februari, Audit BPK atas APBD yang selesai pada bulan Februari-Maret;
- c. Capaian kinerja dan data dukung yang disampaikan oleh OPD berubah-ubah;
- d. Perubahan nomenklatur dan SDM yang mengampu;
- e. Memaknai dan memahami setiap rumus Indikator Kinerja Kunci pada LPPD oleh Perangkat Daerah dan Tim Penyusun LPPD yang berbeda-beda.

Sehingga dalam mengatasi kendala tersebut Bagian Pemerintahan Setda Kota Probolinggo melakukan beberapa langkah diantaranya :

- a. Dalam penyusunan LPPD, Bagian Pemerintahan melaksanakan sosialisasi dan evaluasi atas capaian dan data dukung Indikator Kinerja Kunci sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 kepada penyusun LPPD di Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
- b. Melaksanakan koordinasi baik melalui WhatsApp maupun secara langsung dengan Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Kementerian Dalam Negeri dan dengan Biro Pemerintahan dan OTDA Setda Provinsi Jawa Timur.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah melalui verifikasi dan penilaian dalam bentuk reviu oleh Inspektorat Amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam paragraf 3 pasal 69-70 menyebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian Pemerintah Kota Probolinggo wajib menyampaikan LPPD setiap tahunnya untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dan selanjutnya dilakukan verifikasi untuk disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri RI. LPPD tahun 2023 disusun pada tahun 2024 dan dilaksanakan evaluasi oleh Tim Evaluasi LPPD Provinsi Jawa Timur dan Tim Evaluasi LPPD Pusat atas capaian penyelenggaraan pemerintahan pada Bulan



Agustus 2024, sedangkan skor LPPD tahun 2023 diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada Tahun 2025.

d. Indeks SPBE

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, Indeks SPBE Kota Probolinggo mengalami kenaikan dari 1,97 menjadi 3,10 namun angka tersebut masih belum memenuhi target RPJMD 3,5 dikarenakan pada Domain Manajemen SPBE terdapat beberapa indikator yang mendapat nilai 1 (satu). Pada Domain Manajemen SPBE, terdapat aspek manajemen dan aspek audit yang mendapat nilai 1, nilai tersebut bisa terjadi karena Pemerintah Kota Probolinggo dinilai kurang keterkaitan antara kegiatan audit (infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE) dengan peta rencana, Meskipun audit dilakukan sesuai pedoman dan oleh tim auditor internal yang ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota, kegiatan tersebut tidak terarah pada peta rencana. Pada Aspek Manajemen, karena dapat terjadi beberapa hal yaitu pelaksanaan manajemen sudah dilaksanakan tetapi belum terencana dan tertuang di peta rencana. Sehingga ketidaktercapaian realisasi indeks SPBE dari target yang telah ditentukan Karena Bukti dukung yang disampaikan (diupload) pada saat evaluasi dianggap oleh assessor belum dapat menjelaskan kondisi yang ada. Beberapa indikator SPBE terutama di Domain Manajemen SPBE yang belum didokumentasikan dengan baik di Kota Probolinggo. Sehingga Pemerintah Kota Probolinggo melakukan langkah-langkah dalam upaya meningkatkan nilai indeks SPBE diantaranya :

- Meningkatkan Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan dengan mendorong evaluasi yang lebih mendalam terkait Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, termasuk arah perubahan kebijakan yang lebih spesifik. Memberikan rekomendasi konkrit dan terukur untuk perbaikan, terutama terkait kebijakan arsitektur SPBE.
- Mendokumentasi Perencanaan Strategis SPBE : Meningkatkan dokumentasi terkait Perencanaan Strategis SPBE, terutama terkait Arsitektur dan Peta Rencana. Memastikan kelengkapan dan keakuratan data dukung untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih efektif.
- Mengembangkan Manajemen SPBE: Meningkatkan keterkaitan antara kegiatan Manajemen SPBE dengan Peta Rencana. Memastikan bahwa setiap kegiatan dan inisiatif terkait dengan manajemen memiliki arah dan tujuan yang jelas sesuai dengan rencana strategis SPBE Kota Probolinggo.
- Mengintegrasikan Audit TIK dengan Perencanaan Strategis: Memperkuat keterkaitan antara kegiatan Audit TIK dengan Perencanaan Strategis secara menyeluruh. Memastikan bahwa hasil audit mendukung dan terarah pada pencapaian tujuan strategis SPBE.
- Meningkatkan Layanan Publik Berbasis Elektronik: Terus melakukan reviu dan evaluasi secara periodik pada Layanan Publik Berbasis Elektronik untuk memastikan adopsi inovasi terbaru dan peningkatan kualitas layanan. Fokus pada integrasi yang lebih baik antar layanan dan optimalisasi efisiensi operasional.



e. Opini BPK Terhadap LKPD

Tahun 2022 untuk nilai LKPD sudah memenuhi target RPJMD yaitu opini WTP. Sementara LKPD Tahun Anggaran 2023 masih dalam proses penyusunan. Sampai saat ini, proses pelaksanaan masih dalam tahap proses penyusunan LK SKPD.

Dalam penyusunan LKPD terdapat permasalahan diantaranya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemda (LKPD) membutuhkan waktu yang tidak sedikit, dikarenakan terdapat berbagai permasalahan ketika penyusunan Laporan Keuangan SKPD. Sering dilakukannya koordinasi dengan SKPD, agar permasalahan SKPD yang berhubungan dengan Laporan Keuangan dapat terselesaikan.

f. Indeks Profesionalitas Aparatur

Realisasi Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kota Probolinggo Tahun 2023 pada 1 Desember sebesar 64,04 dengan kategori Rendah (Pasal 14 Kategori Tingkat Profesionalitas Aparatur Sipil Negara pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018) merupakan perhitungan yang telah valid dan secara real time diolah oleh Badan Kepegawaian Negara melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) BKPSDM Kota Probolinggo. Peningkatan Indeks Profesional Aparatur secara signifikan ini disebabkan oleh perubahan formula perhitungan dan ketentuan yang lebih proporsional dan ideal untuk menghasilkan skor nilai IP ASN yang valuable, dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi yang tepat dan akurat. Selain itu, adanya program kegiatan yang mendorong peningkatan nilai IP ASN seperti pengembangan kompetensi melalui DOU ASN dan diklat secara pengiriman, pengadaan ASN dengan standar kualifikasi pendidikan tinggi, pembinaan disiplin ASN, dan lain sebagainya. Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas Aparatur Sipil Negara berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan. Target Indeks Profesionalitas Aparatur Tahun 2023 adalah 64,5, sementara realisasi pada Tahun 2023 berdasarkan data pada 1 Desember adalah sebesar 64,04 dengan kategori rendah, merupakan perhitungan yang telah valid dan secara real time diolah oleh Badan Kepegawaian Negara melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian BKPSDM Kota Probolinggo. Permasalahan masih rendahnya capaian Indeks Kinerja Utama adalah berkenaan dengan data kepegawaian yang belum up to date. Data kepegawaian yang dimaksud seperti sertifikat-sertifikat bukti keikutsertaan kegiatan peningkatan kompetensi pada sistem aplikasi kepegawaian belum sepenuhnya up to date yang mana para pegawai tidak segera mengupload sertifikat-sertifikat mereka pada aplikasi SIMPEG. Permasalahan pada kompetensi lainnya yaitu belum adanya kesesuaian jadwal dengan stakeholder terkait, dalam rencana pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi. Selain itu, rendahnya kualifikasi pendidikan yang dimiliki pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo juga menyebabkan rendahnya capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Tahun 2023 yang mana kurangnya kesadaran para Pegawai



Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dalam meningkatkan Kualifikasi Pendidikan . Hal tersebut juga mengakibatkan jumlah pelaksana yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dalam jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah rendah. Hambatan-hambatan tersebut tentunya berpengaruh terhadap capaian realisasi Indeks Profesionalitas Aparatur di Kota Probolinggo Tahun 2023. Sinkronisasi data pada Sistem Informasi Kepegawaian milik Kota Probolinggo (SIMPEG) dengan Sistem Informasi ASN (SIASN) dari Badan Kepegawaian Negara secara berkala serta melaksanakan banyak kegiatan pengembangan kompetensi melalui metode daring, pengiriman, ataupun secara mandiri agar memperoleh kapasitas kompetensi yang lebih baik dan bukti dari keikutsertaannya dapat meningkatkan IP ASN.

g. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Tahun 2022 untuk perhitungan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Probolinggo sebesar 84,88. terjadinya kenaikan dikarenakan masyarakat pengguna layanan banyak yang merasa puas dengan pelayanan yang kita berikan terutama dari unsur persyaratan, biaya, waktu sedangkan untuk sarana banyak yang merasa kurang puas. Rencana di tahun 2024 akan dilaksanakan SKM secara online melalui E-SUKMA dari Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur

3.1.1.3 Realisasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

3.1.1.3.1 PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan pelayanan publik yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang mencakup penyelenggaraan pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sosial, serta ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Adapun data capaian indikator kinerja Tahun 2023 sebagaimana penjelasan di bawah ini



A. URUSAN PENDIDIKAN

Tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pendidikan juga mengacu pada realisasi capaian IKU perangkat daerah, dimana dalam hal ini terkait capaian IKU Urusan Pendidikan yang diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Perwali Nomor 49 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 219 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Jika ditinjau dari capaian IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk urusan Pendidikan terdapat 6 Indikator Kinerja Utama. 4 IKU telah memenuhi target yang telah ditetapkan, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs. 2 IKU lainnya belum memenuhi target yang ada dengan 2 IKU capaian di atas 80% yang juga menunjukkan adanya kinerja yang baik dari penyelenggaraan urusan yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun dan Indikator Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah bersertifikat pendidik. Capaian IKU Urusan Pendidikan Sebagaimana Tabel 3.3

Tabel 3. 3 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023
(Urusan Pendidikan)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Wajib Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	96,67	98,26	Belum optimalnya penanganan ATS usia 7-12 tahun	Penyediaan anggaran Operasional Sekolah Daerah bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Kota Probolinggo, Penyusunan Regulasi penanganan dan pencegahan ATS usia 7 - 12 tahun, Kebijakan penanganan dan pencegahan perundungan siswa	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs		92,23	96,59	Belum optimalnya penanganan dan pencegahan ATS usia 13 -15 tahun	Penyediaan anggaran Operasional Sekolah Daerah bagi Satuan Pendidikan Sekolah SMP Negeri dan Swasta di Kota Probolinggo,	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
							Penyusunan Regulasi penanganan dan pencegahan ATS usia 13 - 15 tahun, kebijakan penanganan dan pencegahan perundungan siswa	
		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun		68,34	66,05	Animo masyarakat terhadap PAUD masih rendah; Pemenuhan Guru PAUD masih rendah (belum ada kuota bagi PPPK Pendidik PAUD, minimnya jumlah Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah)	Penyediaan anggaran Operasional Sekolah Daerah bagi Satuan PAUD (TK/RA/KB)	
		Angka Melek Huruf		99,31	98,94	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan	Pelaksanaan Keaksaraan Fungsional bagi warga belajar usia 15 - 59 tahun	
		Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah bersertifikat pendidik		54,09	46,50	Masih terdapat Pendidik yang belum memenuhi kualifikasi S1, Pelaksanaan PPG berdasarkan kuota Kemendikbud Ristek RI	Pengusulan PPG bagi Pendidik yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Diklat	
		Nilai SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	84,00	80,22	Lemahnya pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut terhadap Kinerja Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Optimalisasi pelaksanaan evaluasi dan perbaikan kinerja manajemen pelayanan pendidikan dan kebudayaan	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 17 Januari 2024

B. URUSAN KESEHATAN

Pelaksanaan urusan kesehatan di Kota Probolinggo dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB. Sesuai dengan Perwali Nomor 49 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 219 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo terdapat 1 IKU untuk Urusan Kesehatan yaitu Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan yang diampu oleh 3 program pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB. Jika ditinjau dari capaian IKU Dinas Kesehatan,



Pengendalian Pendudukan dan KB untuk urusan Kesehatan telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Akan tetapi masih diperlukan peningkatan kinerja dari RSUD yang terkait dengan pemenuhan SPM serta peningkatan kepuasan masyarakat. Sebagaimana tabel 3.4

Tabel 3. 4 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023
(Urusan Kesehatan)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	URUSAN BIDANG KESEHATAN	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	85%	85%			
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					

Sumber : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, 17 Januari 2024

C. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Ruang lingkup urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi 11 (sebelas) sub urusan, yaitu: sumberdaya air (SDA), air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang. Dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024, pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ditujukan untuk mendukung Misi Pembangunan Ketiga yaitu: Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Sesuai dengan Perwali Nomor 49 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 219 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo terdapat 5 IKU untuk Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sebagaimana tabel 3.5



**Tabel 3. 5 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023
(Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang)**

No	Urusan Pemerintahan	Kebijakan / Indikator Kinerja PD	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persentase Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	84%	84%			
2		Persentase Fasilitas Umum yang Sesuai Standar Konstruksi	Program Penataan Bangunan Gedung	89%	87%	Pembangunan Gedung Inspektorat yang putus kontrak /Wan Prestasi dikarenakan adanya keterlambatan pekerjaan oleh Penyedia		
3		Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi Mantap	Program Penyelenggaraan Jalan	81%	80%	Pembangunan Jalan Tembus Maramis yang belum terserap seluruhnya dan masih membutuhkan perpanjangan waktu/addendum kontrak		
4		Persentase Pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	84%	83%	Belanja Honorarium Tenaga Ahli Forum Penataan Ruang (FPR) yang tidak terserap dikarenakan berkurangnya permohonan/pengajuan perijinan pemanfaatan ruang yang membutuhkan pembahasan dengan FPR. Honorarium hanya diberikan pada saat terdapat kegiatan Rapat FPR		
5		Persentase Penurunan Luasan Permukiman Kumuh	Program Pengembangan Permukiman	81%	80%			

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 17 Januari 2024



D. URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman menjadi urusan wajib pemerintah yang terkait dengan kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum serta mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun ruang lingkup penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari 5 (lima) sub urusan, yaitu: (1) Perumahan (meliputi Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah, Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG)), (2) Kawasan Permukiman (meliputi Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman serta Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha), (3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh), (4) Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan, serta (5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024, penyelenggaraan urusan permukiman ditujukan untuk mendukung Misi Ketiga, yaitu Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Sesuai dengan Perwali Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 219 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo terdapat 1 IKU untuk Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebagaimana tabel 3.6

**Tabel 3. 6 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023
(Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman)**

No	Urusan Pemerintahan	Kebijakan / Indikator Kinerja PD	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Pemerintah	Persentase Penurunan	Program Pengembangan Perumahan	81%	79%			
2	Bidang Perumahan Dan	Luasan Permukiman Kumuh	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	81%	79%	Pembiayaan untuk persertifikatan pekerjaan padat karya dan Dana Kelurahan lebih rendah daripada		



No	Urusan Pemerintahan	Kebijakan / Indikator Kinerja PD	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
	Kawasan Permukiman					biaya sertifikasi lahan Fasum Perumahan. Selain itu adanya permohonan warga berupa dinding pembatas perumahan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan anggaran yang tersedia adalah untuk drainase lingkungan perumahan.		

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 17 Januari 2024

E. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan bidang urusan pemerintahan wajib yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan (1) ketentraman dan ketertiban umum, 2) bencana serta (3) kebakaran. Penyelenggaraan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum oleh pemerintah Kabupaten / Kota diarahkan untuk penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda Kabupaten/Kota serta pembinaan PPNS. Penyelenggaraan sub urusan ini terkait dengan usaha pemenuhan hak dasar masyarakat yang terkait dengan rasa aman dalam melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur tanpa adanya potensi gangguan terhadap kepentingan umum. Sedangkan penyelenggaraan sub urusan bencana dan kebakaran diarahkan untuk penanggulangan bencana serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan bencana dan kebakaran. Penyelenggaraan sub urusan ini merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat dimana masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil dampak / risiko akibat kejadian bencana ataupun kebakaran. Penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Probolinggo dibagi untuk sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, serta sub urusan bencana dilaksanakan oleh Badan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Daerah. Sebagaimana tabel 3.7



**Tabel 3. 7 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023
(Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani sesuai ketentuan	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2	1,46	Kurangnya pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang Perda Perkada	Rutin dalam pengawasan Perda Perkada dengan melakukan patroli dan operasi di lokasi rawan pelanggaran	
2		Persentase penanganan kebakaran yang ditangani sesuai responsive time	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	60	100			
3		Persentase capaian pengelolaan administrasi perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	Penunjang urusan pemerintah daerah kota/kab	90	96			

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 17 Januari 2024



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Indeks Ketahanan Daerah	Program Penanggulangan Bencana	0,62	0,41	Adapun salah satu yang dominan mempengaruhi ketidaktercapaian target besaran nilai IKD ini sekaligus Pengurangan nilai IRB Kota Probolinggo adalah adanya dokumen-dokumen kebencanaan yang ada di Kota Probolinggo masih tetap belum di review kembali meski telah melampaui batas masa berlakunya dan itu menjadi indikator prioritas yang menyebabkan nilai pengukuran IKD semakin sulit ditingkatkan	Permasalahan ini sebenarnya bukan hanya dialami oleh BPBD Kota Probolinggo saja, namun juga pada daerah-daerah lain di Jawa Timur. Namun secara internal, Kota Probolinggo juga harus memenuhi pelayanan dasar kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan strategis lainnya. Sehingga alokasi anggaran untuk pembuatan dokumen kajian akan melalui pertimbangan yang lebih selektif dan lebih prioritas. Tren pengarusutamaan pelaksanaan pelayanan dasar di bidang Kebencanaan semakin meningkat dan menjadi konsumsi berita media massa yang semakin populis. Tidak terkecuali pula adanya jenis dan jumlah ancaman bencana yang meningkat di semua tempat, seiring dengan perubahan iklim global yang terjadi saat ini. Disamping itu akan melakukan pembenahan internal dalam hal pemenuhan dan perbaikan Standart Operating Procedure (SOP) dari setiap pelaksanaan kegiatan yang sudah ada.	

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 17 Januari 2024

F. URUSAN SOSIAL

Penyelenggaraan urusan sosial merupakan jenis urusan wajib bagi pemerintah kabupaten/kota untuk penyediaan pelayanan dasar yang terkait dengan pemberdayaan sosial, penanganan tindak kekerasan, rehabilitasi sosial perlindungan jaminan sosial dan penanganan bencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019–2024, penyelenggaraan urusan sosial ditujukan untuk mendukung Misi Pembangunan Kota Probolinggo Kedua, yaitu “Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas”. tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan urusan Sosial juga mengacu pada realisasi capaian IKU PD, dimana dalam hal ini terkait capaian IKU dari Dinas Sosial, sebagaimana tabel 3.10



Tabel 3. 8 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023
(Urusan Sosial)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Program Pemberdayaan Sosial	89%	91,18%			
			Program Rehabilitasi Sosial					
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial					
			Program Penanganan Bencana					
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan					
		Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%			

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, 17 Januari 2024

3.1.1.3.2 PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Urusan wajib non pelayanan dasar berkaitan dengan penyelenggaraan pada bidang tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; pangan; pertanian; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; serta kearsipan. Penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar di Kota Probolinggo telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari capaian program dan kegiatan yang berkaitan hampir seluruhnya mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan penjabaran pencapaian pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah urusan wajib non pelayanan dasar Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2023.



A. URUSAN TENAGA KERJA

**Tabel 3. 9 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023
(Urusan Tenaga Kerja)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Tenaga Kerja	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan pada sektor Formal dan Informal	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	93,30%	93,50%			
			Penempatan Tenaga Kerja					
		Persentase perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	Hubungan Industrial	70 %	70 %			
		Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial						

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 17 Januari 2024

B. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**Tabel 3. 10 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023
(Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nilai evaluasi Pengarusutamaan Gender	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Utama	Madya	Terdapat perubahan indikator penilaian APE dan ada penambahan kategori predikat	Dilakukan evaluasi kinerja atas pengarusutamaan gender	-
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak					
2		Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	Program Perlindungan Perempuan	100%	100%			
			Program Perlindungan Khusus Anak					



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
3		Kategori Kota Layak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Utama	Utama			

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, 17 Januari 2024

C. URUSAN PANGAN

**Tabel 3. 11 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023
(Urusan Bidang Pangan)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Pangan	Persentase Peningkatan Angka Ketersediaan Energi (AKE) (%)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20	16,31	Persentase peningkatan AKE dan AKP saling terkait. Meskipun AKE belum memenuhi target akan tetapi capaian AKE sudah melebihi target. faktor yang mempengaruhi kecukupan energi adalah tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, pertumbuhan dan perkembangan (usia), serta energi cadangan bagi anak dan remaja. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kecukupan protein seseorang dipengaruhi oleh usia (tahap pertumbuhan dan perkembangan), berat badan, dan	(1) Peningkatan Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) melalui pemberian makanan tambahan bagi semua kalangan masyarakat mulai bayi, balita, anak sekolah/pelajar, ibu, bapak, lansia sehingga kualitas konsumsi pangan dapat meningkat ;	
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				(2) Pengenalan mengenai konsumsi pangan yang B2SA ke sekolah - sekolah dan masuk ke dalam kurikulum sekolah agar siswa/i dan warga sekolah juga orangtua mulai	
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
2		Persentase Peningkatan Angka Ketersediaan Protein (AKP) (%)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	12	30	mutu protein dalam pola konsumsi pangannya.	peduli terhadap pangan yang B2SA mulai dini ; (3) Kampanye Konsumsi Pangan B2SA secara masif dan intensif di masyarakat ; (4) Peningkatan teknologi tepat guna dengan mengolah pangan pokok lokal unggulan daerah (sumber karbohidrat lainnya pengganti beras) menjadi produk olahan yang berdaya saing dan memiliki nilai manfaat bagi tubuh dan juga meningkatkan kesejahteraan keluarga.	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, 17 Januari 2024

D. URUSAN PERTANAHAN

Penyelenggaraan urusan pangan dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024 ditujukan untuk mendukung Misi Pembangunan Ketiga, yaitu Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan. Urusan pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman akan tetapi masih dengan ruang lingkup yang terbatas, pada pengelolaan pertanahan. Oleh karena itu pada Tahun 2023 belum ada IKU PD urusan pertanahan sehingga kinerja penyelenggaraan urusan mengacu pada capaian pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 3. 12 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023
(Urusan Pertanahan)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Bidang Pertanahan		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI					

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 17 Januari 2024



E. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

**Tabel 3. 13 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023
(Urusan Lingkungan Hidup)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	53,2	50	Berdasar dari hasil perhitungan, Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Probolinggo tahun 2023 memiliki nilai sebesar 50 yang berada pada kategori "sedang", dimana untuk kategori sedang ini skornya adalah antara $50 \leq x \leq 70$. Pengujian Kualitas Air dilakukan sebanyak 7 (tujuh) titik sample pada 6 (enam) sungai yang berlokasi di Kota Probolinggo, yang terdiri dari 6 (enam) titik hilir sungai yaitu Hilir Sungai Banger, Hilir Sungai Kedunggaleng, Hilir Sungai Pancor, Hilir Sungai Kasbah, Hilir Sungai Umbul dan Hilir Sungai Legundi serta 1(satu) titik hulu sungai, yaitu Hulu Sungai Kedung Galeng. Capaian IKA sebesar 50 tersebut tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 51,3. Ketidak tercapaian target ini disebabkan oleh beberapa hal ini diantaranya: 1) Masih banyaknya industri besar maupun Usaha Kecil Menengah (UKM) yang belum memiliki IPAL atau spesifikasi IPAL yang belum memenuhi syarat untuk	Solusi atau upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala yang muncul antara lain : 1. Akan menambah jumlah titik dan waktu pengujian. 2. Akan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait seperti satpol PP, Dinas Perizinan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dishub dll dalam rangka penegakan hukum. 3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pelaku usaha terkait pentingnya menjaga kualitas air sungai.	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						membuang limbahnya ke badan air. Dari total UMKM di Kota Probolinggo kurang lebih sebanyak 3.500, ada sekitar kurang lebih 80% yang tidak memiliki IPAL; 2) Meningkatnya limbah domestik rumah tangga yang masuk ke badan air akan berakibat menurunnya kualitas air; 3) Limbah dari pertanian dan peternakan diantaranya sisa penggunaan pupuk kimia, pembuangan kotoran hewan yang di buang langsung ke sungai. Kendala yang masih ditemui dalam upaya peningkatan Indeks Kualitas Air diantaranya: 1. Meningkatnya pertumbuhan penduduk 2. Penegakan hukum terkait pengelolaan limbah domestik belum berjalan maksimal 3. Meningkatnya usaha hotel/ homestay, Laundry, tempat cucian kendaraan, tempat kos dan restoran/cafe yang belum diikuti dengan kesadaran penanganan limbah yang dihasilkan.		
2		Indeks Kualitas Udara	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	91,54	91,64	Untuk Capaian dari IKU sudah melebihi dari Target. Namun masih ada hal yang perlu diperhatikan dalam rangka mempertahankan kualitas udara yang baik yakni masih adanya	Kondisi IKU yang sudah baik perlu untuk tetap dijaga agar capaian IKU di tahun mendatang tidak turun. Berdasarkan hal tersebut maka akan dilakukan kegiatan sosialisasi dan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			pembakaran sampah liar oleh masyarakat.	himbauan terkait larangan untuk tidak membakar sampah. Disamping itu juga akan melakukan pengawasan terhadap baku mutu emisi pada industri, serta akan menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang masuk baik secara langsung maupun melalui layanan 112. Capaian nilai indeks Kualitas Udara dapat mendapat nilai 101,26% disebabkan oleh upaya-upaya yang telah dilakukan sebagai berikut: 1. Meningkatkan Peran Sekolah Adiwiyata di Kota Probolinggo dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sejak dini, dengan sasaran siswa-siswi SD, SMP dan SLTA 2. Penyelenggaraan Eco Pesantren dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, dengan sasaran warga pondok pesantren 3. Aksi Perbanyak Lubang Resapan Biopori (Si Mak Ngebor) dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Adapun aksi ini menghasilkan produk kompos yang dapat digunakan untuk kebutuhan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
							sendiri atau sekitarnya 4. Pembentukan dan Pembinaan Program Kampung Iklim (PROKLIM) dan Kelurahan Berseri dengan melibatkan peran masyarakat dan kelurahan dalam aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	
3		Prosesntase Sampah Tertangani	Program Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	80%	64,10		1) Akan dilakukan Pemeliharaan Kompactor; 2) Perluasan lahan untuk pembangunan sanitary landfil baru.	
4		Indeks Kualitas Lahan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	28	26,36	Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kota Probolinggo pada tahun 2023 adalah sebesar 26,36 atau masuk dalam kategori "Kurang". Dimana untuk kategori "Kurang" ini memiliki range skor $25 \leq x < 50$. Adapun Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target adalah Data Ruang Terbuka Hijau (RTH)/ Tutupan Vegetasi yang telah	1. Perlu dilakukan penambahan Luas Lahan baru untuk Hutan Kota, RTH, kawasan lindung RTH RT/RW. 2. Melaksanakan kegiatan Reboisasi sehingga memiliki Tutupan Vegetasi yang memiliki nilai kerapatan yang cukup baik	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						dilakukan penginputan pada aplikasi IKLH sebagaimana data RTH yang sudah tercantum pada Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penetapan Taman Kota, Hutan Kota dan Pemakaman sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik, tidak memiliki vegetasi pepohonan serta memiliki kerapatan kurang. Sementara Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Probolinggo yang memiliki kerapatan vegetasi yang baik hanya pada RTH dan Hutan Kota saja sedang pada taman kota dan pemakaman tidak memenuhi syarat dikarenakan jenis tanaman yang berada pada titik tersebut merupakan tanaman hias yang memiliki ketinggian dibawah 2 meter, sehingga pada saat dilakukan verifikasi oleh tim IKLH dari KLHK melalui sistem Geograpic Information System (GIS) tidak dinyatakan lolos.	agar kedepannya dapat menambah Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL).	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kota Probolinggo pada tahun 2023 adalah sebesar 26,36 atau masuk dalam kategori "Kurang". Dimana untuk kategori "Kurang" ini memiliki range skor $25 \leq x < 50$. Adapun Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target adalah Data Ruang Terbuka Hijau (RTH)/ Tutupan Vegetasi yang telah dilakukan penginputan pada aplikasi IKLH sebagaimana data RTH yang sudah tercantum pada Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penetapan Taman Kota, Hutan Kota dan Pemakaman sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik, tidak memiliki vegetasi pepohonan serta memiliki kerapatan kurang. Sementara Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Probolinggo yang memiliki kerapatan vegetasi yang baik hanya pada RTH dan Hutan Kota saja sedang pada taman kota dan pemakaman tidak memenuhi syarat dikarenakan jenis tanaman yang berada pada titik tersebut merupakan tanaman hias yang memiliki ketinggian dibawah 2 meter,		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						sehingga pada saat dilakukan verifikasi oleh tim IKLH dari KLHK melalui sistem Geograpic Information System (GIS) tidak dinyatakan lolos.		

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 17 Januari 2024



F. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

**Tabel 3. 14 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023
(Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk memiliki KTP-el	Program Pendaftaran Penduduk	99%	97.51%	perubahan usia penduduk pemula selalu bergerak	Melaksanakan Pelayanan perekaman keliling /jemput bola di sekolah-sekolah secara rutin	
2		Persentase penduduk memiliki akta kelahiran usia 0-18 tahun	Program Pencatatan Sipil	99%	100%			
3		Persentase Penyajian Data Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang valid	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100.00%			
4		Persentase Permintaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditindaklanjuti		100%	100.00%			

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 17 Januari 2024

G. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

**Tabel 3. 15 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023
(Urusan Pemberdayaan Masyarakat)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	35%	35%	Pada Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan terdapat beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut : a. Pada Kelurahan Jati kondisi jalan sudah di paving dan masih layak serta masih adanya konflik warga b. Pada Kelurahan	a. Memberikan pemahaman yang jelas pada waktu Musrenbang tentang syarat pengajuan titik lokasi untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan b. Berkoordinasi dengan DPUPR untuk mengetahui status dan kewenangan titik lokasi setiap	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Mangunharjo untuk kegiatan Septic tank komunal Jumlah KK yang mengajukan kurang dari 10 KK dan Lokasinya berdekatan dengan Septic tank komunal yang dibangun sebelumnya serta Lahannya masih belum menjadi Fasum (harus bersertifikat fasum dulu) c. Pada Kelurahan Wiroborang status lahan masih milik pribadi dan surat tanah tidak ditemukan	pekerjaan c. Melakukan Pendampingan dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dan berkoordinasi intern dengan APIP	

Sumber : Kecamatan Mayangan, 17 Januari 2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	35%	35%	Pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana beberapa kelurahan melaksanakan realisasi satu lokasi dikarenakan pada unit yang lainnya Status kepemilikan tanah yang akan dibangun/dipelihara harus bersertifikat dan menjadi aset Pemerintah Kota Probolinggo sedangkan dalam hal ini warga masih belum bersedia untuk menyerahkan tanahnya	Memberikan pemahaman yang jelas pada waktu Musrenbang tentang syarat pengajuan titik lokasi untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta Koordinasi dengan pihak terkait	-



						untuk dijadikan Aset Pemerintah Kota Probolinggo		
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------	--	--

Sumber : Kecamatan Wonoasih, 17 Januari 2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	84%	91,96	Pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan terdapat permasalahan diantaranya: a. Warga tidak bersedia apabila hak milik tanahnya diserahkan kepada Pemerintah Kota Probolinggo sebagai aset. b. Titik lokasi merupakan kewenangan DPUPR dan volume pekerjaan terlalu kecil. c. Pokmas belum memiliki kemampuan teknis dalam melaksanakan pekerjaan fisik.	a. Memberikan sosialisasi/pemahaman yang jelas dan lebih intens lagi kepada masyarakat pada waktu Pra Musrenbang tentang persyaratan pengajuan titik lokasi untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan. b. Berkoordinasi dengan DPUPR untuk mengetahui status dan kewenangan titik lokasi setiap pekerjaan. c. Melakukan Pendampingan Hukum dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo yang difasilitasi oleh Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo dan berkoordinasi intern dengan APIP.	

Sumber : Kecamatan Kademangan, 17 Januari 2024



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	40%	86,35%	Pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan terdapat :a. warga yang keberatan apabila tanahnya diserahkan kepada Pemerintah Kota Probolinggo sebagai aset b. titik lokasi merupakan kewenangan DPUPR c. Pokmas belum memiliki kemampuan teknis dalam melaksanakan pekerjaan fisik	a. Memberikan pemahaman yang jelas pada waktu Musrenbang tentang syarat pengajuan titik lokasi untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan b. Berkoordinasi dengan DPUPR untuk mengetahui status dan kewenangan titik lokasi setiap pekerjaan c. Melakukan Pendampingan dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dan berkoordinasi intern dengan APIP	

Sumber : Kecamatan Kanigaran, 17 Januari 2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	34,98%	34,98%	a. warga ada yang keberatan apabila tanahnya diserahkan kepada Pemerintah Kota Probolinggo sebagai aset b. Pokmas belum memiliki kemampuan teknis dalam melaksanakan pekerjaan fisik	a. Memberikan pemahaman yang jelas pada waktu Musrenbang tentang syarat pengajuan titik lokasi untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan b. Berkoordinasi dengan DPUPR untuk mengetahui status dan kewenangan titik lokasi setiap pekerjaan	

Sumber : Kecamatan Kedopok, 17 Januari 2024



H. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**Tabel 3. 16 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023
(Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2,005	2,01			
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)					
			Program Pengendalian Penduduk					
2		Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	84	80,99			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman					

Sumber : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, 17 Januari 2024

I. URUSAN PERHUBUNGAN

**Tabel 3. 17 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023
(Urusan Perhubungan)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ yang Tersedia di Kota Probolinggo	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	69	60.93	Penambahan persediaan sarpras dan fasilitas LLAJ belum menambah ke ruas jalan pada tepi Kota, masih terfokus pada		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Kawasan Tertib Lalu Lintas di Alun-alun Kota dalam rangka MRLL (Manajemen Rekayasa Lalu Lintas) dan Kebutuhan di sekitar lingkungan RS yang baru sehingga Sarana dan prasarana pada ruas jalan Kota Probolinggo sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal		
		Prosentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo		21	46,43	Tingkat pelanggaran angkutan jalan di Kota Probolinggo cenderung meningkat dikarenakan biaya operasional dan perawatan terhadap angkutan orang tinggi dan adanya regulasi/kebijakan pelaksanaan Operasi Gabungan terhadap pengawasan, penindakan dan penertiban terhadap angkutan jalan ditentukan oleh jajaran Satlantas Polres Kota Probolinggo sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		
		Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi standar keselamatan		99	85,27	Pada pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2023 terjadi kerusakan dan pemeliharaan pada unit Alat Uji Kendaraan Bermotor di Bulan Maret-April sehingga Pelayanan Uji Berkala dihentikan dan penerapan regulasi Surat Edaran		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						terkait ODOL (Over Dimensi dan Over Load) pada angkutan jalan		
		Prosentase Angkutan Laut yang Memenuhi Standar Keselamatan	Program Pengelolaan Pelayaran	88	0	Kewenangan untuk pengawasan dan pengendalian operasi kelautan sudah bukan pada dinas Perhubungan Kota Probolinggo hanya kegiatan sosialisasi pembinaan pada nelayan pemilik kapal di bawah 7GT	Penyesuaian pada IKU PD pada tahun 2025	

Sumber : Dinas Perhubungan, 17 Januari 2024

J. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Tabel 3. 18 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023
(Urusan Komunikasi dan Informatika)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	Persentase E-Government Perangkat Daerah Yang Terintegrasi	Program Aplikasi Informatika	71,43%	89,29%	-		
	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi					
2	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik Sesuai Standar	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	94,29%	96,43%	-		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral					

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 17 Januari 2024

K. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

**Tabel 3. 19 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023
(Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Koperasi dan UKM	Persentase Koperasi Sehat	Program Pelayanan Izin Simpan Pinjam	58%	56,47%	Masih adanya sejumlah koperasi yang teridentifikasi sebagai koperasi yang tidak aktif baik secara kelembagaan maupun manajemen usahanya	Melaksanakan Pendampingan dan pelatihan secara intensif bagi pengurus koperasi dalam melaksanakan kewajibannya melaksanakan RAT secara rutin	
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian					
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi			masih adanya Koperasi yang belum berstandar sehat	Melaksanakan pengawasan Koperasi untuk mengetahui sejauhmana pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus, apakah pengelolaan Koperasi telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku agar Koperasi bisa lebih baik dan sehat yang mampu memberikan kemanfaatan bagi seluruh Anggotanya.	
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi					
		Persentase Pelaku Usaha Mikro Yang Mandiri	Program Pengembangan Umkm	2%	2,28 %			
			Program Pemberdayaan Umkm					

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, 17 Januari 2024



L. URUSAN PENANAMAN MODAL

**Tabel 3. 20 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023
(Urusan Penanaman Modal)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1.	Penanaman Modal	Persentase pertumbuhan penanaman modal	Program pengembangan iklim penanaman modal	0,40%	0,42%	RUPM yang tidak update	Penyusunan naskah akademis RUPM	
			Program Promosi Penanaman Modal			Belum ada RDTR di semua wilayah kecamatan	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang di semua wilayah kecamatan oleh DPUPRKPP	
						belum ada peta digital potensi dan peluang investasi	penyusunan peta digital potensi dan peluang investasi	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			Pengendalian penanaman modal belum optimal karena terkendala oleh keterbatasan SDM OPD Teknis	Memaksimalkan peranan petugas DPMPTSP OPD teknis sesuai dengan surat penugasan	
						kurangnya pemahaman mengenai OSS terhadap akun pengawasan penanaman modal	peningkatan sosialisasi dengan narasumber yang berkompeten	
			Program Pengelolaan data dan system informasi penanaman modal			System informasi penanaman modal yang sering maintenance sehingga menghambat pengelolaan data penanaman modal	Pengelolaan data dilakukan secara manual	
						Penetapan rilis BPKM terhadap pertumbuhan nilai penanaman modal yang melewati batas waktu realisasi kinerja instansi pemerintah daerah	Berkoordinasi dengan Dinas terkait	
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada DPMPTSP	Program Pelayanan Penanaman Modal	83,37%	83,38%	pengolahan hasil Survey Kepuasan Masyarakat masih dilakukan secara manual	Anggaran Tahun 2024 akan dilakukan pengadaan SKM secara elektronik dan terintegrasi	
						Sarana prasarana Mal Pelayanan Publik masih belum memenuhi standar Kemenpan RB	Anggaran Tahun 2024 pengadaan peralatan dan mesin lainnya guna pemenuhan standarisasi MPP sesuai dengan Kemenpan RB	
				100%	102%	Terbatasnya SDM DPMPTSP	Usulan Tambahan SDM ke BKPSDM	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
		Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota			Kurangnya pengembangan SDM	Penempatan anggaran untuk pengembangan kapasitas SDM	
						Kekosongan jabatan Struktural (Sekdis) dan fungsional sehingga terjadi ketimpangan tugas jabatan	Usulan kepada BKPSDM untuk pemenuhan jabatan struktural dan fungsional	

Sumber : Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja, 17 Januari 2024

M. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

**Tabel 3. 21 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023
(Urusan Pemuda dan Olahraga)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Pemuda Dan Olahraga	Persentase Prestasi Kepemudaan dan Olah Raga Yang Dicapai	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	43,86%	90,13%	tahun 2023 terdapat 152 kompetisi tingkat provinsi yang diselenggarakan dan untuk Kota Probolinggo diikuti sebanyak 24 cabang olahraga terdiri dari : Cabor Hapkido, Cabor Panjat Tebing, Cabor Tenis Lapangan, Cabor Anggar, Cabor Bridge, Cabor Sepeda, Cabor Catur, Cabor Taekwondo, Cabor Karate, Cabor Petanque, Cabor Sepak Takraw, Cabor Berkuda, Cabor Akuatik, Cabor Atletik, Cabor Panahan, Cabor Billiar, Cabor Kurash, Cabor Muaythai, Cabor Tenis Meja, Cabor Senam, Cabor Bulu Tangkis, Cabor Tinju, Cabor Sepatu		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						Roda, Cabor Dayung. Dari pertandingan/kompetisi yang diikuti oleh 35 Cabor tersebut, terdapat 24 Cabor yang meraih prestasi, sehingga realisasi capaian kinerja melebihi target yang telah ditentukan.		
			Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan					
			Pengembangan Kapasitas Kepramukaan					
			Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 17 Januari 2024

N. URUSAN STATISTIK

**Tabel 3. 22 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023
(Urusan Statistik)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	Persentase E-Goverment Perangkat Daerah Yang Terintegrasi	Program Aplikasi Informatika	71,43%	89,29%	-		
	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi					



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik Sesuai Standar	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	94,29%	96,43%	-		
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral					

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 17 Januari 2024

O. URUSAN PERSANDIAN

**Tabel 3. 23 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023
(Urusan Persandian)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	Persentase E-Government Perangkat Daerah Yang Terintegrasi	Program Aplikasi Informatika	71,43%	89,29%	-		
	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi					
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik Sesuai Standar	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	94,29%	96,43%	-		
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral					

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 17 Januari 2024



P. URUSAN KEBUDAYAAN

**Tabel 3. 24 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023
(Urusan Kebudayaan)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Kebudayaan	Persentase kebudayaan yang dikelola menjadi daya saing daerah	Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program Pembinaan Sejarah, Program Pelestarian Pengelolaan Cagar Budaya, Program Pengelolaan Permuseuman	96,29	90,24	Minimnya pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas Kelompok Seni dan Budaya, Belum optimalnya pengelolaan anggaran DAK Non Fisik Museum	Peningkatan kapasitas kelompok Seni Budaya melalui Pelaksanaan event Kota maupun Luar Kota, Revitalisasi sarana dan prasarana penunjang Seni dan Budaya	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 17 Januari 2024

Q. URUSAN PERPUSTAKAAN

**Tabel 3. 25 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023
(Urusan Perpustakaan)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Perpustakaan	Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4	6,14	Kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan	Mengajukan anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana perpustakaan	
			Program Pembinaan Perpustakaan					

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 17 Januari 2024



R. URUSAN KEARSIPAN

**Tabel 3. 26 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023
(Urusan Kearsipan)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Kearsipan	Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah	Program Pengelolaan Arsip	11,4	12,9	Masih kurangnya penyediaan sarana dan prasarana kearsipan khususnya sarana depo arsip serta Mobil Layanan Kearsipan untuk mendukung usaha tertib arsip dan layanan restorasi arsip masyarakat	Mengajukan anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana kearsipan	

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 17 Januari 2024

3.1.1.3.1 Pelaksanaan Urusan Pilihan

A. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

**Tabel 3. 27 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023
(Urusan Kelautan Dan Perikanan)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Kelautan Dan Perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Perikanan (%)	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	4	4,07			
		Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kecil (indeks)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	0,84	0,84			
			Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan					
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) (indeks)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1,19	1,17	Faktor-faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	- Melakukan sosialisasi terkait cara budidaya ikan yang baik (CBIB))	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						adalah jumlah pendapatan dan pengeluaran pembudidaya ikan. Capaian NTPi > 1 menunjukkan bahwa keluarga pembudidaya secara ekonomi sejahtera. Pembudidaya mengalami peningkatan daya beli karena kenaikan harga produksi lebih besar dari kenaikan harga input produksi dan konsumsi rumah tangganya. Selain itu, pembudidaya memiliki keuntungan usaha yang tinggi disebabkan karena adanya komoditas budidaya bernilai ekonomis tinggi seperti nila, gurami, dan udang vaname.	- Mengupayakan adanya subsidi pakan dan bantuan sarana produksi untuk mengurangi beban pengeluaran - Melakukan sosialisasi dan pelatihan pembuatan pakan alami - Melakukan sosialisasi agar pembudidaya lebih memperhatikan faktor kesehatan dan kualitas air untuk menjaga mutu dan kualitas produksi hasil perikanan budidaya	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, 17 Januari 2024

B. URUSAN PARIWISATA

**Tabel 3. 28 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023
(Urusan Pariwisata)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Pariwisata	Persentase Peningkatan Angka Kunjungan Wisatawan	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Pemasaran Pariwisata Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan	13%	13,09%	1. Kurangnya sarana pendukung daya tarik destinasi pariwisata 2. Adanya penutupan sementara destinasi pariwisata KUM2 yang	penambahan sarana pendukung destinasi dan melakukan promosi pariwisata secara terus menerus	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
			dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual			berimbas terhadap penurunan angka kunjungan		
			Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 17 Januari 2024

C. URUSAN PERTANIAN

**Tabel 3. 29 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023
(Urusan Pertanian)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Pertanian	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian (%)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	0,5	0,57			
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian					
		Nilai Tukar Petani (NTP) (indeks)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	111,2	111,21			
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian					
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					
			Program Perizinan Usaha Pertanian					
			Program Penyuluhan Pertanian					

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, 17 Januari 2024



D. URUSAN PERDAGANGAN

**Tabel 3. 30 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023
(Urusan Perdagangan)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Perdagangan	Peningkatan Nilai Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	51 M	192.303.433.938,70			
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting					
2	Urusan Penunjang	Persentase capaian pengelolaan administrasi perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90	90			

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, 17 Januari 2024

E. URUSAN PERINDUSTRIAN

**Tabel 3. 31 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023
(Urusan Perindustrian)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Perindustrian	Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	Perencanaan dan pembangunan industri	50.000.000.000	51.597.542.196			
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri					
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional					
2	Non Urusan	Persentase Capaian Pengelolaan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	94.23			



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
		Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan						

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 17 Januari 2024

3.1.1.3.2 Pelaksanaan Unsur Staf

A. SEKRETARIAT DAERAH

**Tabel 3. 32 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023
(Unsur Staf)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Unsur Staf	Persentase Perangkat daerah yang memperoleh Nilai Reformasi Birokrasi BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	100			
		Persentase Keterpenuhan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam LPPD sesuai ketentuan perundangan-undangan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	100	100	1. Keterbatasan waktu mengingat di awal tahun banyak agenda dan kegiatan yang dilaksanakan seperti penyusunan anggaran, audit keuangan dan pertanggungjawaban BPK, penyusunan laporan-laporan (LKPI, JKIP, LPPD, LKD, dsb) yang semuanya diampu oleh 1 orang 2. Beberapa data yang terlambat diperoleh, misalnya : Publikasi Daerah Dalam Angka yang dirilis oleh BPS pada akhir bulan Februari, Data Kependudukan semester 2 yang dirilis pada akhir Februari, Audit BPK atas APBD yang selesai pada bulan Februari-Maret; 3. Capaian kinerja dan data dukung yang	1. Dalam penyusunan LPPD, Bagian Pemerintahan melaksanakan sosialisasi dan evaluasi atas capaian dan data dukung Indikator Kinerja Kunci sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 kepada penyusun LPPD di Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. 2. Bagian Pemerintahan melaksanakan koordinasi baik melalui WhatsApp maupun secara langsung dengan Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Kementerian Dalam Negeri dan dengan Biro Pemerintahan dan OTDA	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						disampaikan oleh OPD berubah-ubah; 4. Perubahan nomenklatur dan SDM yang mengampu; 5. Memaknai dan memahami setiap rumus Indikator Kinerja Kunci pada LPPD oleh Perangkat Daerah dan Tim Penyusun LPPD yang berbeda-beda.	Setda Provinsi Jawa Timur. 3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah melalui verifikasi dan penilaian dalam bentuk reviu oleh Inspektorat	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	80,5	82,36	1. SKM dilaksanakan secara mandiri sehingga nilai yang dihasilkan kurang akurat; 2. ada 2 Bagian yang tidak melaksanakan SKM yaitu bagian perekonomian dan pembangunan karena tidak ada pelayanan langsung dan Bagian Barang dan Jasa	1. Melaksanakan SKM yang bekerjasama dengan Pihak ketiga sehingga akan diperoleh nilai yang akurat dan maksimal; 2. akan bekerjasama dengan Biro Organisasi untuk mereplikasi aplikasi e-SUKMA (SKM online)	
		Indeks Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,51	3,81	untuk IPP tahun 2023 mengalami penurunan dari pada tahun 2022 dikarenakan pada tahun 2023 PD yang di nilai berbeda dengan PD tahun 2022, tahun 2023 ada 3 lokus penilaian yaitu RSUD Dr.Mohamad Saleh, Dinas Sosial, Kecamatan kademangan	Melakukan pembinaan dan pendampingan ke pada PD yang menjadi lokus penilaian,	

Sumber : Sekretariat Daerah, 17 Januari 2024

B. SEKRETARIAT DPRD

**Tabel 3. 33 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023
(Unsur Staf)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Non Urusan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat DPRD	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	73	78,53	-	-	-

Sumber : Sekretariat DPRD, 17 Januari 2024



3.1.1.3.3 Pelaksanaan Unsur Pengawasan

**Tabel 3. 34 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023
(Urusan Pengawasan)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi kinerja minimal memuaskan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	70%	71.42	tercapainya target capaian evaluasi perangkat daerah dengan kinerja memuaskan di dorong oleh hal-hal sebagai berikut: a. terbangunnya sistem pengawasan internal yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur. b. Penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan pelaporan dan pemantauan kinerja pemerintah daerah.	Melakukan audit internal secara teratur untuk memastikan kinerja dan pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan baik.	
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal					
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah					
			Reviu Laporan Kinerja					
2		Persentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	90%	90	tercapainya target kinerja Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan disebabkan berbagai faktor diantaranya sebagai berikut: 1. Kecepatan respon, Keterlibatan dan komitmen tinggi dari pimpinan organisasi dalam menanggapi temuan pemeriksaan 2. tumbuhnya praktik pengelolaan risiko yang efektif sehingga membantu perangkat daerah mengidentifikasi dan mengelola risiko potensial terkait dengan penyusunan laporan keuangan	mengupayakan pemantauan atas perbaikan dalam proses dan sistem organisasi yang relevan untuk mengatasi akar penyebab temuan, mencakup perubahan kebijakan, prosedur, atau sistem manajemen. 2. melakukan pemantauan efektivitas sistem pengendalian internal dengan fokus pada proses pengendalian yang memadai untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan.	
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal					



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah					
			Reviu Laporan Keuangan					
			Kerja Sama Pengawasan Internal					
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP					
3		Persentase penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang terselesaikan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100%	100%	Peningkatan sistem untuk mengelola pengaduan, termasuk proses penerimaan, pendokumentasian, penugasan, dan pemantauan kasus, sehingga dapat meningkatkan efisiensi penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat.	Menerapkan siklus perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas sistem penanganan pengaduan. Evaluasi terus-menerus dapat membantu mengidentifikasi area-area perbaikan.	
4		Level Maturitas SPIP	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3	3	Level maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) atau pencapaian tingkat kematangan yang baik dalam penerapan SPIP, dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Berikut beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tercapainya	Menerapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa SPIP terus berjalan sesuai dengan rencana dan dapat menanggapi perubahan dalam lingkungan organisasi.	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						level maturitas SPIP yang baik: 1.Peningkatan dukungan dan komitmen pimpinan dalam menciptakan budaya organisasi yang mendukung implementasi SPIP. 2. Implementasi kontrol internal yang efektif untuk mencegah, mendeteksi, dan mengatasi risiko-risiko yang mungkin terjadi. Kontrol internal dapat membantu menjaga integritas, keandalan, dan keberlanjutan operasional organisasi.		

Sumber : Inspektorat, 17 Januari 2024

3.1.1.3.4 Pelaksanaan Fungsi Penunjang

A. Perencanaan

**Tabel 3. 35 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023
(Urusan Perencanaan)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Perencanaan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	100%			
		Persentase Program dengan capaian minimal 80%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	90%	90%			

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 17 Januari 2024



B. Keuangan

**Tabel 3. 36 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023
(Urusan Keuangan)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Keuangan	a. Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,67%	9,48%	- Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar tepat waktu dan sesuai Nominal - Banyak Industri / Usaha / Perusahaan yang tidak membayar PBB karena kondisi Ekonomi Subyek Pajak tersebut - Tidak-tersampaikan SPPT karena tidak ditemukan Subyek dan Obyek Pajak	Sosialisasi secara Persuasif pada saat penagihan - Kerjasama dengan Kejaksaan Kota Probolinggo - Mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Peringatan Total + 486 Surat (PDL) - Sosialisasi secara tersistem pada seluruh kelurahan di Kota Probolinggo terkait Pembayaran PBB secara Online E-SPPT di kelurahan Jati, Kelurahan Wonoasih dan Kecamatan Wonoasih (PBB) - Penyampaian Surat Tagihan Pajak PBB- Penyampaian Pemberitahuan tunggakan PBB - Roadshow Pembayaran PBB se Kota probolinggo - Rekonsiliasi Bulanan dengan PPAT (PBB)	
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	b. Persentase OPD dengan Realisasi Diatas 90%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	65%	68%	Terdapat Usulan Program dari PD yang belum diakomodir pada saat Penyusunan RKPD	Monitoring dan Pendampingan terhadap Perangkat Daerah dalam proses Penyusunan RKA APBD PAPBD	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	Penyusunan Rencana Anggaran Kas oleh SKPD tidak berdasarkan kerangka Acuan kerja sehingga menghambat Realisasi APBD	Sering Melakukan Sosialisasi dan Koordinasi dengan SKPD agar PPTK menyusun RAK sesuai dengan KAK dan Penyusunan tidak diserahkan Kepada Operator	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	- Kekurangpahaman SKPD atas Belanja Tak terduga serta koordinasi Penyelesaian dalam Pertanggungjawaban yang membutuhkan waktu lama	Melakukan Sosialisasi mengenai Belanja Tidak terduga dan Koordinasi dengan SKPD terkait kendala Penyelesaian Pertanggungjawabannya	
3		c. Persentase OPD dengan LKPD yang Sesuai Ketentuan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	- Koordinasi Laporan Keuangan SKPD sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemda (LKPD) membutuhkan waktu yang tidak sedikit, dikarenakan terdapat berbagai permasalahan ketika Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Sering dilakukannya Koordinasi dengan SKPD, agar permasalahan SKPD yang berhubungan dengan Laporan keuangan terselesaikan	
4		d. Persentase OPD yang Memiliki Kevalidan Data Aset	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	97%	100%	- Masih ada SKPD yang belum Update data/ Informasi di Aplikasi SIASAD - Permasalahan Tanah di masa lalu yang belum tuntas	-Pendampingan/Asistensi secara berkala kepada setiap SKPD terutama yang belum menyelesaikan update data/ Informasi di Aplikasi SIASAD - Terkait permasalahan Tanah di masa Lalu akan dilakukan Koordinasi Secara intensif dan Kontinyu dengan Pihak pihak terkait	

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 17 Januari 2024



C. Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

**Tabel 3. 37 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023
(Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	Indeks Profesionalitas Aparatur	Program Kepegawaian Daerah	64,5	64,04	Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas Aparatur Sipil Negara berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan. Target Indeks Profesionalitas Aparatur Tahun 2023 adalah 64,5, sementara realisasi pada Tahun 2023 berdasarkan data pada 1 Desember adalah sebesar 64,04 dengan kategori rendah, merupakan perhitungan yang telah valid dan secara real time diolah oleh Badan Kepegawaian Negara melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian BKPSDM Kota Probolinggo. Permasalahan masih rendahnya capaian Indeks Kinerja Utama adalah berkenaan dengan data kepegawaian yang belum up to date. Data kepegawaian yang dimaksud seperti sertifikat-sertifikat bukti keikutsertaan kegiatan peningkatan kompetensi pada sistem aplikasi kepegawaian belum sepenuhnya up to date yang mana para pegawai tidak segera mengupload sertifikat-sertifikat mereka pada aplikasi SIMPEG. Permasalahan pada kompetensi lainnya yaitu belum adanya	Sinkronisasi data pada Sistem Informasi Kepegawaian milik Kota Probolinggo (SIMPEG) dengan Sistem Informasi ASN (SIASN) dari Badan Kepegawaian Negara secara berkala serta melaksanakan banyak kegiatan pengembangan kompetensi melalui metode daring, pengiriman, ataupun secara mandiri agar memperoleh kapasitas kompetensi yang lebih baik dan bukti dari keikutsertaannya dapat meningkatkan IP ASN.	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
						kesesuaian jadwal dengan stakeholder terkait, dalam rencana pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi. Selain itu, rendahnya kualifikasi pendidikan yang dimiliki pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo juga menyebabkan rendahnya capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Tahun 2023 yang mana kurangnya kesadaran para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dalam meningkatkan Kualifikasi Pendidikan. Hal tersebut juga mengakibatkan jumlah pelaksana yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dalam jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah rendah. Hambatan-hambatan tersebut tentunya berpengaruh terhadap capaian realisasi Indeks Profesionalitas Aparatur di Kota Probolinggo Tahun 2023.		
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia					

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, 17 Januari 2024



D. Penelitian dan Pengembangan

**Tabel 3. 38 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023
(Urusan Penelitian dan Pengembangan)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang diimplementasikan	Penelitian dan Pengembangan	85%	100%	ada beberapa rekomendasi pada Kajian yang belum dimaksimalkan oleh Perangkat Daerah	Tetap dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah terkait Implementasi Kajian	

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 17 Januari 2024

E. Fungsi Penunjang Lainnya

**Tabel 3. 39 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023
(Fungsi Penunjang)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Fungsi Penunjang	Persentase Ormas yang aktif	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	87%	96,50%	Kurangnya pemahaman dan respon organisasi kemasyarakatan terhadap peraturan perundangan-undangan tentang Organisasi Kemasyarakatan	Pembinaan secara terus menerus Kepada Organisasi Kemasyarakatan	-



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
2		Prosentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Umum	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	90%	NA	Belum optimalnya Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Pemilihan Umum	Penguatan Kualitas tatanan demokrasi, nilai demokrasi dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	-
3		Persentase Potensi Konflik Sosial Masyarakat yang terselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	100%	100%	Adanya keberagaman, baik dari segi agama, etnis, budaya, kepentingan maupun status sosial	Penguatan kapasitas Timdu PKS yang berkesinambungan dalam menangani potensi konflik sosial	-
4		Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	95%	96,14%	Kurangnya inovasi dalam sistem dan prosedur pelayanan terhadap masyarakat	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 17 Januari 2024



3.1.1.3.5 Pelaksanaan Fungsi Koordinasi

**Tabel 3. 40 Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023
(Fungsi Koordinasi)**

A. Kecamatan Mayangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Kewilayahan	IKM	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	84,9	87,5			
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					
2	Non Urusan	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			

Sumber : Kecamatan Mayangan, 17 Januari 2024



B. Kecamatan Kademangan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	84%	91,96	Pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan terdapat : a. Warga tidak bersedia apabila hak milik tanahnya diserahkan kepada Pemerintah Kota Probolinggo sebagai aset. b. Titik lokasi merupakan kewenangan DPUPR dan volume pekerjaan terlalu kecil. c. Pokmas belum memiliki kemampuan teknis dalam melaksanakan pekerjaan fisik.	a. Memberikan sosialisasi/pemahaman yang jelas dan lebih intens lagi kepada masyarakat pada waktu Pra Musrenbang tentang persyaratan pengajuan titik lokasi untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan. b. Berkoordinasi dengan DPUPR untuk mengetahui status dan kewenangan titik lokasi setiap pekerjaan. c. Melakukan Pendampingan Hukum dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo yang difasilitasi oleh Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo dan berkoordinasi intern dengan APIP.	Kelurahan dapat merealisasikan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku melalui Pendampingan dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dan berkoordinasi aktif dengan dinas terkait
2	Urusan Kewilayahan	IKM	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	84,79	97,37	-	-	-
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			-	-	-
3	Non Urusan	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-

Sumber : Kecamatan Kademangan, 17 Januari 2024



C. Kecamatan Kanigaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Kewilayahan	IKM	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	84	82,75	Kurangnya kapasitas SDM dalam penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat	Pembinaan dan Monitoring secara berkala terhadap hasil pelayanan	
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					
2	Non Urusan	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	98%	98%	Kurangnya sarana dan prasarana penunjang perkantoran seperti Lap top dan PC	Membuat usulan kepada TAPD	

Sumber : Kecamatan Kanigaran, 17 Januari 2024

D. Kecamatan Wonoasih

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi
1	Fungsi Koordinasi (Kecamatan)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	94,13	94,15	-	-	-
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			-	-	-
2	Non Urusan	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	-	-	-

Sumber : Kecamatan Wonoasih, 17 Januari 2024



E. Kecamatan Kedopok

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja PD	Uraian Program	Target Kinerja (IKU PD)	Realisasi Kinerja (IKU PD)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	Urusan Kewilayahan	IKM	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	84	83,79	Kurangnya kapasitas SDM dalam penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana penunjang Survey IKM		
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					
2	Non Urusan	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			

Sumber : Kecamatan Kedopok, 17 Januari 2024



3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam tabel 3.46 sebagai berikut :

Tabel 3. 41 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
1	Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Bantuan Pakaian Seragam Gratis Bagi Siswa yang Tidak Mampu di Kota Probolinggo	1) Permendikbud Ristek RI Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis SPM Pendidikan; 2) Permendikbud Ristek RI Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah; 3) Perda Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan	Meningkatkan partisipasi Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Peraturan Walikota No. 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2022/2023	1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan	Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan azas objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan tidak diskriminasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Peraturan Walikota No. 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Kepada Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pengajian Al-Qur'an dan Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) di Kota Probolinggo	Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	Pelaksanaan Pemberian Jasa Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an / Taman Pengajian Al-Qur'an dan Guru Minggu sesuai ketentuan yang berlaku	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Penentuan Tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan	Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 33 tahun 2023 tentang Penyusunan Tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan	Penyesuaian tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan pada RSUD non BLUD	Dinkes PPKB



NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
5	Pemberian BPJS Ketenagakerjaan Bagi Petani	Perwali No.44 Tahun 2023 Tentang Pemberian Bantuan Sosial berupa Uang Kepada Petani Dalam Rangka Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi petani yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya Risiko Sosial	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
6	Pemberian BPJS ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan (Petani, Nelayan, dan Pelaku Usaha Mikro)	Perwali No.82 Tahun 2023 Tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan untuk Petani, Nelayan dan Pelaku Usaha Mikro	Penyesuaian rekening belanja yang semula dianggarkan pada Rekening Bantuan Sosial dialihkan pada Rekening Belanja Jasa yaitu pada sub rincian objek Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan (5.102.02.02.0012) dan Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Pekerja Rentan (5.102.02.02.0013)	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
7	Pemberian BPJS Ketenagakerjaan Bagi Petani	Perwali No.44 Tahun 2023 Tentang Pemberian Bantuan Sosial berupa Uang Kepada Petani Dalam Rangka Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi petani yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya Risiko Sosial	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
8	Kelayakan Sarana dan prasarana penunjang pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Perwali no 53 tahun 2023	Sudah dianggarkan pada P APBD Tahun 2023	Dinas Perhubungan
9	Pengendalian Kantong Plastik	Perwali Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik	Mengurangi Sampah dari penggunaan sampah sekali pakai dengan sasaran pelaku usaha (Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, Pasar Tradisional)	Dinas Lingkungan Hidup
10.	Peningkatan upaya konservasi kawasan <ul style="list-style-type: none">• Penghijauan di RTHKP• Pemeliharaan dan Perawatan Sumber Mata Air• Peningkatan RTH di 4 lokasi yaitu RTHKP Kedopok, RTHKP Semeru, RTHKP Maramis, RTHKP Supriyadi• Pemeliharaan Taman Jl. Soekarno Hatta	Perwali Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penetapan Sumber Mata Air - Perwali Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penetapan Taman Kota , Hutan Kota dan Pemakaman sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik	<ul style="list-style-type: none">• Konservasi Lingkungan• Konservasi Sumber Mata Air• Meningkatkan sarana fasilitas yang ada di RTH untuk kenyamanan pengunjung khususnya pada Jalan Inspeksi• Mempertahankan icon Kota Seribu Taman• Peningkatan Kualitas RTH	Dinas Lingkungan Hidup



NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
11	Kelayakan Sarana dan prasarana penunjang pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Perwali no 53 tahun 2023	sudah dianggarkan pada P APBD Tahun 2023	Dinas Perhubungan
12	Peningkatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor 100.3.3.3/247/Kep/425.012/2023 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024	1. Sebagai dasar pelaksanaan penyiapan dan/atau pengembangan layanan SPBE; 2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE.	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	Pengpusatdataan layanan pusat data	Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor 100.3.3.3/246 /Kep/425.012/2023 Tentang Layanan Pusat Data Pemerintah Kota Probolinggo	1. Mengantisipasi meningkatnya kebutuhan tempat penyimpanan dan pengolahan data; 2. Memberikan acuan dalam pembangunan, pengembangan, pengimplementasian, pemeliharaan dari layanan pusat data agar lebih terarah, terdokumentasi dengan baik, dan sesuai dengan alur hidup sistem informasi dan standar yang telah ditetapkan.	Dinas Komunikasi dan Informatika
14	Penyediaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SIMPAN SPBE)	Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor : 100.3.3.3/243/Kep/425.012/2023 Tentang Penyelenggaraan Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	Meningkatnya efisiensi pemanfaatan sumberdaya pengetahuan, keberlanjutan Proses Bisnis dan meningkatkan produktivitas dan inovasi dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Peningkatan kemitraan dengan media dan komunitas/jurnalis dalam penyebaran informasi kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo	Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Pemberian Jasa Publikasi Sebagai Kompensasi Penulisan Berita Kepada Mitra Pemerintah Kota Probolinggo	Mengikutsertakan jurnalis media massa baik berupa media cetak, media elektronik maupun media daring (online) dalam mempublikasikan informasi kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Kajian Analisis Probolinggo Plaza	-	untuk mengkaji nilai harga kepantasan, besaran	Dinas Koperasi Usaha Kecil



NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
			kontribusi tetap dan bagi hasil Pelaksanaan Investasi Probolinggo Plaza	dan Menengah dan Perdagangan Kota Probolinggo
17	Perlindungan BPJS UMKM	Perwali No. 82 Tahun 2023 tentang optimalisasi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan untuk pelaku usaha mikro	Pelaku Usaha Mikro rentan mengalami berbagai macam risiko yang berdampak pada kesehatan dan keselamatan dirinya sehingga dapat menimbulkan kerugian secara sosial untuk itu perlu memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk lebih menjamin kelangsungan hidupnya	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Probolinggo
18	Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Probolinggo Tahun 2023	Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor 100.3.3.3/229/KEP/425.012/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Tim Pelaksana Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Probolinggo Tahun 2023	Dalam rangka untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan kelurahan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2023	Bagian Pemerintahan Setda Kota Probolinggo
19	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 73 Tahun 2023 Tanggal 18 Desember 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Dalam rangka memfasilitasi perpanjangan masa jabatan RT dan RW terkait dengan menjelang pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah serentak dan dasar pemberian penghargaan bagi Ketua RT, RW dan LPM	Bagian Pemerintahan Setda Kota Probolinggo
19	Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Tahun 2023-2024	Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 93 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027	Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat di Kota Probolinggo, perlu diwujudkan melalui	Bagian Pemerintahan Setda Kota Probolinggo



NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
			penetapan dan penerapan SPM	
20	Rencana aksi daerah penerapan standar pelayanan minimal Tahun 2023-2027	Peraturan Wali Kota Probolinggo No 93 Tahun 2023 tentang Rencana aksi daerah penerapan standar pelayanan minimal Tahun 2023-2027	Dalam rangka acuan pelaksanaan Rencana aksi daerah penerapan standar pelayanan minimal Tahun 2023-2027	Bagian Organisasi Setda Kota Probolinggo
21	Tim Pemantauan dan Pembinaan aktivitas keagamaan	Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pemantauan dan Pembinaan Aktivitas Keagamaan	Dalam rangka memelihara keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama, dimana aktifitas keagamaan harus dapat menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, saling percaya diantara umat beragama dan masyarakat	Bagian Kesra Setda Kota Probolinggo
22	Penerima Penghargaan kepada Kafilah	Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor : 100.3.3.3/362/KEP/425.012/2023 tentang Daftar Penerimaan Penghargaan Kepada Kafilah Kota Probolinggo Yang Berhasil Meraih Prestasi Pada Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Jawa Timur XXX Tahun 2023	Guna memotivasi dan meningkatkan prestasi pada musabaqah tilawatil qur'an	Bagian Kesra Setda Kota Probolinggo
23	Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	Ada beberapa perubahan terkait Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	Bagian Kesra Setda Kota Probolinggo
24	Daftar Pesantren Penerima Belanja Jasa Berupa Pembayaran Listrik Pada Perubahan Anggaran Pendapat Dan Belanja	Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 100.3.3.3/319/KEP/425.012/2023 tentang Daftar Pesantren Penerima Belanja Jasa Berupa	Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pesantren perlu didukung oleh sarana dan prasarana memadai berupa	Bagian Kesra Setda Kota Probolinggo



NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
	Daerah Tahun Anggaran 2023	Pembayaran Listrik Pada Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	pembayaran listrik yang diakomodir oleh Pemerintah Daerah.	
25	Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Kebutuhan Pesantren Kota Probolinggo Tahun 2023 - 2027	Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor : 100.3.3.3/237/KEP/425.012/2023 tentang Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Kebutuhan Pesantren Kota Probolinggo Tahun 2023 - 2027	Dalam Rangka mendukung kebutuhan pesantren untuk menunjang fungsi pesantren yaitu fungsi pendidikan, fungsi dakwa dan fungsi pemberdayaan masyarakat, maka dipandang perlu dilakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi terhadap kebutuhan pesantren.	Bagian Kesra Setda Kota Probolinggo
26	Penetapan Program/Kegiatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Yang Diberikan Pendampingan Hukum Tahun 2023	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Menetapkan Program/Kegiatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Yang Di Berikan Pendampingan Hukum Tahun 2023	Bagian Hukum
27	Penetapan Pusat Layanan Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang sebagai Pelaksana Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga masa jabatan 2023-2028	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan ANggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah	Untuk melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap calon Direktur Perumda Air Minum Bayuangga Masa Jabatan 2023-2028	Bagian Perekonomian
28	Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga periode 2023 - 2028 oleh Wali Kota probolinggo selaku KPM	Peraturan Wali Kota Probolinggo No. 81 Tahun 2021 tentang Organ, Kepegawaian dan Organ Pendukung Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga	Untuk mengangkat Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga masa jabatan 2023-2028	Bagian Perekonomian
29	Tim Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kota Probolinggo	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	Untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah Kota Probolinggo	Bagian Perekonomian
30	Tim Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Kredit Program untuk Kredit Usaha Rakyat Tahun 2023	Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro	Untuk melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Kredit Program untuk Kredit Usaha Rakyat Tahun 2023	Bagian Perekonomian



NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
31	Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 133 Tahun 2020 tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.	Menindaklanjuti hasil verifikasi dari tim verifikator LKPP untuk penilaian Tingkat Kematangan Kelembagaan UKPBJ Kota Probolinggo, bahwa salah satu variabel pada Domain Proses yaitu Manajemen Resiko, terdapat salah satu dokumen sebagai bukti dukung yang harus diubah karena dinilai terdapat pertentangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) didalamnya, yaitu Dokumen Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Bagian PBJ
32	Peningkatan nilai realisasi Belanja PDN dan Produk UMKK TA. 2023	Surat edaran Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Nomor: 500.2.2.9/824/425.002/2023 tanggal 11 Oktober 2023 perihal Peningkatan Nilai Realisasi Belanja PDN dan Produk UMKK TA. 2023.	Dalam rangka percepatan peningkatan realisasi belanja pengadaan yang menggunakan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.	Bagian PBJ
33	Arahan/petunjuk mengikuti Pelatihan Kompetensi PBJP Untuk PPK Tipe C Model Pembelajaran MOOC	Surat edaran Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Nomor: 400.3.5.3/1079/425.002/2023 tanggal 7 Desember 2023 perihal Pelatihan Kompetensi PBJP Untuk PPK Tipe C Model Pembelajaran MOOC.	Dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berkompetensi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo untuk Tahun 2024.	Bagian PBJ
34	Percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TA. 2024	Surat edaran Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Nomor: 000.3.1/1163/425.002/2023 tanggal 20 Desember 2023 perihal Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TA. 2024	Percepatan penyerapan APBD yang diwujudkan dalam percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.	Bagian PBJ



NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Perangkat Daerah
35	Strategi pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan minimal Baik Tahun 2024	Surat edaran Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Nomor: 000.3.5/1162/425.002/2023 tanggal 20 Desember 2023 perihal Strategi Pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Tahun 2024	Pencapaian ITKP minimal Baik di Tahun 2024.	Bagian PBJ
36	Upaya Peningkatan PAD	Persentase PAD (Perda No. 4 Tahun 2023)	Dari Bidang Pendapatan mulai Tahun 2022 target PAD harus mencapai 60% banyak kelemahan di Pendapatan Anggaran Kurang sehingga Target masih berat berkaitan dengan Teknologi, adanya Aplikasi yang Data Base Pajak, untuk mengukur Potensi yang sudah ada, DataBase ini memerlukan Aplikasi, Misal Database Reklame, dan Jalan Jalan, berapa yang habis Bulan ini, adanya Database Pajak Daerah	BPPKAD
37	Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan	Perwali Kota Probolinggo Nomor 90 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan Bagi PNS Di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	agar ada pedoman teknis dalam pemberian tugas belajar PNS	BKPSDM
38	LHKPN	Perwali Kota Probolinggo Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	Agar tersusun tertib administrasi pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara	BKPSDM Kota Probolinggo
39	Penguatan Kualitas tatanan demokrasi, nilai demokrasi dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Pemilihan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

NO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
1	Dengan tidak terlaksananya program seragam gratis untuk murid kelas 2 dan kelas 7 dikarenakan beberapa alasan. Maka DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belajar dari permasalahan di tahun 2022, sehingga program tersebut di tahun 2023 bisa terealisasi dengan baik.	Pelaksanaan program prioritas penyediaan Seragam Gratis bagi peserta didik kelas 2 dan kelas 7 yang belum terlaksana pada tahun 2022 dikarenakan pelaksanaan Seragam Gratis tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, Namun pada tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, sebagaimana Pasal 12 pada Peraturan tersebut maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo pada tahun 2023 berupaya melaksanakan program prioritas Pengadaan Seragam bagi Peserta Didik dari Keluarga yang tidak mampu. Adapun rencana sasaran penyediaan Seragam bagi Peserta Didik dari Keluarga yang tidak mampu pada tahun 2023 adalah sejumlah 2580 peserta didik Pendidikan Dasar Jenjang SD/MI dan SMP/MTs se Kota Probolinggo. Namun jumlah sasaran tersebut dapat berubah berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo. Dan agar pelaksanaan program prioritas Penyediaan Seragam Peserta Didik tersebut dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo mengupayakan kerjasama dengan Pihak APH sebagai pendampingan kegiatan, dan menyusun rencana kerja / time schedule pelaksanaan	Penyediaan Seragam Gratis bagi Peserta Didik Tidak Mampu dapat terlaksana sesuai ketentuan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Terkait anggaran yang banyak untuk penguatan sarana prasarana yang ada pada sekolah-sekolah SD -	Sebagai upaya peningkatan mutu Pendidikan diantaranya adalah peningkatan mutu pengelolaan pada satuan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



NO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
	SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Probolinggo, maka DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan supaya perencanaan anggaran yang sudah terencana bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.	Pendidikan maupun di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo dan untuk penguatan pengelolaan sarana prasarana yang ada pada satuan Pendidikan SD dan SMP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo mengupayakan antara lain : <ul style="list-style-type: none">• Memberikan pembinaan secara menyeluruh untuk pengelolaan pada satuan Pendidikan SD – SMP khususnya untuk tata kelola Pendidikan mulai dari Penyusunan Dokumen Perencanaan sampai dengan Pelaporan dan Penatausahaan Anggaran Pendidikan,• Mengupayakan menyusun regulasi pengelolaan pada Satuan Pendidikan SD – SMP sebagai bagian dari Sistem Pengawasan Internal agar pengelolaan pada Satuan Pendidikan SD – SMP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.• Menyusun kebijakan untuk pelaksanaan pengawasan baik Internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo maupun melibatkan Eksternal yaitu pelibatan pihak APIP (Inspektorat Kota Probolinggo) untuk memberikan pengawasan secara berkelanjutan.		
3	Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan merupakan tanggungjawab dari setiap komponen di satuan pendidikan, peningkatan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen sekolah. Maka DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan supaya melakukan Audit Internal dan Eksternal untuk monitoring dan evaluasi secara obyektif upaya-upaya peningkatan	upaya peningkatan mutu pada Satuan Pendidikan, salah satunya adalah tata kelola yang baik agar pengelolaan pada Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo melakukan upaya – upaya sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan dan terjadwal dengan pelibatan semua unsur Pengelola pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo;• Memberikan pembinaan	Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan khususnya Pengelolaan Pendidikan berdasarkan kewenangan Pendidikan pada Pemerintah Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



NO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
	Peta Mutu Pendidikan memenuhi standar, serta memastikan berkembang secara professional berkelanjutan.	terhadap Dokumen Perencanaan pada Satuan Pendidikan sebagai dokumen pedoman pelaksanaan pengelolaan anggaran Pendidikan; <ul style="list-style-type: none">• Memberikan Sosialisasi perihal Petunjuk Teknis BOSP dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan BOSDA dan BOP PAUD Daerah dengan melibatkan unsur Pengelola Keuangan Daerah dan APIP Kota Probolinggo;• Melaksanakan pengawasan dan monev secara terjadwal kepada satuan Pendidikan terhadap pengelolaan Pendidikan yang dilaksanakan pada Satuan Pendidikan;• Melakukan Pemetaan Mutu baik Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan sesuai dengan kondisi yang ada, serta memberikan regulasi serta pembinaan untuk peningkatan kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan		
4	Peran penting Dinas pendidikan dan kebudayaan dalam Pendidikan perlu memperhatikan mutu/kualitas pendidik dari tingkatan bawah, khususnya untuk guru PAUD. DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar memberikan reward berupa beasiswa kepada Guru PAUD.	Upaya untuk peningkatan profesionalitas Pendidik/Guru khususnya Pendidik PAUD, dan sebagaimana kebijakan serta ketentuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek RI yang telah dituangkan kedalam beberapa Regulasi serta Kebijakan dalam rangka peningkatan mutu / profesionalitas khususnya Guru PAUD yang mana berdasarkan capaian SPM Pendidikan Kota Probolinggo Tahun 2022 untuk capaian Kualifikasi Guru PAUD yang sudah S-1 PAUD maupun S-1 Sederajat masih mencapai 71,47%, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo telah merencanakan untuk memberikan Reward berupa beasiswa Pendidikan S-1 bagi Guru PAUD yang belum	Peningkatan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan khususnya Pendidik PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



NO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
		memenuhi kualifikasi tersebut pada tahun anggaran 2024, dan untuk itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo akan menyusun Regulasi agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, serta melaksanakan MoU / Kerja sama dengan Pihak Perguruan Tinggi / Universitas untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.		
5	a. Pemanfaatan 29 Ambulans sebagai fungsi pelayanan Kesehatan bagi masyarakat Kota Probolinggo secara garis umum masih terdapat banyak kendala, diantaranya kurang cepatnya penanganan pasien dan keterlambatan merespon aduan dari masyarakat. Hal tersebut karena parkir ambulans tidak ditempatkan pada masing-masing kelurahan. Maka, DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar memfasilitasi sarana dan prasarana untuk lahan parkir 29 ambulans dan Ambulans harus ditempatkan pada masing-masing kelurahan serta mengoptimalkan kinerja pegawai supaya masyarakat merasakan manfaatnya.	a. Sebelumnya disampaikan terima kasih atas rekomendasi yang diberikan terkait kinerja pelayanan Ambulans Siaga kepada masyarakat. Selanjutnya, mohon ijin untuk menyampaikan tanggapan kami atas rekomendasi tersebut sebagai berikut : Ambulans Siaga sebanyak 29 unit yang saat ini terdistribusi di 6 wilayah Puskesmas pada 5 kecamatan adalah jenis Ambulans Transport. Menurut Pedoman Teknis Ambulans yang diterbitkan oleh Dirjen Yankes Kementerian Kesehatan RI Tahun 2019, Ambulans jenis ini harus dilengkapi dengan peralatan Bantuan Hidup Dasar dan petugas dengan kompetensi Bantuan Hidup Dasar. Pedoman tersebut menjadi dasar bagi Dinas Kesehatan PPKB untuk menyerahkan pengelolaan Ambulans Siaga kepada fasilitas Kesehatan (Faskes) yang ada di wilayah tersebut yaitu Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu) mengingat syarat yang ditetapkan dalam pedoman teknis tersebut, meskipun peruntukannya tetap untuk 29 kelurahan sesuai tujuan awal. Bahwa adanya Ambulans Siaga di beberapa kelurahan tidak parkir di kelurahan peruntukannya, hal ini dikarenakan :	a. Pemanfaatan 29 Ambulans sebagai fungsi pelayanan Kesehatan bagi masyarakat Kota Probolinggo secara garis umum masih terdapat banyak kendala, diantaranya kurang cepatnya penanganan pasien dan keterlambatan merespon aduan dari masyarakat. Hal tersebut karena parkir ambulans tidak ditempatkan pada masing-masing kelurahan. Maka, DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar memfasilitasi sarana dan prasarana untuk lahan parkir 29 ambulans dan Ambulans harus ditempatkan pada masing-masing kelurahan serta mengoptimalkan kinerja pegawai supaya masyarakat merasakan manfaatnya.	Dinas Kesehatan pengendalian penduduk dan KB



NO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
		<p>1. Tidak semua kelurahan memiliki Faskes (Puskesmas/Pustu) sehingga untuk keamanannya (mengingat di dalam Ambulans ada peralatan medis Kesehatan), maka untuk parkirnya lalu ditempatkan di Puskesmas Induk. Data Dinkes PPKB, dari 29 Kelurahan ternyata ada 4 kelurahan yang tidak ada faskesnya (2 kelurahan di Kec.Wonoasih, 1 kelurahan di Kec.Kedopok dan 1 kelurahan di Kec.Kademangan)</p> <p>2. Tidak semua kelurahan yang mempunyai Faskes (Puskesmas/Pustu) memiliki lahan untuk dibangun garasi sebagai penyimpanan Ambulans Siaga sehingga dengan pertimbangan yang sama yaitu keamanan maka Ambulans peruntukkan kelurahan tersebut di parkir/disimpan di Puskesmas Induknya. Khusus untuk poin 2, Dinkes PPKB telah berupaya dengan berkonsultasi ke Inspektorat dan Bagian Aset terkait kemungkinan untuk membangunkan garasi di lahan umum (kantor kelurahan atau tanah warga), terkendala karena asset tersebut bukan milik Dinkes PPKB maka secara aturan tidak diperbolehkan. Adapun response time yang dianggap lambat, akan menjadi bahan evaluasi Dinkes PPKB untuk melakukan perbaikan pelayanan dan pembinaan kepada petugas. Selain itu pula, permintaan Ambulans Siaga melalui aplikasi Call Center 112 harus melalui server yang dikelola oleh OPD lain sehingga ketika server mengalami kendala (Error) maka informasi permintaan sampai ke petugas juga terkendala/melambat. Untuk selanjutnya, Dinkes PPKB akan berkoordinasi dengan OPD terkait untuk membantu</p>		



NO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
		kepastian server bekerja dengan baik agar kecepatan informasi dari permintaan warga ke petugas pelaksana juga cepat sampai. Demikian, terima kasih.		
6	b. Persentase realisasi pengadaan alat di Rumah Sakit Ar Rozy masih belum mencapai 100%, masih terdapat alat-alat di Rumah Sakit Ar Rozy yang masih ditempatkan di Gudang. Dikhawatirkan ketika melakukan uji fungsi alat-alat tersebut banyak terdapat kendala. Oleh karena itu, , DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar segera merealisasikan alat-alat tersebut ke tempat yang semestinya.	b. Kami sampaikan terima kasih atas rekomendasi yang diberikan DPRD Kota Probolinggo terkait pengadaan peralatan Kesehatan khususnya untuk RSUD Ar Rozy pada Tahun 2022. Selanjutnya mohon ijin kami sampaikan tanggapan kami atas rekomendasi tersebut sebagai berikut: Bahwa terhitung tanggal 30 Maret 2023, semua peralatan Kesehatan peruntukkan RSUD Ar-Rozy sudah ditempatkan di lokasi RSUD Ar-Rozy. Semua peralatan tersebut sudah di lakukan uji fungsi kecuali peralatan yang instalasinya tersinkronisasi dengan pembangunan sarana Gedung RSUD Ar Rozy (karena harus memastikan prasyarat sarana sudah terbangun)	a. Persentase realisasi pengadaan alat di Rumah Sakit Ar Rozy masih belum mencapai 100%, masih terdapat alat-alat di Rumah Sakit Ar Rozy yang masih ditempatkan di Gudang. Dikhawatirkan ketika melakukan uji fungsi alat-alat tersebut banyak terdapat kendala. Oleh karena itu, DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar segera merealisasikan alat-alat tersebut ke tempat yang semestinya.	Dinas Kesehatan pengendalian penduduk dan KB
7	c.Target prevalensi penurunan kurang gizi sedikit yaitu 173 anak, sedangkan yang terealisasi hanya 112 anak. Data perencanaan sebanyak 173 anak didapat dari data proyeksi. Target capaian tidak terlaksana karena keterbatasan tenaga dan waktu. Oleh karena itu, , DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar tidak main-main dalam melakukan perencanaan, sehingga target perencanaan bisa terealisasi dengan baik.	c. Kami sampaikan terima kasih atas rekomendasi yang diberikan DPRD Kota Probolinggo terkait prevalensi penurunan kurang gizi/gizi buruk pada anak, Selanjutnya mohon ijin kami sampaikan tanggapan kami atas rekomendasi tersebut sebagai berikut: Target Prevalensi kurang gizi/gizi buruk Tahun 2022 sebanyak 173 balita, dengan realisasi 112 balita. Jumlah balita di Kota Probolinggo sebanyak 17.337 balita. Pemerintah Kota Probolinggo menargetkan angka gizi buruk, kurang dari 1%. Dengan Perhitungan target prevalensi gizi buruk adalah $1\% \times 17.337 \text{ balita} = 173 \text{ balita}$ dengan demikian didapatkan angka target sebanyak 173 balita, sehingga dengan capaian 112 balita menunjukkan capaian		Dinas Kesehatan pengendalian penduduk dan KB



NO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
		kinerja yang baik, karena angka gizi buruk kurang dari 1%, apabila capaian sama atau lebih dari 173 balita, menggambarkan banyaknya kasus gizi buruk di Kota Probolinggo sampai melebihi target yang ditetapkan.		
8	Dengan banyaknya kesalahan alih fungsi lahan yang telah ditetapkan oleh pusat, menyebabkan kerugian pada pemilik lahan, Maka, DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Probolinggo supaya mendampingi dan mengambil alih dengan cepat serta mengembalikan fungsi lahan tersebut sebagaimana mestinya.	Terhadap penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala BPN, yang tidak sesuai dengan RTRW Kota Probolinggo, Pemerintah Kota Probolinggo telah melakukan koordinasi dan klarifikasi kepada pihak kementerian ATR/BPN. Lahan yang ditetapkan masuk dalam Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) tetap dapat dimanfaatkan sepanjang sesuai dengan RTRW Kota Probolinggo dan mendapatkan persetujuan dari Menteri ATR/BPN. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Probolinggo membantu pemilik lahan dalam proses verifikasi ke Kementerian ATR/BPN, namun penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) tetap harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian ATR/BPN. Untuk proses verifikasi lahan tersebut berpedoman pada petunjuk Teknis Nomor: 5/juknis-HK.02/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Izin, Konvensi dan/atau Hak Atas Tanah	Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan perijinan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
9	Terkait banyaknya proyek yang menang lelang tetapi tidak dikerjakan. DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan kepada Dinas PUPR dan Perkim supaya lebih	- Proses Pemilihan Penyedia dalam Pengadaan Barang dan Jasa menjadi kewenangan dari Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah. Adapun sebagai Langkah untuk mendapatkan penyedia yang	Mendapatkan pelaksana pekerjaan yang kompeten sehingga pelaksanaan pembangunan menjadi lancar	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan



NO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
	menyeleksi dan berikutnya supaya tidak diberikan proyek lagi, karena hal tersebut sangat merugikan, bukan hanya Pemerintah Kota Probolinggo saja, tetapi masyarakat juga akan terkena imbasnya. Anggaran yang sudah dialokasikan akhirnya tidak tercapai dan infrastruktur tidak bisa dinikmati oleh masyarakat. Kedepan supaya bertindak tegas terhadap proyek one prestasi yang ditinggalkan oleh pelaksana.	berkompeten, Dinas PUPRPKP telah berkoordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang Jasa serta Tenaga Ahli dari Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Jawa Timur tentang evaluasi terhadap penawaran harga dari calon penyedia yang dibawah 80% HPS, supaya dapat dipertimbangkan kembali mengingat dapat menimbulkan dampak tidak lancarnya pelaksanaan pekerjaan seperti tidak selesainya pekerjaan dan kualitasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. - Terhadap penyedia yang melakukan wanprestasi, Dinas PUPRPKP telah memberikan sanksi kepada pihak penyedia berupa Penetapan Sanksi Daftar Hitam telah dipublikasikan di LPSE		dan Kawasan Permukiman
10	Terkait Perencanaan target PAD pada tahun 2022 yang kurang maksimal yaitu hanya 42% DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar perencanaan target PAD pada tahun 2023 harus lebih matang dan supaya bisa terealisasi semaksimal mungkin.	Target PAD pada Dinas PUPRPKP masih belum tercapai karena target yang tinggi. Namun Dinas PUPRPKP telah berupaya maksimal untuk meningkatkan PAD di berbagai Retribusi yang ditangani. Diantaranya dengan melakukan jemput bola mendatangi penghuni Rusunawa supaya tertib dalam pembayaran hutang maupun retribusi sewa setiap bulannya	Tujuan dari Penyesuaian Target PAD adalah agar target benar-benar sesuai dengan potensi yang ada dan dapat memenuhi Capaian realisasi PAD	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
11	Supaya mendata penerima bantuan yang sudah tersalurkan dan penyaluran bantuan ke depan menjadi merata	Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam proses validasi dan verifikasi secara mandiri yang didukung oleh sistem teknologi informasi dan komunikasi yang handal dan terkini	Peningkatan validitas dan pemutakhiran data PPKS	Dinas Sosial P3A
12	Sarana prasarana dan kesejahteraan para pekerja penyaluran bantuan sosial harus ditingkatkan	untuk ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya	Tambahan Kesejahteraan untuk para pekerja penyalur bantuan sosial	Dinas Sosial P3A
13	Agar sarana dan prasarana para pekerja penyaluran bantuan sosial harus lebih ditingkatkan lagi dan pekerja yang ada di lapangan harus diperhatikan	untuk menjadi perhatian	Sarana dan prasarana para pekerja penyaluran bantuan sosial	Dinas Sosial P3A

NO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
14	Pada tahun 2022 jumlah luas lahan pertanian di Kota Probolinggo menurun dari 1.743 hektar menjadi 1.714 hektar kategori lahan sawah dan pada kategori lahan pekarangan atau lahan kering yang beralih fungsi 200 sampai 400 hektar. Sedangkan, Online Single Submission (OSS) pada tahun 2021 tidak memperbolehkan pengembangan lahan pertanian. DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan supaya proses-proses tersebut tidak dikerjakan tanpa mencermati aturan-aturan yang sudah berlaku, sehingga tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari	Dapat disampaikan bahwa data Luas Baku Sektor Pertanian terdiri dari Luas Baku Sawah dan Luas Tegalan (lahan kering) dengan rincian pada tahun 2022 total luas lahan pertanian adalah 2.365 ha yang terdiri dari 1.743,5 ha luas lahan sawah dan 623,5 ha tegal (lahan kering). Sedangkan pada tahun 2021 data Luas Baku Sektor Pertanian adalah 2.367 ha yang terdiri dari 1.741,5 ha luas baku sawah dan 623,5 ha tegalan (lahan kering). Sementara berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040, telah ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Kota Probolinggo seluas 1.099 ha. Penetapan KP2B dapat menjadi dasar/acuan dalam setiap tahap pembangunan terkait perijinan dan pengendalian pemanfaatan lahan khususnya komitmen dan konsistensi untuk melindungi dan mempertahankan lahan pertanian pangan dari alih fungsi lahan menjadi lahan non pertanian Adanya alih fungsi lahan masih dapat dimungkinkan apabila lahan tersebut tidak ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).	Alih fungsi lahan terkait LP2B	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
15	Pada tahun 2022 para petani yang mempunyai mesin diesel sulit mendapatkan solar subsidi, di sisi lain pembelian solar harus menggunakan barcode berdasarkan rekomendasi dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Maka DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar segera mendata para petani yang ada di Kota	Dapat disampaikan bahwa untuk pendataan petani di Kota Probolinggo dilakukan melalui aplikasi SIMLUHTAN (Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian) yaitu sistem informasi penyuluhan pertanian yang menyajikan database kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan, dan kelembagaan pelaku utama. Untuk fasilitasi pemberian Surat Rekomendasi pembelian solar bersubsidi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian	Pemberian rekomendasi BBM untuk Alat Mesin Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan



NO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
	Probolinggo untuk memberikan kemudahan melalui fasilitasi dari Dinas Pertanian, dan memberikan pendampingan dalam mencukupi kebutuhan solar untuk keperluan pertanian di Kota Probolinggo	dan Perikanan mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. Kebijakan barcode bertujuan untuk mengendalikan jenis BBM tertentu (solar subsidi) agar tepat sasaran, tepat volume dan tidak kelebihan kuota.		
16	Dalam nota penjelasan Wali Kota dijelaskan bahwa salah satu pertumbuhan ekonomi berasal dari sektor perikanan, baik penangkapan maupun budidaya. Para nelayan yang melaut banyak terdapat kendala-kendala keselamatan kerja. Maka, DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar nelayan dibekali dengan <i>Basic Safety Training</i> dan berharap Pemerintah Kota Probolinggo memfasilitasi para nelayan lebih cakap ketika melaut baik nelayan tangkap maupun budidaya serta menggalakkan hasil tangkap maupun budidaya ikan untuk diolah agar dapat meningkatkan ekonomi para nelayan	Dapat disampaikan bahwa DKPPP siap melaksanakan kegiatan <i>Basic Safety Training</i> (BST) sesuai dengan ketersediaan dan kemampuan anggaran dengan tetap memperhatikan prioritas anggaran Pemerintah Kota Probolinggo. Sejak Tahun 2021 sampai sekarang, Pemerintah Kota Probolinggo juga menganggarkan pemberian Bantuan Sosial BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Probolinggo terkait dengan keselamatan kerja nelayan. Selain itu, guna meningkatkan perekonomian keluarga nelayan telah dilaksanakan beberapa kegiatan diversifikasi usaha nelayan dan diversifikasi olahan perikanan konsumsi dan non konsumsi antara lain pelatihan pembuatan lampu hias dan gantungan kunci dari kerang-kerangan, pelatihan pembuatan sabun dari kulit kerang, pembuatan lampu celup bawah air (lacuba), pembuatan kerupuk koin cumi, pembuatan tortilla kelor ikan, pembuatan kerupuk amplang ikan, restocking Perairan Umum	Peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial bagi nelayan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan



NO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
		Darat, serta Sekolah Lapang Budidaya lele.		
17	Kelangkaan pupuk pada sektor pertanian menjadi salah satu keresahan yang dihadapi oleh para petani. Oleh karena itu, DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan supaya Dinas Pertanian membuat tim satgas dan harus pro aktif dalam membantu para petani mendapatkan pupuk	<p>Dapat disampaikan bahwa penetapan alokasi pupuk bersubsidi dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota. Untuk tingkat Pusat sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Untuk tingkat Provinsi sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/751/KPTS/013/2022 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023. Sedangkan untuk tingkat Kota Probolinggo sesuai Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor : 188.45/315/KEP/425.012/2022 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2023. Beberapa hal yang perlu disampaikan terkait pupuk bersubsidi adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pupuk bersubsidi hanya terdiri atas urea serta Nitrogen, Phosphat, dan Kalium (NPK);2. Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai), subsektor hortikultura (cabai, bawang merah, dan bawang putih), dan subsektor perkebunan (tebu rakyat, kakao, dan kopi);3. Petani yang berhak mendapat pupuk bersubsidi harus tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam SIMLUHTAN (Sistem Manajemen Penyuluhan	Alokasi pupuk bersubsidi bagi petani	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan



NO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
		Pertanian); 4. Alokasi pupuk bersubsidi untuk Kota Probolinggo Tahun 2023 adalah sebanyak 1.691 ton urea dan 909 ton NPK. Untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia, mendukung pertanian organik, serta untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah maka Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan juga aktif melakukan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) kepada petani dalam bentuk penyuluhan penggunaan pupuk organik dan pelatihan pembuatan pupuk organik. Sedangkan terkait kegiatan pengawasan peredaran, penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida di Kota Probolinggo dilaksanakan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Probolinggo sesuai Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor : 188.45/259/KEP/425.012/2022.		
18	Program sapi kereman pada Tahun 2021 berpotensi banyak menghasilkan PAD. Maka, DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar pada tahun anggaran selanjutnya berharap program sapi kereman diadakan dan dengan adanya program tersebut para peternak semangat untuk membantu dalam peningkatan PAD	Dapat disampaikan bahwa penggadauhan ternak (sapi kereman) bertujuan agar masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan memelihara ternak pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat dengan sistem bagi hasil sesuai Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pengelolaan Dan Penggadauhan Ternak. Untuk tahun 2023, sapi kereman belum dilaksanakan lagi mengingat masih tingginya potensi serangan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta penyakit LSD (Lumpy Skin Disease). Adanya dua penyakit ini menyebabkan peternak masih khawatir untuk memelihara ternak lagi dikarenakan penyebab kedua	Peningkatan PAD melalui program penggadauhan ternak	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan



NO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
		penyakit adalah virus sehingga sifat penyebarannya sangat cepat dan menular. Jika ternak sapi terserang maka harga jualnya akan turun dan bisa menyebabkan kematian (potensi kerugian ekonomi tinggi).		
19	Kepemilikan terhadap gedung UPT Pelayanan KIR /UPT PKB	Usulan rencana pembangunan gedung UPT PKB terdapat pada Ranwal tahun anggaran 2023 dan membutuhkan anggaran kurang lebih dari 5 M akan tetapi rencana tersebut belum terealisasi disebabkan kemampuan pagu anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota diprioritaskan untuk kebutuhan yang lebih penting	Rencana pembangunan gedung UPT PKB akan di usulkan pada Ranwal tahun anggaran 2025	Dinas Perhubungan
20	Dana 6 milyar seharusnya difokuskan pada semua Cabang Olahraga tidak sampai 50%. Maka, DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar KONI bisa memaksimalkan dana hibahnya untuk transfer dana pengurus kota cabang olahraga, supaya masing – masing cabang olahraga bisa berkreasi mengembangkan cabang olah	Sehubungan dengan Dana Hibah KONI Kota Probolinggo Tahun 2022 dapat disampaikan bahwa dana hibah tersebut dialokasikan untuk kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan pada Pengkot Cabor Kota Probolinggo melalui transfer dan untuk pelaksanaan program dan kegiatan KONI Kota Probolinggo di Sekretariat KONI Kota Probolinggo. Dana transfer kepada Pengkot Cabor digunakan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan Pengkot Cabor dalam rangka pembibitan dan pembinaan prestasi di Pengkot Cabornya masing-masing, antara lain: 1. Untuk bantuan transport pelatih bulanan 2. Sewa tempat latihan 3. Ekstra fooding bagi atlet 4. Pengadaan peralatan olahraga 5. Mengikuti kejuaraan single event yang menjadi agenda pengprov cabornya masing – masing (Kejurprov) 6. Mengikuti open turnamen yang berkualitas	Dana Hibah KONI Kota Probolinggo Tahun 2022	DISPOPAR



NO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
		<p>7. Mengikuti rapat – rapat yang menjadi agenda pengprov cabornya masing – masing (musorprov, rakerprov, musorprovlub)</p> <p>Sedangkan alokasi dana di Sekretariat KONI digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan KONI Kota Probolinggo yang didalamnya terdapat sebagian besar program dan kegiatan yang digunakan untuk menunjang kegiatan Pengkot Cabor.</p> <p>Adapun dasar Pertimbangan alokasi dana di Sekretariat KONI yang digunakan untuk menunjang kegiatan Pengkot Cabor adalah agar Pengkot Cabor lebih fokus dalam pembibitan dan pembinaan prestasi atlet Cabornya masing – masing.</p> <p>Program dan kegiatan pada Sekretariat KONI Kota Probolinggo yang digunakan untuk menunjang kegiatan Pengkot Cabor, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengadaan peralatan olah raga2. Pelaksanaan PUSLTKOT dalam rangka persiapan PORPROV VII Jatim Tahun 20223. Mengikuti PORPROV VII Jatim Tahun 2022 yang pelaksanaannya di Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Lumajang4. Bantuan event bagi Pengkot Cabor untuk mengikuti Kejurprov dan open turnamen5. Penerapan sport science yang bekerjasama dengan Program Vokasi UNESA dalam rangka uji kebugaran para atlet Pengkot Cabor yang akan mengikuti PORPROV VII Jatim Tahun 20226. Bantuan bagi Pengkot Cabor yang baru terbentuk dan belum mendapatkan alokasi dana hibah7. Pemberian penghargaan/uang		



NO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
		pembinaan bagi atlet dan pelatih berprestasi. 8. Monitoring dan evaluasi kegiatan Pemkot Cabor.		
21	Bahwa besaran hibah yang diterima KONI yaitu sebesar 6 milyar digunakan untuk menunjang keolahragaan yang ada di Kota Probolinggo. Maka, DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan supaya dana hibah sebesar 6 milyar harus berbanding lurus.	Sehubungan dengan besaran hibah yang diterima oleh KONI Kota Probolinggo tahun 2022 dapat disampaikan bahwasanya yang menjadi ukuran utama keberhasilan KONI Kota Probolinggo dalam pembinaan olahraga prestasi adalah peringkat yang diperoleh dalam mengikuti multi event tertinggi di Provinsi Jawa Timur yaitu Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV). Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu disampaikan beberapa hal, sebagai berikut: 1. Pada PORPROV VII Tahun 2022 Kontingen Kota Probolinggo berada pada peringkat 24 dengan memperoleh 8 medali emas, 12 medali perak, dan 18 medali perunggu. 2. Sedangkan pada PORPROV VI Tahun 2019 Kontingen Kota Probolinggo berada pada peringkat 28 dengan memperoleh 2 emas, 6 medali perak, dan 14 medali perunggu. 3. Berarti peringkat Kontingen Kota Probolinggo mengalami kenaikan empat peringkat dari peringkat 28 ke peringkat 24. Perlu disampaikan bahwasannya prestasi olahraga yang semakin baik dapat dihasilkan dari tatakelola keolahragaan yang baik melalui pembinaan yang terencana, bertahap, berkualitas dan berkelanjutan yang tidak dapat diperoleh secara tiba – tiba meskipun dengan dukungan dana yang besar. Tatakelola penyelenggaraan keolahragaan semakin luas dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga	Dana Hibah KONI Kota Probolinggo Tahun 2022	DISPOPAR



NO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
		<p>Nasional (DBON) yang bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. meningkatkan budaya Olahraga di Masyarakat;2. meningkatkan kapasitas, sinergitas, dan produktivitas Olahraga Prestasi nasional; dan3. memajukan perekonomian nasional berbasis Olahraga <p>Sedangkan penyelenggaraan DBON, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Olahraga Rekreasi;2. Olahraga Pendidikan;3. Olahraga Prestasi; dan4. Industri Olahraga <p>Terkait dengan hal tersebut maka KONI Kota Probolinggo mengadakan kegiatan – kegiatan yang mendukung pelaksanaan DBON pada saat Peringatan HUT RI Ke 77 Tahun 2022 dan Peringatan Hari Jadi Kota Probolinggo Ke 663 Tahun 2022. Kegiatan – kegiatan dimaksud, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengibaran Kain Merah Putih Raksasa di GOR Mastrip oleh para atlet Panjat Tebing Kota Probolinggo.2. Kirab Panji Pemerintah Kota Probolinggo dengan rute Tambak Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Probolinggo ke Pantai Permata melalui tengah Kota Probolinggo yang melibatkan seluruh Pengkot Cabor Probolinggo dengan atraksi/penampilannya masing – masing.3. Atraksi/penampilan para atlet cabang olahraga di panggung Stadion Bayuangga.4. Pengibaran Bendera Merah Putih, Panji Pemerintah Kota Probolinggo dan Bendera KONI Kota Probolinggo di kedalaman Laut Gili Ketapang yang dilakukan oleh atlet selam Kota Probolinggo.		



NO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
22	Pada Tahun Anggaran 2022 terkait program peningkatan sektor kepariwisataan yang anggarannya cukup minim, maka DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar ditambah anggarannya, sehingga pada Tahun Anggaran selanjutnya merevitalisasi beberapa tempat wisata gunanya untuk menarik minat para wisatawan domestik termasuk mancanegara dan memperbanyak wisata-wisata buatan serta tempat rekreasi.	Menanggapi rekomendasi DPRD Kota Probolinggo Tahun 2022 terkait program peningkatan sektor kepariwisataan untuk merevitaliasi beberapa tempat wisata agar menarik minat para wisatawan domestik dan mancanegara serta memperbanyak wisata buatan, dapat kami sampaikan bahwa urusan kepariwisataan bukan hanya menjadi tupoksi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) saja tetapi merupakan kolaborasi semua stakeholder untuk mewujudkannya, karena berbicara tentang wisata juga terkait dengan jumlah wisatawan dan kualitas tempat wisata. Oleh sebab itu Dispopar juga melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Dinas PUPR Kota Probolinggo dalam hal pemenuhan infrastruktur dan sarana prasarana di destinasi pariwisata, pengembangan spot-spot daya tarik wisata melalui revitalisasi area publik sarana pendukung pariwisata yang hingga saat ini terus berproses penyelesaiannya untuk meningkatkan kualitas area publik sebagai penunjang pariwisata diantaranya revitalisasi alun-alun Kota Probolinggo dan area publik di sekitaran Bundaran Gladak Serang	Program peningkatan sektor kepariwisataan	DISPOPAR



3.4 PRESTASI YANG TELAH DIRAIH

Tabel 3. 42 PRESTASI YANG TELAH DIRAIH TAHUN 2023

NO	JENIS PRESTASI/PENGHARGAAN	TINGKAT PROVINSI/NASIONAL	PERANGKAT DAERAH
1	Penetapan Warisan Budaya Tak Benda "Kembang Lamaran" oleh Kemendikbud Ristek RI	Nasional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Penghargaan Sistem Informasi Ijazah Online (SIJOL) sebagai Top Inovasi Terpuji pada Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik dan Jatim Bureaucracy Fest 2023 serta Penganugerahan Penghargaan Top Inovasi Terpuji Inovasi Pelayanan Publik (KOVABLIK), Reformasi Birokrasi, SAKIP, Layak Berpredikat WBK dan Budaya Kerja Cettar Tahun 2023	Provinsi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Pemerintah Daerah dengan Pemanfaatan Rapor Pendidikan oleh Satuan Pendidikan PAUD Tertinggi	Provinsi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Pemerintah Daerah dengan Pemanfaatan Rapor Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Tertinggi	Provinsi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pemerintah Daerah dengan Adoption Rate dan Pemanfaatan PMM Tinggi	Provinsi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Pemerintah Daerah dengan Rasio Tinggi dalam Pembelanjaan melalui SIPLAH	Provinsi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Pemerintah Daerah dengan Pengguna ARKAS membuat Kertas Kerja Tinggi	Provinsi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Penerbit Aktif Kategori OPD Kab/Kota Tingkat Jawa Timur Tahun 2023 yang berhasil menerbitkan 86 karya literasi berupa buku yang Ber ISBN	Provinsi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Wilayah Bebas Korupsi (WBK) untuk Puskesmas Kanigaran	Nasional	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
10	Penghargaan Kota Sehat Swasti Sabha Padapa Tahun 2023	Nasional	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
11	Mitra Bhakti Husada Tahun 2023 untuk GP2SP Gerakan Perempuan Sehat Produktif PT Eratex Djaja	Nasional	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
12	Serifikat Kabupaten / Kota bebas Frambusia Tahun 2023	Nasional	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
13	Lomba Pelaksana Posyandu Bangga kencana Tingkat Propinsi Jatim Tahun 2023	Provinsi	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
14	Indonesia Award atas Kebijakan di Bidang Kesehatan	Nasional	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
15	Penghargaan Universal Health Coverage Kepada Pemerintah Daerah oleh Wakil Presiden RI	Nasional	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB



NO	JENIS PRESTASI/PENGHARGAAN	TINGKAT PROVINSI/NASIONAL	PERANGKAT DAERAH
16	10 besar Inovasi Daerah terbaik Kota Probolinggo dalam innovative government award (IGA) 2023	Tingkat Kota Probolinggo	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17	Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Madya tahun 2023 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tingkat Nasional	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18	Kota Layak Anak (KLA) kategori utama dari Kementerian PPPA	Tingkat Nasional	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19	Penghargaan Gubernur Jawa Timur Atas pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak	Tingkat Provinsi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
20	Kinerja pertumbuhan realisasi investasi terbaik ketiga di Jawa Timur	Propinsi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21	Award Peduli Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur kategori Bidang Distribusi Pangan Tahun 2023	Tingkat Provinsi Jawa Timur	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
22	Sekolah Terbaik ke 2 dalam Pelaksanaan Program GENIUS Tahun 2023	Tingkat Nasional	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
23	Forikan Award Untuk peran aktif dalam peringatan Hari Ikan Nasional ke-10 tahun 2023	Tingkat Provinsi Jawa Timur	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
24	Juara II Kota Dengan Kinerja Vaksinasi PMK Terbaik	Tingkat Provinsi Jawa Timur	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
25	ADIWIYATA PROVINSI a. SDN WONOASIH 2 b. SDN SUMBER TAMAN 1 c. SDN KADEMANGAN 1 d. SDN TRIWUNG LOR 3 e. SDN PAKISTAJI 1 f. SDN MAYANGAN 2 g. SDN TISNONEGARAN 3 h. SMPN 6 i. MI HIDAYATUL ULLA	Tingkat Provinsi Jawa Timur	Dinas Lingkungan Hidup
26	ADIWIYATA NASIONAL a. SDN KEDOPOK 2 b. SDN SUKABUMI 4 c. MI MUHAMMADIYAH 1 d. SD INTEGRAL HIDAYATULLAH e. SMPN 1	Tingkat Nasional (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)	Dinas Lingkungan Hidup
27	ADIWIYATA MANDIRI - SDN SUKOHARJO 1	Tingkat Nasional (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)	Dinas Lingkungan Hidup
28	KELURAHAN BERSERI KATEGORI MADYA a. Kelurahan Jati RW 2	Tingkat Provinsi Jawa Timur	Dinas Lingkungan Hidup



NO	JENIS PRESTASI/PENGHARGAAN	TINGKAT PROVINSI/NASIONAL	PERANGKAT DAERAH
	b. Kelurahan Jati RW 5 c. Kelurahan Jati RW 8		
29	PROKLIM a. Kelurahan Kedung Asem Rw 8 b. Kelurahan Kebonsari Kulon RW 17	Tingkat Nasional (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)	Dinas Lingkungan Hidup
30	SERTIFIKAT ADIPURA	Tingkat Nasional (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)	Dinas Lingkungan Hidup
31	NIRWASITA TANTRA a. Wali Kota Probolinggo sebagai Kepala Daerah kategori Kota Sedang Terbaik III dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan daerah tahun 2023 b. Terbaik III Kriteria Pemerintahan Daerah Kategori Kota Sedang c. DPRD Kota Probolinggo sebagai DPRD Kategori Kota Sedang Terbaik dalam pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Tahun 2022	Tingkat Nasional (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)	Dinas Lingkungan Hidup
32	Kota Terbaik Kedua dalam Pemanfaatan Mail Multi Domain 2023	Nasional	Dinas Komunikasi dan Informatika
33	Kota Terbaik Ketiga dalam Pemanfaatan PDN (Pusat Data Nasional) 2023	Nasional	Dinas Komunikasi dan Informatika
34	Penghargaan Indonesia Raya Award : Apreasiasi Daerah Peduli Keterbukaan Informasi Publik 2023	Nasional	Dinas Komunikasi dan Informatika
35	i-News Indonesia Award 2023, Kategori : Outstanding Awards for Integrated Initiative	Nasional	Dinas Komunikasi dan Informatika
36	Penghargaan Khusus dalam Jatim Bangkit Award	Provinsi	Dinas Komunikasi dan Informatika
37	Badan Publik Informatif Tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur	Provinsi	Dinas Komunikasi dan Informatika
38	REKOR MURI. Pelatihan pembuatan meja lipat rangka baja ringan secara hybrid kepada pelajar SMK sejumlah 1000 Siswa di Kota Probolinggo	Nasional	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Probolinggo
39	Penghargaan Tokoh Penggerak Koperasi Madya	Nasional	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Probolinggo
40	Penghargaan Pembina Koperasi Andalan Penghargaan Dari Dewan Koperasi Indonesia	Nasional	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Probolinggo
41	Penghargaan Dalam Rangka Harkopnas Di Tingkat Jawa Timur	Provinsi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Probolinggo
42	Penghargaan Satyalancana Wira Karya Penghargaan Dari Presiden RI Joko Widodo	Nasional	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Probolinggo
43	Penghargaan Pesantrenpreneur / Kopontren Berprestasi Juara III	Provinsi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



NO	JENIS PRESTASI/PENGHARGAAN	TINGKAT PROVINSI/NASIONAL	PERANGKAT DAERAH
			dan Perdagangan Kota Probolinggo
44	Rekor dunia muri sajian soto ayam koya terbanyak 8000 porsi	Nasional	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
45	Piagam Penghargaan Memenuhi Standarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak dengan kategori Madya Tahun 2023	Nasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
46	Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Skor 3,14 dan Status Kinerja " SEDANG " Berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2022	Nasional	Bagian Pemerintahan
47	Prestasi Pendukung gerakan zakat Indonesia dalam BAZNAS Award	Nasional	Bagian Kesra
	5 Besar Nilai ITKP tertinggi se Provinsi Jatim dengan predikat Baik	Provinsi	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
48	Peningkatan Kapabilitas APIP level 3	Nasional	Inspektorat
49	WTP TAHUN 2022	Nasional	BPPKAD Kota Probolinggo
50	INOVATIOAN GOVERNMENT AWARD (IGA- 2022)	Kota Probolinggo	BPPKAD Kota Probolinggo
51	TP2DD Award Terbaik Untuk Kegiatan Peningkatan Indeks Etpd Tertinggi Tahun 2022	Provinsi Jawa Timur	BPPKAD Kota Probolinggo
52	BKN Award Special Mention Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian	Nasional	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
53	BKN Award Kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT Pemerintah Kota Tipe Sedang	Nasional	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
54	Piala Capaian 6 Terbaik Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten/ Kota Tahun 2022	Propinsi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
55	Kelurahan Berseri Tingkat Madya pada Kelurahan Jati	Tingkat Provinsi	Kecamatan Mayangan
56	Juara 3 Kelurahan Berhasil	Tingkat Provinsi	Kecamatan Kanigaran-Kelurahan Kebonsari Kulon
56	Juara 3 Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK	Tingkat Provinsi	Kecamatan Kanigaran-Kelurahan Kebonsari Kulon
57	Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, Pemerintahan Daerah dan BUMN Tahun 2023 oleh Kemenpan RB	Tingkat Nasional	Kecamatan Kademangan
58	PKK Sehat Lestari	Tingkat Provinsi	Kecamatan Kademangan (Kelurahan Pilang)
59	Pelaksana Terbaik Posyandu-Bangga Kencana	Tingkat Provinsi	
60	Juara Legal Justice Award	Provinsi	Kecamatan Kedopok
61	Non Litigation Peacemaker	Provinsi	Kecamatan Kedopok
62	Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita	Provinsi	Kecamatan Kedopok
63	Inovasi Noasih Trans	Kota	Kecamatan Wonoasih
64	Anugerah Patriot Jawi Wetan 2023	Provinsi	Kelurahan Jrebeng Kidul



NO	JENIS PRESTASI/PENGHARGAAN	TINGKAT PROVINSI/NASIONAL	PERANGKAT DAERAH
65	Juara Harapan I Turnamen Sepak Bola U-45 Antar Kelurahan Walikota Cup 2023	Kota	Kelurahan Jrebeng Kidul
66	Sertifikat Nomor Pokok Perpustakaan 2023 Dari Perpus Nasional Untuk Perpus Kharisma Kelurahan Jrebeng Kidul	Nasional	Kelurahan Jrebeng Kidul
67	Program Kampung Iklim Kategori Utama	Nasional	Kel. Kedung Asem
68	Up2k Pkk Juara Iii	Kecamatan/Kota	Kelurahan Wonoasih
69	Turnamen Sepakbola U-45 Antar Kelurahan Walikota Cup 2023 Juara III	Kota	Kelurahan Wonoasih
70	UP2K PKK Juara II	Kecamatan/Kota	Kelurahan Sumber Taman
71	Perempuan Peduli Lingkungan	Kota	Kelurahan Sumber Taman
72	PT. Kutai Timber Indonesia Penerima Medali / Piagam Perak Partisipasi Kompetisi 5r/5s Antar Perusahaan Di Jawa Timur Kategori Produksi	Tingkat Provinsi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
73	PT. Kutai Timber Indonesia Penerima Medali / Piagam Perunggu Partisipasi Kompetisi 5r/5s Antar Perusahaan Di Jawa Timur Kategori Gudang	Tingkat Provinsi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
74	PT. Kutai Timber Indonesia Penerima Medali / Piagam Perunggu Partisipasi Kompetisi 5r/5s Antar Perusahaan Di Jawa Timur Kategori Bengkel	Tingkat Provinsi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja



BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Terkait Tugas Pembantuan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menyebutkan bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pemberian tugas pembantuan pada dasarnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum.

Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi pada Tahun 2023 meliputi 1 Program dengan 1 Kegiatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan 9 Kegiatan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Pagu anggaran Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 270.726.621,00 dengan realisasi sebesar Rp. 262.369.908,00 (96,91%). Sebagaimana Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah maka Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi juga dapat dilaksanakan dengan baik oleh PD Pelaksana.

Rincian Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut

Tabel 4. 1 Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

No	Instansi Pemberi Tugas	SKPD Pelaksana	Dasar Hukum	Program/Kegiatan/Subkeg dan Pelaksanaannya	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo	Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 440/811/102.1/2023 Tanggal 12 Januari 2023 Perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Babupaten/Kota pada APBD Provinsi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
				Peningkatan Upaya Promosi kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			



			Jawa Timur Tahun Anggaran 2023	Pendampingan Poskestren	35.383.621,00	30.140.000,00	85,18
				JUMLAH	35.383.621,00	30.140.000,00	85,18
2.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan Kota Probolinggo	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Dekonsentrasi Satuan Kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur,Tahun Anggaran 2023, Nomor : SP DIPA-125.01.3.690703/2023 (revisi ke 1) tanggal 13 Juli 2023	Pengawasan Keamanan Pangan Segar Kota Probolinggo	16.742.000,00	16.078.900,00	96,039
				Registrasi Keamanan Pangan Segar Kota Probolinggo	32.327.000,00	29.898.400,00	92,487
				Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Nasional dan Wilayah	7.974.000,00	7.973.500,00	99,994
				Koordinasi, Sosialisasi, BIMTEK, MONEV dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	5.015.000,00	4.995.000,00	99,601
				Data dan Informasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	9.580.000,00	9.580.000,00	100,000
				Fasilitasi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan / FSVA	23.500.000,00	23.500.000,00	100,000
				Pendampingan Gerakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi / GENIUS	87.600.000,00	87.599.992,00	100,000
				Penguatan Cadangan Pangan Nasional	4.480.000,00	4.480.000,00	100,000
				Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Kota Probolinggo	48.125.000,00	48.124.116,00	99,998
				JUMLAH	235.343.000,00	232.229.908,00	98,68
TOTAL					270.726.621,00	262.369.908,00	96,91



BAB V

PENUTUP

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Probolinggo Akhir Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Probolinggo Akhir Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu satu tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo sebagaimana diamanatkan undang-undang.

LKPJ ini disusun dengan lebih memfokuskan pada pelaksanaan berbagai urusan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan melalui program dan kegiatan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berbagai hasil dan permasalahan selama tahun 2023 yang telah dituangkan dalam LKPJ Walikota Probolinggo Akhir Tahun Anggaran 2023 diharapkan menjadi bahan masukan untuk mengarahkan perbaikan-perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut patut disyukuri, mengingat capaian kinerja tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang telah dijelaskan dalam LKPJ ini sesungguhnya merupakan kinerja bersama antara Pemerintah Kota Probolinggo, DPRD dan masyarakat berlandaskan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Hal tersebut dilakukan demi mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan pencapaian pembangunan yang telah disampaikan sebelumnya bahwa masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat berperan sebagai bahan refleksi dan evaluasi terhadap tingkat capaian kinerja tahun berikutnya.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini disampaikan. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya kepada kita dalam melanjutkan karya pengabdian membangun kota Probolinggo yang sudah baik ini menjadi lebih baik lagi.

Probolinggo, Februari 2024
Pj. WALIKOTA PROBOLINGGO

Dr. NURKHOLIS, S.Sos.,M.Si, CIPA, CIHCM



**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2024**